

Rangkuman Eksekutif Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2006

Daftar Isi

Tentang Pengawasan Ranjau Darat	1
Temuan Utama	3
Pendahuluan	7
Pelarangan Ranjau Anti Personil	9
Sosialisasi	9
Peretemuan Keenam Negara-Negara	12
Pelaksanaan dan Jeda antar bagian	13
Program Kerja	
Konvensi mengenai Senjata Konvensional	13
Penggunaan Ranjau Anti Personil	14
Pembuatan Ranjau Anti Personil	16
Perdagangan Global Ranjau Anti Personil	18
Penimbunan dan Penghancuran Ranjau Anti Personil	19
Ranjau yang Disimpan untuk Penelitian dan Pelatihan (Pasal 3)	21
Pelaporan mengenai Transparansi (Pasal 7)	22
Penanganan Pelaksanaan Nasional (Pasal 9)	23
Masalah Khusus yang Menjadi Perhatian	23
Tindakan Penanganan Ranjau	29
Pencapaian Utama dalam Program Tindakan Penanganan Ranjau	29
Tantangan Utama terhadap Program Tindakan Penanganan Ranjau	32
Menanggapi Kebutuhan Masyarakat secara Efektif	32
Memenuhi Persyaratan Pasal 5	34
Kepemilikan Nasional dan Pengelolaan yang Baik	37
Pendidikan Bahaya Ranjau	40
Program MRE	40
Pelaku Utama	41
Kelompok Beresiko Langsung	42
MRE di daerah konflik	42
Integrasi MRE dengan Tindakan Penanganan Ranjau lainnya	42
Kegiatan	
MRE Berbasis Masyarakat	43
Evaluasi dan Pembelajaran	43
Korban Ranjau Darat dan Bantuan bagi Korban yang Selamat	45
Korban baru di tahun 2005-2006	45
Kapasitas dan Tantangan dalam Mengumpulkan Data	48
Memenuhi Kebutuhan Korban yang Selamat	49
Kapasitas dan Tantangan dalam Memberikan Bantuan Bagi Korban dan Pakta	51
Pelarangan Ranjau	
Pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi untuk Kelangsungan Program	52
Kemajuan Bantuan Bagi Korban yang Selamat	55
Kebijakan Bagi Korban yang Menjadi Cacat dan Pelaksanaannya	58
Perkembangan Internasional Lainnya	59
Pendanaan Tindakan Penanganan Ranjau	61
Kontribusi Penyumbang di tahun 2005	61
Pendanaan, Kerjasama dan Pakta Pelarangan Ranjau	63
Kebijakan Pendanaan dari Sumbangan dan Pakta Pelarangan Ranjau	63
Sumber Pendanaan	64
Penyumbang Tindakan Penanganan Ranjau	64

Keadaan dan Bantuan Bagi Korban	72
Penerima Utama Tindakan Penanganan Ranjau	75
Status Konvensi	79
Perkembangan Utama	81
Negara yang Terlibat	81
Penanda tangan	89
Yang tidak memberi tanda tangan	89
Lain-lain	92
Konvensi mengenai Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan	94
Pemindahan Ranjau Anti Personil dan Penghancurannya	
Catatan	103

Konvensi tahun 1997 mengenai Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Pemindahan Ranjau Anti Personil dan Penghancurannya

States Parties: ratified or acceded as of 1 July 2006.

Signatories: signed but not yet ratified.

The Americas

Antigua & Barbuda	Argentina
Bahamas	Barbados
Belize	Bolivia
Brazil	Canada
Chile	Colombia
Costa Rica	Dominica
Dominican Rep.	Ecuador
El Salvador	Grenada
Guatemala	Guyana
Haiti	Honduras
Jamaica	Mexico
Nicaragua	Panama
Paraguay	Peru
St. Kitts & Nevis	St. Vincent and the Grenadines
Saint Lucia	Trinidad & Tobago
Suriname	Venezuela
Uruguay	United States
Cuba	

Europe, the Caucasus & Central Asia

Albania	Andorra	Austria
Belarus	Belgium	Bosnia&Herzegovina
Bulgaria	Croatia	Cyprus
Czech Republic	Denmark	Estonia
France	Germany	Greece
Holy See	Hungary	Iceland
Ireland	Italy	Latvia
Liechtenstein	Lithuania	Luxembourg
Macedonia, FYR	Malta	Moldova
Monaco	Netherlands	Norway
Portugal	Romania	San Marino
Serbia & Montenegro	Slovakia	Slovenia
Spain	Sweden	Switzerland
Tajikistan	Turkey	Turkmenistan
Ukraine	United Kingdom	Poland
Armenia	Azerbaijan	Finland
Georgia	Kazakhstan	Kyrgyzstan
Russia	Uzbekistan	

Middle East & North Africa

Algeria	Jordan	Qatar
Tunisia	Yemen	
		Lebanon
Libya	Morocco	Oman
Saudi Arabia	Syria	United Arab Emirates

Sub-Saharan Africa

Angola	Benin	Botswana
Burkina Faso	Burundi	Cameroon
Cape Verde		Chad
Côte d'Ivoire	Djibouti	Equatorial Guinea
	Ethiopia	Gabon
Gambia	Ghana	Guinea
Guinea-Bissau	Kenya	Lesotho
	Madagascar	Malawi
Mali	Mauritania	Mauritius
Mozambique	Namibia	Niger
	Rwanda	São Tomé & Príncipe
Senegal	Seychelles	Sierra Leone
South Africa	Sudan	Swaziland
Tanzania	Togo	Uganda
Zambia	Zimbabwe	

East & South Asia & the Pacific

	Australia
Bangladesh	
Brunei	Cambodia
Cook Islands	
Japan	Kiribati
Malaysia	Maldives
Nauru	New Zealand
Niue	Papua New Guinea
Philippines	Samoa
	Thailand
Timor-Leste	Vanuatu
Indonesia	Marshall Islands
Burma/Myanmar	
	Laos
Micronesia	Mongolia
Nepal	Pakistan
	Singapore
Sri Lanka	Tonga
Tuvalu	Vietnam

Tentang Pengawasan Ranjau Darat

Ini merupakan laporan Pengawasan Ranjau Darat kedelapan, produk tahunan dari suatu inisiatif yang belum pernah terjadi oleh Kampanye Internasional untuk Pelarangan Ranjau Darat (*ICBL/International Campaign to Ban Landmines*) untuk mengawasi dan melaporkan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap Perjanjian Pelarangan Ranjau tahun 1997, dan secara lebih umum, untuk menilai respon masyarakat internasional terhadap krisis kemanusiaan yang ditimbulkan ranjau darat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lembaga swadaya masyarakat telah berkumpul bersama dengan cara yang terkoordinasi, sistematis, dan terpelihara untuk mengawasi hukum kemanusiaan dan cara yang terpelihara dalam mengawasi hukum kemanusiaan atau perjanjian perlucutan senjata, dan untuk secara teratur mendokumentasikan perkembangan dan permasalahan, yang karenanya berhasil mempraktekkan konsep verifikasi berbasis-masyarakat sipil.

Tujuh laporan tahunan sebelumnya telah diluncurkan sejak tahun 1999, masing-masing diberikan pada rapat-rapat tahunan dari Para Pihak Negara untuk Perjanjian Pelarangan Ranjau: pada bulan Mei 1999 di Maputo, Mozambik; pada bulan September 2001 di Managua, Nikaragua; pada bulan September 2002 di Geneva; pada bulan September 2003 di Bangkok, Thailand; pada bulan November-Desember 2004 di Konferensi Tinjauan Pertama di Nairobi, Kenya; dan pada bulan November-Desember 2005 di Zagreb, Kroasia.

Sistem Pengawasan Ranjau Darat menggambarkan suatu kerangka kerja pelaporan global dan laporan tahunan. Sebuah jaringan kerja dari 71 periset Pengawasan Ranjau Darat dari 62 negara mengumpulkan informasi untuk mempersiapkan laporan ini. Para periset berasal dari koalisi kampanye ICBL dan dari unsur-unsur masyarakat sipil lain, termasuk para Jurnalis, akademis, dan lembaga-lembaga riset.

Pengawasan Ranjau Darat bukan merupakan sistem verifikasi teknis atau rejim inspeksi formal. Pengawasan ini merupakan suatu usaha masyarakat sipil untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap kewajiban yang mereka telah ambil dalam hal

ranjau anti-personil. Hal ini dilakukan melalui pengumpulan, analisa, dan distribusi yang luas untuk informasi yang tersedia secara umum. Walaupun dalam sejumlah kasus memang diikuti misi penyelidikan, Pengawasan Ranjau Darat tidak dirancang untuk mengirim para periset ke daerah berbahaya dan tidak memasukkan pelaporan zona-perang yang panas.

Pengawasan Ranjau Darat dirancang untuk melengkapi pelaporan transparansi Para Pihak Negara yang dibutuhkan di bawah Pasal 7 Perjanjian Pelarangan Ranjau. Pelaporan ini mencerminkan pandangan bersama bahwa transparansi, kepercayaan, dan kerjasama merupakan unsur-unsur penting untuk penghapusan yang berhasil terhadap ranjau anti-personil. Pengawasan Ranjau Darat juga ditetapkan dalam pengenalan kebutuhan akan pelaporan dan evaluasi yang bebas.

Pengawasan Ranjau Darat dan laporan tahunannya bertujuan untuk mempromosikan dan mengajukan pembahasan tentang permasalahan yang berhubungan dengan ranjau, dan mengusahakan klarifikasi, agar dapat membantu mencapai tujuan dunia bebas-ranjau. Pengawasan Ranjau Darat bekerja dengan maksud baik untuk memberikan informasi yang sebenarnya tentang permasalahan yang diawasi, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

Landmine Monitor Report 2006/Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2006 memuat informasi tentang 126 negara dan area dalam hal kebijakan, penggunaan, produksi, pengiriman, penumpukan, pendanaan pekerjaan ranjau, pembebasan ranjau, penerangan resiko ranjau, kecelakaan ranjau darat, dan bantuan orang yang bertahan hidup dari pelarangan ranjau darat. *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2006* berfokus pada negara-negara yang terkena-dampak-ranjau, Para Pihak Negara dengan kewajiban pelaksanaan perjanjian utama yang menonjol, dan Para Bukan Pihak Negara. Informasi tentang negara-negara donor pekerjaan ranjau termasuk pada tinjauan pendanaan.

Seperti halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, Pengawasan Ranjau Darat mengakui bahwa laporan ambisius ini memiliki kekurangan. Pengawasan Ranjau Darat merupakan sebuah sistem yang terus dimutakhirkan, diperbaiki, dan ditingkatkan. Komentar, klarifikasi, dan koreksi dari pemerintah-pemerintah dan pihak-pihak lain diusahakan, dalam semangat

dialog dan dalam pencarian bersama untuk informasi yang akurat dan handal tentang subjek yang sulit.

Proses Pengawasan Ranjau Darat 2006

Pada bulan Juni 1998, ICBL secara formal sepakat untuk membentuk Pengawasan Ranjau Darat sebagai inisiatif ICBL. Empat anggota Dewan Editorial mengkoordinasi sistem Pengawasan Ranjau Darat: *Mines Action Canada*/Pekerjaan ranjau Kanada, *Handicap International*/Orang Cacat Internasional, *Human Rights Watch*/Pemerhati Hak Azasi Manusia, dan *Norwegian People's Aid*/Bantuan Rakyat Norwegia. *Mines Action Canada* bekerja sebagai perwakilan utama. Dewan Editorial mengambil keseluruhan tanggungjawab, dan pembuatan-keputusan untuk sistem Pengawasan Ranjau Darat.

Pemberian riset ini untuk *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2006* diberi penghargaan pada bulan Desember 2005, setelah rapat Dewan Editorial di Zagreb, Kroasia dari tanggal 3-4 Desember 2005. Para Koordinator Riset Tema bertemu di Ottawa, Kanada dari tanggal 9-10 Februari 2006 untuk bertukar informasi, menilai riset dan pengumpulan data apa saja yang sudah terjadi, mengidentifikasi kekurangan, dan memastikan metode riset bersama, dan melaporkan mekanisme untuk Pengawasan Ranjau Darat. Pada bulan Maret dan April 2006, laporan riset naskah diserahkan kepada Para Koordinator Riset Tema untuk mendapatkan tinjauan dan komentar.

Dari tanggal 2-4 April 2006 di Phnom Penh, Kamboja, lebih dari enam puluh periset dan Koordinator Riset Tema bertemu untuk Rapat Riset Global Pengawasan Ranjau Darat 2006 untuk membahas penemuan-penemuan riset, melanjutkan pembangunan kapasitas dalam riset dan pembelaan pelanggaran ranjau, dan berpartisipasi dalam kunjungan pengungkapan untuk proyek-proyek lapangan pekerjaan ranjau. Rapat ini merupakan bagian yang satu dengan proses Pengawasan Ranjau Darat dan memberikan peluang tatap muka satu-satunya bagi para periset untuk membahas penemuan-penemuan riset mereka dengan Para Koordinator Riset Tema.

Pada bulan Mei 2006, Para Koordinator Riset Tema dan sekelompok kecil para periset berpartisipasi dalam rapat-rapat Komite Kedudukan antar sesi di Geneva, Swiss, untuk

melakukan wawancara dan membahas laporan-laporan terakhir dan penemuan-penemuan utama. Dari bulan April sampai Juli, team Pengawasan Ranjau Darat dari Para Koordinator Riset Tema menjelaskan sumber-sumber dan mengedit laporan-laporan negara, dengan sebuah team di *Mines Action Canada* yang mengambil tanggungjawab untuk pemeriksaan-fakta akhir, pengeditan, dan pembentukan seluruh laporan. Laporan ini dicetak selama bulan Agustus dan dipresentasikan dalam rapat Ketujuh Para Pihak Negara untuk Perjanjian Pelarangan Ranjau tahun 1997 di Geneva, Swiss dari tanggal 18 sampai 22 September 2006.

Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2006 tersedia online di www.icbl.org/lm.

Terakhir, tapi bukan yang terkecil, kami memperluas rasa terima kasih kami kepada para donor dan pendukung Pengawasan Ranjau Darat. Para kontributor Pengawasan Ranjau Darat tidak mungkin bertanggungjawab, dan tidak harus menyetujui bahan yang termuat dalam laporan ini. Para kontributor ini hanya mungkin melaksanakan pekerjaan ini dengan bantuan hibah dari:

- Pemerintah Australia
- Pemerintah Austria
- Pemerintah Belgia
- Pemerintah Kanada
- Pemerintah Cyprus
- Pemerintah Denmark
- Pemerintah Perancis
- Pemerintah Jerman
- Pemerintah Irlandia
- Pemerintah Belanda
- Pemerintah Selandia Baru
- Pemerintah Norwegia
- Pemerintah Swedia

- Pemerintah Swiss
- Pemerintah Kerajaan Inggris
- Komisi Eropa
- Program Pembangunan PBB
- UNICEF

Kami juga berterimakasih kepada para donor yang telah memberikan kontribusi kepada setiap anggota dari Dewan Editorial Pengawasan Ranjau Darat dan organisasi-organisasi yang berpartisipasi lainnya.

Penemuan-penemuan Utama

Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2006 mengungkapkan bahwa Perjanjian Pelarangan Ranjau dan gerakan pelarangan ranjau terus memberikan perkembangan yang baik ke arah penghapusan ranjau darat anti-personil dan menyelamatkan kehidupan dan anggota tubuh di setiap daerah di dunia. Akan tetapi, tantangan-tantangan yang signifikan tetap ada.

Edisi Pengawasan Ranjau Darat ini melaporkan secara rinci tentang perkembangan dan tantangan yang ada di lebih dari 120 negara, termasuk negara-negara yang terkena-dampak-ranjau dan negara-negara dengan tumpukan besar ranjau anti-personil, dan minoritas negara yang berkurang jumlahnya yang belum bergabung dengan Perjanjian Pelarangan Ranjau. *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2006* memberikan pemutakhiran tahunan untuk *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005*.

Periode pelaporan untuk *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2006* adalah bulan Mei 2005 sampai Mei 2006. Para editor di mana mungkin telah menambahkan informasi penting yang muncul kemudian. Statistik untuk pekerjaan ranjau dan kecelakaan ranjau darat biasanya diberikan untuk tahun kalender 2005, dengan perbandingan dengan tahun 2004.

□ Peningkatan penolakan internasional terhadap ranjau anti-personil

Pada tanggal 1 Juli 2006, 151 negara menjadi Para Pihak Negara untuk Perjanjian Pelarangan Ranjau, dan tiga negara lain telah menandatangani tapi belum mensyahkannya, yang membentuk lebih dari tiga pertiga bangsa-bangsa di dunia.

Empat negara penandatangan mensyahkan perjanjian ini sejak publikasi *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005*: Ukraine, Haiti, the Cooks Islands, dan Brunei. Ukraine memiliki 6.7 juta ranjau anti-personil, tumpukan terbesar keempat di dunia. Beberapa negara menunjukkan mereka setuju dalam waktu dekat ini, termasuk Indonesia, Kuwait, Palau, dan Polandia. Banyak negara yang bukan merupakan pihak mengambil langkah yang konsisten dengan perjanjian ini.

□ **Peningkatan dukungan untuk tujuan penghapusan ranjau anti-personil**

Keputusan Majelis Umum PBB 60/80, yang menyerukan penguniversalan Perjanjian Pelarangan Ranjau, diambil pada tanggal 8 Desember 2005, di mana 158 menyetujui, tidak ada yang menentang, dan 17 tidak memberikan suara; ini merupakan jumlah suara terbesar yang membela keputusan tahunan ini dan angka terendah yang tidak memberikan suara sejak tahun 1997 ketika untuk pertama kalinya keputusan ini diberikan. Dua puluh empat negara yang bukan merupakan pihak terhadap perjanjian ini memberikan suara pembelaan, termasuk Azerbaijan dan Cina untuk pertama kalinya.

□ **Kelompok Bersenjata Bukan-Negara yang berkomitmen untuk pelarangan ranjau anti-personil**

Front Polisario di Sahara Bagian Barat menandatangani Perjanjian Komitmen Seruan Geneva yang menari ranjau anti-personil pada bulan November 2005 dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) menandatangani pada bulan Juli 2006.

□ **Tantangan penguniversalan**

Tidak ada dari 40 negara bukan-penandatangan Perjanjian Pelarangan Ranjau sepakat tahun lalu. Sejumlah pengumpul, produsen, dan pengguna utama tetap berada di luar perjanjian ini, termasuk Burma, Cina, India, Pakistan, Rusia, dan Amerika Serikat. Sejumlah negara yang dilaporkan memberikan perkembangan terhadap perjanjian ini dalam *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005* yang tidak melaporkan perkembangan lebih lanjut, seperti Bahrain, Oman, Kyrgyzstan, Libia, dan Persatuan Emirate Arab.

□ **Tidak ada penggunaan ranjau anti-personil oleh Para Pihak Negara atau para penandatangan**

Tidak ada bukti – atau bahkan tuduhan serius – penggunaan ranjau anti-personil oleh Para Pihak Negara atau para penandatangan Perjanjian Pelarangan Ranjau. Hal ini bisa dicatat karena banyak merupakan para penggunanya akhir-akhir ini sebelum menjadi Para Pihak Negara atau para penandatangan.

□ **Tiga pemerintah yang menggunakan ranjau anti-personil**

Dalam periode pelaporan ini, sedikitnya tiga pemerintah terus menggunakan ranjau anti-personil – Myanmar (Burma), Nepal dan Rusia – dengan penggunaan yang luas di Myanmar. Akan tetapi, pada bulan Mei 2006, pemerintah Nepal dan para pemberontak Mao sepakat untuk gencatan senjata dan Aturan Perilaku yang termasuk tanpa penggunaan ranjau darat. Tiga pemerintah ini dan Georgia diidentifikasi sebagai para pengguna dalam *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005* dan laporan-laporan sebelumnya, yang menetapkan diri mereka sendiri sebagai terus menjadi para negara-pengguna ranjau anti-personil.

□ **Kelompok Bersenjata Bukan Negara yang menggunakan ranjau anti-personil**

Kelompok bersenjata bukan negara menggunakan ranjau anti-personil di lebih banyak negara daripada angkatan-angkatan pemerintah, tapi NSAG (*Non-State Armed Groups*/Kelompok Bersenjata Bukan-Negara) juga menurun. Dalam periode pelaporan ini, NSAGs menggunakan ranjau anti-personil atau alat bahan peledak yang ditingkatkan seperti-ranjau sedikitnya di 10 negara, termasuk di tiga Para Pihak Negara (Burundi, Kolombia, dan Guinea-Bissau) dan di tujuh Para Bukan Pihak Negara (Burma, India, Irak, Nepal, Pakistan, Rusia/Chechnya, dan Somalia). *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005* mengutip penggunaan NSAG untuk ranjau anti-personil sedikitnya di 13 negara. Guinea-Bissau, di mana para pemberontak Senegal menggunakan ranjau terhadap Angkatan Bersenjata Guinea-Bissau, ditambahkan dalam daftar, sementara Georgia, Filipina, Turki, dan Uganda dihilangkan tahun ini.

□ **Produksi ranjau anti-personil oleh 13 negara**

Pengawasan Ranjau Darat mengidentifikasi 13 negara sebagai para produsen ranjau anti-personil, sama dengan tahun lalu: Burma, Cina, Cuba, India, Iran, Korea Utara, Korea Selatan, Nepal, Pakistan, Rusia, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam. Beberapa dari negara-negara ini tidak secara aktif memproduksi, tapi berhak untuk melakukannya. Amerika Serikat, yang tidak memproduksi sejak tahun 1997, telah mengembangkan sistem-sistem ranjau darat baru yang mungkin tidak sesuai dengan Perjanjian Pelarangan Ranjau. Para pejabat Vietnam mengatakan kepada seorang delegasi Kanada pada bulan November 2005 bahwa Vietnam tidak lagi memproduksi ranjau anti-personil, sebuah laporan Pengawasan Ranjau Darat yang berusaha pastikan dan jelaskan. Sedikitnya 38 negara telah menghentikan produksi ranjau anti-personil, termasuk lima negara bukan pihak Perjanjian Pelarangan Ranjau.

□ **Pelarangan global *de facto/dalam kenyataan untuk perdagangan ranjau anti-personil***

Selama dekade terakhir, perdagangan global untuk ranjau anti-personil semata-mata telah terdiri dari tingkat besaran yang rendah untuk pengiriman terlarang dan tidak diakui. Dalam periode pelaporan ini, hanya ada sejumlah kecil laporan perdagangan seperti itu untuk ranjau anti-personil.

□ **Tuduhan panel PBB untuk pengiriman ranjau anti-personil**

Panel PBB mengungkapkan tuduhan yang paling serius dan pasti tentang pengiriman ranjau anti-personil oleh Pihak Negara Perjanjian Pelarangan Ranjau. Pada bulan Mei 2006, sebuah kelompok pengawasan embargo bersenjata PBB melaporkan bahwa pemerintah Eritrea telah mengirimkan 1.000 ranjau anti-personil kepada kaum fundamentalist militant di Somalia pada bulan Maret 2006. Eritrea menyangkal klaim itu sebagai “tanpa dasar dan tanpa penemuan” dan memberi label kepada laporan itu sebagai “keterlaluhan dan patut disesalkan.”

□ **Jutaan ranjau anti-personil yang dikumpulkan dihancurkan**

Dalam periode pelaporan ini, empat Pihak Negara menyelesaikan penghancuran tumpukan mereka: Guinea-Bissau, Nigeria, Algeria, dan Republik Democratic Kongo.

Tujuh puluh empat Pihak Negara telah menyelesaikan penghancuran itu, dan 64 lainnya tidak pernah memiliki ranjau, yang membuat 13 Pihak Negara dengan kumpulan yang harus dihancurkan. Sekitar 700.000 ranjau anti-personil yang terkumpul dihancurkan oleh Pihak Negara sejak laporan Pengawasan Ranjau Darat terakhir. Para Pihak Negara secara bersama telah menghancurkan lebih dari 39.5 juta ranjau anti-personil.

□ **Jutaan ranjau yang dikumpulkan oleh Para Bukan Pihak Negara**

Pengawasan Ranjau Darat memperkirakan bahwa Para Bukan Pihak Negara mengumpulkan lebih dari 160 juta ranjau anti-personil, di mana mayoritas besarnya dimiliki hanya oleh lima negara: Cina (diperkirakan 110 juta), Rusia (26.5 juta), AS (10.4 juta), Pakistan (diperkirakan 6 juta) dan India (diperkirakan 4.5 juta). Korea Selatan untuk pertama kalinya melaporkan total kumpulan (407.800); para pejabat yang sebelumnya menunjukkan sekumpulan sekitar dua juta ranjau anti-personil. Penandatanganan Polandia memiliki hampir satu juta ranjau anti-personil.

□ **Terlalu banyak ranjau yang diterima untuk pelatihan, terlalu sedikit untuk dijelaskan mengapa demikian**

Lebih dari 227.000 ranjau anti-personil diterima oleh 69 Pihak Negara yang berada di bawah pengecualian yang diberikan oleh Pasal 3 perjanjian ini. Lima Pihak Negara terhitung untuk hampir sepertiga dari semua ranjau yang diterima: Brazil, Turki, Algeria, Bangladesh, dan Swedia. Terlalu sedikit Pihak Negara telah melaporkan secara rinci tentang mengapa mereka menampung semua ranjau ini, dan dalam banyak kasus sama sekali tidak terlihat semua ranjau ini digunakan. Hanya 11 Pihak Negara menggunakan format baru dalam melaporkan tujuan-tujuan yang dimaksudkan dan penggunaan sebenarnya dari semua ranjau yang diterima yang disepakati pada Rapat Keenam Pihak Negara pada bulan Desember 2005.

□ **Penurunan jumlah ranjau yang diterima untuk pelatihan dan pengembangan**

Jumlah ranjau yang diterima menurun sekitar 21.000 dalam periode pelaporan ini. Tambahan lima negara memilih untuk tidak menerima ranjau apapun dan/atau

menghancurkan stok yang diterima yang masih ada: DR Kongo, Eritrea, Hongaria, Republik Makedonia Yang Sebelumnya Yugoslavia, dan Moldova. Sedikitnya 71 Pihak Negara telah memilih untuk tidak menerima ranjau anti-personil apapun.

□ **Tingkat pelaporan transparansi pertama yang terus besar**

Kepatuhan Para Pihak Negara terhadap persyaratan perjanjian ini untuk menyerahkan laporan transparansi pertama mereka tetap ajeg sebesar 96 persen pada tahun 2005, di mana Kamerun dan Latvia memberikan laporan mereka.

□ **Pelaporan transparansi terakhir**

Pada tanggal 1 Juli 2006, enam Pihak Negara belum menyerahkan laporan Pasal 7 pertama yang lewat jatuh temponya: Equatorial Guinea, Cape Verde, Gambia, Sao Tome e Principe, Guyana dan Ethiopia. Untuk tahun kedua secara berturut-turut, ada penurunan pada kepatuhan terhadap persyaratan dalam menyerahkan laporan Pasal 7 pemutakhiran tahunan. Pada tanggal 1 Juli 2006, 90 negara telah menyerahkan laporan yang dimutakhirkan yang jatuh tempo pada tanggal 30 April 2006, atau 62 persen.

□ **Semakin banyak Pihak Negara membuat pandangan mereka diketahui tentang permasalahan utama dari penerjemahan dan pelaksanaan perjanjian**

Albania, Chad, Cyprus, Estonia, FYR Makedonia, Moldova, Slovenia, dan Yemen memberikan pengertian nasional mereka tentang pelarangan Pasal 3 dalam membantu tindakan yang dilarang, khususnya dalam hal operasi militer gabungan dengan Para Bukan Pihak Negara; semua ini berada dalam perjanjian dasar dengan pandangan dari ICBL, Albania, Kroasia, Jerman, Estonia, Guatemala, Kenya, FYR Makedonia, Moldova, Slovenia, dan Yemen menyatakan pandangan itu, yang dimiliki bersama dengan ICBL, bahwa suatu ranjau (bahkan walaupun diberi label sebagai ranjau anti-kendaraan) yang bisa terpicu oleh perbuatan tidak disengaja dari seseorang dilarang, dan/atau menyatakan pandangan, yang juga dimiliki bersama dengan ICBL, bahwa suatu ranjau dengan kabel senggol, kabel putus, atau batang pengungkit dilarang.

□ **Penurunan jumlah negara yang terkena-dampak-ranjau**

Riset Pengawasan Ranjau Darat mengidentifikasi sedikitnya 78 bangsa sebagai terkena dampak ranjau sampai tingkat tertentu oleh ranjau darat pada pertengahan tahun 2006, di mana 51 bangsa merupakan pihak terhadap Perjanjian Pelarangan Ranjau, juga delapan area yang secara internasional tidak diakui sebagai negara-negara merdeka atau di mana wilayah hukumnya sedang diperjuangkan. Dua Pihak Negara terhadap Perjanjian Pelarangan Ranjau – Guatemala dan Suriname – melaporkan penyelesaian pembebasan dari semua area dengan ranjau pada tahun 2005.

□ **Peningkatan produktivitas penghapusan ranjau**

Pada tahun 2005, total lebih dari 740 kilometer kuadrat dihilangkan ranjaunya, yang merupakan produktivitas tahunan terbesar sejak penghapusan ranjau modern dimulai pada akhir tahun 1980an. Tiga program pekerjaan ranjau utama saja – di Bosnia dan Herzegovina, Kamboja, dan Yemen – menurunkan batasan dugaan kontaminasi oleh hampir 340 kilometer kuadrat. Lebih dari 470.000 ranjau darat – mayoritas besarnya (450.000) merupakan ranjau anti-personil – dan lebih dari 3.75 juta alat bahan peledak dihancurkan.

□ **Terlalu banyak Pihak Negara tidak sedang memenuhi batas waktu Pasal 5 dalam menyelesaikan pembebasan ranjau**

Terlalu banyak Pihak Negara tampaknya tidak sedang memenuhi batas waktu Pasal 5 mereka, sedikitnya termasuk 13 dari 29 Pihak Negara dengan batas waktu 2009 atau 2010 – Bosnia dan Herzegovina, Kamboja, Chad, Kroasia, Denmark, Mozambik, Nigeria, Senegal, Tajikistan, Thailand, Kerajaan Inggris (Falklands), Yemen, dan Zimbabwe.

□ **Penerangan resiko ranjau yang diperluas**

Program-program penerangan resiko ranjau yang diperluas di banyak negara dengan proyek-proyek dan aktivitas-aktivitas baru di 28 negara, merupakan suatu perkembangan yang bisa dicatat dari tahun 2004 (15 negara). Untuk pertama kalinya, aktivitas-aktivitas MRE dicatat di Cina. Jumlah relawan komunitas ini dan dari LSM-

LSM nasional yang melaksanakan MRE berbasis-komunitas meningkat. Pengawasan Ranjau Darat mencatat MRE di 60 negara dan delapan area pada tahun 2005-2006; 39 dari semua negara ini merupakan Para Pihak Negara, dan 21 merupakan Para Bukan Pihak Negara.

□ **Peningkatan kecelakaan pada tahun 2005-2006**

Kecelakaan yang dilaporkan meningkat menjadi 7.328 pada tahun 2005 – 11 persen lebih banyak daripada tahun 2004. Pada tahun 2005-2006, ada kecelakaan-kecelakaan baru dari ranjau darat dan sisa bahan peledak dari perang yang dilaporkan di 58 negara (sama dengan tahun lalu) dan tujuh area (kurang satu). (Akan tetapi, Pengawas Ranjau Darat terus memperkirakan ada 15.000-20.000 kecelakaan baru setiap tahun – *lihat di bawah ini*). Pada tahun 2005, semua kecelakaan ini dilaporkan di tujuh negara yang tidak melaporkan kecelakaan pada tahun 2004: Chile, Honduras, Kenya, Moldova, Maroko, Namibia, dan Peru. Pada tahun 2005-2006, konflik yang mengeras mengakibatkan lebih banyak orang sipil dan militer (nasional dan luar negeri) kecelakaan ranjau dan ERW di beberapa negara termasuk: Chad, Kolombia, Pakistan, Burma/Myanmar, dan Sri Lanka.

□ **Kecelakaan ERW di lebih banyak negara**

Pengawas Ranjau Darat telah mengidentifikasi 16 negara lain (sampai 12) dan satu area (tidak ada pada tahun 2004) dengan kecelakaan ranjau darat baru pada tahun 2005-2006 tapi dengan kecelakaan yang ditimbulkan secara eksklusif oleh sisa bahan peledak perang: Bangladesh, Belarus, Bolivia, Cote d'Ivoire, Guatemala, Hongaria, Kyrgyzstan, Latvia, Liberia, Makedonia, Mongolia, Polandia, Republik Kongo, Tunisia, Ukraine, dan Zambia, juga Kosovo. Di 11 negara dari semua negara ini Pengawas Ranjau Darat tidak mencatat kecelakaan ERW pada tahun 2004.

□ **Peningkatan jumlah orang selamat dari ranjau dan para korban ranjau**

Perkembangan dalam kumpulan data menunjukkan bahwa ada sekitar 350.000 sampai 400.000 orang yang selamat dari ranjau di dunia hari ini; mungkin ada sebanyak 500.000. Di mana hanya 10 dari 58 negara dan tujuh area yang

mendapatkan kecelakaan pada tahun 2005-2006 mampu memberikan data setahun penuh secara lengkap, dan dengan pelaporan yang kurang signifikan, Pengawas Ranjau Darat terus memperkirakan ada antara 15.000 dan 20.000 ranjau darat baru/kecelakaan ERW setiap tahun. Ada sejumlah indikasi pendahuluan perkiraan ini mungkin direvisi ke bawah di tahun-tahun yang akan datang. Yang lebih penting, jumlah orang yang selamat *terus bertumbuh – dan kebutuhannya bersifat jangka panjang*.

□ **Peningkatan perhatian terhadap bantuan untuk korban**

Para Pihak Negara meningkatkan dukungan kepada 24 negara dengan jumlah yang selamat signifikan, yang menimbulkan perkembangan alat, tujuan, dan rencana tindakan, tindak-lanjut perkembangan yang lebih baik, pertanggungjawaban, praktek terbaik untuk peningkatan pemasukan orang yang selamat, koordinasi yang lebih baik, dan integrasi dengan perkembangan. Akan tetapi, pada tahun 2005 program-program yang ada jauh dari memenuhi semua kebutuhan orang-orang yang selamat dari ranjau darat; di 49 dari 59 negara dengan kecelakaan pada tahun 2005-2006 satu atau lebih aspek dari aspek yang ada tetap tidak memadai. Para penyedia terus menghadapi banyak permasalahan yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya termasuk akses yang memadai untuk perawatan, variasi dan keefektifan bantuan, kapasitas, pelaksanaan dan pendanaan yang tepat.

□ **Pendanaan pekerjaan ranjau internasional yang signifikan pada tahun 2005**

Pendanaan internasional untuk pekerjaan ranjau dengan total US\$376 juta pada tahun 2005, pendanaan terbesar kedua sampai saat ini dan \$37 juta lebih banyak daripada dua tahun yang lalu. Komisi Eropa (\$51.5 juta), Jepang (\$39.3 juta) dan Norwegia (\$36.5 juta). Dari 20 donor puncak, setengahnya memberikan *lebih banyak* pendanaan pekerjaan ranjau pada tahun 2005: Australia, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, Slovakia, Swedia, Swiss, dan Kerajaan Inggris.

□ **Penurunan pada pendanaan internasional untuk pekerjaan ranjau**

Tahun 2005 total \$376 juta turun menjadi \$23 juta, hampir enam persen, dari tahun 2004. Ini merupakan pertama kalinya pendanaan pekerjaan ranjau global telah menurun secara berarti sejak tahun 1992, ketika negara-negara pertama kalinya mulai mempersembahkan sumber daya-sumber daya yang signifikan untuk pekerjaan ranjau. Dari 20 donor puncak, setengahnya memberikan lebih sedikit pendanaan pekerjaan ranjau pada tahun 2005: Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Irlandia, Jepang, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Komisi Eropa. Penurunan global sebagian besar mencerminkan penurunan besar dari dua donor yang paling signifikan: Komisi Eropa (turun \$14.9 juta) dan Amerika Serikat (turun \$14.6 juta).

Para penerima pendanaan pekerjaan ranjau

Negara-negara yang menerima sebagian besar pendanaan pekerjaan ranjau pada tahun 2005 adalah: Afghanistan (\$66.8 juta), Sudan (\$48.4 juta), Angola (\$23.9 juta). *Peningkatan* terbesar pada pendanaan yang diterima oleh Sudan (sampai \$33.4 juta, lebih dari tiga kali total tahun 2004). Para penerima lain dengan peningkatan sedikitnya \$1 juta termasuk: Abkhazia, Albania, Burundi, Guinea-Bissau, dan Uganda.

□ Penurunan pendanaan untuk banyak negara yang terkena-dampak-ranjau

Penurunan drastis pada pendanaan pekerjaan ranjau terjadi di Irak (turun \$30.9 juta, 53 persen), Afghanistan (\$25 juta, 27 persen), dan Kamboja (\$17.7 juta, 43 persen). Negara-negara lain dengan penurunan besar pada tahun 2005 termasuk Bosnia dan Herzegovina, Kolombia, Jordan, Mozambik, Sri Lanka, dan Tajikistan.

□ Sejumlah program pekerjaan ranjau utama terpukul oleh kurangnya pendanaan

Program pekerjaan ranjau di sedikitnya lima negara yang terkena-dampak-ranjau dibatasi oleh kekurangan pendanaan utama: Afghanistan, Guinea-Bissau, Irak, Mauritania, dan Tajikistan, Guinea-Bissau, Irak, Mauritania, dan Tajikistan; di Kroasia,

para anggota parlemen menyerukan peningkatan pendanaan pemerintah untuk pekerjaan ranjau.

□ **Pendanaan yang tidak memadai bagi bantuan untuk korban ranjau**

Beberapa program bantuan orang yang selamat mengalami kekurangan pendanaan yang serius pada tahun 2005, yang menghambat pengiriman pelayanan utama bagi orang-orang yang selamat dari ranjau, keluarga dan masyarakat mereka – walaupun dengan adanya peningkatan sekitar 29 persen pada pendanaan yang diidentifikasi pada bantuan untuk korban, sampai \$37 juta. Banyak dari pendapatan ini bisa ditunjuk kepada perubahan pada pelaporan. Banyak tingkat yang lebih besar untuk pendanaan yang terjaga dibutuhkan untuk program bantuan orang yang selamat dari ranjau.

□ **Lebih banyak pendanaan nasional oleh negara yang terkena-dampak-ranjau**

Sejumlah negara yang terkena-dampak-ranjau menginvestasikan lebih banyak sumber daya nasional untuk pekerjaan ranjau pada tahun 2005, yang bisa dicatat Kroasia (\$32.4 juta, atau 57 persen dari pengeluaran pekerjaan ranjau) dan Bosnia dan Herzegovina (\$11.3 juta, atau 44 persen dari pengeluaran). Kontribusi-kontribusi besar juga diberikan oleh Azerbaijan dan Chile. Pada tahun 2005, sejumlah negara yang terkena-dampak-ranjau melaporkan penurunan pada kontribusi nasional untuk pekerjaan ranjau termasuk: Kolombia, Mozambik, dan Thailand.

Pendahuluan

Konvensi untuk Pelarangan Penggunaan, Pengumpulan, Produksi dan Pengiriman Ranjau Anti-personil dan tentang penghancurannya (“Perjanjian Pelarangan Ranjau”) berlaku pada tanggal 1 Maret 1999. Dengan ditandatangani oleh 122 pemerintah di Ottawa, Kanada pada bulan Desember 1997, Perjanjian Pelarangan Ranjau memiliki 151 Pihak Negara pada tanggal 1 Juli 2006. Tambahan tiga negara telah menandatangani tapi belum mensyahkan. Total 40 negara tetap berada di luar perjanjian ini.

Kampanye Internasional untuk Pelarangan Ranjau Darat (*ICBL/International Campaign to Ban Landmines*) menganggap Perjanjian Pelarangan Ranjau tahun 1997 sebagai kerangka kerja lengkap satu-satunya yang bisa dimasuki untuk mencapai dunia bebas-ranjau. Perjanjian ini dan usaha global untuk menghilangkan ranjau anti-personil telah memberikan hasil yang mengesankan. Norma internasional baru muncul, karena banyak pemerintah bukan pihak Perjanjian Pelarangan Ranjau mengambil langkah-langkah yang konsisten dengan perjanjian ini, dan jumlah kelompok bersenjata bukan-negara yang semakin meningkat juga berpegang pada suatu pelarangan. Penggunaan baru untuk ranjau-ranjau anti-personil terus menurun. Ada bukti yang menuntut penggunaan baru hanya oleh tiga pemerintah dalam periode pelaporan Pengawasan Ranjau Darat (sejak bulan Mei 2005), juga penggunaan oleh kelompok bersenjata bukan-negara di 10 negara. Tidak ada contoh yang menuntut pengiriman ranjau anti-personil. Akan tetapi, pada bulan Mei 2006, kelompok pengawasan embargo persenjataan PBB di Somalia melaporkan bahwa pemerintah Eritrea telah mengirimkan 1.000 ranjau anti-personil kepada kaum fundamentalist militant di Somalia; Eritrea dengan keras menolak tuntutan itu. Empat lagi Pihak Negara menyelesaikan penghancuran ranjau anti-personil mereka yang terkumpul, yang memberikan total 74; hanya 13 Pihak Negara masih memiliki stok untuk dihancurkan.

Lebih dari 740 kilometer persegi tanah dihilangkan ranjaunya dengan program pekerjaan ranjau pada tahun 2005 – lebih banyak dari tahun yang manapun sejak permulaan penghapusan ranjau modern pada akhir tahun 1980an. Hal ini sebagian besar karena

usaha-usaha di sejumlah negara utama yang terkena-dampak-ranjau dengan lebih baik mengidentifikasi tanah mana yang diperkirakan mengandung ranjau sebenarnya tidak mengandung ranjau, dan meningkatkan penargetan sumber daya-sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasi pembebasan. Lebih dari 470.000 ranjau darat (450.000 merupakan ranjau anti-personil) dan 3.75 juta alat bahan peledak dipindahkan dan dihancurkan. Dua lagi negara yang terkena-dampak-ranjau, Guatemala dan Suriname, menyatakan pemenuhan kewajiban Pasal 5 mereka dengan menyelesaikan pembebasan dari semua ranjau anti-personil di area-area mengandung ranjau. Sekitar 15 Pihak Negara lain melaporkan perkembangan yang baik ke arah pencapaian pembebasan sebelum batas waktu Pasal 5 mereka, ada petunjuk bahwa sekitar lusinan yang lain tidak sedang melakukannya. Beberapa program pekerjaan ranjau utama terancam oleh kurangnya pendanaan pada tahun 2005. Penerangan resiko ranjau dilakukan di 60 negara, yang menjangkau sekitar 6.4 juta orang secara langsung, sebagai tambahan terhadap media massa. MRE menjadi semakin menyatu dengan aktivitas pekerjaan ranjau yang lain, dan ada lebih banyak program berbasis-komunitas.

Pengawasan Ranjau Darat mengidentifikasi sedikitnya 7.328 kecelakaan baru pada tahun 2005, suatu peningkatan 11 persen dari tahun 2004. Kecelakaan ranjau terjadi di setiap daerah di dunia – ada kecelakaan-kecelakaan baru di 58 negara dan tujuh teritori bukan-negara pada tahun 2005. Usaha-usaha untuk memperbaiki bantuan diberikan bagi orang-orang yang selamat dari ranjau memberikan perkembangan pada enam dari 24 Pihak Negara yang teridentifikasi sebagai memiliki paling banyak orang yang selamat dan kebutuhan terbesar untuk meningkatkan bantuan orang yang selamat. Akan tetapi, pada tahun 2005 program ini jauh dari memenuhi kebutuhan orang-orang yang selamat dari ranjau dan menghadapi permasalahan yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Kecenderungan untuk peningkatan dari tahun-ke-tahun meningkat pada pendanaan pekerjaan ranjau yang terhenti pada tahun 2005; ini merupakan penurunan signifikan pertama sejak tahun 1992, yang utamanya disebabkan oleh pemotongan oleh dua donor terbesar.

Karena itu perkembangan telah dihasilkan, tapi tantangan yang menggetarkan masih ada untuk menguniversalkan Perjanjian Pelarangan Ranjau dan memperkuat norma pelarangan ranjau anti-personil, untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian itu, untuk membereskan semua ranjau dari tanah, untuk menghancurkan ranjau anti-personil, dan untuk membantu orang-orang yang selamat dari ranjau. ICBL percaya bahwa tindakan nyata satu-satunya dari keberhasilan Perjanjian Pelarangan Ranjau adalah dampak kongkrit yang dimiliki pada masalah ranjau anti-personil global. Seperti pada tujuan laporan tahunan sebelumnya, *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2006* memberikan cara untuk mengukur dampak tersebut.

Bab pendahuluan ini memberikan tinjauan global tentang periode pelaporan Pengawasan Ranjau Darat saat ini, Mei 2005. Pelaporan ini memuat sesi-sesi tentang pelarangan ranjau anti-personil (universalisasi, pelaksanaan perjanjian, penggunaan, produksi, perdagangan dan pengumpulan), tentang pekerjaan ranjau (termasuk penerangan resiko ranjau), dan tentang kecelakaan ranjau darat dan bantuan kepada orang-orang yang selamat.

Pelarangan Ranjau Anti-personil

Perjanjian Pelarangan Ranjau dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 3 Desember 1997. Setelah mencapai 40 pengesahan yang diminta pada bulan September 1998, Perjanjian Pelarangan Ranjau diberlakukan pada tanggal 1 Maret 1999, menjadi hukum internasional yang mengikat. Hal ini dipercaya sebagai pemasukan tercepat untuk diberlakukan dari suatu perjanjian multilateral utama yang pernah terjadi. Sejak tanggal 1 Maret 1999, negara-negara harus menyetujui dan tidak bisa hanya menandatangani perjanjian ini dengan maksud untuk mensyahkannya kemudian. Untuk sebuah negara yang mengesahkan (setelah menjadi penandatanganan sebelum tanggal 1 Maret) atau menyetujuinya sekarang, perjanjian ini menjadi berlaku untuk negara itu pada hari pertama bulan keenam setelah tanggal di mana negara itu memasukkan instrumen pengesahannya. Negara itu kemudian diharuskan untuk menyerahkan laporan transparansi pertamanya kepada Sekretaris-Jenderal PBB dalam waktu 180 hari (dengan pemutakhiran tahunan setiap tahun setelah itu), menghancurkan ranjau anti-personil yang terkumpul dalam waktu empat tahun, dan menghancurkan ranjau anti-personil dalam tanah dalam waktu 10 tahun. Negara itu juga diharuskan untuk mengambil tindakan pelaksanaan dalam negeri yang tepat, termasuk penerapan sanksi denda.

Universalisasi

Usaha-usaha yang terjaga dan peka oleh Para Pihak Negara untuk Perjanjian Pelarangan Ranjau telah membantu memperluas larangan pada ranjau anti-personil kepada negara-negara yang pada suatu waktu menyatakan kesulitan untuk bergabung. Dari 151 Pihak Negara, total 84 negara mengesahkan atau menyetujui perjanjian itu setelah pemasukan pemberlakuannya pada tanggal 1 Maret 1999. Jumlah negara yang mengesahkan atau menyetujui perjanjian itu setiap tahun sejak terbuka untuk ditandatangani adalah sebagai berikut: 1997 (bulan Desember saja) – 3; 1998-55; 1999-32 (23 setelah

tanggal 1 Maret); 2000-19; 2001-13; 2002-8; 2003-11; 2004-3; 2005-4; dan 2006 (sejak bulan Juli)-3.

Empat negara penandatangan telah mengesahkan perjanjian itu sejak publikasi *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005*: Ukraine (Desember 2005), Haiti (Februari 2006), the Kepulauan Cook (Maret 2006) dan Brunei (April 2006). Ukraine memiliki kumpulan yang sangat besar 6.6 juta ranjau anti-personil, termasuk 5.9 juta ranjau tipe-PFM yang sukar-untuk-dihancurkan. Dengan pengesahan Haiti, hanya dua negara di Amerika, Cuba, dan Amerika Serikat, tetap berada di luar perjanjian. The Kepulauan Cook dan Brunei memberikan contoh-contoh positif untuk negara-negara Asia-Pasifik yang belum menjadi pihak terhadap perjanjian ini.

Ada tiga negara yang telah menandatangani, tapi belum mengesahkan perjanjian ini: Indonesia, Marshall Islands, dan Polandia. Ada petunjuk-petunjuk positif dari Indonesia dan Polandia bahwa mereka akan mengesahkan perjanjian ini dalam waktu dekat. Presiden Indonesia menerbitkan persetujuannya untuk memulai proses pengesahan perjanjian ini pada bulan Oktober 2005, dan pada bulan Maret 2006 sebuah naskah hukum diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk mendapatkan revisi akhir. Polandia terus mengerjakan proses pengesahan nasional setelah pemilihan dan perubahan pada pemerintah. Sebagai tambahan, pada bulan Desember 2005, Marshall Islands memberikan suara yang membela keputusan Majelis Umum PBB tahunan (UNGA) yang menyerukan universalisasi dan pelaksanaan penuh Perjanjian Pelarangan Ranjau, setelah abstain untuk keputusan yang sama pada tahun-tahun yang lalu.

Telah ada juga perkembangan yang mendorong banyak bangsa bukan-penandatangan di seluruh dunia.

Di Afrika Sahara Bagian Bawah: Somalia merupakan negara satu-satunya di daerah ini yang bukan merupakan pihak terhadap perjanjian. Pada bulan Juni 2005, Wakil Perdana Menteri dari Pemerintah Federal Transisi Somalia (TFG) memastikan kembali keputusan TFG untuk menyetujui perjanjian ini dan menyerukan bantuan, termasuk untuk penghancuran kumpulannya.

Di daerah Asia-Pasifik: Pada rapat-rapat Komite Pendirian antar sesi bulan Mei 2006, Palau menyatakan harapannya untuk menyetujui Perjanjian Pelarangan Ranjau pada Rapat Ketujuh Para Pihak Negara bulan September 2006. Negara-negara Federasi Mikronesia menghadiri Rapat Keenam Para Pihak Negara untuk Perjanjian Pelarangan Ranjau pada bulan November-Desember 2005 – partisipasi pertamanya pada rapat yang berhubungan dengan Perjanjian Pelarangan Ranjau – dan mengatakan kepada ICBL bahwa legislasi persetujuan sedang dirancang. Pada bulan Mei 2006, Mongolia menunjukkan telah memulai pendekatan langkah-demi-langkah untuk menyetujui Perjanjian Pelarangan Ranjau pada tahun 2008; langkah pertama dalam rencana itu adalah mengungkapkan informasi tentang kumpulan ranjau daratnya. Pada bulan Oktober 2005, di PBB, wakil Mongolia mendeklarasikan: “Mongolia menentang penggunaan, produksi, pengumpulan dan pengiriman semua jenis ranjau darat anti-personil dan mendukung usaha-usaha yang diambil oleh masyarakat internasional dalam melarang senjata berbahaya dan tanpa pandang bulu ini.”

Pada bulan Juli 2005, Laos memastikan maksudnya untuk menyetujui Perjanjian Pelarangan Ranjau di masa mendatang. Pada bulan Desember 2005, Cina memberikan suara untuk pertama kalinya yang membela keputusan UNGA; negara itu terus memberikan pernyataan yang mendukung maksud dan tujuan Perjanjian Pelarangan Ranjau. India telah menunjukkan keterbukaan yang semakin besar ke arah Perjanjian Pelarangan Ranjau, dan telah secara teratur menghadiri rapat-rapat yang berhubungan dengan perjanjian ini sejak bulan Desember 2004; pada Rapat Keenam Para Pihak Negara delegasi India menyatakan bahwa partisipasinya dalam semua rapat ini “merupakan pencerminan komitmen kami untuk visi umum dunia bebas ancaman ranjau darat dan perlengkapan perang yang tidak meledak.”

Selama kunjungan seorang delegasi pemerintah Kanada pada bulan November 2005 untuk mempromosikan Perjanjian Pelarangan Ranjau, para pejabat Vietnam menunjukkan bahwa Vietnam akan bergabung dengan perjanjian ini pada sejumlah poin dan menekankan bahwa negara ini sudah menghormati semangat perjanjian dengan tidak memproduksi,

menjual, atau menggunakan ranjau anti-personil. Pada tanggal 26 Mei 2006, pemerintah Nepal dan Partai Komunis Nepal (Maoist) sepakat untuk melakukan gencatan senjata bilateral dan Aturan Perilaku yang memasukkan tidak menggunakan ranjau darat. Pada bulan Juni 2006, Taiwan mengundang legislasi yang melarang produksi dan perdagangan ranjau anti-personil, tapi tidak mengumpulkan dan menggunakan, dan mengharuskan pembebasan area-area yang mengandung ranjau dalam tujuh tahun.

Di Persemakmuran Negara-negara Merdeka: Untuk pertama kalinya, Azerbaijan pada bulan Desember 2005 memberikan suara yang membela keputusan UNGA pro-pelarangan tahunan. Armenia telah secara pasti melaporkan akan menyerahkan kepada Sekretaris-Jenderal PBB, atas dasar sukarela, laporan-laporan transparansi tahunan yang dibutuhkan oleh Perjanjian Pelarangan Ranjau dan Protokol II Yang Diamendemen CCW. Georgia menghadiri rapat-rapat antar sesi yang tidak menyetujui Perjanjian Pelarangan Ranjau sedang dipertimbangkan kembali, dan dengan itu memulai komitmennya untuk tidak menggunakan, memproduksi, mengimpor, atau mengekspor ranjau anti-personil.

Di Serikat Buruh Eropa: Finlandia merupakan negara EU satu-satunya yang belum menandatangani, mengesahkan, atau menyetujui Perjanjian Pelarangan Ranjau. Pada Rapat Keenam Para Pihak Negara, Finlandia mengulangi pernyataan komitmennya untuk menyetujuinya pada tahun 2012 dan menghancurkan semua ranjau anti-personil yang dikumpulkan pada tahun 2016.

Di daerah Timur Tengah-Afrika Utara: Di Kuwait, naskah hukum persetujuan diserahkan kepada Dewan Nasional; Kuwait memberikan suara yang membela keputusan UNGA pro-pelarangan tahunan untuk pertama kalinya sejak tahun 1998. Para pejabat Menteri Senior Luar Negeri Irak berkata pada bulan Maret 2006 bahwa Irak akan bergabung dengan perjanjian ini dan bahwa persiapan sedang dilakukan. Di Lebanon, suatu proses tinjauan internal yang bisa membawa kepada persetujuan dimulai. Pada bulan Juni 2006, Perdana Menteri Lebanon dan Panglima Angkatan Bersenjata mengatakan kepada ICBL bahwa mereka tidak menentang persetujuan itu, dan Menteri Luar Negeri berkata bahwa Lebanon memberikan pertimbangan serius terhadap persetujuan. Untuk pertama kalinya, Lebanon

memberikan suara yang berpihak kepada keputusan UNGA pro-pelarangan tahunan dalam Komite Pertama; negara itu absen dari suara terakhir. Maroko terus menyatakan dukungan yang kuat untuk Perjanjian Pelarangan Ranjau dan menekankan kepatuhan *de facto*-nya; negara itu memberikan suara yang membela keputusan UNGA pro-pelarangan, dan mengumumkan pada Rapat Keenam dari Para Pihak Negara itu maksudnya untuk menyerahkan laporan transparansi Pasal 7 sukarela.

Keputusan Majelis Umum PBB 60/80

Salah satu kesempatan bagi negara-negara yang menunjukkan dukungan untuk pelarangan atas ranjau anti-personil telah memberikan suara tahunan untuk keputusan-keputusan Majelis Umum PBB yang menyerukan universalisasi dan pelaksanaan penuh Perjanjian Pelarangan Ranjau. Keputusan UNGA 60/80 diambil pada tanggal 8 Desember 2005 dengan suara 158 yang membela, tidak ada yang menentang, dan 17 abstain. Ini merupakan jumlah suara terbesar yang membela dari keputusan tahunan ini, dan jumlah abstain terkecil, sejak tahun 1997 ketika pertama kali diberikan. Dua puluh empat negara yang bukan pihak terhadap perjanjian ini memberikan suara membela. Ini termasuk tiga negara yang selanjutnya menjadi Para Pihak Negara (Ukraine, Haiti, dan Brunei), tiga negara penandatangan (Indonesia, Polandia dan Marshall Islands), dan 18 bukan-penandatangan (Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cina, Finlandia, Georgia, Irak, Kuwait, Mikronesia, Maroko, Nepal, Oman, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tonga, Tuvalu, dan Persatuan Emirate Arab). Yang paling bisa dicatat di antara kelompok terakhir ini adalah Azerbaijan dan Cina, yang memberikan suara membela keputusan tahunan untuk pertama kalinya, juga Kuwait (pertama kali sejak tahun 1998) dan Marshall Islands (pertama kali sejak tahun 2002). Lebanon memberikan suara membela untuk pertama kali pada Komite Pertama, tapi absen pada suara akhir. Layak dicatat bahwa dari 40 Bukan Pihak Negara yang ada, lebih banyak yang memberikan suara untuk keputusan itu (18) daripada yang abstain (17); lima Bukan Pihak Negara absen dalam memberikan suara.

Walaupun dengan adanya daftar negara-negara yang bertumbuh yang berkomitmen untuk melarang ranjau anti-personil, ada juga pekerjaan yang melemahkan di antara

sejumlah 40 negara bukan pihak terhadap perjanjian ini. Angkatan-angkatan pemerintah di Burma (Myanmar), Nepal dan Rusia terus menggunakan ranjau anti-personil. Amerika Serikat telah mengembangkan sistem-sistem ranjau darat baru yang mungkin cocok dengan Perjanjian Pelarangan Ranjau. Sejumlah negara yang dilaporkan memberikan perkembangan ke arah perjanjian ini dalam *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005* yang tidak melaporkan perkembangan lebih lanjut, seperti Bahrain, Kyrgyzstan, Libia, Oman, dan Persatuan Emirate Arab.

Kelompok Bersenjata Bukan-Negara

Ada kesadaran yang semakin besar tentang keharusan untuk melibatkan kelompok angkatan bersenjata bukan-negara (NSAGs/*Non-State Armed Groups*) dalam usaha global untuk melarang ranjau anti-personil. NSAGs merupakan topik yang menonjol pada rapat-rapat Komite Kedudukan bulan Juni 2005 dan Mei 2006, juga Rapat Keenam Para Pihak Negara.

Jumlah signifikan kelompok bersenjata bukan-negara telah menunjukkan kesediaan mereka untuk mematuhi larangan ranjau anti-personil. Mereka telah melakukannya melalui pernyataan unilateral, perjanjian bilateral, dan dengan menandatangani Perjanjian Seruan Geneva untuk Komitmen NSAGs di tiga Pihak Negara (Filipina, Senegal, dan Sudan) telah setuju untuk mematuhi pelarangan pada ranjau anti-personil melalui perjanjian bilateral dengan pemerintah-pemerintah. Sebagai tambahan, pada bulan Agustus 2005, Gerakan untuk Demokrasi dan Keadilan di Chad (MDJT/*Movement for Democracy and Justice*) menandatangani gencatan senjata dengan pemerintah yang memasukkan perjanjian untuk membereskan ranjau.

Seruan Geneva telah menerima tandatangan dari 29 NSAGs, banyak dari mereka di Somalia, sejak tahun 2001. Para penandatangan itu berada di Burma, Burundi, India, Irak, Filipina, Somalia, Sudan, Turki, dan Sahara Barat. Front Polisario di Sahara Barat menandatangani Akta Komitmen pada bulan November 2005 dan Partai Para Pekerja Kurdistan (PKK), juga yang dikenal sebagai Kongres Rakyat Kurdistan (Kongra-Gel), menandatangani pada bulan Juli 2006.

Rapat Keenam Para Pihak Negara

Para Pihak Negara, negara-negara pengamat dan para peserta lain bertemu untuk Rapat Keenam Para Pihak Negara di Zagreb, Kroasia dari tanggal 28 November sampai 2 Desember 2005. Rapat ini berbeda dari rapat-rapat tahunan sebelumnya di mana rapat ini dilakukan dalam kerangka kerja perkembangan yang diukur sebelumnya dalam memenuhi Rencana Kerja Nairobi 2005-2009 yang telah diambil pada tingkat politik tinggi pada Konferensi Tinjauan Pertama (Pertemuan Puncak Nairobi tentang Dunia Bebas-Ranjau) pada bulan November-Desember 2004. Jadi, rapat ini menghasilkan Laporan Perkembangan Zagreb, yang sebagai tambahan terhadap peninjauan ulang perkembangan yang diberikan tahun lalu, menekankan area-area prioritas kerja untuk tahun yang akan datang. Laporan Perkembangan Zagreb terjadi pada Program Kerja Presiden yang muncul dari rapat-rapat tahunan sebelumnya.

Pengumuman yang bisa dicatat pada rapat itu memasukkan: Guatemala dan Suriname menyelesaikan kewajiban pembebasan ranjau mereka; Algeria dan Guinea-Bissau menyelesaikan kewajiban penghancuran kumpulan mereka; Nigeria menghancurkan ranjau-ranjau yang sebelumnya diterima untuk pelatihan; dan, Australia menjaminkan 75 juta dolar Australia untuk pekerjaan ranjau selama lima tahun. Dalam perjanjian dasar satu-satunya pada rapat itu, Para Pihak Negara sepakat untuk proposal dari Argentina dan Chile untuk mendapatkan format baru untuk pelaporan yang diperluas terhadap ranjau anti-personil yang diterima untuk pelatihan atau tujuan pengembangan di bawah pengecualian Pasal 3. ICBL senang dengan fokus dari Para Pihak Negara untuk batas waktu pembebasan ranjau Pasal 5, dan khususnya tawaran Norwegia untuk memulai suatu proses dalam memfasilitasi pemenuhan semua kewajiban ini.

Partisipasi dalam rapat ini besar – lebih dari 600 orang – dengan total 115 delegasi negara yang hadir, termasuk 94 Pihak Negara. Lebih dari 180 wakil dari LSM-LSM dari 63 negara hadir. Batasan para peserta – para diplomat, pelaku kampanye, personil PBB, dan, yang paling bisa dicatat, jumlah signifikan dari para praktisi pekerjaan ranjau, orang dari lapangan, dan orang-orang yang selamat dari ranjau darat – sekali lagi menunjukkan bahwa

Perjanjian Pelarangan Ranjau telah menjadi kerangka kerja untuk membahas semua aspek masalah ranjau anti-personil.

Total 21 Pihak Negara berpartisipasi, yang menunjukkan penyebaran berlanjut dari norma internasional yang menolak ranjau anti-personil. Beberapa dari pemberian yang lebih bisa dicatat hadir, termasuk Azerbaijan, Cina, Mesir, dan India. India membuat pernyataan formal pertamanya pada rapat Perjanjian Pelarangan Ranjau. Yang bisa dicatat, tujuh Bukan Pihak Negara dari Timur Tengah/Afrika Utara mengambil bagian, perkembangan yang mendorong di sebuah daerah dengan kepatuhan yang rendah terhadap Perjanjian Pelarangan Ranjau. Semua ini termasuk Mesir, Irak, Kuwait, Libia, Maroko, Saudi Arabia, dan Persatuan Emirate Arab.

Para Pihak Negara memberikan sejumlah keputusan praktis pada Rapat Keenam. Mereka memutuskan untuk berpegang pada Rapat Ketujuh dari Para Pihak Negara di Geneva dari tanggal 18 sampai 22 September 2006, dengan Australia sebagai pejabat-Presiden. Jordan menawarkan menjadi tuan rumah Rapat Kedelapan Para Pihak Negara tahun 2007. Sebagai tambahan, para ketua-bersama baru dan *co-rapporteurs* dipilih sebagai Komite Kedudukan.

ICBL mengidentifikasi beberapa aspek yang mengecewakan dari rapat itu, termasuk Australia merupakan satu-satunya Pihak Negara yang mengumumkan komitmen keuangan yang baru untuk pekerjaan ranjau, respon-respon terhadap kuesioner bantuan untuk korban merupakan kualitas yang beragam dengan tujuan-tujuan yang terlalu kabur dalam banyak kasus, dan ada pembahasan yang berarti kecil tentang penerjemahan yang tidak konsisten dan pelaksanaan Pasal 1 dan 2, mengenai tindakan yang diizinkan di bawah pelarangan perjanjian tentang “bantuan,” dan ranjau dengan alat anti-senggol yang peka atau pemicu yang peka.

Pelaksanaan dan Program Pekerjaan Antar Sesi

Gambaran yang bisa dicatat dari Perjanjian Pelarangan Ranjau ini adalah perhatian yang Para Pihak Negara telah berikan dalam memastikan pelaksanaan peraturan perjanjian ini. Struktur-struktur yang diciptakan untuk mengawasi perkembangannya ke arah

pelaksanaan dan memungkinkan pembahasan di antara Para Pihak Negara termasuk Rapat tahunan dari Para Pihak Negara, program kerja antar sesi, komite koordinasi, kelompok penghubung untuk universalisasi, mobilisasi sumber daya dan Pasal 7 dan 9, program pensponsoran, dan unit pendukung pelaksanaan.

Komite Kedudukan antar sesi bertemu selama satu minggu pada bulan Juni 2005 dan seminggu lagi pada bulan Mei 2006. Pada Rapat Keenam Para Pihak Negara, para ketua-bersama baru dan *co-rapporteurs* dipilih untuk periode sampai rapat tahunan berikutnya, sebagai berikut: Status Umum dan Operasi: Belgia dan Guatemala sebagai para ketua-bersama dan Argentina dan Italia sebagai *co-rapporteurs*; Pembebasan Ranjau, Penerangan Resiko Ranjau dan Teknologi Pekerjaan Ranjau: Jordan dan Slovenia sebagai para ketua-bersama dan Chile dan Norwegia sebagai *co-rapporteurs*; Penghancuran Kumpulan: Jepang dan Tanzania sebagai ketua-bersama dan Algeria dan Estonia sebagai *co-rapporteurs*; dan Bantuan Untuk Korban dan Penyatuan Kembali Sosial-Ekonomi: Afghanistan dan Swiss sebagai para ketua-bersama dan Austria dan Sudan sebagai *co-rapporteurs*.

Rincian tentang Pembahasan Komite Kedudukan dan intervensi-intervensinya bisa didapatkan dalam sesi-sesi tema sebagai berikut.

Konvensi Persenjataan Konvensional (CCW/*Convention on Conventional Weapons*)

Total 86 negara merupakan pihak terhadap Protokol II Yang Diamendemen CCW, sejak tanggal 1 Juli 2006. Protokol II Yang Diamendemen mengatur produksi, pengiriman, dan penggunaan ranjau darat, jebakan-ranjau, dan alat bahan peledak lain. Protokol itu berlaku pada tanggal 3 Desember 1998. Sejak Publikasi *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005*, hanya Tunisia yang bergabung dengan Protokol II Yang Diamendemen. Hanya 10 dari 86 Pihak Negara terhadap Protokol II Yang Diamendemen belum bergabung dengan Perjanjian Pelarangan Ranjau: Finland, India, Israel, Maroko, Pakistan, Rusia, Korea Selatan, Sri Lanka, dan Amerika Serikat.

Cina, Latvia, Pakistan, dan Rusia menunda kepatuhan terhadap persyaratan tentang kemampuan deteksi terhadap ranjau anti-personil, sebagaimana yang diberikan dalam Lampiran Teknis. Cina dan Pakistan diwajibkan untuk mematuhi pada tanggal 3

Desember 2007, tidak ada satupun dari mereka yang telah memberikan informasi rinci tentang langkah-langkah yang diambil sejauh ini untuk memenuhi persyaratan pendeteksian. Rusia harus mematuhi pada tahun 2014. Penundaan Latvia sekarang diasumsikan sebelumnya tidak relevan karena aksesnya terhadap Perjanjian Pelarangan Ranjau, yang melarang penggunaan ranjau-ranjau seperti itu dan mengharuskan penghancurannya.

Belarus, Cina, Pakistan, Rusia, dan Ukraine menunda kepatuhan terhadap penghancuran-sendiri dan keharusan penghentian sendiri untuk ranjau-ranjau anti-personil yang dikirimkan dari jauh yang dinyatakan dalam Lampiran Teknis. Masing-masing batas waktu sembilan tahun mereka untuk tindakan ini adalah 3 Desember 2007 untuk Cina dan Pakistan, dan 2014 untuk Rusia. Ukraine diwajibkan oleh Perjanjian Pelarangan Ranjau untuk menghancurkan tumpukannya yang terdiri dari enam juta ranjau anti-personil yang dikirimkan dari jauh tipe PFM pada tanggal 1 Juni 2010. Belarus diwajibkan oleh Perjanjian Pelarangan Ranjau untuk menyelesaikan penghancuran stok ranjau anti-personil yang dikirim dari jauh untuk tipe PFM dan KPOM pada tanggal 1 Maret 2008.

Pada bulan November 2003, 91 Pihak Negara CCW setuju untuk mengangkat Protokol V, instrumen yang secara hukum mengikat untuk tindakan umum, penanggulangan pasca-konflik untuk sisa-sisa bahan peledak perang (*ERW/explosive remnants of war*). Pada tanggal 12 Mei 2006, Pihak Negara ke-20 mengesahkan protokol ini, yang memicu tanggal pemberlakuan 12 November 2006. Sedangkan pada tanggal 1 Juli 2006, 23 negara telah mengesahkan Protokol V.

Pada CCW, pekerjaan ranjau selain untuk ranjau anti-personil (*MOTAPM/mines other than antipersonnel mines*) dan tentang tindakan-tindakan untuk mencegah persenjataan tertentu, termasuk *cluster munitions*, dari menjadi sisa-sisa bahan peledak perang berlanjut pada tahun 2005 dan 2006.

Penggunaan Ranjau Anti-personil

Salah satu dari prestasi yang paling signifikan dari Perjanjian Pelarangan Ranjau adalah tingkat di mana suatu penggunaan ranjau anti-personil oleh seorang pelaku telah

ternodai di seluruh dunia. Penggunaan ranjau anti-personil, khususnya oleh pemerintah, telah menjadi fenomena yang jarang.

Dalam periode pelaporan ini, sejak Mei 2005, tiga pemerintah dipastikan telah menggunakan ranjau anti-personil: Myanmar (Burma), Nepal, dan Rusia. Semua pemerintah yang sama ini, juga Georgia, diidentifikasi menggunakan ranjau anti-personil dalam periode pelaporan Pengawasan Ranjau Darat sebelumnya.

Kekuatan militer Myanmar terus menggunakan ranjau anti-personil secara luas, karena mereka setiap tahun sejak Pengawasan Ranjau Darat memulai pelaporan pada tahun 1999. Penggunaan ranjau paling luas di Karen (Kayin), Karenni (Kayah) dan negara-negara Shah. Pada bulan Mei 2006, Pengawasan Hak Azasi Manusia melaporkan bahwa orang-orang sipil yang mencari perlindungan di Thailand telah ditempatkan pada resiko besar dari ranjau-ranjau darat yang ditanam oleh Angkatan Bersenjata Myanmar di sepanjang perbatasan negara Karen. Dikatakan ranjau-ranjau anti-personil ditanam di area-area sipil untuk menteror penduduk lokal, dan mengutip angka 2.000 ranjau yang diberikan pada satu area untuk menghambat rute-rute pelarian dan menolak akses penduduk sipil untuk persediaan makanan, komoditas, dan bantuan kemanusiaan lain. Angkatan Bersenjata Myanmar dilaporkan telah mendapatkan dan menggunakan jumlah ranjau anti-personil yang semakin meningkat untuk disain M-14 AS; manufaktur dan sumber dari semua ranjau yang tidak bisa terdeteksi ini – apakah luar negeri atau dalam negeri – tidak diketahui.

Pada bulan Juni 2006, para pejabat Rusia memastikan kepada Pengawasan Ranjau Darat bahwa kekuatan Rusia terus menggunakan ranjau anti-personil di Chechnya, baik ranjau yang baru saja ditempatkan maupun ladang ranjau pertahanan yang ada, yang mencatat, “Ranjau anti-personil digunakan untuk melindungi fasilitas yang sangat penting.” Mereka mengindikasikan ranjau digunakan oleh kekuatan Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Para Penjaga Perbatasan. Walaupun Rusia secara teratur telah mengakui menggunakan ranjau anti-personil di Chechnya di masa lalu, pada bulan Agustus 2005 para pejabat militer Rusia mengklaim kepada Pengawasan Ranjau Darat bahwa

angkatan Menteri Pertahanan Rusia tidak menggunakan ranjau anti-personil di Chechnya pada tahun 2004 atau 2005.

Pada tanggal 26 Mei 2006, pemerintah Nepal dan Partai Komunis Nepal (Maoist) sepakat untuk perlucutan senjata bilateral dan Aturan Perilaku yang memasukkan tidak menggunakan ranjau darat. Sebelum perlucutan senjata kedua belah pihak telah terus menggunakan ranjau darat dan/atau alat bahan peledak yang ditingkatkan. Kekuatan pemerintah (Angkatan Bersenjata Nepal Kerajaan dan pelayanan keamanan lain) menggunakan ranjau anti-personil buatan pabrik dan alat bahan peledak yang ditingkatkan (IEDs/*improvised explosive devices*).

Tidak ada bukti – atau bahkan tuduhan serius – tentang penggunaan ranjau anti-personil oleh Para Pihak Negara dari Perjanjian Pelarangan Ranjau atau para penandatanganan dalam periode pelaporan. Hal ini bisa dicatat di mana banyak Para Pihak Negara saat ini bisa telah mengakui menggunakan, atau ada tuduhan yang bisa dipercaya tentang penggunaannya, ranjau anti-personil di masa lalu baru-baru ini, sebelum bergabung dengan perjanjian ini, bahkan beberapa dari mereka merupakan para penandatanganan.

Penggunaan Kelompok Bersenjata Bukan-Negara

Kelompok bersenjata bukan-negara menggunakan ranjau anti-personil di lebih banyak negara daripada angkatan pemerintah, tapi penggunaan ranjau anti-personil oleh kelompok bersenjata bukan-negara juga menurun. Dalam periode pelaporan ini, NSAGs menggunakan ranjau anti-personil sedikitnya di 10 negara. Penggunaan NSAG untuk ranjau anti-personil atau IEDs seperti-ranjau anti-personil dilaporkan di tiga Pihak Negara (Burundi, Kolombia, dan Guinea-Bissau) dan di tujuh Bukan Pihak Negara (Burma, India, Irak, Nepal, Pakistan, Rusia/Chechnya dan Somalia). *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005* mengutip penggunaan NSAG untuk ranjau anti-personil sedikitnya di 13 negara. Guinea-Bissau, di mana para pemberontak Senegal menggunakan ranjau terhadap Angkatan Bersenjata Guinea-Bissau ditambahkan dalam daftar, sementara Georgia, Filipina, Turki, dan Uganda dihilangkan dari daftar tahun ini.

Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, tidak ada laporan yang dipastikan, atau bahkan tuduhan serius, tentang penggunaan ranjau anti-personil oleh para pelaku bukan-negara di Georgia. Ada banyak contoh pada tahun 2005 dan 2006 di mana militer Uganda menangkap tempat persembunyian ranjau anti-personil yang merupakan milik Angkatan Bersenjata Perlawanan *the Lord*, tapi Pengawasan Ranjau Darat tidak menemukan laporan apapun tentang penggunaan ranjau anti-personil oleh LRA. LRA dikenal telah menggunakan ranjau di masa lalu.

Banyak media dan laporan lain di Filipina merujuk penggunaan “ranjau darat” oleh beberapa NSAGs, termasuk Angkatan Bersenjata Rakyat Baru (NPA/*New People Army*), Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF/*Moro National Liberation Front*) dan Kelompok Abu Sayyaf, tapi Pengawasan Ranjau Darat hanya bisa mengidentifikasi penggunaan ranjau anti-kendaraan dan ranjau dipicu-perintah dan IEDs. NPA meningkatkan penggunaan ranjau anti-kendaraan yang ditingkatkan yang dipicu-perintah, yang mengakibatkan lebih banyak kecelakaan daripada yang pernah terjadi sebelumnya. NPA dan MNLF keduanya telah menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan ranjau-ranjau anti-personil yang dipicu-korban.

Dengan cara yang sama, laporan media dan pejabat di Turki sering merujuk kepada penggunaan “ranjau darat” oleh Partai Pekerja Kurdistan (PKK/*Kongra-Gel*) tapi, sekali lagi, Pengawasan Ranjau Darat hanya bisa dengan jelas mengidentifikasi penggunaan ranjau anti-kendaraan dan ranjau yang dipicu-perintah dan IDEs. Sejumlah insiden selama periode pelaporan tampaknya telah merupakan akibat dari ranjau anti-personil yang dipicu-korban atau IEDs, tapi tanggal penempatannya tidak terbukti. Pemerintah Turki telah melaporkan bahwa pada tahun 2005, 39 personil militer terbunuh dan 115 terluka oleh ranjau yang diletakkan oleh PKK. Pada bulan Desember 2005, *Gendarme General Command* melaporkan telah menemukan 40 ranjau anti-personil DM-11 dan persenjataan lain yang merupakan milik PKK. Menurut Seruan Geneva, PKK telah mengakui penggunaan alat bahan peledak yang bisa diaktifkan oleh korban atau kendaraan. Dalam komentarnya tentang rancangan laporan Pengawasan Ranjau Darat, pemerintah menyatakan bahwa

klaim PKK untuk tidak menggunakan ranjau yang dipicu-korban “tidak sama dengan kenyataan.” Seperti yang dicatat di atas, pada bulan Juli 2006, PKK menandatangani Akta Seruan Geneva tentang Komitmen pelarangan ranjau anti-personil.

Di Burma, Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional Karena, Angkatan Bersenjata Karenni, Angkatan Bersenjata Negara Shan (Selatan, Angkatan Bersenjata Nasional Chin, Angkatan Bersenjata Negara Kesatuan Wa, Angkatan Bersenjata Buddha Karena Demokratis, dan beberapa kelompok bersenjata bukan-negara terus menggunakan ranjau anti-personil; adalah mungkin bahwa Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional Karen adalah NSAG yang menggunakan ranjau paling luas dalam periode pelaporan ini.

Di Burundi, pemerintah terus menuduh para pemberontak *Front National de Libération* (FNL) menggunakan ranjau anti-personil; peningkatan jumlah kecelakaan ranjau, khususnya di provinsi Pedesaan Bujumbura di mana Perkelahian telah terjadi, menunjukkan penggunaan berlanjut ranjau anti-personil.

Para pemberontak Chechen terus menggunakan alat bahan peledak yang ditingkatkan secara luas. Sulit untuk memastikan tingkat di mana ranjau anti-personil yang dipicu-korban atau IEDs digunakan, tapi tampaknya dalam sebagian besar contoh ini, para pemberontak menggunakan kendaraan yang ditargetkan IED yang dipicu-perintah.

Di Kolombia, FARC terus menjadi pengguna ranjau darat terbesar di negara ini, dan di antara yang terbesar di dunia. Pengawasan Ranjau Darat mendaftarkan penggunaan baru untuk ranjau anti-personil oleh kekuatan FARC di beberapa kotamadya yang belum melaporkan insiden ranjau sebelumnya. Kelompok-kelompok lain, yang bisa dicatat ELN, juga menggunakan ranjau. Tidak ada laporan khusus tentang penggunaan ranjau anti-personil oleh AUC dalam periode pelaporan ini, walaupun ranjau-ranjau ini ditangkap dan dikembalikan oleh para anggota AUC.

Pada bulan Maret dan April 2006, suatu faksi Gerakan berbasis-di-Senegal dari Angkatan Demokratis Casamance yang dipimpin oleh Salif Sadio melarikan diri ke Guinea-Bissau bagian utama dan meletakkan baik ranjau anti-personil maupun anti-kendaraan

selama pertempuran dengan angkatan bersenjata Buginea-Bissau, yang menyebabkan kecelakaan kaum sipil dan gangguan sosial ekonomi yang signifikan.

Di India, variasi NSAGs terus menggunakan ranjau anti-personil, ranjau anti-kendaraan, dan yang paling umum, alat bahan peledak yang ditingkatkan. Para pengacau komunis di India tengah menggunakan IEDs yang dipicu-perintah, alat bahan peledak yang dipicu-korban, dan perangkap ranjau. Sejumlah kelompok di India timur laut menggunakan alat yang dipicu-korban. Para pengacau di Kashmir menggunakan IEDs yang dipicu-perintah, dan Angkatan Bersenjata India menemukan ranjau-ranjau darat anti-personil dari para pengacau itu.

Di Irak, kekuatan perlawanan terus menggunakan alat bahan peledak yang ditingkatkan dalam jumlah besar, juga ranjau anti-kendaraan. IEDs tampaknya hampir secara eksklusif dipicu-perintah, walaupun kekuatan Koalisi menemukan banyak tempat persembunyian ranjau anti-personil. Pada bulan Juni 2006, kekuatan pengacau dilaporkan menempatkan banyak IEDs yang dipicu-korban di area yang mengelilingi badan-badan dua serdadu Amerika yang telah diculik dan dibunuh.

Di Nepal, kaum Mao menggunakan sejumlah besar alat bahan peledak yang dipicu-perintah, juga yang dipicu-korban dan alat yang diaktifkan-waktu, yang menimbulkan kecelakaan di hampir setiap wilayah negara itu.

Di Pakistan, NSAGs menggunakan ranjau anti-personil, ranjau anti-kendaraan, dan IEDs secara luas di Baluchistan, dan sampai batasan yang lebih kecil di Waziristan dan di tempat lain di Area-area Suku Yang Diperintah Secara Federal.

Di Somalia, ada sedikit informasi yang pasti yang tersedia, tapi tampaknya telah ada penggunaan berkelanjutan ranjau anti-personil oleh berbagai faksi di bagian-bagian yang berbeda di negara itu.

Di Sri Lanka, sejak bulan Desember 2005, dugaan penggunaan oleh Para Macan Pembebasan Tamil Elam (LTTE/*Liberation Tigers of Tamil Elam*) untuk ranjau Claymore yang dipicu-perintah telah sangat meningkat, dan Angkatan Bersenjata dalam beberapa contoh telah menyatakan penggunaan ranjau anti-personil oleh para pemberontak.

Kaum militan di Mesir mungkin telah menggunakan alat seperti-ranjau anti-personil selama operasi bulan Agustus-Oktober 2005 menentang mereka oleh angkatan keamanan Mesir.

Produksi Ranjau Anti-personil

Lebih dari 50 negara diketahui telah memproduksi ranjau anti-personil. Tiga puluh delapan negara telah menghentikan produksi ranjau anti-personil. Ini termasuk lima negara yang bukan merupakan pihak terhadap Perjanjian Pelarangan Ranjau: Mesir, Finlandia, Irak, Israel dan Polandia. Sebagai tambahan, Taiwan, yang mengumumkan beberapa tahun yang lalu bahwa ia telah berhenti berproduksi, lolos dari produksi pelarangan legislasi pada bulan Juni 2006. Total 24 anggota perjanjian telah melaporkan status program untuk perubahan atau penghapusan komisi fasilitas produksi ranjau anti-personil.

Pengawasan ranjau darat mengidentifikasi 13 negara sebagai para produsen ranjau anti-personil. Dalam sejumlah kasus, negara ini tidak secara aktif memproduksi ranjau, tapi berhak untuk melakukannya. Tidak ada negara ditambahkan atau dihilangkan dari daftar para produsen dalam periode pelaporan ini. Tahun lalu, Mesir dan Irak dihilangkan.

Para Produsen Ranjau Darat Anti-personil

Burma, Cina, Kuba, India, Iran, Korea Utara, Korea Selatan, Nepal, Pakistan, Rusia, Singapura, Amerika Serikat, Vietnam.

Para pejabat Vietnam baik dari Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada seorang delegasi Kanada yang berkunjung pada bulan November 2005 bahwa Vietnam tidak lagi memproduksi ranjau anti-personil. Pengawasan Ranjau Darat telah mengusahakan konfirmasi dan klarifikasi dari pemerintah, termasuk apakah ada kebijakan, hukum atau peraturan pejabat yang melarang produksi itu.

Amerika Serikat telah tidak memproduksi ranjau anti-personil sejak tahun 1997. Akan tetapi, negara itu telah melakukan riset dan pengembangan ranjau-ranjau darat baru. Pentagon meminta \$1.3 milyar untuk riset dan produksi dua sistem ranjau darat baru – Spider dan Sistem *Intelligent Munitions* – antara tahun 2005 dan 2011; semua sistem ini tampaknya tidak cocok dengan Perjanjian Pelarangan Ranjau. Kongres AS memerintahkan

studi Pentagon untuk efek tanpa pandang bulu yang mungkin dari Spider, yang karenanya menunda keputusan yang diharapkan Pentagon pada bulan Desember 2005 apakah akan memproduksi Spider.

Industri Berat Militer Burma dilaporkan mulai merekrut para teknisi untuk produksi generasi ranjau berikutnya dan *munitions* lain. Pejabat pemerintah Nepal sebelumnya mengatakan kepada Pengawasan Ranjau Darat pada bulan Agustus 2005 bahwa ranjau darat diproduksi di pabrik persenjataan di Sunchari sebelah selatan Kathmandu, tapi pemerintah belum memberikan informasi apapun tentang tipe ranjau yang diproduksi.

India dan Pakistan secara aktif terlibat dalam produksi ranjau anti-personil yang patuh terhadap Protokol II Yang Diamendemen CCW. Pada bulan Agustus 2005, India mengatakan kepada Pengawasan Ranjau Darat bahwa ia tidak memproduksi ranjau anti-personil yang dikirim dari jauh; India telah menyatakan pada bulan Oktober 2000 bahwa ia telah mendisain suatu sistem ranjau anti-personil yang dikirim dari jauh, untuk evaluasi percobaan dan produksi percontohan.

Direktur Pusat Pekerjaan Ranjau Iran mengatakan kepada Pengawasan Ranjau Darat pada bulan Agustus 2005 bahwa Iran tidak memproduksi ranjau darat, yang menggemakan pernyataan dari Kementerian Pertahanan pada tahun 2002 bahwa Iran belum memproduksi ranjau anti-personil sejak tahun 1988. Akan tetapi, organisasi pembebasan ranjau di Afghanistan telah menemukan sejak tahun 2002 ratusan ranjau anti-personil Iran yang berstempel tahun 1999 dan 2000.

Perusahaan Korea Selatan Hanwha memproduksi sekitar 3.300 ranjau Claymore (KM18A1) pada tahun 2005. Sebelumnya, Korea Selatan melaporkan bahwa ia belum memproduksi ranjau anti-personil apapun, termasuk ranjau Claymore, dari tahun 2000 sampai 2004.

NSAGs di Burma, Kolombia, India, Irak, dan Nepal diketahui memproduksi ranjau yang dipicu-korban atau IEDs. IEDs yang dipicu-perintah- atau dipicu-dari jauh diproduksi oleh NSAGs di Afghanistan, Bangladesh, Burma, Chechnya, Kolombia, India, Irak, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka dan Thailand. Di Burma, Angkatan Bersenjata Negara Kesatuan

Wa dinyatakan memproduksi ranjau anti-personil tipe-PMN di pabrik senjata yang sebelumnya miliki Partai Komunis Burma.

Perdagangan Global Ranjau Anti-personil

Selama dekade lalu, perdagangan global untuk ranjau anti-personil telah terdiri semata-mata dari pengiriman liar dan tidak diakui tingkat rendah. Dalam periode pelaporan ini, hanya ada sejumlah kecil laporan tentang perdagangan seperti itu untuk ranjau anti-personil. Akan tetapi, panel PBB membeberkan tuduhan paling sering dan pasti yang pernah terjadi untuk pengiriman ranjau anti-personil oleh Pihak Negara Perjanjian Pelarangan Ranjau. Pada bulan Mei 2006, kelompok pengawasan embargo persenjataan PBB melaporkan bahwa pemerintah Eritrea telah mengirim 1.000 ranjau anti-personil kepada kaum fundamentalist militan di Somalia pada bulan Maret 2006. Eritrea menyangkal klaim itu sebagai “tidak berdasar dan tidak ditemukan” dan memberi label kepada laporan itu sebagai “keterlalu dan patut disesalkan.” Laporan Oktober 2005 sebelumnya dari kelompok pengawasan PBB menyatakan bahwa antara tanggal 25 Maret dan 10 April 2005, Eritrea dua kali mengapalkan persenjataan termasuk ranjau ke lawan Pemerintah Federal Transisi (TFG/*Transitional Federal Government*) Somalia; negara itu tidak memastikan ranjau anti-personil atau anti-kendaraan.

Oktober 2005 dan Mei 2006 laporan-laporan PBB juga mengatakan bahwa pemerintah Ethiopia telah menyediakan jenis ranjau darat yang tidak pasti kepada faksi-faksi di Somalia. Ethiopia dengan keras menyangkal semua tuduhan itu. Laporan Oktober juga mengatakan bahwa pemerintah Yemen memberikan tipe ranjau yang tidak pasti kepada TFG, tampaknya pada bulan Juli 2005.

Terus ada laporan-laporan dan tuduhan-tuduhan bahwa kelompok-kelompok bersenjata di Pakistan menyelundupkan ranjau ke negara itu dari Afghanistan. Laporan kelompok pengawasan PBB Mei 2006 berkata bahwa pada bulan Agustus 2005 para pedagang di pasar persenjataan Bakaraaha di Somalia dilaporkan membeli ranjau dan persenjataan lain dari jaringan kerja perdagangan persenjataan Yemeni.

Pada bulan Juli 2005, Israel memperpanjang tiga tahun lagi penundaannya untuk ekspor ranjau anti-personil yang pertama kali dideklarasikan pada tahun 1994. Jumlah signifikan negara-negara lain di luar Perjanjian Pelarangan Ranjau telah mengundang atau memperpanjang penundaan ekspor pada tahun-tahun terakhir termasuk Cina, Rusia, Kazakhstan, Pakistan, Polandia, Rusia, Singapura, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Korea Selatan mengekspor 1.050 ranjau Claymore yang dipicu-perintah saja ke Selandia Baru pada bulan Desember 2005.

Pada bulan Juli 2006, Amerika Serikat mengulangi keinginannya (pertama kali diumumkan pada bulan Juli 2004) untuk mengejar negosiasi-negosiasi tentang pelarangan internasional atas penjualan atau ekspor ranjau darat tidak-hancur sendiri pada Konferensi Perlucutan Senjata (CD/Conference on Disarmament) berbasis-di-Geneva. Beberapa Pihak Negara telah menolak proposal itu, dengan memperhatikan bahwa pelarangan hanya satu kategori ranjau anti-personil menunjukkan bisa diterimanya perdagangan pada kategori-kategori lain. CD belum mampu menyepakati agendanya sejak tahun 1997.

Kumpulan Ranjau Anti-personil dan Penghancurannya

Pada pertengahan tahun 1990, sebelum Perjanjian Pelarangan Ranjau, 131 negara memiliki kumpulan yang diperkirakan lebih dari 260 juta ranjau anti-personil. Pengawasan Ranjau Darat sekarang memperkirakan bahwa 50 negara menumpuk sekitar 178 juta ranjau anti-personil. Salah satu perkembangan yang bisa dicatat dalam periode pelaporan ini adalah bahwa Korea Selatan untuk pertama kalinya membeberkan total kumpulannya sebesar 407.800 ranjau anti-personil; berbagai pejabat sebelumnya telah menunjukkan tumpukan sekitar 2 juta ranjau anti-personil.

Para Pihak Negara

Tampaknya sejak Juli 2006, 138 dari 151 Pihak Negara tidak memiliki tumpukan ranjau anti-personil. Total 74 Pihak Negara telah menyelesaikan penghancuran tumpukan mereka. 64 lainnya bisa secara formal tidak pernah memiliki stok, atau tidak diyakini memiliki stok.

Para Pihak Negara secara bersama telah menghancurkan lebih dari 39.5 juta ranjau anti-personil, yang menghancurkan hampir 700.000 ranjau anti-personil yang dikumpulkan

dalam periode pelaporan ini. Para Pihak Negara yang akhir-akhir ini menyelesaikan kewajiban penghancuran tumpukan mereka adalah Guinea-Bissau (Oktober 2005), Nigeria (November 2005), Algeria (November 2005), dan DR Kongo (yang diumumkan pada bulan Mei 2006). Walaupun sebelumnya belum melaporkan suatu perkembangan dalam program penghancuran tumpukannya, DR Kongo mengatakan kepada Para Pihak Negara pada bulan Mei 2006 bahwa negara itu telah menyelesaikan penghancuran terhadap semua ranjau anti-personil yang terkumpul di bawah kendalanya sehingga mampu mengidentifikasi, dan karena itu memenuhi kewajiban perjanjiannya. Juga dikatakan negara itu diharapkan untuk mendapatkan tumpukan ranjau anti-personil tambahan di masa mendatang, yang kemudian akan dihancurkan.

Pengawasan Ranjau Darat memperkirakan bahwa lebih dari 16 juta ranjau anti-personil tetap harus dihancurkan oleh 13 Pihak Negara yang masih harus menyelesaikan program penghancuran tumpukan mereka. Total 11 Pihak Negara dalam proses menghancurkan tumpukan mereka: Afghanistan, Angola, Belarus (3.7 juta), Burundi, Cyprus, Yunani (1.6 juta), Latvia, Serbia dan Montenegro, Sudan, Turki (3 juta) dan Ukraine (6.7 juta). Walaupun mereka belum secara resmi mendeklarasikan tumpukan mereka dalam laporan Pasal 7, Ethiopia dan Guyana juga dianggap menumpuk ranjau anti-personil.

Latvia, yang menjadi Pihak Negara pada tanggal 1 Januari 2006, telah melaporkan bahwa ia akan menghancurkan tumpukannya sebesar 2.410 ranjau pada tahun 2006. Serbia dan Montenegro mulai menghancurkan tumpukan ranjau anti-personil pada bulan Agustus 2005 dan pada Maret 2006 telah menghancurkan 649.217 ranjau, hampir setengah dari tumpukannya. Cyprus menghancurkan 11.000 ranjau anti-personil pada tahun 2005 dan 18.000 lagi dikumpulkan untuk penghancuran tahun 2006. Pada bulan Mei 2006, Afghanistan memastikan kepada Para Pihak Negara semua tumpukan yang diketahui akan dihancurkan pada batas waktu Maret 2007, dan menyatakan bahwa sejak menandatangani Perjanjian Pelarangan Ranjau 65.973 ranjau yang ditumpuk telah dihancurkan.

Setelah menandatangani kontrak dengan Perwakilan Pemeliharaan dan Persediaan NATO (*NATO Maintenance and Supply Agency*) pada bulan Februari 2006, Belarus mulai

menghancurkan tumpukan sisanya sebesar 294.755 ranjau anti-personil, selain dari ranjau PFM. Kementerian Pertahanan Belarus menandatangani “pernyataan persetujuan” untuk menerima bantuan teknis dari Komisi Eropa (*EC/European Commission*) untuk penghancuran 3.37 juta ranjau PFM pada tanggal 6 Mei 2006, dengan tujuan memulai proyek pada bulan Januari 2007. Pada bulan Februari 2006, EC yang memberikan penghargaan tender €3 juta (\$1.2 juta) untuk penghancuran tambahan, yang baru-baru ini diidentifikasi 716.745 ranjau anti-personil tipe-bukan-PFM ditunda. Turki melaporkan bahwa pada bulan Desember 2005 NAMSA dan sebuah perusahaan menandatangani perjanjian untuk membentuk fasilitas baru dalam menghancurkan ranjau yang ditumpuk.

Pada bulan Mei 2006, Angola untuk kedua kalinya menunjukkan negara itu mungkin mengharuskan perpanjangan batas waktu 1 Januari 2007-nya untuk penyelesaian penghancuran tumpukan ranjau anti-personil; akan tetapi, Perjanjian Pelarangan Ranjau itu tidak memungkinkan perpanjangan waktu untuk penghancuran tumpukan itu. Burundi dan Sudan masing menentukan jumlah dan lokasi dari semua ranjau anti-personil yang mereka kumpulkan. Guyana, yang belum menyerahkan laporan Pasal 7 pertamanya yang jatuh tempo Juli 2004, belum pernah memberikan informasi tentang tumpukan atau rencana dan perkembangan penghancurannya. Pengawasan Ranjau Darat telah memperkirakan tumpukan Guyana adalah 20.000 ranjau anti-personil.

Batas Waktu Penghancuran Tumpukan Yang Tertunda

Angola	1 Jan 2007
Afghanistan	1 Mar 2007
Cyprus	1 Juli 2007
Guyana	1 Feb 2008
Belarus	1 Mar 2008
Yunani	1 Mar 2008
Serbia & Montenegro	1 Mar 2008
Turki	1 Mar 2008
Burundi	1 Apr 2008

Sudan	1 Apr 2008
Ethiopia	1 Juni 2009
Latvia	1 Juni 2010
Ukraine	1 Juni 2010

Total 55 Pihak Negara telah mendeklarasikan bahwa mereka tidak memiliki tumpukan ranjau anti-personil, kecuali dalam sejumlah kasus yang diterima untuk tujuan riset dan pelatihan. Sebagai tambahan, ada sembilan negara yang belum menyerahkan laporan Pasal 7 yang secara resmi mendeklarasikan adanya atau tidak adanya tumpukan, tapi tidak diyakini memiliki ranjau apapun: Bhutan, Brunei, Cape Verde, Kepulauan Cook, Equatorial Guinea, Gambia, Haiti, São Tomé e Príncipe, dan Vanuatu.

Para Penandatangan

Tiga penandatangan yang tersisa untuk tumpukan Perjanjian Pelarangan Ranjau sekitar satu juta ranjau anti-personil. Polandia menyatakan tumpukan 984.690 ranjau anti-personil pada akhir tahun 2005; negara itu melepaskan 12.990 ranjau tumpukan kedaluwarsa pada tahun 2005. Indonesia telah memperkirakan tumpukannya 16.000 ranjau anti-personil. Marshall Islands tidak dianggap menumpuk ranjau anti-personil apapun.

Bukan-Penandatangan

Pengawasan Ranjau Darat memperkirakan bahwa lebih dari 160 juta ranjau anti-personil ditumpuk oleh negara-negara bukan-pihak Perjanjian Pelarangan Ranjau. Mayoritas besar dari semua tumpukan ini hanya milik tiga negara: Cina (diperkirakan 110 juta), Rusia (26.5 juta) dan Amerika Serikat (10.4 juta). Negara-negara lain dengan tumpukan besar termasuk Pakistan (diperkirakan 6 juta), India (diperkirakan 4.5 juta) dan Korea Selatan (407.800). Negara-negara lain yang bukan pihak terhadap perjanjian ini yang diyakini memiliki tumpukan besar adalah Burma, Mesir, Finlandia, Iran, Irak, Israel, Korea Utara, Syria, dan Vietnam.

Yang bukan penandatangan yang telah menghancurkan jumlah signifikan ranjau anti-personil, lebih dari 25 juta, utamanya karena mereka telah lewat waktu atau untuk mematuhi Protokol II Yang Diamendemen CCW. Israel untuk pertama kalinya melaporkan bahwa ia

menghancurkan 15.510 ranjau kedaluwarsa yang ditumpuk pada tahun 2005. Pada bulan November 2005, seorang pejabat Cina menyatakan bahwa lebih dari tiga tahun lalu Cina telah menghancurkan hampir 500.000 ranjau darat yang tidak mematuhi Protokol II Yang Diamendemen. Tampaknya dari akhir tahun 1990an sampai 2005, Cina menghancurkan sekitar 2.2 juta ranjau anti-personil yang hilang atau tidak sesuai dengan Protokol II Yang Diamendemen. Rusia telah melaporkan menghancurkan lebih dari 19.5 juta ranjau anti-personil sejak tahun 2000.

Kelompok Bersenjata Bukan-Negara

Selama periode pelaporan ini, NSAGs dilaporkan memiliki tumpukan ranjau anti-personil di Bangladesh, Burma, Kolombia, Republik Demokratis Kongo, India, Pakistan, Somalia, Turki, dan Uganda. Paling sering, semua tumpukan ini dilaporkan sebagai bagian dari penangkapan oleh kekuatan pemerintah. Ranjau darat ditangkap atau dikembalikan oleh SNAGs, atau sumber-sumber yang tidak teridentifikasi, di delapan Pihak Negara: Bangladesh, Bosnia dan Herzegovina, Kolombia, Republik Demokratis Kongo, El Salvador, Filipina, Turki dan Uganda. Hanya DR Kongo melaporkan penangkapan seperti itu dalam laporan Pasal 7-nya; tidak ada dari negara-negara lain telah melaporkan akuisisi atau penghancuran ranjau anti-personil yang ditangkap.

Ranjau-ranjau Yang Ditampung Untuk Riset dan Pelatihan (Pasal 3)

Dari 151 Pihak Negara, 69 menerima lebih dari 227.000 ranjau anti-personil untuk tujuan riset dan pelatihan di bawah pengecualian yang diberikan oleh Pasal 3 Perjanjian Pelarangan Ranjau.

Sedikitnya 71 Pihak Negara telah memilih untuk tidak menerima ranjau apapun, dengan tambahan terakhir dari Republik Demokratis Kongo, Eritrea, Hongaria, Bekas Republik Yugoslav Makedonia, dan Moldova. Pada bulan Juli 2006, FYR Makedonia menghancurkan seluruh tumpukannya sebesar 4.000 rantai yang diterima untuk pelatihan. Selama bulan rapat-rapat antar sesi Mei 2006, Moldova menyatakan ia akan menghancurkan seluruh tumpukannya sebesar 4.000 ranjau yang diterima untuk pelatihan. Selama rapat-rapat antar sesi Mei 2006, Moldova menyatakan bahwa ia akan

menghancurkan semua dari 249 ranjau yang diterimanya antara tanggal 17 Mei dan 31 Juli 2006. Hongaria menghancurkan semua dari 1.500 ranjau yang diterimanya pada bulan Oktober 2005.

Sebelas Pihak Negara belum menjelaskan apakah mereka bermaksud menerima ranjau apapun.

Lima Pihak Negara terhitung untuk hampir sepertiga dari semua ranjau yang diterima: Brazil (16.125), Turki (15.150), Algeria (15.030), Bangladesh (14.999) dan Swedia (14.402).

Total delapan Pihak Negara menerima antara 5.000 dan 10.000 ranjau: Sudan (10.000), Australia (7.266), Yunani (7.224), Kroasia (6.236), Belarus (6.030), Jepang (5.350), Serbia dan Montenegro (5.000), dan Tunisia (5.000). Sudan melaporkan pada bulan Februari 2006 bahwa sebagai tambahan terhadap 5.000 ranjau yang ia sebelumnya telah tunjukkan akan diterima oleh angkatan bersenjataanya, 5.000 ranjau lain akan disimpan oleh Pemerintah Angkatan Bersenjata Rakyat Sudan Bagian Selatan.

Mayoritas Pihak Negara yang menerima ranjau, total 38 negara, menerima antara 1.000 dan 5.000 ranjau. Selama Mei 2006 rapat-rapat Komite Kedudukan Mei 2006, Chile, yang sebelumnya menerima 5.866 ranjau, mengumumkan bahwa ia telah mengambil suatu tinjauan dari program pelatihannya dan jumlah ranjau yang dibutuhkannya, dan telah memutuskan, sebagai tambahan terhadap 300 ranjau yang akan dipakai selama pelatihan pada tahun 2006, untuk menghancurkan 1.292 ranjau anti-personil lain yang tidak lagi dibutuhkan untuk pelatihan.

17 Pihak Negara lain menerima kurang dari 1.000 ranjau. Botswana belum melaporkan jumlah ranjau yang ia terima.

Total 14 Pihak Negara melaporkan pemakaian 3.702 ranjau untuk pelatihan dan tujuan riset pada tahun 2005. Pada tahun 2004, 24 Pihak Negara melaporkan pemakaian 6.761 ranjau. Pada tahun 2003, 17 Pihak Negara Melaporkan memakai 3.112 ranjau.

Sedikitnya 51 Pihak Negara tidak melaporkan memakai ranjau yang diterima apapun untuk pelatihan dan tujuan riset pada tahun 2005: Afghanistan, Algeria, Angola, Argentina, Australia, Bangladesh, Belarus, Bosnia, dan Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burundi,

Kolombia, Republik Kongo, Cyprus, Republik Czech, Djibouti, Ekuador, El Salvador, Perancis, Yunani, Italia, Jordan, Kenya, Latvia, Luxembourg, Mali, Mauritania, Moldova, Namibia, Belanda, Portugal, Romania, Rwanda, Serbia, dan Montenegro, Sierra Leone, Slovakia, Afrika Selatan, Spanyol, Sudan, Suriname, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Kerajaan Inggris, Uruguay, Venezuela, Yemen, Zambia, dan Zimbabwe.

Lima dari 51 negara itu tidak secara pasti melaporkan pemakaian suatu ranjau yang diterima untuk pelatihan, tapi melaporkan jumlah yang lebih kecil daripada laporan Pasal 7 tahun-tahun sebelumnya: Australia, Perancis, Namibia, Belanda, dan Uganda.

Total 36 Pihak Negara tidak, melaporkan pemakaian ranjau apapun pada tahun 2004; 26 tidak memakainya pada tahun 2003; 29 tidak memakai apapun pada tahun 2002.

Sedikitnya 15 Pihak Negara yang menerima lebih dari 1.000 ranjau belum melaporkan memakai ranjau apapun untuk tujuan riset atau pelatihan selama dua tahun atau lebih secara berturut-turut, termasuk Algeria, Cyprus, Republik Czech, Djibouti, Ekuador, Hongaria, Jordan, Kenya, Mozambik, Peru, Portugal, Romania, Tanzania, Thailand, Tunisia, Kerajaan Inggris, Venezuela, Yemen, dan Zambia. Sejumlah negara telah menunjukkan bahwa tujuan untuk mana mereka menggunakan ranjau tidak membutuhkan pemakaian (penghancuran) ranjau.

ICBL percaya bahwa negara-negara yang menerima ranjau anti-personil dan tampaknya tidak menggunakan ranjau apapun untuk tujuan yang diizinkan melanggar pengecualian yang diizinkan dalam Pasal 3.

ICBL telah lama mendesak agar semua negara harus menyatakan tujuan yang dimaksud dan penggunaan dari ranjau-ranjau anti-personil yang diterima di bawah Pasal 3. Para Pihak Negara sepakat untuk mengambil format pelaporan yang secara suka rela baru untuk Formulir D atas ranjau-ranjau yang diterima pada Rapat Keenam dari Para Pihak Negara pada bulan November-Desember 2005. Yang pada mulanya diusulkan secara bersama oleh Argentina dan Chile, format yang dimodifikasi ini memungkinkan Pihak-pihak Negara untuk melaporkan tujuan yang dimaksud dan penggunaan sebenarnya dari ranjau-

ranjau yang diterima di bawah Pasal 3. Sebelas Pihak Negara menggunakan format baru ini untuk tahun kalender 2005.

Tujuh belas Pihak Negara memberikan pernyataan tentang ranjau-ranjau yang mereka terima selama rapat-rapat Komite Kedudukan pada bulan Mei 2006, dengan Bulgaria, Kanada, Kroasia, Jerman, Belanda, Tanzania, Tajikistan, dan Yemen khususnya yang memberikan rincian tentang praktek-praktek nasional mereka.

Pelaporan Transparansi (Pasal 7)

Pasal 7 Perjanjian Pelarangan Ranjau menyatakan bahwa “Masing-masing Pihak Negara harus melapor kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa sesegera mungkin, dan dalam hal apapun tidak lebih lambat dari 180 hari setelah pemberlakuan Konvensi ini untuk Pihak Negara itu” mengenai langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan aspek-aspek Konvensi. Sesudah itu, Pihak-pihak Negara diwajibkan untuk melapor setiap tahun, pada tanggal 30 April, pada tahun kalender sebelumnya.

Tingkat kepatuhan keseluruhan dari Para Pihak Negara yang menyerahkan laporan tindakan transparansi permulaan secara mengherankan 96 persen. Ini bisa dibandingkan dengan 96 persen pada tahun 20-05, 91 persen pada tahun 2004, 88 persen pada tahun 2003, 75 persen pada tahun 2002 dan 63 persen pada tahun 2001.

Dua Pihak Negara telah menyerahkan laporan-laporan permulaan sejak *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005*, Kamerun dan Latvia. Bagi Kamerun, batas waktu penyerahan adalah bulan Agustus 23003.

Enam Pihak Negara mendapatkan batas waktu penundaan. Bhutan (31 Juli 2006), Vanuatu (28 Agustus 2006), Ukraine (28 November 2006), Haiti (28 Januari 2007), Kepulauan Cook (28 Februari 2007), dan Brunei (30 Maret 2007).

Total enam Pihak Negara terlambat dalam menyerahkan laporan pertama mereka: Equatorial Guinea (jatuh tempo 28 Agustus 1999), Cape Verde (30 April 2002), Gambia (28 Agustus 2003), São Tomé e Príncipe (28 Februari 2004), Guyana (31 Juli 2004), dan Ethiopia (28 November 2005).

Untuk tahun kedua, ada penurunan dalam tingkat pemutakhiran tahunan yang diserahkan untuk tahun kalender sebelumnya, yang jatuh tempo pada tanggal 30 April 2006. Sedangkan pada tanggal 1 Juli 2006, total 90 Pihak Negara telah menyerahkan pemutakhiran tahunan untuk tahun kalender 2005; 55 Pihak Negara belum menyerahkan pemutakhiran. Ini sama dengan tingkat kepatuhan 62 persen. Tingkat kepatuhan untuk laporan-laporan tahunan ini untuk tahun kalender 2004 adalah 65 persen, untuk tahun kalender 2003 adalah 78 persen, dan untuk tahun kalender 2002 adalah 62 persen.

Dalam perkembangan yang sangat mendorong, beberapa negara yang bukan pihak terhadap Perjanjian Pelarangan Ranjau telah menyerahkan laporan Pasal 7 secara sukarela, termasuk Kamerun pada tahun 2001, Gambia pada tahun 2002 dan Lithuania pada tahun 2002, ketika mereka menjadi para penandatangan. Kemudian Bukan Pihak Negara Latvia menyerahkan laporan sukarela pada tahun 2003, 2004, dan 2005. Polandia, penandatangan, telah menyerahkan laporan sukarela setiap tahun sejak tahun 2003. Pada bulan Juni 2005, Bukan Pihak Negara Sri Lanka menyerahkan laporan Pasal 7 pertamanya secara sukarela. Laporan itu cukup rinci dalam banyak area, tapi tidak melaporkan ranjau anti-personil yang dikumpulkan. Beberapa negara lain telah menyatakan maksud mereka untuk menyerahkan laporan sukarela, yang paling akhir Armenia dan Maroko, bergabung dengan Azerbaijan, Cina, dan Mongolia.

Tindakan Pelaksanaan Nasional (Pasal 9)

Pasal 9 dari Perjanjian Pelarangan Ranjau tahun 1997 menyatakan, "Masing-masing Pihak Negara harus mengambil semua tindakan hukum administratif, dan lainnya, termasuk penerapan sanksi hukum, untuk menghambat dan menekan aktivitas apapun yang dilarang" oleh perjanjian ini.

Hanya 49 dari 151 Pihak Negara telah memberikan undang-undang dalam negeri yang baru untuk melaksanakan perjanjian ini dan memenuhi kewajiban dalam Pasal 9. Ini merupakan peningkatan dari lima Pihak Negara sejak Publikasi *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005*: Albania, Djibouti, Niger, Serbia, dan Montenegro, dan Lithuania. Total 23 Pihak Negara melaporkan bahwa langkah-langkah dalam mengundang legislasi sedang

dilakukan. Bolivia dan Tanzania memulai proses itu tahun lalu. Akan tetapi, legislasi itu telah dilaporkan berkembang selama lebih dari dua tahun di Bangladesh, Benin, Gabon, Guinea, Jamaica, Mauritania, Namibia, Nigeria, Filipina, Rwanda, Suriname, Swaziland, dan Uganda.

Total 40 Pihak Negara telah menunjukkan bahwa mereka tidak percaya suatu hukum yang baru dibutuhkan untuk melaksanakan perjanjian ini. Argentina, Cyprus, dan Yunani termasuk dalam kategori ini tahun lalu. Argentina dan Guinea-Bissau berkata mereka sedang menyelidiki kemungkinan mengangkat legislasi baru walaupun mereka telah menganggap legislasi yang ada itu cukup. Walaupun Qatar belum mempertimbangkan legislasi baru yang diperlukan karena ia belum pernah memproduksi, menumpuk, atau menggunakan ranjau anti-personil dan tidak terkena-dampak-ranjau, ia telah menetapkan suatu komite nasional untuk memberikan nasehat tentang keharusan untuk legislasi nasional. ICBL percaya bahwa semua Pihak Negara harus mendapatkan legislasi yang memasukkan sanksi hukum untuk suatu pelanggaran potensial di masa mendatang terhadap perjanjian itu dan memberikan pelaksanaan penuh terhadap semua aspek perjanjian itu.

Pengawasan Ranjau darat tidak sadar tentang suatu perkembangan di 41 Pihak Negara dalam mengundang tindakan dalam negeri yang tepat untuk melaksanakan Perjanjian Pelarangan Ranjau.

ICRC telah memproduksi Alat Informasi tentang Perkembangan Legislasi Nasional dalam Melaksanakan Konvensi Pelarangan Ranjau Anti-Personil. Alat ini tersedia dari ICRC dalam bahasa Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, dan juga tersedia di Internet.

Permasalahan Penting Khusus

Membantu dalam Suatu Aktivitas Yang Dilarang oleh Perjanjian Pelarangan Ranjau (Pasal 1)

Pasal 1 Perjanjian Pelarangan Ranjau tahun 1997 mewajibkan Para Pihak Negara untuk “tidak pernah dalam keadaan apapun ... membantu, mendorong atau menyebabkan, dengan cara apapun, seseorang untuk terlibat dalam suatu aktivitas yang dilarang untuk Pihak Negara di bawah Konvensi ini.” Akan tetapi telah terjadi kekurangjelasan, mengenai jenis-jenis tindakan apa yang diizinkan atau dilarang dalam konteks pelarangan untuk

bantuan. Banyak Pihak Negara telah mengetahui keharusan untuk membahas masalah ini dan berbagi pandangan tentang kebijakan dan prakteknya.

Laporan Terakhir dan Program Pekerjaan Presiden yang disepakati pada Rapat Kelima Para Pihak Negara di Bangkok pada bulan September 2003 menyatakan bahwa “rapat ini menyerukan para pihak Negara untuk terus berbagi informasi dan pandangan, khususnya dalam hal pasal 1, 2, dan 3, dengan pandangan untuk mengembangkan pengertian tentang berbagai permasalahan dengan Konferensi Tinjauan Pertama.” Para ketua-bersama dari Komite Kedudukan untuk Status dan Operasi Umum dari Konvensi (Meksiko dan Belanda) pada bulan Februari dan rapat antar sesi Juni 2004 melakukan konsultasi signifikan dalam mencapai pengertian atau kesimpulan atas permasalahan yang berhubungan dengan Pasal 1, tapi sejumlah Pihak Negara tetap menentanginya.

Rencana Pekerjaan Nasional untuk tahun 2000-2009 menunjukkan bahwa Para Pihak Negara akan “bertukar pandangan dan berbagi pengalaman mereka dengan cara yang bekerjasama dan tidak resmi atas pelaksanaan praktis dari berbagai peraturan Konvensi, termasuk Pasal 1, 2, dan 3, untuk terus mengangkat penerapan yang efektif dan konsisten dari semua peraturan ini.”

Operasi Militer Bersama

Pengertian tentang bagaimana Pasal 1 berlaku untuk operasi militer bersama dan arti “membantu” telah mulai muncul. Total 42 Pihak Negara telah mendeklarasikan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan ranjau anti-personil dalam operasi bersama dengan sebuah negara yang bukan pihak terhadap Perjanjian Pelarangan Ranjau yang mungkin menggunakan ranjau anti-personil. Beberapa Pihak Negara telah membuat pandangan mereka diketahui oleh Pengawasan Ranjau Darat sejak bulan Mei 2005:

- Albania menyatakan bahwa “selama operasi militer bersama dengan Negara dan Para Bukan Pihak Negara, Albania tidak menggunakan dan tidak terlibat dalam penggunaan atau pengangkutan ranjau anti-personil.”

- Chad menyatakan bahwa “kami akan menolak suatu peraturan keterlibatan yang mengizinkan penggunaan anti-personil dan akan menolak mengordernya juga. Kami juga akan menolak partisipasi dalam suatu operasi bersama jika kekuatan militer kami mendapatkan suatu keuntungan militer dari penggunaan ranjau anti-personil dan kami tidak akan memberikan keamanan atau pengangkutan untuk ranjau anti-personil.”
- Cyprus menyatakan bahwa Pasal 1 “melarang latihan militer umum dari para pihak negara Konvensi dengan kekuatan bersenjata negara-negara yang belum mensyahkan Konvensi ini.”
- Estonia menyatakan, “Hampir dua tahun yang lalu Belanda mengedarkan suatu bukan-makalah, yang mendaftarkan aktivitas-aktivitas yang bisa dianggap sebagai bantuan. Usul-usul yang didaftarkan dalam bukan-makalah itu bisa diterima Estonia. Pada tanggal 21 Juni 2004 kursi-kursi Komite Kedudukan untuk Status Umum dan Operasi Konvensi juga memperkenalkan bukan-makalah untuk topik ini atas dasar bukan-makalah Belanda, yang diterima Estonia juga.”
- FYR Makedonia menyatakan bahwa negara itu “berhak untuk menolak peraturan keterlibatan apapun yang mengizinkan penggunaan APM dan menolak order-order untuk menggunakannya.”
- Moldova berkata, “Adalah keyakinan kami yang kuat bahwa Para Pihak Negara yang terlibat dalam operasi militer dengan negara-negara lain dari kelompok negara-negara seharusnya tidak: berpartisipasi dalam perencanaan penggunaan ranjau anti-personil; melatih pihak-pihak lain dalam menggunakan ranjau anti-personil; berpartisipasi dalam operasi-operasi di mana keuntungan militer secara langsung diketahui oleh Pihak Negara yang akan didapatkan penggunaan ranjau personil; menyepakati peraturan keterlibatan yang mengizinkan penggunaan ranjau anti-personil; atau meminta pihak-pihak lain untuk menggunakan ranjau-ranjau anti-personil.”
- Slovenia menyatakan bahwa “Kekuatan Bersenjatanya dalam keadaan apapun tidak akan mengambil suatu tindakan yang akan menyebabkan penggunaan ranjau anti-

personil atau memberikan kontribusi untuk penggunaan demikian dalam operasi bersama dengan Negara-negara lain.”

- Yemen menyatakan bahwa “satu pihak tidak bisa berpartisipasi dalam suatu aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan ranjau anti-personil dan harus menolak suatu peraturan keterlibatan yang mengizinkan penggunaan ranjau anti-personil dan menolak order-order untuk menggunakannya, dan menolak partisipasi dalam suatu operasi bersama jika kekuatan militer mereka mendapatkan suatu keuntungan dari penggunaan ranjau anti-personil, dan harus tidak memberikan keamanan atau pengangkutan untuk ranjau AP.”

Sejumlah Pihak Negara telah mendeklarasikan bahwa hanya partisipasi “aktif” atau “langsung” dalam operasi bersama di mana ranjau-ranjau anti-personil dilarang; setiap pengertian negara tentang apa yang membentuk bantuan “aktif” atau “langsung” beragam. Australia secara resmi telah mendeklarasikan bahwa diizinkan untuk memberikan “dukungan tidak langsung seperti pemberian keamanan untuk personil dari sebuah Negara yang bukan pihak terhadap Konvensi yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas [yang dilarang] seperti itu,” dengan mengasumsikan sebelumnya termasuk peletakkan ranjau anti-personil.

Penumpukan Transit dan Di Luar Negeri

Total 31 Pihak Negara telah mendeklarasikan mereka melarang pengiriman, penumpukan di luar negeri, atau menguasai ranjau anti-personil luar negeri pada teritori nasional. Beberapa Pihak Negara telah membuat pandangan mereka diketahui oleh Pengawasan Ranjau Darat sejak Mei 2005:

- Albania menyatakan ia “melarang pengiriman ranjau anti-personil dalam teritorinya dan penumpukan luar negeri di Albania untuk ranjau anti-personil.”
- Cyprus menyatakan, “Arti dari istilah ‘membantu’, yang termasuk dalam Pasal 1 Konvensi, harus diterjemahkan demikian: (a) ia melarang penyimpanan ranjau anti-personil di teritori negara lain, di mana negara itu menerapkan wilayah hukumnya; (b) ia melarang pengapalan ranjau anti-personil oleh negara-negara bukan pihak Konvensi, melalui teritori negara-negara yang telah mengesahkan Konvensi....”

- Estonia menyatakan, “Pada tanggal 21 Juni 2004 kursi-kursi Komite Kedudukan untuk Status Umum dan Operasi Konvensi juga memberikan bukan-makalah tentang topik tertentu ini atas dasar bukan-makalah Belanda, yang diterima Estonia juga.”
- FYR Makedonia menyatakan bahwa perjanjian ini “melarang transit APM luar negeri, melintasi, atau melalui teritori di bawah wilayah hukum atau kendali pihak negara, dan melarang penumpukan di luar negeri untuk APM di teritori di bawah wilayah hukum atau kendali suatu Pihak Negara.”
- Moldova menyatakan, “Kami kukuh berada di belakang pandangan Pasal 1 yang melarang transit ranjau anti-personil melintasi, atau penumpukan di luar negeri ranjau anti-personil di teritori di bawah wilayah hukum atau kendali Negara Pihak.”
- Yemen berkata ia mendukung pandangan bahwa Perjanjian Pelarangan Ranjau melarang transit “ranjau anti-personil melintasi, atau penumpukan di luar negeri ranjau anti-personil di teritori di bawah wilayah hukum atau kendali dari sebuah Pihak Negara.”

Tajikistan merupakan Pihak Negara satu-satunya yang mendeklarasikan dalam Pasal 7 laporan tindakan transparansi jumlah ranjau anti-personil yang terkumpul oleh sebuah Bukan Pihak Negara di teritorinya. Kekuatan Rusia memiliki 18.200 ranjau anti-personil di Tajikistan. Jerman, Jepang, Qatar dan Kerajaan Inggris telah menyatakan bahwa stok ranjau anti-personil AS di negara mereka tidak berada di bawah wilayah hukum nasional atau kendali mereka.

Ranjau dengan Pemicu Peka dan Alat Anti-senggol (Pasal 2)

Sejak kesimpulan negosiasi Perjanjian Pelarangan Ranjau, banyak Pihak Negara, ICBL dan ICRC telah menekankan bahwa, menurut definisi perjanjian, suatu ranjau – bahkan jika diberi label sebagai ranjau anti-kendaraan – dilengkapi dengan pemicu atau alat anti-senggol yang menyebabkan ranjau itu meledak oleh tindakan tidak disengaja atau tindakan tidak bersalah dari seseorang dianggap sebagai ranjau anti-personil dan karena itu dilarang. Akan tetapi, untuk sejumlah kecil Pihak Negara hal ini tetap merupakan masalah yang diperdebatkan. Cara di mana Para Pihak Negara sepakat – atau tidak sepakat –

tentang ranjau-ranjau apa yang dilarang mungkin memiliki suatu dampak yang signifikan pada bagaimana Perjanjian Pelarangan Ranjau itu dilaksanakan dan diuniversalkan.

26 Pihak Negara berikut telah menyatakan pandangan bahwa suatu ranjau, walaupun ada label atau maksud disainnya, yang bisa dipicu oleh tindakan yang tidak disengaja dari seseorang merupakan ranjau anti-personil dan dilarang: Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brazil, Kanada, Columbia, Estonia, Jerman, Guatemala, Kenya, Irlandia, FYR Makedonia, Irlandia, Meksiko, Moldova, Mozambik, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Swiss, Yemen, dan Zambia. Empat Pihak Negara (Denmark, Perancis, Jepang, dan Kerajaan Inggris) telah berkata bahwa Perjanjian Pelarangan Ranjau sama sekali tidak berlaku untuk ranjau anti-kendaraan, tanpa memandang penggunaannya dengan pemicu peka atau alat anti-senggol.

Jumlah Pihak Negara yang semakin besar telah membuat pandangan mereka diketahui untuk Pengawasan Ranjau Darat dalam komunikasi sejak Mei 2005:

- Albania menyatakan ia “memiliki tumpukan ranjau anti-kendaraan dengan pemicu peka (kabel putus) dan sebenarnya ada perencanaan untuk penghancurannya dan semua ranjau ini saat ini juga digunakan selama pembuangan amunisi lama.”
- Kroasia memberitahu Para Pihak Negara bahwa ia telah menghilangkan batang ungkit dari ranjau anti-kendaraan TMRP-6-nya. Dikatakan bahwa ranjau itu “sepenuhnya sesuai” dengan pernyataan dalam Pengawasan Ranjau Darat. Lembar Fakta bahwa “sebuah ranjau yang bergantung pada kabel senggol, kabel putus, atau batang pengungkit sebagai mekanisme satu-satunya harus dianggap sebagai ranjau anti-personil.”
- Estonia menyatakan bahwa “ranjau anti-kendaraan yang bisa dihidupkan secara tidak sengaja oleh keberadaan, kedekatan, atau kontak dengan orang, harus diperlakukan sebagai ranjau anti-personil, tanpa memandang pertanyaan apakah pemicuan itu disebabkan oleh pemicu peka atau alat anti-senggol peka. Dari titik pandang kami, ranjau-ranjau seperti itu karenanya dilarang.

- Seorang pejabat Guatemalan mengatakan kepada Pengawasan Ranjau Darat bahwa Guatemala mendukung penerjemahan ICBL dan banyak Pihak Negara mengenai Pasal 2.
- Kenya menyatakan bahwa “suatu ranjau yang berfungsi atau memiliki kapasitas untuk berfungsi sebagai ranjau anti-personil, atau bisa dimodifikasi untuk berfungsi demikian, harus dianggap sebagai ranjau anti-personil dan karena itu dilarang di dalam arti ranjau dan secara harafiah dan semangat Konvensi. Kami karena itu menganggap ranjau dengan pemicu peka dan semua ranjau anti-kendaraan dengan alat anti-senggol termasuk di bawah Pasal 2 dan karena itu dilarang di bawah Konvensi. Kami memberikan dukungan kami terhadap penerjemahan yang diberikan oleh Kampanye Internasional Pelarangan Ranjau Darat dan Komite Internasional Palang Merah dalam hal ini.”
- FYR Makedonia menyatakan bahwa “ranjau anti-kendaraan dengan alat anti-senggol atau pemicu peka secara efektif APM dilarang di bawah Konvensi Ottawa.”
- Moldova menyatakan, “Adalah keyakinan kukuh kami bahwa semua ranjau, termasuk ranjau anti-kendaraan, yang dirancang untuk dipicu dengan keberadaan, kedekatan, atau kontak dengan seseorang dan akan melumpuhkan, melukai, atau membunuh satu atau lebih orang, sesungguhnya masuk dalam liputan Konvensi Ottawa dan karena itu dilarang oleh Konvensi. Kami sepenuhnya berbagi pandangan bahwa ranjau yang dilengkapi dengan pemicu peka atau alat anti-senggol, yang mampu diaktifkan oleh tindakan yang tidak disengaja dari seseorang, harus dianggap sebagai ranjau anti-personil dan dilarang di bawah Konvensi, tanpa memandang label yang dilekatkan yang mungkin menyebutnya sebagai ranjau anti-kendaraan, dan jumlah masing-masing bahan peledak yang menyertainya.”
- Slovenia menyatakan bahwa “ranjau anti-kendaraan yang dilengkapi dengan alat anti-senggol, yang aktif ketika usaha diberikan untuk mengotak-atik atau dalam hal lain secara sengaja mengganggu ranjau anti-kendaraan, dan ranjau anti-kendaraan dengan alat pemicu, yang menyebabkan ranjau itu berfungsi sebagai ranjau anti-

personil, masuk ke dalam Pasal 2 Konvensi Ottawa dan karena itu dilarang oleh Konvensi.”

- Yemen menyatakan ia mendukung pandangan bahwa “suatu ranjau bahkan jika disebut ranjau anti-kendaraan yang dilengkapi dengan pemicu peka atau alat anti-senggol peka yang menyebabkan ranjau meledak karena tindakan tidak disengaja dari seseorang dianggap sebagai ranjau anti-personil dan karena itu dilarang.”

Tampaknya ada kesepakatan, dengan sejumlah pengecualian, bahwa sebuah ranjau yang bergantung pada kabel senggol, kabel putus, atau batang pengungkit sebagai mekanisme pemicu satu-satunya harus dianggap sebagai ranjau anti-personil. Akan tetapi, Republik Czech telah menyatakan ia tidak menganggap penggunaan kabel senggol dengan ranjau anti-kendaraan sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Pelarangan Ranjau, dan perusahaan Czech telah menawarkan penjualan ranjau-ranjau dengan pemicu kabel senggol. Republik Czech juga telah mengakui memiliki pemicu batang ungkit, tapi telah menyatakan bahwa ranjau-ranjau yang mampu menggunakannya dianggap tidak berlaku dan akan dihentikan dalam waktu 15 tahun. Slovenia memiliki ranjau-ranjau TMRP-6 yang dilengkapi dengan pemicu tekanan dan batang pengungkit, dan sedang mempertimbangkan bagaimana menyelesaikannya. Swedia memiliki ranjau anti-kendaraan dengan batang pengungkit, tapi belum secara resmi menyatakan pandangan tentang legalitasnya di bawah Perjanjian Pelarangan Ranjau.

Beberapa Pihak Negara telah melaporkan bahwa mereka telah menghilangkan dari pelayanannya dan menghancurkan item-item alat perang yang, ketika digunakan dengan ranjau, bisa menyebabkannya berfungsi sebagai ranjau anti-personil. Belgia telah melarang alat pemicu pelepasan tekanan dan ketegangan (pemicu) yang digunakan sebagai jebakan-ranjau. Perancis telah menghancurkan sejumlah pemicu pelepasan tekanan dan tekanan yang tidak dipastikan. Jerman dan Slovakia telah menghentikan dan menghancurkan mekanisme anti-angkat yang bisa dilekatkan ke ranjau. Slovakia telah melarang penggunaan pemicu Ro-3 sebagai alat anti-senggol. Belarus telah berkomitmen untuk menghancurkan pemicu tipe-MUV yang digunakan sebagai alat anti-senggol dan jebakan-ranjau.

Ranjau Claymore dan OZM-72 Yang Dipicu-perintah

Jenis-jenis ranjau tertentu tidak dilarang oleh Perjanjian Pelarangan Ranjau dalam semua contoh ini karena dirancang untuk dimampukan oleh pemicuan-perintah dengan listrik (yang diizinkan di bawah perjanjian ini) dan dipicu-korban dengan menggunakan pemicu kabel senggol pelepasan tekanan/tegangan secara mekanis (yang dilarang oleh perjanjian ini). Di masa lalu, pilihan-pilihan untuk kedua cara penggunaan itu telah sering dikemas dengan ranjau.

Agar sesuai dan sepenuhnya transparan, Para Pihak Negara harus mengambil langkah-langkah, dan melaporkannya dalam laporan Pasal 7, untuk memastikan bahwa cara pengaktifan-korban secara permanen dihilangkan dan angkatan bersenjata mereka diperintahkan tentang kewajiban hukum mereka.

Ranjau yang paling umum dalam kategori ini adalah *munitions* fragmentasi arah tipe-Claymore. M18A1 (yang produksinya berasal dari Amerika Serikat tapi juga ditiru secara luas atau diberi izin-produksi oleh negara-negara lain), seri MON (yang diproduksi di USSR sebelumnya dan negara-negara Pakta Warsaw lain) dan MRUD (diproduksi di Yugoslavia sebelumnya) merupakan contoh-contoh yang dikenal baik dan secara luas dimiliki oleh ranjau-ranjau fragmentasi arah jenis-Claymore.

Beberapa Pihak Negara telah memperluas perintah ini dan perbedaan pengaktifan target untuk tipe ranjau fragmentasi *bounding*, OZM-72, yang juga memiliki semua kemampuan penggunaan-ganda yang melekat ini. Lithuania dan Moldova telah melaporkan modifikasi sejumlah kecil ranjau OZM-72 sehingga tidak lagi menganggapnya ranjau anti-personil, dan tidak memperhitungkannya sebagai ranjau yang harus dihancurkan atau ranjau-ranjau yang diterima untuk pelatihan. Belarus memutuskan untuk merubah lebih dari 200.000 ranjau OZM-72 menjadi *munitions* dipicu-perintah.

Total 30 Pihak Negara telah mendeklarasikan bahwa mereka menerima stok ranjau tipe-Claymore dan/atau OZM-72. Sejumlah Pihak Negara telah mengklarifikasi posisi mereka sejak Mei 2005:

- Bosnia dan Herzegovina memasukkan 15.343 ranjau fragmentasi arah MRUD yang dimiliki oleh kekuatan angkatan bersenjata dalam seluruh ranjau yang diterima untuk pelatihan.
- Denmark menyatakan pada bulan Maret 2006, “Kabel senggol dan alat kabel senggol telah dihilangkan dari Ranjau Claymore Denmark dan telah digantikan dengan pemicu listrik. Karena itu semua ranjau ini hanya bisa diaktifkan dengan perintah.”
- Latvia membeberkan memiliki ranjau seri MON yang dipicu-perintah dalam laporan transparansi pertamanya sebagai Pihak Negara, dan berkomitmen “untuk tidak menggunakannya sebagai ranjau anti-personil.”
- Nikaragua melaporkan pada tahun 2005 bahwa total 121 ranjau seri MON yang sebelumnya dilaporkan sebagai ranjau yang diterima untuk pelatihan telah dikeluarkan dari daftar karena semua ranjau ini “tidak termasuk dalam pembatasan yang ditetapkan oleh Konvensi Ottawa.”
- Kepala pusat pekerjaan ranjau Thailand mempertanyakan kembali pada tahun 2005 agar semua unit telah dibahas bahwa semua ranjau Claymore harus digunakan hanya dalam bentuk yang dipicu-perintah. Akan tetapi, tidak ada modifikasi fisik telah diambil untuk memastikan penggunaan bentuk yang dipicu-perintah.
- Turki menyatakan dalam bulan Mei 2006 bahwa “komponen-komponen pengaktifan korban ranjau Claymore M18 akhir-akhir ini telah ditambahkan dalam daftar ranjau untuk dihancurkan dan langkah-langkah yang diperlukan telah diambil untuk stok hanya ranjau-ranjau Claymore M18 yang dipicu-perintah.” Pada mulanya negara ini mendeklarasikan memiliki 18.236 ranjau Claymore M18.

Sejumlah Pihak Negara telah memilih untuk secara fisik memodifikasi ranjau dengan hanya menerima pemicu listrik dan sejumlah negara telah secara fisik menghilangkan dan menghancurkan rakitan kabel senggol dan penutup ledak yang tepat. Belarus, Denmark, Lithuania, Moldova, Selandia Baru dan Swedia telah melaporkan tindakan-tindakan yang diambil untuk memodifikasi semua ranjau ini dalam laporan Pasal 7 mereka. Dalam hal

komponen-komponen yang dipicu-korban untuk OZM-72, Belarus menyatakan, “Tipe *munition* ini saat ini direvisi: semua sub-bagian yang dirancang untuk pemicu tidak terkendali harus dikeluarkan dan dihancurkan.”

Tiga puluh Pihak Negara telah mendeklarasikan bahwa mereka tidak memiliki atau telah menghancurkan ranjau tipe-Claymore dan/atau OZM-72. Albania, Chad, Cyprus, FYR Makedonia dan Moldova merupakan tambahan terakhir pada daftar Para Pihak Negara yang mendeklarasikan bahwa mereka tidak memiliki ranjau tipe-Claymore. Pada bulan Mei 2006, Moldova menyatakan bahwa ia akan menghancurkan 249 ranjau seri OZM-72 dan MON yang sebelumnya diterima untuk tujuan pelatihan. Dicatat bahwa “dalam waktu dekat ini pelatihan non-konvensional (seperti simulator ranjau anti-personil dan program-program komputer relevan lainnya) akan digunakan sebagai gantinya....”

Mayoritas besar Para Pihak Negara, total 91, belum mendeklarasikan apakah kekuatan mereka memiliki semua tipe ranjau ini. Walaupun mayoritas Pihak Negara ini telah mendeklarasikan bahwa mereka tidak memiliki tumpukan ranjau anti-personil apapun, dalam sejumlah kasus tidak bisa diasumsikan bahwa ini termasuk ranjau yang dipicu-perintah penggunaan-ganda.

Pelaporan dan Penghancuran Tumpukan Yang Ditangkap atau Baru Ditemukan (Pasal 4)

Sejumlah Pihak Negara secara rutin menemukan, menangkap, menahan atau menerima tempat persembunyian persenjataan yang diserahkan yang memuat ranjau anti-personil. Burundi, DR Kongo, Kamboja, Kenya, Filipina, Serbia, dan Montenegro, Uganda, dan Yemen sejauh ini belum melapor. Kerja #15 dari Rencana Kerja Nairobi menyatakan: “Ketika tumpukan yang sebelumnya tidak diketahui ditemukan setelah batas waktu penghancuran tumpukan telah lewat, laporan penemuan seperti itu sesuai dengan kewajiban mereka di bawah Pasal 7, mengambil manfaat dari cara tidak resmi lain untuk berbagi informasi itu dan menghancurkan semua ranjau ini sebagai prioritas yang mendesak.”

Para Pihak Negara sebagian besar gagal dalam melaporkan semua penemuan ini atau pekerjaan yang dihasilkannya. Ketika Para Pihak Negara gagal untuk melaporkan ranjau-

ranjau anti-personil yang ditangkap, ditahan, atau diserahkan, tidak ada informasi tentang apakah semua ranjau ini ditempatkan ke dalam tumpukan, diterima untuk tujuan pelatihan, atau dihancurkan atau tidak. Adalah tanggungjawab Para Pihak Negara untuk memperhitungkan penempatan ranjau darat anti-personil yang ditangkap, ditahan, atau diserahkan setelah penyelesaian program penghancuran tumpukannya. Untuk menjamin informasi yang lengkap, Para Pihak Negara harus mengungkapkan dalam laporan Pasal 7 rincian tentang ranjau darat anti-personil yang baru ditemukan.

Pekerjaan Ranjau

Sesi ini meninjau ulang keberhasilan-keberhasilan dan tantangan-tantangan utama dari program-program di seluruh dunia yang berusaha untuk menyelesaikan kontaminasi dari ranjau darat dan sisa bahan peledak dari perang. Sesi ini utamanya didasarkan pada analisa data yang dikumpulkan oleh Pengawasan Ranjau Darat dalam perjalanan riset untuk 101 ranjau/negara-negara yang terkena-dampak-ERW dan area-area pada tahun 2005 dan pertengahan pertama tahun 2006. Laporan-laporan tentang masing-masing dari semua negara ini menjelaskan, secara relevan, masalah ranjau darat dan ERW, koordinasi dan manajemen program kerja ranjau, dan perkembangan pada penghapusan ranjau selama periode pelaporan ini.

Perhatian khusus diberikan untuk pengawasan perkembangan Para Pihak Negara ke arah memenuhi kewajiban mereka (terbatas-waktu) di bawah Pasal 5 Perjanjian Pelarangan Ranjau. Kepatuhan lengkap dan pada waktunya terhadap kewajiban ini mewakili tantangan terbesar terhadap integrasi perjanjian selama lima tahun ke depan. Batas waktu Pasal 5 pertama kali untuk Para Pihak Negara dalam melengkapi pembebasan ranjau anti-personil di area-area yang bermuatan ranjau di bawah wilayah hukum atau kendali mereka kurang dari tiga tahun saja – tapi sumber daya-sumber daya keuangan menjadi lebih sedikit. Memaksimalkan keefektifan dan efisiensi, memberikan penggunaan terbaik untuk sumber daya yang tersedia, seharusnya menjadi sasaran dari setiap program kerja ranjau.

Prestasi Utama dari Program Kerja Ranjau

Total lebih dari 740 kilometer kuadrat – area yang lebih besar dari seluruh teritori dari sejumlah negara – dihilangkan dengan program kerja ranjau pada tahun 2005. Ini berarti lebih banyak tanah yang lebih berbahaya dan yang diduga berbahaya dibebaskan dari kontaminasi dalam satu tahun saja daripada kapanpun sejak permulaan penghapusan ranjau modern pada akhir tahun 1980an. Hal ini dipelopori oleh peningkatan usaha dengan beberapa program kerja ranjau untuk mencapai lebih banyak “pengurangan area” (identifikasi tanah yang diduga terkontaminasi yang sebenarnya tidak memuat baik ranjau

maupun ERW, tanpa beralih kepada operasi pembebasan yang menghabiskan-waktu dan yang mahal). Pada tahun 2005, hanya tiga program kerja ranjau utama – Bosnia dan Herzegovina, Kamboja dan Yemen – yang menurunkan batasan dugaan kontaminasi sebesar hampir 340 kilometer kuadrat. Pengurangan area dalam semua program ini di mana semua angka itu tersedia terhitung 55 persen dari total area yang dihilangkan ranjaunya di seluruh dunia pada tahun 2005.

Dalam kerangka pembebasan ranjau yang sebenarnya, total hampir 145 kilometer kuadrat dari area-area berranjau dan 190 kilometer kuadrat kancah peperangan dibebaskan pada tahun 2005; akan tetapi, semua angka ini mungkin memasukkan unsur pengurangan area karena beberapa tampaknya menyebar di antara teknik-teknik penghapusan ranjau yang berbeda. Pada 470.000 ranjau darat – di mana mayoritas besar, sekitar 450.000, merupakan ranjau anti-personil – dan lebih dari 3.75 juta alat bahan peledak dipindahkan dan dihancurkan. Tabel di bawah ini menetapkan prestasi dari program-program kerja utama pada tahun 2005.

Semua angka ini mencerminkan keberhasilan tertentu dalam sejumlah program. Empat program, Kamboja, Afghanistan, Bosnia dan Herzegovina, dan Yemen, masing-masing melepaskan lebih dari 100 kilometer kuadrat tanah selama tahun itu.

Di **Kamboja**, area yang dibebaskan oleh perwakilan penghapusan ranjau kemanusiaan pada tahun 2005 meningkat lebih dari 63 persen dari tahun sebelumnya, utamanya sebagai akibat dari usaha oleh Pusat Kerja Ranjau Kamboja, yang menggandakan area yang ia bersihkan. Para operator lain di Kamboja mengembangkan suatu strategi baru untuk mempercepat pengurangan area, yang mengetahui tanah yang sebelumnya ditentukan sebagai diduga-berranjau, tapi yang telah ditanami oleh orang-orang desa, sebagai beresiko rendah jika tidak ada insiden/kecelakaan ranjau telah terjadi. Pemerintah menyetujui strategi ini pada bulan Mei 2006 dan berkata ia ingin para operator untuk memfokuskan usaha pada pembebasan tanah yang paling padat terkontaminasi. Pada akhir tahun 2005, *HALO Trust* telah memetakan lebih dari 50 kilometer kuadrat tanah yang berproduksi baik sehingga Pekerjaan Ranjau Kamboja dan Pihak Berwenang Bantuan Untuk

Korban (CMAA/*Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority*) sepakat untuk memindahkan dari database tanah yang diduga. Reformasi dan strukturisasi pada CMAA pada tahun 2005 juga dianggap oleh para donor sebagai mendukung trend untuk produktivitas yang lebih besar.

Perkembangan oleh masyarakat lokal dalam mengembalikan tanah yang sebelumnya dianggap diduga berranjau menjadi penggunaan yang produktif dan penyebaran geografis yang sempit dari insiden ranjau telah mempertajam debat tentang berapa lama yang dibutuhkan Kamboja untuk bebas dari dampak ranjau. HALO Trust percaya bahwa area-area prioritas yang diidentifikasi oleh komunitas-komunitas yang terkena-dampak-ranjau bisa dibebaskan dalam waktu lima tahun – tapi hanya jika sumber daya-sumber daya pembebasan terkonsentrasi di semua area itu. Lebih lanjut, sebuah studi yang dilakukan untuk CMAA atas sisa bahan peledak perang, yang diselesaikan pada tahun 2006, memproyeksikan penurunan tajam pada kecelakaan ranjau di tahun-tahun yang akan datang dan menekankan keharusan untuk menangani sisa ancaman jangka panjang dari ERW juga ranjau.

Di **Afghanistan**, kecepatan penghapusan ranjau juga dipercepat selama tahun 2005; total area yang dihilangkan ranjaunya meningkat lebih dari sepertiga (dibandingkan dengan tahun 2004) menjadi hampir 140 kilometer kuadrat, menurut Pusat Kerja Ranjau PBB untuk Afghanistan (*UNMACA/UN Mine Action Center for Afghanistan*). Yang bisa dicatat, peningkatan ini dicapai walaupun hambatan-hambatan yang lebih besar diterapkan oleh keamanan yang menurun.

Di **Bosnia dan Herzegovina**, survey yang sistematis menyatakan 147 kilometer kuadrat yang mengesankan tanah yang diduga berbahaya pada tahun 2005, walaupun kurang daripada target tahunan yang ditetapkan oleh rencana strategis (170 kilometer kuadrat). Survey sistematis merupakan pengukuran umum non-teknis yang melibatkan analisa perbandingan data yang dikumpulkan oleh pusat kerja ranjau selama lebih dari 10 tahun, disain *polygon* (pemetaan yang lebih tepat untuk perimeter area-area berranjau) dan

produksi data geografis yang tepat untuk area-area yang terkontaminasi, yang karenanya menurunkan jumlah tanah yang diduga.

Di **Yemen**, pada bulan April 2006, survey dan operasi pembebasan telah menghilangkan ranjau-ranjau dan ERW 12 dari 14 komunitas yang sangat-terkena-dampak-ranjau, 62 dari 86 komunitas yang terkena-dampak-menengah-ranjau dan 107 komunitas dengan dampak-rendah, dari total 594 yang teridentifikasi oleh survey dampak ranjau darat pada tahun 2000 dan survey-survey selanjutnya. Penghapusan ranjau pada tahun 2005, yang menyatakan lebih dari 100 kilometer kuadrat tanah – suatu catatan untuk negara ini.

Guatemala dan **Suriname** juga melaporkan prestasi penting pada tahun 2005 – penyelesaian pembebasan semua area berranjau yang memuat ranjau anti-personil sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Pelarangan Ranjau (*lihat di bawah*). Mereka bergabung dua Partai Negara satu-satunya yang membuat deklarasi sebelumnya dan secara bulat telah memenuhi kewajiban Pasal 5 mereka: **Costa Rica** dan **Honduras**.

Prestasi-prestasi lain yang bisa dicatat selama tahun 2005 dan awal 2006 dilaporkan di:

Abkhazia: Jumlah tanah yang dibebaskan dan berkurang dari ranjau oleh HALO Trust, lebih dari 2.5 kilometer kuadrat, merupakan suatu catatan untuk program di sana; selama tahun 2005, HALO mendeklarasikan daerah Gali dan lembah sungai Gumista dekat Sokhumi bebas-dampak ranjau.

China: Sebuah proyek untuk membebaskan ranjau data dari perbatasannya dengan Vietnam diluncurkan pada tahun 2005.

Jordan: Mempercepat pembebasan ranjau, pihak berwenang pekerjaan ranjau nasional memasukkan LSM penghapusan ranjau internasional, Bantuan Rakyat Norwegia, pada bulan Oktober 2005.

Laos: Operator nasional UXO Lao melaporkan peningkatan yang tajam pada produksi tahun 2005, menghapus ranjau 15.7 kilometer kuadrat tanah, 25 persen lebih banyak daripada tahun sebelumnya.

Libia: Program nasional untuk penghapusan ranjau dan pembebasan tanah dimulai pada bulan April 2005.

Peru dan Ekuador: Memulai operasi pembebasan di area sungai Chira pada bulan April 2006.

Rwanda: Setelah beberapa tahun tidak aktif, program penghapusan ranjau diberikan permulaan-tendangan dengan pelatihan dan memperlengkapi 140 alat penghapus ranjau pada 2006, dan penyebaran tiga penasehat teknis dari LSM internasional, *Mines Awareness Trust/Wali Kesadaran Ranjau*.

Korea Selatan: Para serdadu memulai pembebasan tiga area ranjau di Zona Kontrol Sipil dan tujuh basis militer.

Sri Lanka: Para operator menghilangkan ranjau 19.5 kilometer kuadrat lebih dari lima kali banyaknya daripada tahun 2004, sebagai akibat dari area peningkatan usaha pengurangan ranjau dan peningkatan kapasitas pembebasan manual dan mekanis.

Taiwan: Hukum diundangkan pada bulan Juni 2006 dengan batas waktu tujuh tahun untuk menyelesaikan pembebasan semua ranjau darat dari pulau Kinmen dan Matsu.

Thailand: Pusat kerja ranjau memulai pengurangan area ranjau pada tahun 2005 dalam suatu tawaran untuk mempercepat penghapusan ranjau, dan area yang dilepaskan (5.9 kilometer kuadrat) hampir berlipat tiga dibandingkan dengan tahun 2004. Percepatan yang cepat pada pembebasan tanah juga dilaporkan pada kuartal pertama tahun 2006, sebagian besar melalui pengurangan area ranjau – 4.3 kilometer kuadrat merupakan area-pengurangan dalam tiga bulan pertama, hampir sama banyaknya dengan seluruh yang ada pada tahun 2005.

Ukraine: Kelompok kerja antar perwakilan dalam mempersiapkan program kerja ranjau nasional dibentuk pada bulan Januari 2006.

Tantangan Utama untuk Program Kerja Ranjau

Walaupun dengan adanya prestasi dari banyak program Pekerjaan Ranjau, tantangan-tantangan besar menghadapi semua program ini. Tiga dari tantangan ini adalah: merespon secara efektif kebutuhan komunitas yang terkena-dampak-ranjau; memenuhi persyaratan

Pasal 5; dan memastikan kepemilikan nasional dan pemerintahan yang baik untuk program kerja ranjau. Semua tantangan ini digariskan di bawah ini.

Merespon Secara Efektif Kepada Kebutuhan Komunitas

Mengukur Masalah Ranjau

Mengidentifikasi sifat dan batasan kontaminasi ranjau dan ERW dan dampaknya pada penduduk sipil merupakan prasyarat untuk respon kerja ranjau nasional yang efektif. Jika para pelaku yang relevan tidak sepakat tentang hal ini, mereka tidak mungkin mengambil respon-respon yang terkodiner dan efektif. Sejumlah negara telah lebih terampil daripada yang lain dalam menentukan secara akurat masalah yang akan diselesaikan.

Riset Pengawasan Ranjau Darat menunjukkan bahwa 78 negara dan delapan area lain yang terkena-dampak-ranjau oleh area berranjau. Ada tambahan 14 negara dan area yang utamanya terkena-dampak-ranjau oleh sisa bahan peledak perang; beberapa mungkin juga memiliki tingkat sisa kontaminasi ranjau.

Pasal 5 Perjanjian Pelarangan Ranjau mengharuskan setiap Pihak Negara untuk melakukan “setiap usaha” untuk mengidentifikasi semua area di bawah wilayah hukum atau kontrolnya yang memuat ranjau anti-personil, sebelum dan dalam persiapan pembebasan. Ini menunjukkan bahwa Pihak Negara harus melakukan survey yang tepat terhadap area-area yang diduga berranjau. Sampai akhir-akhir ini, bentuk yang paling luas digunakan untuk “pengukuran kebutuhan” adalah Survey Dampak Ranjau Darat (*LIS/Landmine Impact Survey*), sebagaimana yang dipromosikan oleh Kelompok Kerja Survey. Tampaknya LIS kekurangan dukungan dalam sejumlah program kerja ranjau. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk akurasi, biaya, waktu dan sumber daya yang digunakan. Banyak Survey Dampak Ranjau Darat telah menimbulkan perkiraan berlebihan terhadap batasan tanah yang terkontaminasi.

Di **Mozambik**, misalnya, akurasi LIS tahun 2001 dipertanyakan dari permulaan. LIS menghasilkan perkiraan area yang terkena-dampak-ranjau, 562 kilometer kuadrat, yang beberapa operator utama anggap melebih-lebihkan. Perkiraan baru sebesar 149 kilometer kuadrat dihasilkan oleh Lembaga Penghapusan Ranjau Nasional, yang didasarkan pada

hasil LIS dan memperhitungkan survey-survey ulang dan pembebasan ranjau selanjutnya, pada akhir tahun 2005. Pembebasan ranjau sejak LIS hanya diperhitungkan untuk porsi kecil dari penurunan ini. Perkiraan baru mungkin masih secara signifikan melebihi-lebihkan batasan kontaminasi ini. Perhitungan dari survey-survey ulang oleh tiga operator pembebasan menunjukkan bahwa batasan sebenarnya dari area-area yang terkena-dampak-ranjau jauh lebih rendah. Menurut pejabat Program Pembangunan PBB (UNDP/UN Development Program) di Mozambik, “mulai tahun 2001, 423 kilometer kuadrat yang dikunjungi oleh para operator 1.047 area yang diidentifikasi-LIS, hanya 17.5 kilometer kuadrat tanah membutuhkan pembebasan, bisa diasumsikan dengan hati-hati, bahwa sisanya 149 kilometer kuadrat yang membutuhkan pembebasan mungkin ternyata hanya enam kilometer kuadrat.”

Di **Bosnia dan Herzegovina**, dengan cara yang sama, pejabat di sana mengklaim berdasarkan pada LIS tahun 2003 total area berpotensi terkontaminasi oleh ranjau dan UXO adalah sekitar 2.100 kilometer kuadrat. Akan tetapi, pada bulan November 2005, wakil direktur Pusat Kerja Ranjau Bosnia dan Herzegovina merujuk kepada keharusan untuk membebaskan hanya sekitar 400 kilometer kuadrat. Konfirmasi bahwa area yang terkontaminasi telah secara signifikan diperkirakan terlalu besar juga datang dari studi survey dan tinjauan jangka-menengah UNDP, yang mencatat bahwa survey sistematis telah menurunkan ukuran dan jumlah area-area yang diduga berbahaya sebesar 50 persen pada entitas Federasi Bosnia dan Herzegovina.

Di **Angola**, juga, LIS berjalan sejak tahun 2004 dan tidak selesai telah memperkirakan bahwa ada sekitar 2.900 area yang diduga berbahaya yang mencakup sekitar 1.300 sampai 1.400 kilometer kuadrat. Akan tetapi, menurut UNDP, perkiraan ini bisa secara signifikan dikurangi dengan survey teknik dan pengurangan area.

Keefektifan LISA mungkin sangat meningkat dengan mengkombinasikannya dengan data survey yang ada. Di **Afghanistan**, LIS memasukkan data survey yang para operator telah kumpulkan selama bertahun-tahun, yang karenanya mengkonfirmasi atau menghilangkan kepercayaan data dari kumpulan pendapatan pendahuluan LIS. Hal ini

mengakibatkan penurunan signifikan, dari 1.350 menjadi 715 kilometer kuadrat, dalam perkiraan tanah yang terkontaminasi. Survey dampak yang lebih fokus juga menemukan bahwa ranjau Afghanistan dan kontaminasi ERW secara geografis lebih terkonsentrasi daripada yang dipikirkan sebelumnya. Semuanya kecuali satu dari 32 provinsi yang terkena-dampak-ranjau, tapi tiga perempat dari area yang diduga berbahaya dan kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini hanya ada di 12 provinsi; setengah dari area yang diduga berbahaya ada di enam provinsi dan hampir setengah kecelakaan terakhir ada di tiga provinsi. Informasi survey seperti ini memiliki implikasi yang jelas dan signifikan untuk mentargetkan sumber daya-sumber daya penghapusan ranjau.

Akan tetapi, tidak setiap perkiraan yang berlebihan untuk kontaminasi bisa dirujuk kepada survey dampak. **Mauritania**, misalnya, sebelumnya telah mengklaim bahwa seperempat dari teritorinya diduga-berranjau, walaupun tidak ada area yang telah dipetakan. Mauritania mengharapkan survey dampak yang akan datang, yang hanya berfokus pada komunitas-komunitas di utara yang diduga terkena-dampak-ranjau, untuk memberikan perkiraan yang lebih realistis tentang batasan masalah dan kepastian lokasi dan sifat kontaminasi ranjau.

Kosovo merupakan sebuah contoh perkiraan berlebihan pertama dari masalah ranjau dan, mungkin, untuk di bawah perkiraan di kemudian waktu. Perkiraan pada tahun 2000 untuk kontaminasi yang mencakup 360 kilometer kuadrat sangat berkurang, walaupun operasi-operasi penghapusan ranjau hanya terhitung untuk 41 kilometer kuadrat untuk pengurangan dari tahun 1999 sampai akhir tahun 2005. Sedangkan untuk batasan masalah ranjau saja, PBB dan operator kerja ranjau utama terus saja secara kuat tidak sepatutnya: PBB menjelaskan ini sebagai "sisa" dari tingkat di negara-negara Eropa barat, sementara HALO Trust yakin bahwa ada lebih banyak dari 15 area yang diketahui berbahaya dan 51 dugaan area pada akhir tahun 2005.

Penghapusan Ranjau Di Desa

Komponen kedua dalam usaha merespon secara efektif terhadap kebutuhan komunitas yang terkena-dampak-ranjau adalah alokasi sumber daya, termasuk penargetan

sumber daya-sumber daya penghapusan ranjau. Yang disebut penghapusan ranjau “desa,” atau “spontan” terus menerima banyak perhatian, khususnya di Asia tenggara. Sebelumnya, program-program kerja ranjau telah cenderung menyimpangkan pengenalan formal dari inisiatif-inisiatif seperti itu. Hal itu mulai berubah. Mungkin ada pengenalan formal terhadap usaha-usaha sukarela oleh orang-orang desa untuk membebaskan ranjau dari tanah yang dibutuhkan untuk pemeliharaan lokal, dengan pemberian sejumlah pelatihan, peralatan, dan pengawasan. Sedikitnya, ada penghargaan yang semakin besar bahwa pengambilan-resiko secara sengaja seperti itu merupakan respon yang wajar dan terdorong ekonomi oleh komunitas-komunitas yang tidak berharap bahwa para penghapus ranjau profesional akan membantu mereka dalam waktu dekat ini. Hal ini menekankan kembali keharusan untuk menargetkan sumber-sumber daya secara efektif.

Di **Kamboja** pada tahun 2005, HALO Trust menyebarkan tiga team survey selama dua bulan untuk menyelidiki inisiatif-inisiatif pembebasan tanah lokal di tiga wilayah dari dua provinsi. Mereka menemukan bahwa para petani telah membebaskan 34.53 kilometer kuadrat tanah, membebaskan 3.371 ranjau dan 2.22 UXO, yang hanya menimbulkan satu orang luka. HALO menyimpulkan, “Inisiatif ini ekivalen dengan puluhan juta dolar pekerjaan pembebasan oleh para operator penghapus ranjau, dan karena itu layak mendapatkan perhatian serius.”

Pemberian Tanda dan Pemagaran

Salah satu dari persyaratan Pasal 5 yang sering dilewati adalah sebelum operasi pembebasan, setiap Pihak Negara yang terkena-dampak-ranjau harus memastikan, sesegera mungkin, agar area-area berranjau “diberi tanda-batas luar, diawasi, dan dilindungi dengan pagar atau cara lain, untuk memastikan pengeluaran orang-orang sipil secara efektif, sampai semua ranjau anti-personil yang terkandung di dalamnya telah dihancurkan.”

Hanya sedikit mungkin tidak ada Pihak Negara yang terkena-dampak-ranjau diketahui telah memenuhi kewajiban ini secara menyeluruh, dan sedikit yang telah melapor secara memadai dalam laporan Pasal 7 tentang usaha mereka dalam memenuhi kewajiban perjanjian ini. Denmark, Perancis, (dalam hal basisnya di Djibouti), dan Kerajaan Inggris

(Falklands) tampaknya telah mengambil tindakan yang memadai untuk memastikan pengeluaran orang-orang sipil dari area-area berranjau yang berada di bawah wilayah hukum atau kontrolnya.

Memenuhi Persyaratan Pasal 5

Pasal 5 Perjanjian Pelarangan Ranjau mengharuskan penghancuran semua ranjau anti-personil di area-area berranjau di dalam wilayah hukum atau kontrol Pihak Negara sesegera mungkin, dan tidak lebih lambat dari 10 tahun dari berlakunya perjanjian itu untuk setiap Pihak Negara.

Riset Pengawasan Ranjau Darat mengidentifikasi bahwa sedikitnya 29 Pihak Negara dengan batas waktu Pasal 5 pada tahun 2009 (24 Pihak Negara) atau 2010 (lima Pihak Negara memiliki area-area berranjau yang mengandung ranjau anti-personil yang berada di bawah wilayah hukum atau kontrolnya: Albania, Bosnia, dan Herzegovina, Kamboja, Chad, Kroasia, Denmark, Djibouti, Ekuador, Perancis (basis militer Perancis di Djibouti), Jordan, FYR Makedonia, Malawi, Mozambik, Namibia, Nikaragua, Niger, Peru, Filipina, Rwanda, Senegal, Swaziland, Tajikistan, Thailand, Tunisia, Uganda, Kerajaan Inggris (Kepulauan Falklands), Venezuela, Yemen, dan Zimbabwe.

Para Pihak Negara yang mungkin bisa memenuhi batas waktu Pasal 5 mereka termasuk: Albania, Djibouti, Perancis, Jordan, FYR Makedonia, Malawi, Namibia, Nikaragua, Rwanda, Swaziland, Tunisia, Uganda, dan Venezuela. Juga, Ekuador, dan Peru secara publik telah memastikan kepastian mereka untuk memenuhi masing-masing batas waktu mereka.

Akan tetapi, sedikitnya 13 dari 29 Pihak Negara dengan batas waktu Pasal 5 pada tahun 2009/2010 saat ini tidak sedang memenuhi kewajiban perjanjian mereka. Secara bersama, usaha-usaha yang lebih besar dibutuhkan untuk memenuhi komitmen yang dibuat oleh Para Pihak Negara pada Konferensi Tinjauan Pertama untuk “berjuang memastikan bahwa sedikit, mungkin tidak ada, Para Pihak Negara akan merasa diharuskan untuk meminta perpanjangan waktu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 5, ayat 3-6 Konvensi.”

Memulai dan Menyelesaikan Operasi Penghapusan Ranjau Sesegera Mungkin

Pasal 5 mengharuskan setiap Negara untuk melakukan “segala usaha” untuk mengidentifikasi area yang berada di bawah wilayah hukum atau kontrolnya yang memuat ranjau-ranjau anti-personil dan menghancurkan semua ranjau anti-personil di area seperti itu di mana pun juga *sesegera mungkin*. Jadi, langsung setelah berlaku berlakunya perjanjian ini, kewajiban-kewajiban Pasal 5 secara resmi melibatkan Pihak Negara manapun yang mengetahui, atau menduga, bahwa area-area di bawah wilayah hukum atau kontrolnya mengandung ranjau anti-personil.

Tampaknya tidak semua Pihak Negara telah menerima bahwa mereka memiliki area-area berranjau yang berada di bawah wilayah hukum atau kontrolnya yang memuat ranjau anti-personil, walaupun bukti *prima facie* ada. Misalnya:

Filipina telah menyangkal bahwa ada area-area berranjau di teritorinya, tapi laporan-laporan dari waktu ke waktu menyatakan lain.

Bangladesh telah mengklaim dalam laporan Pasal 7 bahwa tidak ada area yang diketahui atau diduga berranjau di teritorinya. Akan tetapi, diyakini ada ranjau-ranjau di perbatasannya sepanjang 208-kilometer dengan Burma (Myanmar) dan di saluran Bukit Chittagong. Angkatan Bersenjata Bangladesh, yang berkomentar pada tahun 2005 tentang penemuan Pengawasan Ranjau Darat sebelumnya, berkata negara itu juga telah “mempelajari bahwa ranjau-ranjau diletakkan oleh Na Sa Ka [kekuatan keamanan perbatasan Burma] tapi mereka [Na Sa Ka] menyangkal keberadaan ranjau darat apapun di sepanjang perbatasan.” Bangladesh memiliki batas waktu Pasal 5 pada bulan Maret 2010.

Moldova melaporkan bahwa negara itu telah menyelesaikan penghancuran semua ranjau anti-personil di area-area berranjau pada bulan Agustus 2000. Akan tetapi, rakyat di sejumlah komunitas tetap tidak percaya terhadap hasil dari operasi penghapusan ranjau di masa lalu dan masing-masing menghindari masuk ke area-area tertentu yang diduga. Misalnya, ada klaim-klaim oleh kepala wilayah Dubasari bahwa ranjau-ranjau itu tetap ada di sejumlah area hutan yang para penghapus ranjau Moldova tidak temukan. Ada juga dugaan bahwa area-

area lain, yang tidak termasuk dalam pembebasan sebelumnya, juga terkontaminasi. Moldova juga memiliki batas waktu Pasal 5 pada bulan Maret 2011.

Republik Kongo belum menyatakan secara bulat bahwa negara itu memiliki area-area berranjau. Laporan Pasal 7-nya menyatakan bahwa “tidak ada area-area berranjau yang belum diidentifikasi” tapi kemudian menunjukkan lokasi dari area-area yang mungkin berranjau, di tempat yang informasi PBB pastikan. Republik Kongo memiliki batas waktu Pasal 5 pada bulan November 2011.

Dalam pandangan Pengawasan Ranjau darat ada sejumlah kasus yang bisa dicatat di mana Pihak Negara telah menerima bahwa mereka memiliki kewajiban di bawah Pasal 5, tapi belum bertindak “sesegera mungkin” dalam merencanakan dan melakukan program penghapusan ranjau. Semua Pihak Negara ini memasukkan Denmark, Perancis, Niger, Swaziland, Venezuela, dan Kerajaan Inggris.

Denmark punya batas waktu pembebasan dari area-area berranjaunya tanggal 1 Maret 2009. Walaupun laporan Pasal 7 pertamanya pada bulan Agustus 1999 menyatakan bahwa area berranjau di tanjung Skallingen dipetakan dan rencana untuk pembebasan akan dikembangkan, tidak ada tindakan dilaporkan sampai tahun 2005. Perkembangan yang signifikan dibuat pada akhir tahun 2005. Denmark mengumumkan dalam Rapat Keenam Para Pihak Negara bahwa negara itu telah mengalokasikan lebih dari \$14.5 juta untuk aktivitas pembebasan pada tahun 2006-2008. Akan tetapi, dalam sebuah pernyataan kepatuhan terhadap Pasal 5 dalam rapat Komite Kedudukan pada bulan Mei 2006, Denmark tidak menunjukkan maksud atau kemampuannya untuk memenuhi batas waktu 2009.

Perancis memiliki tanggungjawab Pasal 5 dalam hal ranjau anti-personil yang tetap ada di sekeliling depot amunisinya dekat kota La Doudah di Djibouti; batas waktunya untuk penyelesaian operasi pembebasan adalah tanggal 1 Maret 2009. Walaupun dengan adanya dua misi penilaian, Perancis belum mulai membebaskan ranjau-ranjau anti-personil pada bulan Mei 2006, lebih dari tujuh tahun setelah menjadi Pihak Negara. Perancis mengumumkan bahwa negara itu berencana untuk memulai penghapusan ranjau pada

bulan Oktober 2006, tapi diperingatkan bahwa “hambatan administratif” bisa lebih lanjut menunda proses ini.

Kerajaan Inggris memiliki tanggungjawab Pasal 5 dalam hal ranjau anti-personil di area-area berranjau yang luas di Kepulauan Falklands; batas waktunya adalah 1 Maret 2009. Sejak menjadi Pihak Negara pada tahun 1999, perkembangan Kerajaan Inggris ke arah memenuhi kewajiban Pasal 5-nya terbatas pada persetujuan pada bulan Oktober 2001 di mana Argentina harus melakukan studi kelayakan, dan kelompok kerjasama yang telah memenuhi yang telah bertemu delapan kali sejak bulan Mei 2006. Studi kelayakan belum dimulai; sebuah rencana dan tabel waktu untuk operasi pembebasan belum dirumuskan. Tidak ada pembebasan ranjau telah dimulai. Dalam pernyataannya dalam rapat-rapat Komite Kedudukan dan dalam laporan Pasal 7-nya, Kerajaan Inggris belum menunjukkan maksud atau kapasitasnya untuk memenuhi batas waktu Pasal 5.

Niger belum memulai operasi pembebasan sejak pertengahan tahun 2006. Sejak memberikan naskah rencana kerja ranjau dalam rapat-rapat Komite Kedudukan pada bulan Februari 2004, Niger belum melaporkan suatu persiapan untuk operasi pembebasan juga maksud atau kemampuannya untuk memenuhi batas waktu Pasal 5-nya pada tanggal 1 September 2009.

Swaziland, dengan cara yang sama, belum memulai operasi pembebasan sejak pertengahan tahun 2006. Akan tetapi, pada bulan Mei 2006 negara ini memang melapor dalam rapat-rapat Komite Kedudukan persiapan untuk operasi pembebasan yang dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pasal 5-nya (batas waktu 1 Juni 2009).

Venezuela juga belum mulai membebaskan area-area berranjaunya. Pada bulan Juli 2005, negara itu memberikan untuk pertama kalinya tabel waktu untuk pembebasan; pada bulan Mei 2006, Venezuela mendeklarasikan bahwa negara itu tidak akan memulai operasi sebelum tahun 2007 karena kurangnya peralatan dan pelatihan. Batas waktu Pasal 5-nya adalah tanggal 1 Oktober 2009.

Dalam kasus-kasus lain, Para Pihak Negara telah memulai operasi penghapusan ranjau tapi memberikan perkembangan yang lamban, sampai kepada batasan penyelesaian

operasi sebelum batas waktu Pasal 5 tampaknya diragukan, atau dalam sejumlah kasus dipertanyakan oleh para pejabat.

Menteri Luar Negeri **Thailand** memperingati Perdana Menteri pada bulan Maret 2006 bahwa perkembangan penghapusan ranjau lamban dan sebagai akibatnya, Thailand tidak akan memenuhi batas waktu Pasal 5 pada tanggal 1 Mei 2009. Alasan-alasan yang diberikan untuk perkembangan yang lamban termasuk pekerjaan ranjau itu belum merupakan prioritas pemerintah, dukungan keuangan yang tidak memadai, dan struktur militer pekerjaan ranjau di Thailand.

Penyelesaian Operasi Pembebasan Yang Sangat Berhasil:

Tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 untuk kepatuhan-terhadap-perjanjian adalah penghancuran semua ranjau anti-personil di area-area berranjau. Perjanjian Pelarangan Ranjau tidak membuat peraturan untuk tingkat pemberesan yang lebih kecil dari itu, seperti “aman-ranjau” atau “bebas-dampak” (di mana, misalnya, area berranjau yang dianggap tidak berbahaya dan tidak memiliki dampak sosial ekonomi mungkin dipagari dan diberi tanda tapi tidak dibebaskan).

Namibia belum berada dalam posisi pemenuhan kewajiban Pasal 5-nya. Pada bulan Desember 2005, Kepala Pekerjaan Ranjau Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa ia akan memastikan bahwa semua area yang diduga berranjau akan dikunjungi sebelum mendeklarasikan negara itu bebas-ranjau. Pada bulan Maret 2006, ia menambahkan bahwa “Namibia tidak ingin terburu-buru dalam deklarasi itu. Negara itu akan melakukannya ketika waktunya matang untuk itu,” yang berarti setelah penyelesaian survey yang berjalan.

Dengan cara yang sama, sejumlah Pihak Negara lain yang telah menyelesaikan operasi pembebasan mungkin belum dalam posisi untuk mendeklarasikan dengan percaya diri bahwa mereka telah mematuhi Pasal 5.

Djibouti memberikan beberapa pernyataan tentang penyelesaian pembebasan ranjau dan pemenuhan kewajiban Pasal 5-nya, termasuk mendeklarasikan dirinya “aman-ranjau” (tapi tidak “bebas-ranjau”). Rincian tentang area-area berranjau, survey dan operasi

pembebasan belum sepenuhnya dilaporkan dalam laporan Pasal 7 Djibouti. Ada sejumlah bukti bahwa ranjau-ranjau itu tetap berada di utara dan mungkin juga di selatan negara itu.

Perjanjian ini tidak menentukan bagaimana Pihak Negara seharusnya memberitahu penyelesaian operasi pembebasannya dan kepatuhan Pasal 5 (selain melalui pelaporan transparansi di bawah Pasal 7), juga tidak tentang informasi apa yang Para Pihak Negara secara bersama harus wajibkan dalam hal ini. ICBL merekomendasikan agar semua Pihak Negara membuat deklarasi formal tentang kepatuhan penuh terhadap Rapat tahunan Para Pihak Negara atau kepada konferensi tinjau ulang, sehingga kepatuhannya bisa dinilai.

Operasi pembebasan **Suriname** dilaporkan dalam rapat-rapat Komite Kedudukan pada bulan Juni 2005 oleh Organisasi Negara-negara Amerika (*OAS/Organization of American States*). Dilaporkan pada tanggal 4 April 2005, operasi pembebasan dan kontrol kualitas dari area-area berranjau yang tersisa di Suriname diselesaikan: “Adalah pandangan kami bahwa pembebasan ranjau dilakukan dengan menggunakan teknologi dan metodologi yang tepat dan sesuai dengan Standar Kerja Ranjau Internasional (*IMAS/International Mine Action Standards*) yang diterima sedemikian rupa sehingga hasilnya sesuai dengan persyaratan Pasal 5 Konvensi.”

OAS merekomendasikan agar pemerintah Suriname “menggunakan format deklarasi yang sama dengan yang digunakan oleh Costa Rica dan Honduras (dan sedang dipertimbangkan oleh Guatemala) untuk mengkomunikasikan kepatuhan terhadap Konvensi. Format itu akan mendeklarasikan bahwa semua area ranjau yang diketahui atau diduga dan daerah berranjau telah dibebaskan; bahwa Perencanaan/Program Nasional telah berhasil diselesaikan; bahwa sisa kapasitas nasional ada untuk merespon terhadap keadaan yang tidak diperkirakan sebelumnya yang berhubungan dengan pembebasan ranjau.” Pada bulan November 2005, dalam sebuah dokumen yang dikirim kepada Unit Pendukung Pelaksanaan untuk Perjanjian Pelarangan Ranjau, Suriname mengklaim bahwa ia telah memenuhi kewajibannya di bawah Pasal 5.

Laporan Pasal 7 **Guatemala** untuk tahun 2005 mendeklarasikan bahwa pembebasan dari semua ranjau anti-personil dan ERW belum diselesaikan, dan tidak ada area berranjau

tetap ada di teritorinya. Guatemala juga membuat suatu pernyataan tentang kepatuhan penuh dalam rapat-rapat Komite Kedudukan pada bulan Mei 2006. **Costa Rica** telah mengumumkan penyelesaian program pembebasan ranjau dalam rapat-rapat Komite Kedudukan antar sesi pada bulan Februari 2003.

Laporan terakhir Konferensi Tinjauan Pertama untuk Perjanjian Pelarangan Ranjau semata-mata mencatat bahwa **Honduras** telah melaporkan penyelesaian operasi pembebasan, tapi tidak merujuk kepada pernyataan kepatuhan formal. Menurut OAS, operasi pembebasan diselesaikan pada bulan Oktober 2004.

Pasal 5 mengharuskan identifikasi area-area berranjau “yang diketahui atau diduga” dan penghancuran terhadap semua ranjau anti-personil dalam area itu. Akan tetapi, mungkin identifikasi dan operasi pembebasan itu dilakukan secara efektif, tapi area-area berranjau selanjutnya atau ranjau-ranjau anti-personil yang tersebar ditemukan pada suatu waktu di masa mendatang. Dalam akhir seperti itu, konsisten dengan perjanjian bahwa ranjau-ranjau itu dihancurkan tepat waktu dan rinciannya dilaporkan sepenuhnya dalam laporan pemutakhiran tahunan Pasal 7 berikutnya dari Pihak Negara itu.

Dalam hal ada penemuan-penemuan baru untuk ranjau-ranjau anti-personil yang ditempatkan, beberapa Pihak Negara telah mengambil langkah untuk menjaga “sisa” kapasitas pembebasan. Tindakan berhati-hati ini bisa direkomendasikan untuk semua Pihak Negara yang terkena-dampak-ranjau. Di Guatemala, unit penghapusan ranjau bergerak dibentuk pada bulan Desember 2005 untuk merespon terhadap laporan-laporan sisa ranjau dan sisa bahan peledak perang. Dengan cara yang sama, OAS merekomendasikan kepada Suriname agar sisa kapasitas nasional ditempatkan untuk merespon terhadap suatu keadaan yang tidak diduga sebelumnya yang berhubungan dengan pembebasan ranjau.

Pemberian Perpanjangan Waktu Untuk Batas Waktu Pasal 5

Perjanjian ini memuat perangkat persyaratan tertentu dan prosedur untuk pemberian *yang mungkin* untuk suatu perpanjangan waktu terhadap batas waktu Pasal 5 bagi Para Pihak Negara yang tidak mampu menyelesaikan pembebasan dalam waktu 10 tahun.

ICBL mendukung pemberian yang tepat untuk suatu periode perpanjangan waktu untuk Pihak Negara yang terkena-dampak-ranjau setelah pertimbangan yang berhati-hati terhadap keadaan-keadaan tertentu yang telah menghambatnya dalam menyelesaikan penghancuran semua ranjau anti-personil di area-area berranjau yang berada di bawah wilayah hukum atau kontrolnya, juga perencanaan rinci tentang bagaimana negara itu akan memastikan penyelesaian penghancuran ranjau anti-personil dalam kerangka waktu yang baru.

Akan tetapi, ICBL menyerukan kepada Para Pihak Negara untuk tidak menyetujui perpanjangan waktu samaran kepada suatu Pihak Negara. Hal itu konsisten dengan Pasal 5 bahwa setiap perpanjangan waktu yang diberikan oleh Para Pihak Negara harus merupakan waktu tersingkat yang mungkin dan harus sesuai dengan persyaratan untuk pelaporan teratur oleh Pihak Negara yang meminta dan prestasi batu loncatan yang wajar dalam periode waktu itu. Lebih lanjut, kewajiban untuk menyelesaikan pembebasan ranjau anti-personil di area-area berranjau “sesegera mungkin” menuntut agar perencanaan penghapusan dan operasi ranjau telah dimulai secara tepat waktu dan dilakukan secara menguntungkan. Suatu situasi di mana Pihak Negara telah menunda permulaan operasi pembebasan sampai mendekati batas waktu Pasal 5, atau dalam keadaan lain telah memberikan sedikit perkembangan dalam periode 10-tahun pertama, tidak sesuai dengan peraturan Pasal 5, yang menyatakan, “Jika Pihak Negara percaya ia *tidak mampu* untuk...” (penekanan ditambahkan). Perkataan Pasal 5 tidak memberikan pilihan dalam menerapkan perpanjangan waktu untuk Para Pihak Negara yang semata-mata belum membereskan kewajiban pembebasan secara tepat waktu.

Kepemilikan Nasional dan Pemerintahan Yang Baik Untuk Pekerjaan Ranjau

Tanggungjawab utama dalam melaksanakan Pasal 5 berada pada Pihak Negara yang terkena-dampak-ranjau, sesuai dengan Pasal 5. Dalam berusaha menyelesaikan kontaminasi ranjau dan mematuhi perjanjian, masing-masing Pihak Negara yang terkena-dampak-ranjau harus mengambil tanggungjawab yang efektif untuk program kerja ranjau.

Dalam hal pemerintahan yang baik, setiap program kerja ranjau sama baiknya dengan manajemennya.

Pendanaan

Yang penting untuk kepemilikan nasional dan pemerintahan yang baik untuk kerja ranjau adalah memastikan agar sumber daya yang cukup, secara nasional dan internasional, dimobilisasi oleh Pihak Negara yang terkena-dampak-ranjau untuk mempertahankan program kerja ranjau pada tingkat yang wajar. Akan tetapi, Pasal 6 dari perjanjian ini mengharuskan Para Pihak Negara lain yang berada dalam posisi melakukannya untuk mendukung usaha dari setiap Pihak Negara yang terkena-dampak-ranjau. Karena itu pasal itu menyerukan kepada para donor untuk terus memberikan dukungan yang memadai dalam pelaksanaan program kerja ranjau yang efektif.

Beberapa program terancam oleh kurangnya pendanaan selama periode pelaporan:

- Di **Afghanistan**, operasi pembebasan ranjau mengalami kekurangan pendanaan yang parah pada pertengahan tahun 2006, yang menyebabkan UNMACA mengumumkan pemecatan 1.130 personil penghapusan ranjau pada bulan Juli dan berencana memotong 2.800 lebih pekerjaan pada bulan Agustus dan September.
- **Kroasia** mendeklarasikan pada bulan Mei 2006 “kemungkinan memenuhi batas waktu Konvensi 2009 untuk penghapusan ranjau memang sangat, sangat kecil.” Para anggota Parlemen menyerukan kepada pemerintah untuk memisahkan lebih banyak dana untuk program kerja ranjau. Kroasia sudah mendanai sendiri sekitar 57 persen dari program kerja ranjaunya.
- Di **Guinea-Bissau**, krisis pendanaan untuk program kerja ranjau pada bulan April 2006 memaksa satu dari dua LSM penghapusan ranjau nasional untuk berhenti beroperasi selama dua bulan. Kekurangan sumber daya jangka-panjang mengancam peluang Guinea-Bissau untuk menyelesaikan persyaratan Pasal 5-nya dalam batas waktu perjanjian.
- Di **Irak**, 15 team pembuangan persenjataan bahan peledak dioperasikan oleh MineTEch International yang berada di bawah kontrak Kantor PBB untuk Pelayanan

Proyek (UNOPS/UN Office for Project Services) dibubarkan pada pertengahan tahun 2005 ketika kontrak itu diakhiri karena kurangnya dana.

- Di **Mauritania**, pembebasan ranjau ditangguhkan sepanjang tahun 2005 karena kurangnya dana, yang dilakukan kembali pada tahun 2006.
- Di **Tajikistan**, kekurangan dukungan donor dan tidak datangnya dana-dana yang dijaminakan mengancam perencanaan untuk mencapai produktivitas yang lebih besar pada tahun 2006. Tajikistan memperingati bahwa bantuan internasional “dibutuhkan sekarang jika kita ingin memenuhi kewajiban kita terhadap perjanjian.”

Usaha-usaha yang lebih besar dibutuhkan dari banyak Pihak Negara, baik yang terkena-dampak-ranjau maupun yang tidak terkena-dampak-ranjau, agar dapat mematuhi kewajiban mereka di bawah Pasal 5 dan 6 Perjanjian Pelarangan Ranjau. ICBL mendesak semua Pihak Negara dengan kewajiban Pasal 5 untuk melakukan segala yang mungkin dalam memastikan mereka memenuhi batas waktu perjanjian, dan mendesak Para Pihak Negara untuk memberikan bantuan semampu mereka.

Kontrol Sipil Atas Pekerjaan Ranjau

Dalam berusaha memastikan pemerintahan yang baik untuk pekerjaan ranjau, sejumlah program dipercaya akan lebih produktif, transparan, dan menarik lebih banyak pendanaan internasional jika berada di bawah manajemen sipil daripada militer.

- Kantor Penghapusan Ranjau **Lebanon** memulai suatu proyek jangka-menengah pada tahun 2005 untuk meresmikan keterlibatan perwakilan yang lebih luas untuk lembaga-lembaga nasional dan lokal dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan ranjau, yang karenanya memungkinkan pengawasan yang lebih besar dari lembaga-lembaga sipil. Hal ini ditujukan untuk memberi “pekerjaan ranjau di Lebanon struktur yang kuat dan perangkat dokumentasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kerja ranjau dengan cara yang transparan dan efektif-biaya.”
- Di **Mauritania** pada tahun 2006, pembahasan dimulai dalam Kementerian pertahanan nasional dan permasalahan ekonomi dan pembangunan untuk mentransfer Kantor Penghapusan Ranjau Kemanusiaan Nasional ke dalam kontrol Kementerian sipil.

- Kantor Penghapusan Ranjau Nasional **Rwanda** tetap berada di bawah bantuan Kementerian Pertahanan, walaupun dengan adanya penilaian 2003 yang merekomendasikan agar kantor ini seharusnya dikepalai oleh seorang sipil, untuk menarik para donor internasional.
- Pusat Kerja Ranjau **Thailand** mengajukan kepada kabinet tahun 2005 agar pusat itu berubah dari organisasi militer menjadi organisasi sipil. Tinjau ulang tingkat tinggi pada bulan Januari 2006 mensyahkan usul ini dan meminta proposal resmi untuk transfer wilayah hukum dari Kantor Perdana Menteri.

Penyatuan Ke Dalam Pembangunan

Sejumlah donor percaya bahwa penyatuan pekerjaan ranjau ke dalam pembangunan akan membantu memobilisasi sumber daya dan memaksimalkan keefektifan sektor itu. Contoh-contoh usaha, beberapa lebih banyak dan beberapa lebih sedikit berhasil, dalam melakukan penyatuan itu termasuk:

- **Angola** mengklaim telah menyatukan pekerjaan ranjau masuk ke dalam rencana pembangunan. Pekerjaan ranjau diidentifikasi sebagai tujuan tertentu dalam Strateginya untuk Memerangi Kemiskinan tahun 2004-2006. Salah satu dari tujuan-tujuan Strategi itu adalah untuk “menjamin keamanan fisik dasar melalui penghapusan ranjau, perlucutan senjata dan penjunjungan hukum dan ketertiban di seluruh negara itu.”
- Strategi Pembangunan Jangka-Menengah **Bosnia dan Herzegovina** memasukkan pekerjaan ranjau sebagai sektor prioritas; akan tetapi, hanya sedikit sektor pembangunan memasukkan pekerjaan ranjau sebagai prioritas. Revisi pada pertengahan tahun 2006 dikatakan memasukkan pekerjaan ranjau sebagai prioritas untuk sektor-sektor pembangunan yang lebih strategis, dan meningkatkan akses kepada pekerjaan ranjau untuk sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk program-program pembangunan.

- Program Reformasi Sektor Umum **Guinea-Bissau** direvisi pada bulan September 2005 dan difaktorkan ke dalam rencana kerja ranjau; semua dokumen ini jatuh tempo untuk dipresentasikan ke meja bundar donor pada akhir tahun 2006.
- Pusat Pekerjaan Ranjau **Irak** melaporkan bahwa karena kecelakaan di Irak bagian utara menurun prioritas pembebasannya berubah dari tugas murni kemanusiaan menjadi proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Rencana Kerja Ranjau Nasional **Jordan** tahun 2005-2009, yang dirancang selama periode-konsultasi 10-bulan dengan pemerintah, masyarakat sipil, komunitas-komunitas yang terkena-dampak-ranjau dan sektor swasta, dikatakan menyesuaikan diri dengan tujuan Rencana Transformasi Sosial Ekonomi dan Tujuan Pembangunan Millennium pemerintah.
- Strategi Penurunan Kemiskinan kedua dari **Mozambik**, yang disetujui pada bulan Mei 2006 oleh Dewan Menteri, memasukkan pekerjaan ranjau baik sebagai masalah bersilang maupun sebagai masalah sektoral. Diklaim bahwa pemasukan pekerjaan ranjau ke dalam Strategi itu akan mendorong semua proyek pembangunan untuk memasukkan komponen penghapusan ranjau.
- **Zambia** mengumumkan dalam Rapat Keenam Para Pihak Negara bahwa negara itu telah memasukkan strategi pembebasan ranjau yang disatukan ke dalam rencana pembangunan nasional lima-tahunnya yang baru tahun 2006-2010. Tujuannya adalah agar kebutuhan pembangunan mendorong penghapusan ranjau kemanusiaan.

Meningkatkan Kinerja Program

Sejumlah evaluasi proyek-proyek dan program-program pekerjaan ranjau telah dilakukan selama periode pelaporan, dengan maksud untuk meningkatkan kinerja program-program kerja ranjau.

Di **Abkhazia**, pusat kerja ranjau dan program HALO dua kali dievaluasi pada tahun 2005 oleh para wakil dari Departemen Luar Negeri AS. Evaluasi-evaluasi itu menemukan bahwa, "Program itu dianggap efisien, berjalan-baik, dan terarah kepada mendeklarasikan Abkhazia aman-ranjau selama tahun 2007."

Di **Azerbaijan**, evaluasi pada akhir tahun 2005 dari Perwakilan Nasional Azerbaijan untuk Pekerjaan Ranjau (*ANAMA/Azerbaijan National Agency for Mine Action*) dipersiapkan oleh Bank Dunia atas permintaan Kabinet Para Menteri. Menurut ANAMA, evaluasi itu menemukan bahwa organisasi itu “secara efisien tersusun dan organisasi yang berfungsi baik yang beroperasi sesuai dengan standar-standar internasional untuk aktivitas-aktivitas penghapusan ranjau... ANAMA bisa secara wajar diharapkan untuk mencapai tujuan-tujuan Rencana Pekerjaan Ranjau, yaitu menyatakan pada akhir tahun 2008 bahwa semua tanah di “teritori yang dibebaskan” bebas-ranjau, dengan ketentuan pendanaan yang diperlukan diberikan selama tiga tahun berikutnya.”

Di **Bosnia dan Herzegovina**, Pusat Internasional Geneva untuk Penghapusan Ranjau Kemanusiaan (*GICHD/Geneva International Center for Humanitarian Demining*) melakukan evaluasi jangka-menengah pada bulan Juni 2006 terhadap Program Kerja Ranjau Yang Disatukan dari UNDP dan menyimpulkan, secara keseluruhan, bahwa program itu telah berhasil dalam mendukung munculnya kapasitas nasional untuk perencanaan dan koordinasi program kerja ranjau.

Di **Chad**, penilaian pekerjaan ranjau bersama UNDP/UNOPS dilakukan pada bulan Juni 2005 agar dapat meninjau ulang usaha-usaha PBB dalam mengembangkan kapasitas manajerial dan teknis pekerjaan ranjau dalam menentukan kebutuhan lebih banyak dukungan donor dan bagaimana hal ini bisa dicapai, dan untuk memberi nasehat bagaimana program PBB bisa ditingkatkan. Misi ini merekomendasikan tinjau ulang terhadap sumber daya manusia Kantor Penghapusan Ranjau Nasional untuk memastikan agar staff berkualifikasi yang tepat untuk posisi mereka, dan rencana pelatihan menyeluruh bagi staff nasional. Misi ini menyatakan, “pengaturan ulang, pengurangan, dan penyederhanaan lebih lanjut terhadap struktur dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan merasionalisasi biaya.”

Di **Laos**, dua proyek percontohan satu-tahun yang dilakukan dengan Bantuan Rakyat Norwegia jatuh tempo untuk penyelesaiannya pada bulan Juni 2006. Semua proyek ini menarik perhatian karena memberikan dasar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas penghapus ranjau. UXO Lao mengatakan tinjau ulang ini bisa menyebabkan “modifikasi

lengkap pendekatannya terhadap mandat kemanusiaannya.” Studi-studi NPA memasukkan studi survey teknis “yang ditingkatkan”, yang dimaksudkan untuk meningkatkan penilaian dan perencanaan tugas, dan untuk menetapkan garis petunjuk untuk pengurangan area, yang memungkinkan UXO Lao untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih besar.

Di **Mozambik**, GICHD melakukan tinjau ulang menyeluruh untuk program pekerjaan ranjau. Rekomendasi-rekomendasi utamanya termasuk keharusan untuk memperbaiki penghitungan tantangan kemanusiaan dan pembangunan yang tersisa (melalui survey-ulang dan peningkatan pada pemutakhiran dan akurasi IMSMA) dan untuk membentuk hubungan yang lebih kuat antara pekerjaan ranjau pada satu sisi, dan pembangunan dan konstruksi ulang pada sisi lain. Sejak akhir April 2006, IND masih harus membahas rekomendasi-rekomendasi tinjau ulang yang dibuat pada bulan Oktober 2005 dan merencanakan pelaksanaannya.

Di **Sri Lanka**, UNDP menugaskan evaluasi independen untuk peran dan operasinya pada tahun 2006.

Di **Yemen**, evaluasi dukungan UNDP untuk program kerja ranjau pada bulan April 2005 dilakukan oleh GICHD. Laporan ini menyimpulkan, “perkembangan yang signifikan telah dicapai dalam pekerjaan ranjau dan bahwa YEMAC (*Yemen Mine Action Center/Pusat Pekerjaan Ranjau Yemen*) memiliki struktur organisasi yang mampu untuk membahas semua komponen program pekerjaan ranjau.” Laporan itu juga menekankan beberapa jurang pemisah seperti kurangnya pelatihan, kurangnya fasilitas penghancuran dan keharusan untuk meningkatkan rehabilitasi komunitas pasca-pembebasan. Pada bulan Maret 2006, YEMAC dan GICHD memulai studi sosial ekonomi dan nafkah untuk mengukur pengembalian sosial ekonomi secara keseluruhan dari investasi pembebasan ranjau.

Memastikan Keselamatan Para Penghapus Ranjau

Pengawasan Ranjau Darat telah mencatat lebih dari 100 kecelakaan di antar para penghapus ranjau dalam kecelakaan selama operasi pembebasan pada tahun 2005. Afghanistan dan Kamboja secara bersama-sama terhitung lebih dari setengah dari total

kecelakaan yang dicatat. (Rincian tentang kecelakaan para penghapus ranjau diberikan dalam sesi tentang *Kecelakaan Ranjau Darat*).

Sejumlah program kerja ranjau telah merespon terhadap permasalahan tentang HIV/AIDS di antara para penghapus ranjau. Di **Mozambik**, tinjau ulang 10-tahun oleh GICHD melaporkan bahwa tingkat yang besar penyakit jangka-panjang di antara team-team penghapus ranjau memberikan alasan untuk pemikiran. Ditemukan bahwa persentase yang signifikan dari staff sejumlah operator tidak mampu bekerja karena penyakit sering yang berhubungan dengan AIDS, dengan mengutip dua operasi telah kehilangan delapan persen dari kapasitas operasional untuk apa yang diyakini sebagai penyakit yang berhubungan dengan-AIDS pada tahun 2003. Tinjau ulang itu menyimpulkan bahwa, “ada alasan untuk khawatir bahwa para penghapus ranjau melayani sebagai vektor penular, baik kepada komunitas di area-area yang terkena-dampak-ranjau maupun kepada para istri atau mitra seks mereka di rumah.” Lebih banyak riset harus dilakukan di area ini.

Pendidikan Resiko Ranjau

Strategi Pekerjaan Ranjau Antar-Perwakilan PBB 2006-2010 mendeklarasikan, “Lebih banyak peralatan efektif untuk mengurangi resiko telah memberikan kontribusi untuk tingkat kecelakaan yang secara ajeg menurun.” Pendidikan resiko ranjau (*MRE/mine risk education*) merupakan salah satu dari peralatan untuk meredakan resiko dari ranjau darat dan sisa bahan peledak perang. MRE didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas yang berusaha untuk “menurunkan resiko cedera dari ranjau/UXO dengan meningkatkan kesadaran dan mengangkat perubahan perilaku; termasuk penyebaran informasi kepada umum, pendidikan dan pelatihan, dan penghubung pekerjaan ranjau komunitas.”

MRE merupakan komponen yang menyatu dari pekerjaan ranjau, yang harus memberikan peringatan dan nasehat tentang perilaku keselamatan, tapi juga memobilisasi masyarakat untuk melaporkan area-area berbahaya dan persenjataan perang yang tidak diledakkan atau ditinggalkan. MRE bisa mengangkat kepemilikan bersama informasi antara para operator pekerjaan ranjau dan komunitas lokal. Team-team MRE sering terlibat dalam pengumpulan data untuk pekerjaan ranjau, dan bisa membantu mengidentifikasi orang-

orang yang selamat dari ranjau dan kebutuhan mereka, juga memberikan informasi relevan kepada orang-orang yang selamat. MRE juga merupakan peralatan yang baik untuk membela pelarangan ranjau darat.

Perkembangan yang secara khusus mendorong pada tahun 2005-2006 adalah peningkatan promosi MRE berbasis-komunitas. Sebagaimana yang dicatat oleh seorang ahli, "Pendekatan-pendekatan berbasis-komunitas melibatkan masyarakat lokal dalam pemberian pesan MRE kepada komunitas mereka, suatu pendekatan yang bisa efektif biaya, memastikan peliputan yang baik, membangun Kompetensi dan menciptakan sejumlah harapan pemeliharaan."

Dalam perkembangan sambutan lain, peningkatan jumlah program MRE telah membangun hubungan dengan survey, usaha-usaha pemberian tanda dan pembebasan, dan bekerja di dalam kerangka kerja kurikulum sekolah secara resmi. Proyek-proyek MRE yang berdiri-sendiri menurun.

Tantangan terbesar bagi para penyedia MRE adalah perilaku pengambilan-resiko secara sengaja. Contoh yang paling sering dicatat merupakan kumpulan ranjau dan sisa bahan peledak perang sebagai logam sampah yang menguntungkan. Untuk membahas hal ini, para operator MRE telah mengembangkan pendekatan pendidikan resiko secara menyeluruh yang melibatkan para pihak berkepentingan lokal dalam mengidentifikasi alternatif-alternatif kongkrit untuk perilaku pengambilan-resiko. Semua ini termasuk memasukan pesan-pesan yang secara geografis-tertentu ke dalam sesi-sesi MRE untuk menjelaskan di mana area-area yang aman itu berlokasi, yang membentuk area-area-bermain yang aman bagi anak-anak, dan proyek-proyek tertentu yang menargetkan para pengumpul dan pialang logam sampah.

Program-program MRE

Program-program atau aktivitas-aktivitas MRE yang dicatat Pengawas Ranjau Darat di 60 negara pada tahun 2005 dan pertengahan pertama tahun 2006, kurang satu negara daripada yang dicatat dalam laporan tahun lalu. Tiga puluh sembilan negara merupakan Para Pihak Negara terhadap Perjanjian Pelarangan Ranjau. Dua puluh satu bukan

merupakan partai terhadap perjanjian itu. Ada juga program-program dan aktivitas-aktivitas MRE pada delapan dari sembilan area-area bukan-negara yang dicakup oleh Pengawasan Ranjau Darat.

Total jumlah para penerima MRE secara langsung meningkat menjadi 6.4 juta orang pada tahun 2005, dari 6.25 juta pada tahun 2004. Seperti pada tahun-tahun terakhir, total global hanya merupakan perkiraan yang didasarkan pada banyak sumber yang memberikan informasi kepada Pengawasan Ranjau Darat. Total 6.4 juta tidak memasukkan para penerima MRE yang diberikan oleh mass media, tapi banyak bisa merupakan para individu yang menerima MRE dari banyak sumber. Lima negara yang terhitung dalam empat juta penerima: Afghanistan, Angola, Kamboja, Sri Lanka, dan Thailand. Akan tetapi, para operator MRE menekankan bahwa jumlah orang yang dicapai MRE kurang penting daripada kualitas dan dampak MRE.

Perjanjian Pelarangan Ranjau mengharuskan agar Para Pihak Negara melaporkan tindakan-tindakan yang diambil “untuk memberikan peringatan langsung dan efektif kepada penduduk” tentang area-area berranjau. Sejak bulan Juni 2006, 23 Pihak Negara telah melaporkan MRE dalam laporan Pasal 7 tahun 2005 mereka, yang jauh lebih kecil daripada 33 yang dicatat tahun lalu. Sejumlah Pihak Negara yang memang memiliki atau seharusnya memiliki aktivitas-aktivitas MRE tidak menggunakan Formulir 1 Pasal 7 yang melaporkan format untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas MRE (Belarus, Kamboja, Honduras, Latvia, Namibia, Ukraine, dan Zambia). Sejumlah Pihak Negara yang memang memiliki atau seharusnya memiliki aktivitas MRE menyatakan dalam Formulir I bahwa topik ini tidak berlaku untuk mereka (Bangladesh, Republik Kongo, Côte d’Ivoire dan Moldova).

Dalam pandangan Pengawasan Ranjau Darat, program-program dan aktivitas-aktivitas MRE yang baru atau tambahan paling dibutuhkan di Algeria, Burma/Myanmar, Kolombia, Mesir, India, Kuwait, Laos, Mozambik, Pakistan, Turki, dan Ukraine.

Aktivitas-aktivitas MRE Yang Baru

Pada tahun 2005 dan 2006, proyek-proyek dan aktivitas-aktivitas pendidikan beresiko ranjau yang baru dicatat di 28 negara, suatu perkembangan yang bisa dicatat yang dibangun

di atas MRE yang baru yang dicatat di 15 negara tahun lalu. Untuk pertama kalinya, aktivitas-aktivitas MRE dicatat di Cina; di negara-negara lain, ada para penyedia MRE baru, aktivitas-aktivitas yang secara signifikan diperluas, dan/atau area-area geografis baru yang dicakup.

Dari 28 negara, 18 merupakan Pihak Negara (Afghanistan, Angola, Bosnia, dan Herzegovina, Kamboja, Chile, Kolombia, Côte d'Ivoire, DR Kongo, Ekuador, Ethiopia, Liberia, Peru, Senegal, Sudan, Thailand, Turki, Uganda, dan Zimbabwe) dan 10 Bukan Pihak Negara, (Armenia, Cina, Iran, Irak, Kyrgyzstan, Nepal, Pakistan, Somalia, Siria, dan Vietnam). Ada juga aktivitas-aktivitas MRE baru di Palestina dan Sahara Barat.

Program-program MRE Yang Memadai

Dua puluh tiga negara dan lima area memiliki program MRE yang memadai yang ditempatkan pada tahun 2005 dan pertengahan pertama tahun 2006. Cara yang "memadai" bahwa program MRE atau proyek terukur ditempatkan yang mampu menyediakan MRE dalam kerangka kebutuhan dan kualitas sehubungan dengan ancaman ranjau/ERW yang terbatas. Di negara-negara atau area-area dengan masalah ranjau/ERW terbatas, program MRE terbatas mungkin memadai selama jumlah kecelakaan tetap sangat rendah atau nol. Akan tetapi, di sebagian besar negara tambahan kapasitas MRE akan dibenarkan untuk mencapai penyediaan pelayanan yang lebih menyeluruh.

Lima belas negara dengan program MRE yang memadai adalah Para Pihak Negara, termasuk Afghanistan, Angola, Bosnia dan Herzegovina, Kamboja, Ekuador, Eritrea, Guatemala, Guinea-Bissau, Nikaragua, Senegal, Sudan, Tajikistan, Thailand, Uganda, dan Yemen.

Delapan Bukan Pihak Negara memiliki program MRE yang memadai, termasuk Azerbaijan, Iran, Irak, Kyrgyzstan, Lebanon, Nepal, Korea Selatan, dan Sri Lanka. Lima area dengan program MRE yang memadai adalah Abkhazia, Chechnya, Kepulauan Falkland, Kosovo, dan Somaliland.

Aktivitas-aktivitas MRE Yang Tidak Memadai

Pengawasan Ranjau Darat mencatat aktivitas-aktivitas MRE yang tidak memadai di 37 negara pada tahun 2005-2006. Cara yang “tidak memadai” yang pendekatan MRE ambil adalah terlalu mendasar, atau MRE itu berada pada skala yang terlalu terbatas atau tidak mencapai sejumlah area geografis yang membutuhkan. Termasuk di dalamnya 24 Pihak Negara (Albania, Belarus, Burundi, Chad, Chile, Kolombia, Côte d’Ivoire, Kroasia, DR Kongo, El Salvador, Ethiopia, Jordan, Liberia, Mauritania, Mozambik, Namibia, Peru, Filipina, Rwanda, Tunisia, Turki, Ukraine, Zambia, dan Zimbabwe) dan 13 Bukan Pihak Negara (Armenia, Burma/Myanmar, Cina, Georgia, India, Israel, Laos, Pakistan, Polandia, Rusia, Somalia, Siria, dan Vietnam). Aktivitas-aktivitas MRE yang tidak memadai juga dicatat di Nagorno-Karabakh, Palestina, dan Sahara Barat.

Tidak Ada Aktivitas MRE

Pada tahun 2005 dan 2006, tidak ada pendidikan resiko ranjau dicatat di 30 negara yang terkena-dampak-ranjau atau sisa bahan peledak perang. Di sejumlah negara ini, pengukuran ranjau/ERW pertama belum dilakukan untuk memungkinkan suatu penilaian yang tepat apakah pendidikan resiko ini dibutuhkan; di beberapa negara, pendidikan resiko secara resmi mungkin tidak perlu. Dari 30 negara, 20 adalah Pihak Negara: Algeria, Bangladesh, Republik Kongo, Cyprus, Denmark, Djibouti, Estonia, Yunani, Honduras, Kenya, Latvia, FYR Makedonia, Malawi, Moldova, Niger, Panama, Serbia dan Montenegro, Sierra Leone, Swaziland, dan Venezuela. Sepuluh negara bukan merupakan bukan Pihak Negara: Kuba, Mesir, Kazakhstan, Kuwait, Libia, Mongolia, Maroko, Korea Utara, Oman, dan Uzbekistan. Sebagai tambahan, tidak ada aktivitas MRE dicatat di Taiwan.

Para Pelaku Utama

Ribuan relawan masyarakat – termasuk mereka yang dari Palang Merah dan Masyarakat Nasional Bulan Sabit Merah, anak-anak dari Klub Anak, dan “siswa-guru” (pendekatan anak-ke-anak dan anak-ke-orangtua) – dan puluhan ribu guru di sekolah dasar dan menengah merupakan para pelaku utama yang melakukan MRE dalam masyarakat mereka sendiri, termasuk di kampus-kampus bagi para pengungsi dan masyarakat yang secara internal dipindahkan.

Staff dari pusat-pusat pekerjaan ranjau nasional dan kekuatan-kekuatan keamanan (termasuk personil angkatan bersenjata, para penjaga perbatasan, polisi dan pemadam kebakaran) memberikan peringatan kepada penduduk; di sejumlah negara mereka telah dilatih untuk memberikan MRE berkualitas sebagai komponen menyatu dari program pekerjaan ranjau nasional.

Total 121 LSM nasional melakukan MRE di 30 negara dan tiga area selama periode pelaporan. LSM-LSM nasional sering bekerja dengan team-team bergerak dari para pendidik MRE untuk mencapai masyarakat-masyarakat yang terkena-dampak-ranjau dan melatih dan memonitor para relawan dan guru berbasis-masyarakat.

Secara internasional, para operator MRE dasar merupakan Komite Internasional Palang Merah (*ICRC/International Committee of the Red Cross*), UNICEF, Penyandang Cacat Internasional, Kelompok Penasehat Ranjau, Kelompok Penghapus Ranjau Denmark, INTERSOS, HALO Trust, dan Bantuan Rakyat Norwegia. LSM-LSM Internasional lain yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas MRE secara mendasar termasuk Aliansi Selamatkan Anak-anak Internasional (Selamatkan Anak-anak Swedia, Inggris, dan AS), Visi Dunia, AVSI (*Associazione Volontari per il Servizio Internazionale*), Pendidikan Dunia, Dana Rehabilitasi Dunia, Wali Keringanan Islam dan Kesadaran Ranjau.

LSM-LSM Internasional – yang didominasi LSM-LSM pekerjaan ranjau yang terdaftar di atas – yang dilaksanakan MRE di 25 negara dan empat area pada tahun 2005-2006. Komite Internasional Palang Merah dan masyarakat Palang Merah/Sabit Merah melakukan program-program MRE di sekitar 27 negara. Pada tahun 2005, ICRC mengembangkan sebuah kerangka kerja untuk operasi pekerjaan ranjau pencegahan di masa mendatang, yang berusaha menyatukan pekerjaan ranjau, termasuk MRE, melintasi semua departemen ICRC yang tepat.

Dalam PBB, UNICEF menerima peran utama di area-area MRE, bantuan dan nasehat bagi orang yang selamat. Pada tahun 2005 dan 2006, UNICEF memberikan dukungan keuangan dan teknis untuk pekerjaan ranjau di 30 negara dan dua area. Dukungan ini diarahkan utamanya untuk MRE dan pembelaannya, tapi juga untuk pengumpulan data dan

bantuan bagi orang yang selamat. Sebagaimana dicatat dalam *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005*, PBB meluncurkan kebijakan antar-perwakilan yang direvisi untuk pekerjaan ranjau pada tahun 2005, dan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas UNICEF dan perwakilan-perwakilan PBB yang lain telah didesentralisasi kepada team-team dalam-negara PBB.

UNDP, UNMAS, dan OAS membantu menyatukan pendidikan resiko ke dalam pekerjaan ranjau, dan memberikan ranjau darat secara teratur dan pembahasan keselamatan ERW. Perusahaan-perusahaan penghapus ranjau komersial secara normal tidak terlibat dalam MRE atau dalam penghubung komunitas, kecuali untuk RONCO yang telah melaksanakan MRE di Sudan.

Kelompok-kelompok Beresiko

Masyarakat yang paling beresiko dari ranjau darat, persenjataan perang yang tidak diledakkan dan ditinggalkan beragam menurut negara dan daerahnya, tapi pada umumnya mayoritas adalah laki-laki, apakah remaja atau usia bekerja, dan sangat sering para penduduk pedesaan. Orang-orang yang kembali dari perang, baik para pengungsi dan masyarakat yang dipindahkan di dalam negeri, juga beresiko besar, khususnya mereka yang tidak kenal dengan ancaman lokal (seperti yang terlihat di Afghanistan, Angola, Burundi, Kolombia, Sri Lanka, Sudan, dan di tempat lain). Data kecelakaan menunjukkan bahwa anak-anak lebih beresiko dari UXO daripada orang-orang dewasa, sementara orang-orang dewasa lebih mungkin menjadi korban ranjau darat. Para pengembara dan semi-pengembara secara pasti merupakan kelompok beresiko di berbagai negara.

Di Afghanistan, para pria khususnya beresiko. Di Albania, insiden ranjau menurun tapi kecelakaan yang disebabkan sisa bahan peledak perang meningkat. Di Kroasia, para pemburu secara khusus terus mengalami resiko; mereka ditargetkan dengan aktivitas-aktivitas MRE tertentu dalam usaha bersama oleh Palang Merah Kroasia dan Asosiasi Berburu Kroasia.

Di Lebanon, kelompok beresiko utama adalah para pria dan orang-orang yang lebih tua dari 20 tahun (72 persen dari kecelakaan berusia 21 sampai 50 tahun). Di Nepal, IEDs

yang tidak diledakkan adalah penyebab paling umum insiden; anak-anak mewakili 56 persen dari total kecelakaan sipil pada tahun 2005. Di Sri Lanka, resiko ini dipengaruhi oleh musim. Resiko terbesar pada bulan September ketika daur tanam dan panen dimulai, dan minggu pekerjaan ranjau diorganisir sebelum musim panen. Di Yemen, para wanita dan anak-anak paling rawan ketika melakukan tugas mereka sehari-hari (menggembala, mengumpulkan kayu dan mengambil air), walaupun mereka sadar akan resikonya.

MRE Di Area-area Konflik

Di sejumlah tempat di mana pembebasan kemanusiaan tidak bisa dilakukan, yang disebabkan oleh konflik yang berlangsung atau alasan-alasan lain, MRE masih dilakukan dan sering bersifat instrumental dalam mengurangi kecelakaan. Pada tahun 2005 dan 2006, MRE darurat dilakukan di Chad, Sri Lanka dan Guinea-Bissau/Senegal setelah peperangan yang diperbaharui yang dari waktu ke waktu melibatkan penggunaan ranjau darat.

Di Irak, termasuk di area pusat, staff lokal terus memberikan MRE, yang menjangkau sedikitnya 85.000 orang pada tahun 2005. Ada aktivitas-aktivitas MRE yang berjalan di Burma, Chechnya, Kolombia, dan Nepal walaupun dengan adanya konflik yang berlanjut, walaupun dengan keterbatasan besar dalam setiap kasus. Di Republik Demokratik Kongo, MRE disatukan dengan kesadaran HIV/AIDS di zona-zona konflik di Katanga bagian utara dan Kivu Selatan. Di Tajikistan, MRE tetap merupakan pilihan satu-satunya yang bisa dimasuki untuk menurunkan resiko dari ranjau darat di area-area terkontaminasi yang berbatasan dengan daerah-daerah Kantong Uzbek, yang menunggu negosiasi dengan Uzbekistan yang mungkin mengizinkan pembebasan.

Penyatuan MRE dengan Aktivitas-aktivitas Pekerjaan Ranjau Lain

Melanjutkan trend positif pada tahun-tahun terakhir, MRE semakin disatukan ke dalam bentuk-bentuk pekerjaan ranjau lain dan memperluas disiplinnya pada tahun 2005-2006, di banyak negara. Standar Pekerjaan Ranjau Internasional (*IMAS/International Mine Action Standards*) untuk MRE menyatakan bahwa “proyek-proyek dan program-program harus disatukan... dengan aktivitas-aktivitas pekerjaan, pelepasan, dan perkembangan ranjau lain.” Team-team penghubung komunitas merupakan instrumen utama dalam

mempromosikan penyatuan yang ditingkatkan. Akan tetapi, seorang ahli telah tunjukkan bahwa semua ini jarang digunakan untuk menghubungkan aktivitas-aktivitas perkembangan yang lain.

Di Bosnia dan Herzegovina, MRE merupakan komponen menyatu dengan Perencanaan Pekerjaan Ranjau Yang Berdampak Pada Masyarakat yang menuntun strategi pekerjaan ranjau secara keseluruhan negara itu. Sejumlah operator MRE membantu dalam menegakkan tanda-tanda peringatan ranjau. Di Lebanon Selatan, penghubung masyarakat telah membantu memastikan bahwa pembebasan berjalan lancar dan memberi para pemilik tanah rasa percaya diri untuk menggunakan tanah yang dibebaskan; secara lebih umum telah membantu membangun kepercayaan di antara komunitas-komunitas. Di Somaliland, para operator penghapus ranjau memberikan MRE, dan personil penghubung komunitas telah meyakinkan para warga lokal untuk menangani ranjau-ranjau yang tersimpan di rumah.

Di Sri Lanka, team-team pembebasan melaporkan bahwa peran penghubung komunitas dari team-team MRE telah membantu mereka untuk berfungsi secara lebih efektif. Organisasi-organisasi MRE merupakan sumber informasi utama tentang area-area berbahaya yang baru dan UXO yang terisolasi. Misalnya, di area-area yang dikontrol-LTTE di Vanni dan Jaffna, LSM-LSM MRE lokal memberikan 86 persen dari 158 laporan area berbahaya yang dikirim ke kantor pekerjaan ranjau wilayah di Jaffna pada tahun 2005.

MRE Berbasis-komunitas

Pendekatan-pendekatan berbasis-komunitas melibatkan warga lokal dalam pemberian pesan-pesan MRE kepada komunitas mereka. Paling sering terjadi, para operator profesional MRE mengidentifikasi dan melatih para relawan lokal, dan dari waktu ke waktu memberikan insentif atau kompensasi untuk pengeluaran. Dua puluh dua negara dan empat area melakukan sejumlah tipe MRE berbasis-komunitas selama periode pelaporan. MRE berbasis-sekolah tidak dimasukkan dalam jumlah ini karena para guru biasanya menerima gaji, tapi bisa dianggap sebagai sub-perangkat MRE berbasis-komunitas karena sebagian besar guru merupakan anggota komunitas. Ada dua tantangan serius untuk pendekatan berbasis-komunitas: menjaga para relawan termotivasi selama periode waktu yang panjang,

khususnya jika resiko ranjau itu cukup rendah, dan memastikan kualitas dan konsistensi pesan.

Di Afghanistan, ICRC dan Masyarakat Palang Merah Afghan telah mengidentifikasi dan melatih lebih dari 100 relawan komunitas dari desa-desa di 10 provinsi untuk melakukan MRE. Di Angola, 318 komite komunitas MRE atau jaringan kerja komunitas (khususnya masing-masing dari 12 pimpin dan relawan komunitas) telah dibentuk. Mereka memberikan MRE kepada para pendatang baru dan orang-orang yang kembali dari perang, berbagi informasi tentang area-area dan insiden-insiden berbahaya, berhubungan dengan para operator pekerjaan ranjau dan pemerintah lokal dan badan-badan LSM, dan mendukung orang-orang yang selamat dari ranjau. Di Azerbaijan, 59 komunitas MRE dengan 512 anggota telah dibentuk. Komite-komite itu ditugaskan dengan kelompok-kelompok beresiko yang menentukan di lokasi mereka dan memberikan MRE.

Di Kamboja, para relawan di 422 jaringan kerja pengurangan resiko ranjau berbasis-komunitas menggunakan teknik-teknik partisipasi untuk mengidentifikasi bagaimana ranjau dan UXO berdampak pada desa, dan kemudian menggunakan informasi ini sebagai dasar untuk memprioritaskan rencana pembebasan dan meminta sumber daya-sumber daya pembangunan. Di Kosovo, Masyarakat Palang Merah lokal mengadakan rapat-rapat secara teratur dengan para relawan MRE untuk mengumpulkan informasi tentang area-area yang terkena-dampak-ranjau dan UXO. Masyarakat ini memiliki tujuh kantor di lapangan yang mencakup 26 dari 30 kotamadya, dan 60 sampai 65 relawan yang melayani sebagai penghubung antara komunitas dan kantor-kantor di lapangan.

Di Kyrgyzstan, LSM-LSM lokal, para pemimpin komunitas, para pelaku masyarakat sipil dan para guru ditargetkan untuk pelatihan kelompok kerja para pelatih. Pelatihan ini termasuk 39 anggota staff dari 26 LSM dan 13 para pemimpin masyarakat/desa dari desa-desa yang terkena-dampak-ranjau. Di Sri Lanka, untuk menjangkau anak-anak-di-luar-sekolah, UNICEF membentuk sekitar 130 klub anak-anak dengan rata-rata 60 anggota di wilayah Trincomalee, Batticaloa, dan Ampara pada tahun 2004 dan 2005. Pada tahun 2005, 2.605 aktivitas MRE penghubung komunitas dilakukan dalam mendukung pekerjaan ranjau.

Evaluasi dan Pembelajaran

Pada tahun 2005-2006, evaluasi, survey-survey Pengetahuan, Sikap, Praktek (KAP/*Knowledge, Attitudes, Practices*) dan peluang-peluang pembelajaran tentang aspek-aspek masalah ranjau atau UXO dicatat di Afghanistan, Albania, Angola, Bosnia, dan Herzegovina, Kamboja, Chad, Kolombia, Laos, Liberia, Mauritania, Nepal, Pakistan, dan Uganda.

Buku Petunjuk Praktek Terbaik IMAS MRE, yang dipersiapkan oleh PBB dan Pusat Internasional Geneva untuk Penghapusan Ranjau Kemanusiaan, dilepaskan pada bulan November 2005. Semua ini mengambil praktek-praktek terbaik dari program-program MRE secara global untuk mengidentifikasi satu seri indikator dampak, relevansi, keefektifan, efisiensi, dan pemeliharaan yang mungkin. 10 buku petunjuk ini mencakup topik-topik berikut: pendahuluan MRE; pengumpulan data dan penilaian kebutuhan; perencanaan; penyebaran informasi publik; pendidikan dan pelatihan; penghubung pekerjaan ranjau komunitas; evaluasi; pendidikan resiko ranjau darurat; dan koordinasi.

Pada bulan Maret 2006, Program Pekerjaan Ranjau Afghanistan menerbitkan studi pengawasan dampak MRE secara menyeluruh, mempresentasikan dan menganalisa dua survey yang dilakukan pada tahun 2004-2005. Survey-survey ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan MRE di antara anak-anak laki-laki dan para pria muda lebih besar daripada di antara para wanita dan anak-anak perempuan, tapi mayoritas besar insiden ranjau/UXO melibatkan anak-anak laki-laki dan para pria muda, yang menunjukkan bahwa MRE sebagai aktivitas yang berdiri sendiri tidak memadai untuk merubah perilaku berbahaya: "Keperluan ekonomi menimbulkan Pengabaian bahaya *bawah sadar* ini."

Di Albania, sebuah studi menunjukkan bahwa negara ini menghadapi masalah serius dari sisa bahan peledak perang yang belum terselesaikan oleh program pekerjaan ranjaunya, yang difokuskan di daerah Kukës yang terkena-dampak-ranjau sementara mengabaikan area-area lain yang menderita dari ERW. Negara-negara yang akhir-akhir ini mulai mengembangkan strategi MRE baru seperti Jordan memperhitungkan faktor ERW ini.

Di Angola, Orang Cacat Internasional melakukan evaluasi eksternal untuk proyek MRE-nya di Huambo pada tahun 2005. Beberapa dari penemuan utama adalah para relawan membutuhkan pengawasan dari dekat, pelatihan pengawasan dan penyegar untuk tetap termotivasi, dan bahwa kecuali MRE dianggap sebagai persyaratan jangka-panjang, pendekatan-pendekatan lain mungkin lebih tepat dan menghabiskan lebih sedikit waktu daripada pendekatan berbasis-komunitas. Pelatihan bagi para agen untuk metode partisipasi direkomendasikan.

Di Laos, UNICEF dan GICHD menerbitkan studi tentang dampak ekonomi logam sampah pada anak-anak, sebagai respon terhadap peningkatan jumlah kecelakaan yang dilaporkan. Mereka menyimpulkan bahwa harga yang menguntungkan dari pasar logam sampah menyulitkan identifikasi sumber-sumber pendapatan alternatif; pesan-pesan keselamatan bisa ditingkatkan; dan, penekanan yang lebih besar seharusnya ditempatkan pada mendukung komunitas dalam mengelola semua resiko ini bagi diri mereka sendiri. UNICEF dan GICHD juga melepaskan evaluasi dari proyek-proyek pendidikan resiko UXO dari UNICEF di Laos.

Di Kamboja, sebuah studi yang diterbitkan pada bulan Desember 2005 meringkas kekuatan dan kelemahan pendekatan berbasis-komunitas. Disimpulkan bahwa “pekerjaan ranjau dan perwakilan pembangunan memiliki mandat dan agenda mereka sendiri dan tidak selalu responsive terhadap permintaan untuk bantuan yang dimunculkan komunitas.” Dikatakan bahwa pendekatan Kelompok Penasehat Ranjau meningkatkan pengertian antara team-team pekerjaan ranjau dan penduduk lokal, tapi dicatat bahwa penghubung komunitas bisa menjadi “pendekatan yang relatif bersifat transisi yang tidak berlangsung lama melampaui operasi penghapusan ranjau; bisa menghabiskan waktu... [dan] merupakan proses konsultasi bukan proses membangun kompetensi lokal.” Pendekatan Pusat Pekerjaan Ranjau Kamboja murah biaya, yang memungkinkan area-area besar untuk dicakup, mengembangkan kompetensi lokal dan mempromosikan pembuatan keputusan lokal; akan tetapi, membentuk pengumpulan informasi yang hanya sedikit lebih dari dasar

dan penghubung komunitas dasar, dan membutuhkan padat pelatihan dari titik-titik fokus wilayah.

Kecelakaan Ranjau Darat dan Bantuan Bagi Orang Yang Selamat

“Orang-orang yang selamat dari ranjau bukan merupakan masalah yang harus diselesaikan. Mereka merupakan para individu dengan harapan dan impian seperti kita semua. Mereka merupakan aset dengan kapasitas menjadi para kontributor produktif untuk pembangunan sosial dan ekonomi komunitas mereka. Tantangannya adalah memberikan lingkungan dan peluang yang akan memungkinkan orang-orang yang selamat dari ranjau dan orang-orang cacat lain untuk mencapai potensi penuh mereka dalam memberikan kontribusi kepada komunitas mereka dan merealisasikan impian mereka.

Kecelakaan-kecelakaan baru pada tahun 2005-2006

Pada tahun 2005, Pengawasan Ranjau Darat mengidentifikasi kecelakaan-kecelakaan baru dari ranjau dan sisa bahan peledak perang di 58 negara, dengan jumlah yang sama seperti dalam *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005*. Pengawasan Ranjau juga mendaftarkan kecelakaan ranjau/ERW di tujuh dari sembilan area-area bukan-negara yang ia cakup, kurang satu daripada yang dilaporkan tahun lalu. Antara bulan Januari dan Juni 2006, semua kecelakaan ini tercatat di 48 negara dan enam area.

Dibandingkan dengan *Laporan Pengawasan Ranjau Darat* tahun lalu, ada tujuh negara baru dengan kecelakaan yang dilaporkan: Chile, Honduras, Kenya, Moldova, Maroko, Namibia, dan Peru. Ada juga tujuh negara yang dikeluarkan dari daftar tahun lalu karena tidak ada kecelakaan ranjau/ERW yang dilaporkan sejak akhir tahun 2004 di Belarus, Cyprus, Djibouti, Ekuador, Uzbekistan, Venezuela, dan Zambia.

Pengawasan Ranjau Darat telah mengidentifikasi 16 negara lain dan satu area di mana tidak ada kecelakaan ranjau darat baru pada tahun 2005-2006, tapi dengan kecelakaan (total 130) yang secara eksklusif disebabkan oleh persenjataan perang yang tidak diledakkan: Bangladesh, Belarus, Bolivia, Côte d'Ivoire, Guatemala, Hongaria, Kyrgyzstan, Latvia, Liberia, FYR Makedonia, Mongolia, Polandia, Republik Kongo, Tunisia, Ukraine, dan Zambia, juga Kosovo. Di 11 negara dari semua negara ini, Pengawasan Ranjau Darat tidak mencatat kecelakaan pada tahun 2004.

Pada tahun 2005-2006, kecelakaan ranjau/ERW masih terjadi di setiap daerah di dunia: di 17 negara dan satu area di Afrika Bawah Sahara, di 13 negara dan satu area di daerah Asia-Pasifik, di 12 negara dan tiga area di Eropa dan Asia Tengah, di 10 negara dan dua area di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan di enam negara di Amerika, Pengawasan Ranjau Darat menemukan bahwa 36 dari 65 negara dan area yang mendapat kecelakaan ranjau baru pada tahun 2005-2006 belum mengalami konflik bersenjata selama periode riset. Untuk semua dari tujuh negara ini menambah daftar kecelakaan pada tahun 2005-2006, alasan untuk pemasukannya adalah kecelakaan-kecelakaan baru dari konflik-konflik sebelumnya, bukan permulaan konflik baru. Akan tetapi, konflik yang meluas di sejumlah negara terhitung untuk sebagian besar peningkatan kecelakaan global pada tahun 2005, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

Peningkatan Kecelakaan tahun 2005

Ranjau darat terus memberikan ancaman yang signifikan, berlangsung lama, dan tanpa pandang bulu. Pengawasan Ranjau Darat mengidentifikasi sedikitnya 7.328 kecelakaan ranjau darat/ERW baru dalam tahun kalender 2005-721 (11 persen) lebih banyak daripada tahun 2004 (6.607). Akan tetapi penting untuk diingat bahwa angka 7.328 ini hanya mewakili kecelakaan *yang dilaporkan* dan tidak memperhitungkan banyak kecelakaan yang diyakini yang terjadi tanpa dilaporkan. Di banyak negara, orang-orang sipil terbunuh atau terluka di area-area terpencil jauh dari suatu bentuk bantuan atau alat komunikasi; di sejumlah negara, semua kecelakaan ini tidak dilaporkan karena alasan militer atau politik. Walaupun diakui bahwa tidak mungkin untuk mengetahui kepastian yang mutlak, Pengawasan Ranjau Darat terus memperkirakan bahwa ada antara 15.000 dan 20.000 kecelakaan ranjau darat/ERW baru setiap tahun.

Mayoritas besar (81 persen) dari kecelakaan ranjau darat baru pada tahun 2005 adalah orang-orang sipil, seperti di tahun-tahun yang lalu. Total tahun 2005 termasuk sedikitnya 1.518 anak-anak (21 persen) dan 347 wanita (5 persen). Sembilan belas persen dari kecelakaan yang dilaporkan diidentifikasi sebagai personil militer (1.404), suatu penurunan dari 25 persen (1.650) pada tahun 2004.

Jumlah kecelakaan ranjau/ERW baru yang dilaporkan telah menurun secara signifikan di sejumlah negara yang sangat terkena-dampak-ranjau (yang bisa dicatat Albania dan Bosnia dan Herzegovina), tapi terus meningkat di sejumlah negara lain (yang bisa dicatat Kolombia, Mozambik, dan Pakistan). Jumlah kecelakaan itu tetap cukup ajeg di sebagian besar negara, termasuk Afghanistan, Kamboja, dan Laos.

Peningkatan global kecelakaan pada tahun 2005 sebagian besar disebabkan oleh konflik yang meluas di sejumlah negara. Di delapan negara dan satu area yang mengalami konflik (Burma/Myanmar, Kolombia, India, Irak, Nepal, Pakistan, Somalia, Turki; dan Palestina) ada kombinasi peningkatan kecelakaan yang berjumlah total lebih dari 950. Tekanan ekonomi dan gerakan penduduk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kecelakaan di negara-negara ini seperti di Lebanon, Mozambik, Siria, dan Uganda. Dalam sejumlah kasus, jumlah yang lebih besar dari kecelakaan yang dilaporkan sedikitnya sebagian mencerminkan sumber informasi yang lebih baik atau analisa media yang meningkat (misalnya, di Algeria, Maroko, Nepal, Filipina, dan Rusia). Dalam beberapa kasus, satu kecelakaan tunggal menimbulkan peningkatan besar pada kecelakaan, seperti di Eritrea dan Yemen.

Dari total kecelakaan yang dicatat, 39 persen (2.833) terjadi hanya di tiga negara: Afghanistan, Kamboja, dan Kolombia. Sebagian besar (58 persen) dari kecelakaan yang dicatat terjadi di 37 Pihak Negara, dan 42 persen terjadi di 28 bukan Pihak Negara atau area-area yang tidak dikenal PBB. Dari kecelakaan-kecelakaan di Pihak Negara, 87 persen dicatat di 24 negara yang diidentifikasi memiliki jumlah signifikan orang-orang yang selamat dari ranjau ("VA 24"). Analisa data menunjukkan bahwa jauh lebih sedikit yang diketahui tentang kecelakaan di bukan Pihak Negara.

Pada tahun 2005, sebagian besar dari kecelakaan yang dilaporkan terjadi di Kolombia – 1.110 (naik dari 882 pada tahun 2004), Kamboja – 875 (turun dari 898 pada tahun 2004), Afghanistan – 848 (turun dari 857 pada tahun 2004), Afghanistan – 848 (turun dari 857 pada tahun 2004), Irak – 363 (naik dari 261 pada tahun 2004) dan Palestina – 363 (naik dari 187 pada tahun 2004).

Pada tahun 2005, peningkatan yang bisa dicatat pada kecelakaan terjadi di Kolombia – naik 228 menjadi 1.110, Palestina – naik 176 menjadi 363, Somalia – naik 174 menjadi 276, Irak – naik 102 menjadi 363, dan Burma – naik 99 menjadi 231.

Pada tahun 2005, penurunan yang bisa dicatat pada kecelakaan dilaporkan di Vietnam – turun 126 menjadi 112, Chechnya – turun 70 menjadi 24 (seperti yang dicatat oleh UNICEF), Bosnia dan Herzegovina – turun 24 menjadi 19, Albania – turun 23 menjadi 23 dan Sri Lanka – turun 18 menjadi 39. Tampaknya juga ada penurunan yang signifikan pada kecelakaan di Angola, tapi data penuh-setahun untuk tahun 2005 tidak tersedia pada pertengahan tahun 2006.

Pada tahun 2005-2006, peningkatan jumlah negara telah memperkuat konflik yang dihasilkan pada keduanya yaitu lebih banyak kecelakaan ranjau dan ERW orang sipil dan militer (nasional dan luar negeri). Di Chad, ada 54 kecelakaan dari bulan Januari sampai Mei 2006, dibandingkan dengan 35 pada tahun 2005 dan 32 pada tahun 2004. Di Kolombia, telah ada peningkatan secara konstan pada kecelakaan, di mana 526 pada lima bulan pertama tahun 2006, 1.110 pada tahun 2005, 882 pada tahun 2004, 734 pada tahun 2003 dan 627 pada tahun 2002. Di Pakistan, dalam lima bulan pertama tahun 2006 sedikitnya 344 kecelakaan ranjau/ERW dilaporkan dalam media, dibandingkan dengan 214 pada semua kecelakaan tahun 2005.

Tidak hanya negara-negara yang terkena-dampak-ranjau mendapatkan masalah ranjau darat. Pada tahun 2005-2006, kecelakaan ranjau-ERW juga termasuk para warganegara dari 31 negara dan satu area (termasuk sembilan negara bebas-ranjau) yang terbunuh atau terluka ketika berada di luar negeri terlibat dalam konflik militer, operasi penghapusan ranjau, menjaga perdamaian atau aktivitas-aktivitas lain. Negara-negara bebas-ranjau itu adalah Perancis, Kazakhstan, Belanda, Portugal, Qatar, Romania, Afrika Selatan, Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat. Negara-negara lain itu adalah Armenia, Bangladesh, Mesir, Eritrea, Georgia, India, Irak, Jordan, Kuwait, Mauritania, Moldova, Maroko, Peru, Filipina, Rusia, Korea Selatan, Sudan, Thailand, Tunisia, Turki, Ukraine, dan Zimbabwe, juga Palestina.

Pada tahun 2005 dan Januari-Juni 2006, kecelakaan-kecelakaan ranjau selama operasi pembebasan atau dalam latihan pelatihan menyebabkan kecelakaan di sedikitnya 29 negara dan area: Abkhazia, Afghanistan, Albania, Angola, Bosnia dan Herzegovina, Kamboja, Chad, Chile, Kroasia, Ethiopia, Georgia, Yunani, Hongaria, Iran, Kuwait, Lebanon, Liberia, Mozambik, Nikaragua, Peru, Serbia, dan Montenegro, Somaliland, Sri Lanka, Sudan, Taiwan, Tajikistan, Turki, Vietnam, dan Yemen.

Peralatan bahan peledak yang ditingkatkan merupakan masalah yang membesar di banyak negara. Sebagian besar insiden IED yang Pengawasan Ranjau Darat identifikasi pada tahun 2005 dan 2006 melibatkan peralatan yang dipicu-perintah atau dikeluarkan-kendaraan, dan karena itu tidak termasuk dalam total kecelakaan Pengawasan Ranjau Darat. Peralatan yang dipicu-perintah digunakan secara luas di Afghanistan, Irak dan India. Tapi dalam sejumlah kasus, IEDs meledak secara kontak langsung dengan orang, yang bekerja sebagai ranjau anti-personil *de facto*, dan semua kecelakaan itu dimasukkan. Akan tetapi, identifikasi tipe IED (dipicu-perintah atau dipicu-korban) sering sulit, khususnya ketika menggunakan laporan media, yang biasanya tidak memberikan rincian yang cukup tentang keadaan ledakan atau istilah yang tepat untuk tipe-tipe peralatan. Di Algeria, IEDs yang dipicu-korban menyebabkan 46 dari 51 kecelakaan pada tahun 2005, yang lain disebabkan oleh ranjau dan ERW anti-personil. Di Nepal, UNICEF menemukan bahwa dari bulan Januari-Mei 2006, 90 persen dari kecelakaan sipil disebabkan oleh IEDs, yang mayoritasnya dipicu-korban.

Peningkatan jumlah kecelakaan itu dirujuk kepada manusia (utamanya pria dan anak laki-laki) yang terlibat dalam peningkatan perdagangan logam sampah di banyak negara. Di Vietnam, survey dampak di tiga provinsi menunjukkan bahwa pengumpulan logam sampah, “perburuan bom,” dan perusakan terhitung untuk sedikitnya 62 persen dari semua kecelakaan dari tahun 2001 sampai 2005. Di Jordan, delapan dari sembilan kecelakaan yang dilaporkan sampai tanggal 18 April 2006 berasal dari logam sampah yang diperdagangkan. Di Azerbaijan, sebuah ledakan dalam kelompok kerja logam yang memproses persenjataan perang dari toko-toko *munition* Soviet sebelumnya di Aghstafa

membunuh tiga orang dan melukai 23 orang. Pada catatan positif, di Kamboja pembuatan kebijakan yang lebih tegas menurunkan jumlah pialang yang menjual bahan berbahaya, yang menghasilkan lebih sedikit kecelakaan dalam lima bulan pertama tahun 2006.

Peningkatan Jumlah Orang Yang Selamat Secara Global

Jumlah kecelakaan baru setiap tahun hanya merupakan indikator kecil dari masalah ranjau darat, karena total jumlah orang-orang yang selamat dari ranjau darat yang berhak mendapatkan bantuan terus meningkat. Jumlah yang tepat dari orang-orang yang selamat secara global tidak diketahui. Pengawasan Ranjau Darat itu telah mengidentifikasi lebih dari 264.000 orang-orang yang selamat dari ranjau, mayoritas besar terluka dari tahun 1970an dan seterusnya. Akan tetapi angka dari orang-orang yang selamat yang dicatat hanya merupakan titik permulaan. Adalah wajar untuk mengasumsikan bahwa, walaupun dengan adanya peningkatan pencatatan ke belakang terhadap orang-orang yang selamat, jumlah yang signifikan dari orang-orang yang selamat tidak memasukkan banyak perkiraan orang-orang yang selamat di berbagai negara. Angka itu tidak memasukkan perkiraan baru dan lebih akurat untuk jumlah orang-orang yang selamat di Afghanistan, dari antara 52.000 dan 60.000, atau hasil-hasil pertama dari database kelumpuhan di Eritrea yang menunjukkan bahwa ada 84.000 orang yang selamat dari ranjau darat yang diketahui. Angka itu juga tidak memasukkan perkiraan yang lama ada sebesar 70.000 orang yang selamat dari ranjau di Angola, 30.000 di Mozambik, dan 80.000 di Ukraine. Walaupun mengakui bahwa sejumlah perkiraan negara itu tidak handal, dan karena tidak mungkin memastikan berapa banyak orang yang selamat yang masih hidup, perkiraan konservatif dari orang-orang yang selamat di dunia saat ini sekitar 350.000 sampai 400.000 tapi mungkin lebih dari 500.000.

Banyak negara dengan kecelakaan ranjau darat baru yang tidak dilaporkan bagaimanapun juga memiliki orang-orang yang selamat dari ranjau darat yang terus membutuhkan bantuan. Pengawasan Ranjau Darat telah mengidentifikasi 122 negara dengan orang-orang yang selamat dari ranjau darat, termasuk 19 negara yang tidak terkena-dampak-ranjau dengan para warganegara yang terluka di luar negeri dalam kecelakaan ranjau dan kecelakaan penghapusan ranjau. Ini berarti bahwa hampir dua pertiga dari

negara-negara di dunia ini secara langsung terkena-dampak-ranjau sampai suatu batasan oleh masalah ranjau darat/ERW dan masalah orang-orang yang selamat.

Kapasitas dan Tantangan Dalam Pengumpulan Data

Pada Konferensi Tinjau Ulang Pertama bulan November-Desember 2004, Para Pihak Negara mengakui “nilai dan keperluan untuk data yang akurat dan mutakhir tentang jumlah kecelakaan ranjau darat yang baru, total jumlah orang yang selamat dari ranjau dan kebutuhan tertentu mereka, dan batasan/kekurangan dan kualitas pelayanan yang ada untuk menyelesaikan kebutuhan mereka....” Akan tetapi, data menyeluruh tentang kecelakaan ranjau darat/UXO terus sulit untuk didapatkan, khususnya di negara-negara yang mengalami konflik berjalan, dengan tanah berranjau di area-area terpencil, atau dengan sumber daya yang terbatas untuk mengawasi pelayanan kesehatan publik. Sumber-sumber yang digunakan untuk mengidentifikasi kecelakaan-kecelakaan baru termasuk database, catatan pemerintah, catatan rumah sakit, laporan media, survey, penilaian dan wawancara. Para pengumpul utama dari data kecelakaan ranjau merupakan pusat pekerjaan ranjau, Komite Internasional Palang Merah, masyarakat nasional Bulan Sabit Merah dan Palang Merah, UNICEF, dan sejumlah LSM.

Sejumlah negara yang terkena-dampak-ranjau mengumpulkan dan menyimpan data insiden dan kecelakaan ranjau dengan menggunakan Sistem Manajemen Informasi untuk Pekerjaan Ranjau (*IMSMA/Information Management System for Mine Action*) atau database-database lain. Sering kurangnya sumber daya manusia dan keuangan menghambat pengumpulan data prospektif, proaktif dan penggunaan operasional penuh database. IMSMA utamanya dibentuk untuk tujuan pekerjaan ranjau kemanusiaan, yang membuatnya kurang tepat untuk data kecelakaan dan perencanaan bantuan orang yang selamat. Sebagai tambahan, banyak pelaku telah menunjukkan bahwa sistem-sistem lain lebih mudah untuk disesuaikan dengan konteks lokal, lebih bersahabat-dengan-pengguna dan bisa memuat informasi bantuan orang selamat yang relevan untuk tujuan perencanaan. Survey dampak ranjau darat juga memberikan indikasi kecelakaan dalam komunitas-komunitas yang diidentifikasi terkena-dampak-ranjau, tapi hal ini tidak menunjukkan jumlah orang yang

selamat dari ranjau yang hidup di luar semua tempat yang disurvei ini, atau penduduk pengembara atau yang dipindahkan. Walaupun demikian, para perencana bantuan orang yang selamat telah mengatakan kepada Pengawasan Ranjau Darat bahwa hasil-hasil LIS belum digunakan sampai batasan penuhnya untuk tujuan-tujuan perencanaan.

Dari 58 negara dan tujuh area yang melaporkan kecelakaan ranjau baru pada tahun 2005-2006, 40 negara dan lima area melaporkan menggunakan IMSMA atau database yang bisa dibandingkan lain untuk mencatat data kecelakaan. Dari semua itu, hanya sembilan negara dan satu area mampu memberikan Pengawasan Ranjau Darat dengan data lengkap setahun penuh, yang dikumpulkan di semua dari daerah-daerah yang terkena-dampak-ranjau. Bahkan di negara-negara dengan sistem pengumpulan data yang berfungsi, mungkin tidak semua kecelakaan ranjau yang dilaporkan.

Di sejumlah negara, penurunan signifikan pada kecelakaan baru yang dilaporkan tampaknya merupakan hasil dari penurunan pada kemampuan untuk melaksanakan pengumpulan data secara menyeluruh, seperti di Angola, Burundi, dan Rwanda. Dalam kasus-kasus lain, konflik-konflik (seperti di Burma dan Irak), ketidakstabilan dan ketidakamanan (seperti di Sudan), atau alasan politik (seperti di Kolombia) menghambat pengumpulan data dan berbagi informasi.

Di negara-negara yang terkena-dampak-ranjau lain, tidak ada mekanisme pengumpulan data secara formal. Hanya data terbatas tentang kecelakaan ranjau darat/UXO dikumpulkan dari Kementerian dan perwakilan pemerintah, perwakilan internasional, LSM, rumah sakit, laporan media, survey, dan kampanye negara dari ICBL. Di banyak negara, ada kemungkinan yang kuat bukan hanya pelaporan yang diperkecil secara signifikan, tapi juga data yang tidak akurat atau digandakan.

Pada tahun 2005-2006, banyak negara memberikan perkembangan di area pengumpulan data ke belakang oleh perangkat data yang dikonsolidasi, yang menyatukan sistem pengumpulan data yang terpisah, yang meninjau ulang catatan-catatan yang ada dan mengunjungi kembali orang-orang yang selamat. Di negara-negara lain, pengumpulan data itu diperluas untuk mencakup area-area yang sebelumnya tidak diawasi, atau memasukkan

statistik-statistik yang lebih baik tentang kecelakaan yang lebih sedikit akhir-akhir ini. Sebagai tambahan, banyak pemerintah, LSM, dan para ahli lain telah mengidentifikasi penyebaran informasi yang lebih baik dan penyatuan yang lebih baik ke dalam mekanisme pengawasan orang cidera yang lebih besar sebagai area prioritas untuk ditingkatkan; sejumlah negara mencoba untuk memasukkan lebih banyak informasi bantuan orang selamat yang relevan untuk meningkatkan data untuk tujuan perencanaan program bantuan orang yang selamat.

Albania: Pada tahun 2005, laporan insiden dan pengukuran kebutuhan disusun untuk kecelakaan-kecelakaan yang tidak diketahui sebelumnya di “tempat-tempat panas” dari pemberontakan tahun 1997 agar dapat meningkatkan perencanaan. Perencanaan bantuan orang yang selamat dan identifikasi para penerimanya didasarkan pada analisa pengumpulan data secara terus menerus, termasuk informasi rinci tentang kebutuhan dan status para penerima. Proyek-proyek penyatuan kembali sosial ekonomi terdaftar di IMSMA untuk mengukur perkembangan dan membuat perbandingan dengan survey dampak asli yang mungkin.

Bosnia dan Herzegovina: Pada tahun 2006, kontrol penuh dari database kecelakaan ranjau/UXO yang disatukan diberikan kepada Pusat Pekerjaan Ranjau BiH (*BHMAC/BiH Mine Action Center*) dalam usaha untuk menghindari tumpang-tindih. Semua orang yang selamat dalam database akan dikunjungi dan BHMAC akan memberikan pemutakhiran berkala kepada para mitra untuk perencanaan dan koordinasi yang lebih baik untuk bantuan orang yang selamat dan program-program pekerjaan ranjau lain.

Kamboja: Dalam Sistem Informasi Korban Ranjau/UXO Kamboja, sub-kelompok kumpulan data dan para pelaku bantuan untuk korban dibentuk pada bulan Desember 2005 untuk menyelesaikan kekurangan informasi tentang perkembangan orang-orang yang selamat melalui rehabilitasi dan pelayanan lain.

Eritrea: Survey Nasional untuk Rakyat Lumpuh diselesaikan pada tahun 2005, yang menetapkan database nasional pertama bagi orang lumpuh, termasuk orang-orang yang selamat dari ranjau; database itu memiliki petunjuk psikologi dan sosial yang rinci.

Ethiopia: Pada tahun 2005-2006, data kecelakaan tidak dikumpulkan karena kekurangan kemauan politik, koordinasi, mandat yang didefinisikan dengan jelas dan divisi tugas-tugas antara tingkat pemerintah pusat dan lokal; para mitra yang bertindak tidak memiliki akses bebas untuk informasi dalam IMSMA.

Pakistan: Database ranjau/UXO dengan hasil dari survey rumah tangga di Perwakilan Kurram telah dibentuk untuk memfasilitasi intervensi di masa mendatang.

Mengumpulkan Informasi Tentang Para Penerima

Mengumpulkan dan berbagi informasi yang akurat tentang jumlah orang yang dibantu, dan orang yang ada dalam daftar tunggu sehubungan dengan total jumlah orang yang selamat dari ranjau dan orang-orang lain yang lumpuh, penting untuk tujuan perencanaan. Banyak fasilitas telah diminta untuk melaporkan tentang berapa banyak orang yang selamat dari ranjau. Pengawasan Ranjau Darat tidak selalu mampu untuk mendapatkan informasi ini dan sejumlah fasilitas tidak menyimpan catatan tentang penyebab cedera, karena semua orang yang lumpuh diperlakukan secara setara. Sejumlah fasilitas yang dilaporkan tidak memiliki kapasitas untuk mencatat sebetulnya data. Dalam banyak kasus, data ini tidak dikumpulkan dengan cara yang sistematis atau tersentralisasi sehingga bisa diverifikasi, dikumpulkan, dan secara efektif dianalisa untuk tujuan perencanaan. Sejumlah organisasi tidak menghitung jumlah penerima, tapi menghitung jumlah sesi yang diberikan; orang-orang lain tidak mencatat jumlah pasien baru, atau tidak memasukkan informasi pasien untuk memberikan petunjuk tentang jangkauan program ini, perubahan pada profile pasien, atau perubahan pada lingkup masalah. Peningkatan kepemilikan bersama informasi juga akan menurunkan penggandaan pelayanan dan jurang pemisah pada pelayanan yang ada, dan meningkatkan sistem rujukan. Akan tetapi, walaupun diakui bahwa data ini jauh dari lengkap, data ini tidak memberikan petunjuk tentang di mana perhatian tambahan itu mungkin dibutuhkan.

Menyelesaikan Kebutuhan Orang-orang Yang Selamat

Walaupun telah ada perkembangan, program-program yang ada jauh dari memenuhi kebutuhan orang-orang yang selamat dari ranjau darat. Orang-orang yang selamat itu terus

menghadapi banyak permasalahan yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Orang-orang yang selamat dan orang-orang lain yang lumpuh masing berada di antara kelompok yang paling miskin dalam setiap masyarakat dan sering tidak memiliki akses untuk sejumlah kebutuhan paling dasar: keamanan makanan, air bersih, perumahan yang memadai, alat untuk mendapatkan pendapatan, perawatan kesehatan yang terjangkau, rehabilitasi, pendidikan atau pelayanan pengangkutan, apalagi pelayanan konseling dan hak-hak yang sama. Sebagai tambahan, banyak laporan LSM lokal dan internasional yang kekurangan pendanaan, khususnya pendanaan jangka-panjang, membatasi operasi mereka dan pemeliharaan program mereka.

Perjanjian Pelarangan Ranjau, dalam Pasal 6, Ayat 3, bahwa “Setiap Negara dalam posisi melakukan hal itu harus memberikan bantuan perawatan dan rehabilitasi, dan penyatuan kembali sosial dan ekonomi, dari para korban ranjau...” Banyak orang yang selamat dari ranjau mendapatkan manfaat dari bantuan untuk korban oleh Para Pihak Negara dan pihak-pihak lain. Para Pihak Negara telah sepakat untuk mempromosikan pendekatan menyatu yang menyeluruh terhadap bantuan untuk korban yang bersandar pada definisi tiga-tingkat untuk korban ranjau darat. Ini berarti bahwa “korban ranjau” termasuk para individu yang terkena-dampak-ranjau secara langsung, keluarga mereka, dan komunitas yang terkena-dampak-ranjau. Konsekuensinya, bantuan untuk korban dianggap sebagai batasan aktivitas yang luas yang memberikan manfaat secara individual, keluarga, dan komunitas.

Lebih lanjut, Para Pihak Negara telah mengetahui bahwa orang-orang yang selamat dari ranjau merupakan bagian dari komunitas orang yang lebih besar dengan cedera dan kelumpuhan, dan bahwa usaha bantuan untuk korban seharusnya tidak mengeluarkan kelompok yang lebih besar ini karena “dorongan yang diberikan oleh Konvensi meningkatkan kesejahteraan tidak hanya para korban ranjau darat tapi juga semua orang lain dengan luka yang berhubungan dengan perang dan orang yang lumpuh.” Para Pihak Negara juga mengetahui bahwa bantuan untuk orang-orang yang selamat harus dipertimbangkan dalam konteks pembangunan dan kurangnya pembangunan yang lebih luas. Mereka telah sepakat

bahwa bantuan untuk korban ranjau harus dimasukkan ke dalam strategi pengurangan kemiskinan dan rencana pembangunan jangka-panjang untuk memastikan pemeliharannya dan menghindari pemisahan yang tidak perlu terhadap orang-orang yang selamat.

Kapasitas dan Tantangan Dalam Memberikan Bantuan

Pengawasan Ranjau Darat telah menemukan bahwa sedikitnya 49 dari 58 negara dengan kecelakaan ranjau baru pada tahun 2005-2006, dan di enam area, satu atau lebih aspek bantuan orang yang selamat dilaporkan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang selamat dari ranjau dan orang-orang lain yang lumpuh. Riset Pengawasan Ranjau Darat menunjukkan lima kelompok utama tantangan yang menghambat bantuan yang efektif pada tahun 2005-2006: akses, variasi dan efisiensi pelayanan yang diberikan, kapasitas, hak pelaksanaan, dan sumber daya keuangan.

Akses untuk perawatan

Sebagian besar pelayanan perawatan kesehatan, rehabilitasi dan sosial ekonomi yang disatukan kembali berlokasi di pusat-pusat perkotaan, dan sering berjarak jauh dari area-area pedesaan yang terkena-dampak-ranjau di mana mayoritas orang-orang yang selamat dari ranjau hidup. Program rehabilitasi berbasis-komunitas tetap terbatas. Akses ke pelayanan lebih lanjut terhambat oleh kurangnya pengangkutan, termasuk pengangkutan darurat, kesadaran yang tidak memadai dari pelayanan yang ada, tidak adanya atau kurangnya sistem rujukan dan hambatan birokrasi untuk kelompok-kelompok orang tertentu untuk mendapatkan pelayanan tertentu. Di mana perawatan darurat sebagian besar bebas biaya, melanjutkan perawatan medis, rehabilitasi, konseling dan pelayanan sosial ekonomi tidak selalu gratis, khususnya tidak untuk orang yang tidak diasuransikan. Bahkan jika pelayanan itu gratis, pengangkutan, penginapan, dan makanan biasanya tidak gratis. Hambatan ekonomi sering menghambat orang meninggalkan rumah mereka untuk perawatan yang dibutuhkan.

Variasi dan keefektifan bantuan

Mayoritas sumber daya terus diarahkan ke arah perawatan medis dan pemberian peralatan *orthopedic*/tulang. Walaupun ada program pelatihan kejuruan, pelatihan ini tidak

selalu memberikan kerja atau pendapatan yang bertahan. Semua program ini tidak selalu memenuhi permintaan pasar, dan mungkin tidak ada pelayanan penempatan kerja atau tindak-lanjut yang memadai untuk proyek-proyek pembangkit pendapatan. Sebagai tambahan, orang yang lumpuh sering tidak berhak untuk pelatihan kejuruan secara teratur atau rencana kredit-kecil. Pendidikan khusus atau memasukkan segalanya tetap terbatas, seperti halnya kapasitas para guru untuk berurusan dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pada tahun 2005-2006, dukungan sosial kejiwaan tetap terbatas karena cacat sosial dan kurangnya pengetahuan tentang efek yang menguntungkan. Beberapa pelayanan konseling resmi ada, yang membuat sesama kelompok pendukung dan jaringan kerja keluarga sistem pendukung utama. Walaupun dengan adanya seruan untuk rehabilitasi yang disatukan, banyak pelaku berfokus hanya pada satu bagian bantuan orang yang selamat dan sistem rujukan tetap lemah.

Kapasitas

Kapasitas prasarana dan sumber daya manusia tetap menjadi permasalahan rumit utama. Banyak fasilitas kesehatan, rehabilitasi dan penyatuan kembali membutuhkan peningkatan dan peralatan baru, dan banyak mendapatkan kesulitan memelihara persediaan yang memadai. Bagian yang lebih besar dari sektor rehabilitasi fisik tetap terikat pada dukungan internasional yang disebabkan oleh biaya material yang besar. Staff khusus membutuhkan pelatihan teknis dan manajemen yang berlanjut untuk pemeliharaan proyek-proyek, seperti halnya asosiasi orang lokal dengan kelumpuhan. Membangun kapasitas pada tingkat pemerintah dan koordinasi di antara para pihak berkepentingan, termasuk perwakilan lokal, nasional, dan internasional, tetap menjadi tantangan prioritas.

Pelaksanaan hak

Banyak negara memiliki legislasi umum atau tertentu yang menyelesaikan diskriminasi terhadap orang lumpuh, tapi pelaksanaannya tetap lemah. Beberapa negara telah memperkenalkan kuota pekerjaan bagi orang lumpuh dan denda terhadap ketidakpatuhannya, tapi semua ini jarang telah ditegakkan. Pengangguran di antara orang lumpuh tetap tinggi. Kompensasi bagi orang-orang yang selamat dari ranjau, orang lumpuh

dan mantan-serdadu lumpuh terus tidak memadai dalam banyak kasus; dalam periode pelaporan ini, sejumlah negara telah mengurangi tunjangan mereka. Personil militer terus menerima kompensasi yang lebih besar daripada orang-orang sipil. Kelompok-kelompok *indigenous*, pengembara, pengungsi atau orang yang dipindahkan di dalam negeri masih memiliki akses yang lebih kecil untuk hak mereka, sering karena mereka tidak bisa menghasilkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Sumber daya keuangan

Pada tahun 2005, dukungan keuangan donor untuk program bantuan untuk korban meningkat, tapi bantuan untuk korban tetap menjadi komponen terkecil dari pendanaan pekerjaan ranjau. Pendanaan jangka-panjang untuk memastikan pemeliharaan program sulit didapatkan. Entitas-entitas nasional (baik pemerintah dan bukan-pemerintah) hanya secara perlahan meningkatkan kontribusi mereka untuk proyek-proyek yang didukung secara internasional, dan entitas-entitas nasional sering kekurangan sumber daya keuangan untuk melanjutkan program-program setelah organisasi-organisasi internasional itu ditarik.

Faktor-faktor lain

Konflik yang berlanjut, dan konsekuensi permasalahan keamanan, sangat membatasi kemampuan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang selamat dari ranjau darat di sejumlah negara. Seluruh kelompok penduduk dikeluarkan dari bantuan dalam sejumlah kasus. Prioritas lain yang muncul bagi penyedia bantuan pemerintah dan bukan-pemerintah, seperti HIV/AIDS, juga berdampak.

Bantuan Untuk Korban Dan Pelaksanaan Perjanjian Pelarangan Ranjau

Perjanjian Pelarangan Ranjau merupakan perjanjian perlucutan senjata multilateral pertama untuk menyerukan kepada negara-negara mengambil tanggungjawab dalam membantu para korban tipe senjata tertentu. Dalam rapat-rapat Komite Kedudukan Bantuan Untuk Korban dan Penyatuan kembali Sosial Ekonomi (SCVA/*Standing Committee on Victim Assistance*), pemerintah, orang-orang yang selamat, ICRC, ICBL, dan LSM-LSM lain bekerja erat untuk mengembangkan pengertian dan pelaksanaan bantuan untuk korban. Sejak bulan Desember 2005, Afghanistan dan Swiss telah bekerja sebagai para ketua-bersama SC-VA

dan Sudan dan Austria telah bekerja sebagai *co-rapporteurs* (mereka diharapkan untuk menjadi ketua-bersama pada bulan Desember 2006).

Pada Konferensi Tinjau Ulang Pertama pada bulan November-Desember 2004, Para Pihak Negara sepakat untuk 11 pekerjaan kongkrit dalam mendorong alokasi usaha-usaha dan sumber daya-sumber daya yang memadai untuk memfasilitasi rehabilitasi, penyatuan kembali, dan partisipasi penuh bagi orang-orang yang selamat dari ranjau/UXO dan orang-orang lumpuh lainnya. Dalam kerangka kerja ini, 24 Pihak Negara diidentifikasi memiliki jumlah signifikan dari orang yang selamat dari ranjau, dan “tanggungjawab terbesar untuk bertindak, tapi juga kebutuhan dan harapan terbesar untuk bantuan” dalam memberikan pelayanan yang memadai untuk perawatan, rehabilitasi, dan penyatuan kembali orang-orang yang selamat. Tanpa mengabaikan yang lain Para Pihak Negara atau bukan pihak negara Perjanjian Pelarangan Ranjau, semua negara ini, VA 24, menerima dukungan yang lebih terfokus selama periode 2005-2009.

Pada awal tahun 2005, sebuah kuesioner dikembangkan untuk membantu VA 24 dalam mengembangkan rencana pekerjaan bantuan untuk korban dengan menjawab empat pertanyaan utama: bagaimana situasinya dalam tahun 2005 pada masing-masing dari enam area tema utama bantuan untuk korban, apa yang menjadi tujuan SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, and time bound/pasti, terukur, bisa dicapai, relevan, dan terikat waktu*) yang harus dicapai pada masing-masing dari semua area ini pada tahun 2009, apa yang menjadi rencana untuk mencapai semua tujuan ini pada tahun 2009; dan cara apa yang tersedia atau dibutuhkan untuk melaksanakan semua rencana ini. Pada tahun 2006, ketua-bersama SC-VA mengakui bahwa “kuesioner itu bukan merupakan produk-akhir tapi sebaliknya merupakan langkah pertama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan jangka-panjang.” Dua kelompok kerja regional diorganisir di Amerika dan di Afrika untuk memungkinkan negara-negara yang relevan untuk berbagi pengalaman dan mengembangkan jawaban mereka kepada kuesioner itu.

Pada Rapat Keenam Para Pihak Negara di Zagreb bulan November-Desember 2005, VA 24 harus memberikan informasi tentang status bantuan bagi orang yang selamat saat ini

dan tujuan mereka selama periode sampai 2009, sebagai langkah pertama untuk merubah semua tujuan itu menjadi perencanaan pelaksanaan kongkrit. Informasi ini dimasukkan dalam lampiran rinci untuk Laporan Perkembangan Zagreb yang muncul dalam Rapat Keenam Para Pihak Negara. Akan tetapi, kualitas respon dan kapasitas yang beragam untuk merespon terhadap dua pertanyaan pertama dari kuesioner itu menjelaskan bahwa proses itu tidak bisa dilanjutkan dengan kecepatan yang sama bagi semua dari 24 Pihak Negara. Dua negara tidak menyerahkan penjelasan tentang status dan tujuan mereka saat ini (Burundi dan Chad). Beberapa negara tidak memberikan tinjauan lengkap tentang status mereka (Eritrea, Ethiopia, Guinea-Bissau, Mozambik, dan Serbia dan Montenegro). Beberapa negara tidak memberikan tujuan yang lengkap (Kolombia, Kroasia, Mozambik, Nikaragua, dan Serbia dan Montenegro). Sebagian besar negara tidak memberikan tujuan SMART (Angola, Bosnia dan Herzegovina, Kamboja, Kolombia, DR Kongo, Ethiopia, Guinea-Bissau, Mozambik, Nikaragua, Peru, Senegal, Serbia dan Montenegro, Sudan, Tajikistan, dan Thailand).

Akan tetapi, kuesioner itu berguna sebagai titik permulaan dalam menciptakan sejumlah pengertian terhadap kepemilikan nasional, sebagai tolok ukur untuk perkembangan dan petunjuk prioritas yang harus dicapai. ICBL telah mengidentifikasi bukan-penandatanganan terhadap perjanjian yang secara khusus bermanfaat untuk penggunaan kuesioner, termasuk Azerbaijan, Georgia, India, Irak, Laos, Lebanon, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Vietnam.

Dengan pendanaan yang diberikan Swiss, Unit Pendukung Pelaksanaan perjanjian ini menggunakan Spesialis Bantuan Untuk Korban dalam memberikan dukungan untuk VA 24 untuk mengembangkan tujuan SMART dan rencana pelaksanaan. Ini termasuk kunjungan negara; rapat tatap muka dengan para pejabat dari kementerian yang relevan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong koordinasi antar kementerian; komunikasi dengan organisasi internasional dan lainnya yang relevan mengenai usaha-usaha bantuan untuk korban; dan kelompok kerja antar kementerian untuk mengumpulkan para pelaku yang relevan dalam membahas dan mengkonsolidasi tujuan dan rencana.

Pada bulan Mei 2006 rapat SC-VA, Chad mempresentasikan sejumlah tujuan tahun 2005-2009-nya; Afghanistan, DR Kongo, dan Serbia dan Montenegro mempresentasikan tujuan yang diperhalus; Tajikistan mempresentasikan tujuan yang direvisi dan rencana pelaksanaan yang disepakati oleh kementerian yang relevan; Albania mempresentasikan peningkatan rencana untuk pelaksanaan dan perkembangan yang dicapai pada bulan Mei 2006. Sembilan negara VA 24 lain membuat laporan perkembangan secara umum. Hanya 10 delegasi memasukkan spesialis bantuan untuk korban (Afghanistan, Albania, Peru, Serbia dan Montenegro, Sudan dan Uganda) dan hanya tiga delegasi memasukkan orang yang selamat atau orang lumpuh (Afghanistan, Kroasia, dan Uganda). Delapan negara tidak terlibat dalam proses ini: Bosnia dan Herzegovina, Burundi, Kamboja, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Mozambik, dan Senegal.

Kelompok Kerja ICBL Bagi bantuan untuk korban (termasuk orang yang selamat dari ranjau dari berbagai negara, kampanye nasional, Orang Cacat Internasional, Jaringan Kerja Orang Yang Selamat Dari Ranjau Darat, dan koordinator riset tema Pengawasan Ranjau Darat bagi bantuan untuk korban) berpartisipasi secara aktif dalam rapat SC-VA bulan Mei 2006. Ia mempresentasikan sebuah dokumen yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan tentang bantuan untuk orang yang selamat, Bantuan Untuk Korban Ranjau Darat pada tahun 2005; Tinjauan atas Situasi di 24 Pihak Negara, yang dihasilkan oleh Australia Berdiri Tegak dan Orang Cacat Internasional dengan pendanaan dari Australia. Orang-orang yang selamat dari El Salvador dan Afghanistan membuat laporan yang mendorong Para Pihak Negara untuk melaksanakan kewajiban bantuan untuk korban mereka dan secara akurat mempresentasikan batasan masalah dan tantangan yang dihadapi bukan mempresentasikan gambaran tentang “surga orang yang selamat.” ICBL memastikan kembali komitmennya untuk memberikan pemeriksaan-realitas, untuk menghindari resiko usaha bantuan untuk korban menciptakan “surga di atas kertas.”

Sejak tanggal 12 Juli 2006, total 38 Negara Pihak telah menyerahkan Formulir 1 sukarela dengan laporan-laporan Pasal 7 2006 mereka untuk melaporkan aktivitas bantuan

untuk korban atau pendanaan pelaksanaan pekerjaan ranjau. Ini termasuk 22 Pihak Negara yang terkena-dampak-ranjau dan 16 bukan Pihak Negara yang terkena-dampak-ranjau.

Berdasarkan pada variasi faktor-faktor, Pengawasan Ranjau Darat menanggapi bahwa pada tahun 2005-2006 perkembangan paling banyak telah diberikan bagi bantuan untuk korban di Afghanistan, Albania, Eritrea, Guinea-Bissau, Tajikistan, dan Uganda. Perkembangan terkecil telah dibuat di Angola, Burundi, Kamboja, Kolombia, El Salvador, Ethiopia, Serbia dan Montenegro, dan Thailand.

Koordinasi dan Penyatuan Bantuan Untuk Korban Yang Terpelihara

Koordinasi dan Kepemilikan Nasional

Setiap negara dengan orang-orang yang selamat dari ranjau darat dan para korban ranjau lainnya bertanggungjawab untuk memastikan kesejahteraan kelompok ini sebagai bagian dari penduduk yang lebih besar. Di banyak negara yang terkena-dampak-ranjau/UXO hal ini dilakukan dengan dukungan dari komunitas internasional, dalam peran pelaksanaan, nasehat, dan pendanaan. Akan tetapi, ICBL mendorong negara-negara untuk melihat semua pelayanan ini apa adanya, pemberian sementara sampai prasarana nasional bisa memenuhi semua kebutuhan ini. Karena itu, kerjasama dan koordinasi yang di antara para pihak berwenang nasional, para mitra nasional dan internasional, perlu untuk memastikan penggunaan yang lebih baik untuk sumber daya yang terbatas, mencegah penggandaan pelayanan, dan penurunan jurang pemisah dalam pelayanan. Para Pihak Negara dan para ahli juga memprioritaskan proses ini sebagai suatu area kerja pada tahun 2006. Tanggungjawab koordinasi ini idealnya berada pada kementerian lini yang relevan dalam bentuk komite-komite antar kementerian atau angkatan kerja antar-sektoral, yang mengukur kebutuhan dan aktivitas relevan yang ada, mengembangkan tujuan dan rencana nasional dan mengidentifikasi sumber daya. Proses VA 24 terakhir mengenai kuesioner telah menunjukkan bahwa dialog di dalam dan di antara para pihak berkepentingan internasional dan para mitra pemerintah dan bukan-pemerintah cacat: semua tujuan kadang-kadang ditulis oleh seorang pemain utama, seorang pekerja asing yang bekerja di pusat pekerjaan ranjau, para konsultan eksternal, atau di dalam satu kementerian, tanpa berkonsultasi

dengan para kolega yang relevan, LSM-LSM nasional dan internasional, kampanye atau para ahli nasional dalam sektor orang lumpuh. Di sejumlah negara, para pelaku yang relevan diwawancarai tapi tidak mampu memberikan input untuk hasil akhir. Di negara-negara lain, para penyedia bantuan utama tidak sadar akan Rencana Pekerjaan Nairobi, strategi-strategi bantuan orang yang selamat lainnya atau inisiatif untuk orang lumpuh.

Agar bisa bertahan, program-program bantuan untuk orang yang selamat harus disatukan ke dalam jaringan kerja kesehatan dan sosial nasional, di mana perasaan kepemilikan, tanggungjawab, pertanggungjawaban nasional dan nasionalisasi bertahap terhadap semua program ini baik secara keuangan maupun dalam kerangka pelaksanaan terdorong. Organisasi-organisasi internasional dan LSM-LSM bisa memainkan peran penting dalam pembangunan-kapasitas kantor-kantor dan staff pemerintah di beberapa negara.

Afghanistan: pada tahun 2005-2006, angkatan kerja orang lumpuh, unit koordinasi LSM dan program pembangunan-kapasitas nasional dibangun untuk menyatukan dan mengkoordinasikan pelayanan orang lumpuh, menciptakan kepemilikan nasional dan memasukkan para pelaku relevan dalam proses-proses pembuatan keputusan sehingga kementerian-kementerian yang relevan bisa secara bertahap mengambil alih tanggungjawab.

Angola: nasionalisasi atas sektor rehabilitasi fisik terhambat oleh kurangnya kapasitas teknis, manajerial dan keuangan pemerintah.

Irak: pada pertengahan-tahun 2005, beberapa rehabilitasi yang dijalankan-LSM dan program-program medis diberikan kepada Kementerian Kesehatan di Irak bagian utara, yang juga mengembangkan strategi-strategi pembagian biaya dan tanggungjawab dengan Kementerian Sosial untuk memastikan pemeliharaan di masa mendatang.

Somalia: untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal dan untuk menciptakan kepemilikan lokal, model pembagian-biaya telah diperkenalkan di beberapa pusat rehabilitasi dan rumah sakit-rumah sakit rujukan, yang digunakan untuk membeli peralatan dan memfasilitasi perjalanan dan penginapan bagi para pasien.

Pemasukan dan Konsultasi Orang Yang Selamat

Pekerjaan #38 dari Rencana Pekerjaan Nairobi yang muncul dari Konferensi Tinjau Ulang Pertama menyatakan bahwa Para Pihak Negara harus “memastikan penyatuan yang efektif terhadap para korban ranjau dalam pekerjaan Konvensi.” Pada tingkat nasional, yang mengukur kebutuhan orang-orang yang selamat dengan cara berkonsultasi dengan mereka secara langsung merupakan alat perencanaan yang penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Pada tahun 2005-2006, banyak orang yang selamat dan organisasi mereka terus menunjukkan bahwa mereka tidak dimasukkan dalam proses-proses pembuatan perencanaan dan kebijakan, dan mereka tidak dikonsultasikan tentang apa yang mereka anggap sebagai jurang pemisah. Hanya dua orang yang selamat dari ranjau menjadi bagian dari delegasi pemerintah dalam rapat-rapat Komite Kedudukan pada bulan Mei 2006. Delegasi ICBL dalam Rapat Keenam Para Pihak Negara memasukkan 23 orang yang selamat dan sedikitnya 10 orang yang selamat hadir dalam rapat-rapat Komite Kedudukan.

Azerbaijan: pada tahun 2005, informasi bulanan berbagi dalam rapat-rapat dengan kementerian-kementerian yang relevan, LSM, ICRC dan PBB dimulai untuk meningkatkan keefektifan bantuan untuk korban. Proyek pertama sepenuhnya dikelola oleh program bantuan untuk korban nasional didanai.

Bosnia dan Herzegovina: pada tahun 2005, survey kepuasan pengguna dilakukan untuk memberikan tanggapan kepada pusat-pusat *prosthetic* dan badan-badan pemerintah yang relevan, dan menekankan masalah kualitas pelayanan dan peralatan *prosthetic*.

Kroasia: beberapa orang yang selamat bekerja di pusat pekerjaan ranjau dan dengan para operator pekerjaan ranjau sebagai pemasukan data, MRE atau staff pengawasan.

El Salvador: organisasi-organisasi orang yang selamat, para penyedia bantuan, dan orang-orang yang selamat dari ranjau tidak dimasukkan dalam pembahasan tentang rencana bantuan untuk korban nasional.

Guinea-Bissau: orang-orang yang selamat dikunjungi kembali atas dukungan LSM-LSM lokal dan Organisasi Kesehatan Dunia untuk menyelesaikan informasi dalam database kecelakaan ranjau/UXO; sebagai akibatnya, beberapa perawatan medis dan rehabilitasi dilakukan pada tahun 2006.

Penyatuan dengan Program-program Pekerjaan, Pengembangan, dan Orang Lumpuh Karena Ranjau Lainnya

Bantuan untuk korban tidak bisa dipisahkan dari kebijakan kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya dan prasarana dan pelayanan yang ada dari sebuah negara. Bantuan juga harus dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan, pembangunan kembali, dan pekerjaan ranjau dari sebuah negara. Pada tahun 2005-2006, sejumlah negara menghubungkan program bantuan untuk korban dengan Makalah Strategi Pengurangan Kemiskinan, usaha-usaha pembangunan kembali, pembangunan sektor kesehatan, koordinasi pekerjaan ranjau, tujuan millennium, dan legislasi orang lumpuh. Pada tahun 2006, VA 24 diminta untuk memberikan informasi tentang bagaimana rencana bantuan untuk korban disatukan ke dalam kerangka kerja perawatan, legislatif, dan kebijakan yang lebih luas.

Albania: bantuan untuk korban berhubungan dengan pilar-pilar pekerjaan ranjau lain, dan dengan strategi-strategi pembangunan orang lumpuh nasional dan komunitas regional, semua didorong oleh kebutuhan orang yang selamat dan komunitas-komunitas yang terkena-dampak-ranjau, dan dengan partisipasi orang yang selamat secara aktif; program bantuan untuk korban juga dihubungkan dengan aktivitas-aktivitas pemerintah nasional dan lokal untuk memastikan pemeliharaannya.

Kamboja: beberapa LSM telah mengambil suatu "pendekatan pembangunan" terhadap bantuan untuk orang yang selamat, di mana (setelah pembebasan ranjau) mereka membantu orang-orang yang selamat dari ranjau dan para anggota komunitas lain dengan memberikan tanah, jalan, sumur, sekolah, fasilitas perawatan kesehatan, dan bantuan yang menimbulkan-pendapatan.

Mozambik: organisasi orang lumpuh membela pemasukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membela orang-orang lumpuh dalam Program Strategi Pengurangan Kemiskinan 2006-2009; sebagai akibat dari target-target tertentu yang ditetapkan program dalam kerangka orang yang dibantu, kapasitas untuk memberikan pelayanan, dan peningkatan-kesadaran.

Serbia dan Montenegro: ICRC menyelesaikan pengiriman proyek-proyek percontohan pelayanan kesehatan dasarnya kepada Kementerian Kesehatan; reformasi perawatan kesehatan dasar nasional yang diilhami proyek itu dan tiruannya di tempat lain di Serbia.

Uganda: bantuan untuk korban dihubungkan dengan masalah orang yang dipindahkan di dalam negeri, kelumpuhan dimasukkan dalam Program Penghapusan Kemiskinan Uganda; database kecelakaan akan memasukkan petunjuk-petunjuk untuk mengawasi situasi orang-orang yang selamat dari ranjau/UXO sehubungan dengan Tujuan-tujuan Pembangunan Millennium; Kantor Perdana Menteri mempersiapkan naskah rancangan undang-undang untuk melegislasi pekerjaan ranjau, termasuk komponen bantuan untuk korban.

Perkembangan Dalam Bantuan Untuk Korban

Seperti dalam edisi-edisi di masa lalu, *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2006* memberikan informasi tentang fasilitas-fasilitas yang telah diidentifikasi sebagai membantu orang-orang yang selamat dari ranjau darat dan orang-orang lain yang lumpuh di negara-negara yang terkena-dampak-ranjau. Laporan ini tidak rinci, karena informasi tentang aktivitas-aktivitas dari sejumlah perwakilan pemerintah dan LSM terhadap aktivitas-aktivitas bantuan untuk orang yang selamat pada edisi-edisi di masa mendatang dalam laporan ini. Akan tetapi, Pengawasan Ranjau Darat mengidentifikasi petunjuk-petunjuk tertentu tentang perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam membahas kebutuhan orang-orang yang selamat dari ranjau.

Perawatan Medis Darurat dan Berlanjut

Perawatan medis darurat dan berlanjut memasukkan pertolongan pertama dan manajemen orang cidera langsung sesudah ledakan ranjau darat, operasi, manajemen rasa sakit, perawatan rumah sakit akut, dan perawatan medis berlanjut yang dibutuhkan untuk pemulihan fisik dari orang yang selamat dari ranjau.

Dalam periode pelaporan ini, seperti di masa lalu, bantuan darurat ditunda dalam banyak contoh karena begitu banyak insiden ranjau terjadi di area-area terpencil, pedesaan tanpa pengangkutan darurat dan fasilitas yang memadai yang hanya bisa memberikan pertolongan pertama. Hambatan utama yang menghambat akses untuk perawatan medis

berlanjut bagi banyak orang yang selamat adalah kurangnya sumber daya keuangan untuk membayar pelayanan, yang diperburuk oleh kurangnya kesadaran, jarak yang jauh, biaya angkutan dan penginapan, dan permasalahan dokumentasi. Beberapa negara yang terkena-dampak-ranjau juga mendapatkan kesulitan dalam memberikan bantuan yang memadai karena kurangnya staff, peralatan, dan persediaan khusus.

Komite Internasional Palang Merah membantu lebih dari 6.300 pasien luka-oleh-senjata di rumah sakit-rumah sakit di 18 negara pada tahun 2005. Sekitar 5 persen diidentifikasi sebagai kecelakaan ranjau. Di Afghanistan saja, rumah sakit-rumah sakit yang mendukung-ICRC dengan operasi merawat 2.241 yang luka-karena-perang, termasuk 250 kecelakaan ranjau.

Keadaan darurat, LSM Italia, mengoperasikan rumah sakit-rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan di tiga negara (Afghanistan, Kamboja, dan Irak sampai Mei 2005) yang melakukan sedikitnya 2.567 operasi terhadap orang yang terluka karena-perang pada tahun 2005 dan memberikan perawatan medis untuk 3.711 lebih; sedikitnya 1.154 orang yang selamat dari ranjau/UXO dirawat dan tambahan 491 orang yang selamat dari ranjau menerima perawatan tindak-lanjut.

Burundi: akses yang dibatasi rencana pengembalian biaya untuk pelayanan bagi orang miskin; diperkirakan bahwa mayoritas orang menjadi berhutang atau menjual aset-asetnya untuk membayar pelayanan medis.

Chechnya: ICRC memfasilitasi pelatihan operasi perang khusus bagi 23 dokter operasi dan memfasilitasi kursus-kursus khusus untuk 46 dokter lain dari Caucasus bagian utara.

DR Kongo: pada umumnya membutuhkan lebih dari 12 jam untuk menjangkau pusat kesehatan, sampai 24 jam sebelum diperiksa oleh seorang profesional, dan sedikitnya 48 jam sebelum operasi darurat dan amputasi dilakukan.

Ethiopia: hanya perkiraan 10 persen dari kecelakaan ranjau mendapatkan akses untuk perawatan kesehatan dasar dan rehabilitasi; akses untuk perawatan pasca-trauma yang kompleks bahkan lebih rendah karena negara itu hanya memiliki dua dokter operasi *orthopedic*.

Iran: Pusat Sumber Daya Korban Ranjau, LSM satu-satunya dengan kapasitas dan teknologi untuk memberikan perawatan pra-medis dan pelatihan pertolongan pertama di provinsi Ilam yang terkena-dampak-ranjau, pendanaan internasional yang hilang dan menghentikan operasi sejak Maret 2006.

Mozambik: rumah sakit-rumah sakit merawat 1.038 orang yang terdaftar lumpuh pada tahun 2005; 297 orang lumpuh baru saja didaftarkan, 106 telah terdaftar sebelumnya dan 535 adalah para pasien rawat luar.

Sudan/Kenya: pada tanggal 31 Mei 2006, ICRC menutup rumah sakit perang Lopiding-nya di Lokichokio, Kenya, yang membantu utamanya orang Sudan bagian selatan, yang sekarang akan dirawat di Juba (Sudan).

Rehabilitasi Fisik

Rehabilitasi fisik memasukkan pemberian pelayanan untuk rehabilitasi, *physiotherapy*, dan persediaan *prosthetics/orthotics* dan alat bantu. Pusat-pusat rehabilitasi untuk sebagian besar tempat berlokasi di area-area perkotaan jauh dari para pasien yang membutuhkannya. Bagi banyak orang semua pelayanan ini tidak terjangkau.

Di Ethiopia, ada sekitar 360.000 orang membutuhkan rehabilitasi fisik, tapi pada tahun 2005 Pengawasan Ranjau Darat hanya mencatat sekitar 23.000 orang yang menerima pelayanan, termasuk 1.321 orang yang selamat dari ranjau. Di Afghanistan ada antara 747.500 dan 867.100 orang lumpuh, termasuk 52.000-60.000 orang yang selamat dari ranjau, sementara pada tahun 2005 Pengawasan Ranjau Darat mencatat 113.340 orang yang menerima rehabilitasi fisik, termasuk sedikitnya 3.946 orang yang selamat dari ranjau. Di Korea Utara, diperkirakan ada 64.000 yang diamputasi, tapi pada tahun 2005 hanya 1.219 orang dicatat menerima pelayanan rehabilitasi, termasuk 10 orang yang selamat dari ranjau.

Pada tahun 2005, ICRC mendukung pelatihan *prosthetics* dan *orthotics* bagi 36 teknisi dari 10 negara dan melatih sedikitnya 51 lagi teknisi dalam operasi nasionalnya di tiga negara.

Chad: program pelatihan *physiotherapy* nasional tiga tahun di Moundou berada pada tahap perkembangan terakhirnya.

Ethiopia: pada bulan Agustus 2005, Pusat Rehabilitasi Regional Dessie pindah ke lokasi yang lebih bisa diakses orang lumpuh dan meningkatkan prasarananya, yang menimbulkan peningkatan pada orang yang dibantu.

Korea Utara: Pada bulan Mei 2006, ICRC menyelesaikan pemasangan pusat Rakrang yang baru dibangun di Pyongyang, yang dioperasikan bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan untuk merawat personil militer yang lumpuh.

Rwanda: Kementerian Kesehatan menerima dukungan dari seorang koordinator untuk kelumpuhan fisik dalam meningkatkan pelayanan-pelayanan rehabilitasi yang ada; sebuah survey tentang kelumpuhan fisik dilakukan untuk memfasilitasi perencanaan pelayanan berdasarkan kebutuhan.

Tajikistan: pemerintah meningkatkan anggarannya untuk biaya operasi Pusat *Ortho* Nasional dan mengkoordinasikan program penjangkauan yang memberikan pengangkutan dan penginapan selama perawatan, dan tindak-lanjut bagi orang-orang yang diamputasi dari area-area terpencil.

Lebanon: setelah *prosthesis* pertama, selama bebas tagihan, para pasien tidak bisa mendapatkan perbaikan atau penggantian gratis selama dua tahun, yang khususnya bermasalah bagi anak-anak.

Yemen: nasionalisasi pusat rehabilitasi Aden pada tanggal 31 Desember 2005 mengakibatkan penurunan gaji staff dan kekurangan bahan mentah pada bulan Juni 2006.

Persediaan Alat *Prosthetics/Orthotics/Bantu*

Pada tahun 2005, ICRC membantu sekitar 140.000 orang di 72 proyek di 18 negara, yang menghasilkan 20.543 *prostheses* dan 25.914 *orthoses*, dan memberikan 1.979 kursi roda dan 19.446 pasang tongkat untuk berjalan. Lima puluh dua persen dari *prostheses* yang dihasilkan adalah untuk orang-orang yang selamat dari ranjau. Pusat-pusat yang didukung-ICRC memproduksi 5.097 *prostheses* (2.218 untuk orang yang selamat dari ranjau), 4.282 *orthoses*, 7.349 pasang tongkat untuk berjalan dan 190 kursi roda di Afrika; 10,388 *prostheses* (6.862 bagi orang-orang yang selamat), 11.553 *orthoses*, 9.064 pasang tongkat untuk berjalan dan 1.567 kursi roda di Asia; dan 3.199 *prostheses* (1.066 untuk

orang-orang yang selamat), 6.974 *orthoses* dan 541 pasang tongkat untuk berjalan di Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2005.

Pada tahun 2005, proyek-proyek yang didukung-Orang Cacat Internasional di 12 negara memproduksi 3.300 *prostheses*, 5.150 *orthoses*, 6.885 pasang tongkat untuk berjalan, 876 kursi roda, dan 2.785 alat untuk bergerak lainnya.

Dukungan Sosial Kejiwaan dan Penyatuan Kembali Secara Sosial

Dukungan psikologis dan penyatuan kembali secara sosial memasukkan aktivitas-aktivitas yang membantu orang-orang yang selamat dari ranjau dan keluarga-keluarga dari mereka yang terbunuh atau terluka untuk mengatasi trauma psikologis dari ledakan ranjau darat dan mengangkat kesejahteraan sosial mereka. Semua aktivitas ini termasuk kelompok pendukung sesama berbasis-komunitas, asosiasi untuk orang lumpuh, aktivitas-aktivitas olahraga dan yang berhubungan, dan konseling profesional. Komponen bantuan untuk korban ini tetap dihargai paling rendah dan kecil, walaupun beberapa dari 24 negara VA menunjukkan mereka akan mulai membantu kebutuhan dalam bidang ini dan mengembangkan program-program bantuan. Di banyak negara, konseling diberikan kepada jaringan kerja pendukung keluarga dan ada cacat yang melekat dalam mengusahakan bantuan psikologis profesional. Di sejumlah negara konseling tersedia melalui bantuan untuk korban perang secara umum, yang sering menargetkan anak-anak. Penyatuan kembali secara sosial terhambat oleh kurangnya pengertian di antara penduduk secara umum tentang hak, kebutuhan, dan kapasitas dari orang lumpuh.

Pada tahun 2005-2006, lebih banyak organisasi memasukkan aktivitas-aktivitas olahraga dalam program mereka, yang semakin mengenal nilai olahraga baik karena alasan kesehatan maupun sosial psikologis.

Pendidikan yang memasukkan semua orang menjadi lebih baik dikenal sebagai sebuah konsep, tapi sedikit negara memiliki guru yang terlatih dalam menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Angola: pada tahun 2005, Rehabilitasi melalui Program Olahraga yang memberikan pelatihan bagi para *physiotherapists*, pelatih olahraga, dan orang lumpuh tentang penggunaan aktivitas olahraga sebagai alat untuk rehabilitasi.

Kosovo: 24 orang muda yang selamat dari ranjau darat berpartisipasi dalam perkemahan musim panas, di mana mereka didorong untuk membicarakan insiden mereka dan bagaimana mereka mengatasinya.

Nikaragua: bantuan psikologis dan penyatuan kembali secara sosial tersedia di Managua, tapi situasi ekonomi tidak memungkinkan pelayanan-pelayanan ini di seluruh bagian negara itu.

Peru: bantuan sosial kejiwaan tersedia, tapi bukan tanpa tagihan, dan bantuan keuangan untuk membantu orang-orang sipil yang selamat dari ranjau yang menghadapi masalah stress pasca-trauma tidak tersedia.

Senegal: anak-anak lumpuh karena ranjau bisa menerima bantuan keuangan untuk bersekolah, seperti anak-anak lumpuh lainnya; Orang Cacat Internasional memfasilitasi penyatuan anak-anak lumpuh ke dalam kelas karena para gurunya tidak terlatih dalam pendidikan yang memasukkan semua orang.

Sri Lanka: UNICEF mendukung rehabilitasi sosial kejiwaan dan melatih para konselor tentang kebutuhan orang lumpuh.

Sudan: pada tahun 2005, kurikulum bantuan psikologis dan petunjuk untuk penggunaan para pekerja sosial, staff rehabilitasi dan di rumah sakit-rumah sakit dikembangkan.

Penyatuan Kembali Secara Ekonomi

Program-program penyatuan kembali secara ekonomi meningkatkan status ekonomi dari orang-orang yang selamat dari ranjau dan orang-orang lumpuh lainnya dan meningkatkan kesadaran sehingga orang lumpuh mendapatkan peluang yang sama untuk pekerjaan dan pelayanan. Penyatuan kembali secara ekonomi termasuk pendidikan, pelatihan kejuruan, penciptaan peluang pekerjaan, rencana kredit-kecil, dan pengembangan prasarana masyarakat untuk mencerminkan realitas ekonomi lokal. Bagi banyak orang yang selamat dari ranjau, mengambil peran mereka sebagai para anggota masyarakat yang

produktif dan bekerja untuk kesejahteraan keluarga mereka merupakan bagian penting dari rehabilitasi penyatuan. Akan tetapi, mereka menghadapi tantangan dalam mengukur peluang lowongan pekerjaan dan mengalami kesulitan dalam menjaga standar kehidupan yang wajar. Peluang penyatuan kembali secara sosial ekonomi sering lebih lanjut berkurang karena persepsi sosial yang negatif, diskriminasi, dan ejekan.

Di tempat di mana program-program pelatihan kejuruan tersedia, semua ini tidak selalu diperlengkapi ke arah orang lumpuh, atau bebas tagihan. Pelatihan ini tidak harus memberikan lowongan pekerjaan dan pendapatan yang terjaga: ada diskriminasi ketika mengukur rencana kredit atau pekerjaan teratur; pelatihan tidak selalu memenuhi permintaan pasar; dan sering ada tindak-lanjut yang tidak memadai untuk orang yang bekerja-sendiri. Lebih lanjut, adalah penting untuk membuka program-program penyatuan kembali secara ekonomi kepada para anggota keluarga, dan khususnya untuk para istri, janda, dan para wanita saja. Para wanita sering merupakan pemberi-perawatan utama, atau menjadi pencari-nafkah dasar, ketika mitra mereka terbunuh atau cidera.

Bosnia dan Herzegovina: pada tahun 2005, Masyarakat Palang Merah nasional memulai suatu proyek yang menciptakan lowongan pekerjaan dan peluang yang menimbulkan-pendapatan bagi orang-orang yang selamat dan keluarga mereka, dengan memberikan pelatihan, kredit-kecil, dan penempatan kerja.

Kamboja: Pusat Nasional bagi Orang Lumpuh memiliki database para pekerja lumpuh, utamanya bagi orang lumpuh perkotaan yang mencari kerja; akan tetapi, dari 1.500 orang yang terdaftar, hanya 125 yang ditempatkan setiap tahun.

Lebanon: sedikitnya 432 dari 2.239 orang-orang yang selamat dari ranjau/UXO yang terdaftar menerima bantuan sosial ekonomi secara langsung pada tahun 2005, yang tidak memasukkan sedikitnya 350 orang yang selamat dari ranjau yang menerima tindak-lanjut secara sosial ekonomi. Pengukuran proyek-proyek yang menimbulkan-pendapatan bagi orang-orang yang selamat dilakukan; 25 persen membutuhkan bantuan keuangan lebih lanjut atau pelatihan yang lebih baik.

Maroko: hasil dari sensus orang lumpuh yang dilepaskan pada bulan Desember 2005 menyimpulkan bahwa hanya 12 persen dari orang lumpuh, yang berusia 15 sampai 60 tahun dan mampu bekerja, diperkerjakan.

Senegal: pelatihan kejuruan tersedia di area-area yang terkena-dampak-ranjau, tapi tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang selamat dari ranjau karena tidak bebas tagihan. Orang-orang yang selamat dari ranjau jarang melanjutkan pekerjaan mereka sebelumnya dan sering ditolak mendapatkan akses kredit oleh bank.

Tajikistan: dua proyek pembangkit pendapatan nasional bagi orang lumpuh dihentikan pada akhir tahun 2005 karena kurangnya pendanaan.

Thailand: pada bulan Oktober 2005, pemerintah memulai proyek percontohan, yang melaluinya Pembangunan Sosial dan Kantor Jaminan Manusia di provinsi-provinsi mempekerjakan orang lumpuh atas dasar kontrak satu-tahun.

Program-program Rehabilitasi Berbasis-Komunitas

Rehabilitasi berbasis-komunitas (*CBR/community-based rehabilitation*) dan program-program penjangkauan dirancang untuk melengkapi rehabilitasi berbasis-fasilitas agar dapat meningkatkan pemberian pelayanan, memberikan peluang yang sama dan melindungi hak manusia untuk kelompok masyarakat yang lebih besar yang lumpuh yang memiliki akses terbatas untuk pelayanan karena biaya tinggi, penyebaran pelayanan yang tidak merata dan jumlah staf rehabilitasi yang kecil. CBR menyatukan pekerjaan untuk semua wilayah bantuan orang yang selamat dengan partisipasi orang yang selamat dan orang lumpuh dengan menggunakan sumber daya yang realistis dan terpelihara. Program-program CBR dan para pekerja yang menjangkau bertujuan untuk memberdayakan orang lumpuh dan menyatukan mereka masuk ke dalam masyarakat, melalui pengembangan organisasi orang lumpuh, meningkatkan pembuatan-keputusan komunitas dan pertanggungjawaban; pelatihan keahlian dalam prinsip-prinsip perawatan-diri; pemrograman berbasis-kebutuhan; dan mengidentifikasi keahlian dan teknologi lokal. CBR juga memainkan peran dalam meningkatkan koordinasi dan rujukan dengan pelayanan-pelayanan lain, yang tidak tersedia dalam masyarakat dan yang masyarakat itu mungkin tidak menyadarinya.

Bosnia dan Herzegovina: banyak orang yang selamat dari ranjau memulai rehabilitasi di rumah sakit dan melanjutkan rehabilitasi mereka di salah satu dari pusat rehabilitasi berbasis-komunitas, yang juga memberikan dukungan sosial kejiwaan.

Kamboja: pada bulan Juni 2006, pemerintah dan Dewan Pekerjaan Orang Lumpuh mengajukan proyek di seluruh negara untuk membentuk rehabilitasi fisik berbasis-komunitas nasional yang terpelihara, menstandarkan bahan-bahan dan aktivitas-aktivitas yang menimbulkan-kesadaran orang lumpuh, dan mengembangkan mekanisme untuk mempromosikan, mengkoordinasi, dan bertukar informasi.

Eritrea: program CBR telah melatih para anggota masyarakat dalam konseling dasar, dukungan sesama-kepada-sesama, Mobilitas, *physiotherapy*, rujukan dan pelaporan dan melakukan berbagai aspek bantuan orang lumpuh; dan memasukkan pembangkitan pendapatan; nafkah yang terpelihara dan program merubah sikap. Pekerjaan pemastian dalam area-area CBR menyebabkan orang lumpuh kadang-kadang mendapatkan pengutamaan dalam lowongan kerja daripada orang tanpa kelumpuhan.

Kebijakan dan Praktek Orang Lumpuh

Para Pihak Negara telah mengetahui kebutuhan untuk legislasi dan pekerjaan “yang mempromosikan perawatan yang efektif, perawatan dan perlindungan bagi semua warganegara lumpuh.” Bantuan orang yang selamat dari ranjau darat, seperti halnya bantuan bagi semua orang lumpuh, lebih dari hanya masalah medis dan rehabilitasi; bantuan itu juga merupakan masalah hak azasi manusia. Pengawasan Ranjau Darat telah mengidentifikasi lebih dari 50 negara yang terkena-dampak-ranjau atau area-area dengan legislasi atau tindakan yang secara nyata melindungi hak orang lumpuh; di negara-negara lain orang lumpuh dilindungi oleh hukum bersama. Akan tetapi, dalam banyak contoh semua hukum ini tidak sepenuhnya dilaksanakan atau ditegakkan.

Algeria: sejak bulan Mei 2006, naskah keputusan mengukur denda keuangan untuk bisnis dan organisasi gagal memberikan pekerjaan bagi orang lumpuh dan mengatur kriteria untuk angkutan umum gratis, mengurangi biaya untuk sewa rumah dan perumahan sosial.

Kroasia: pada bulan Desember 2005, Hukum untuk Penghapusan Ranjau Kemanusiaan diberikan yang mendaftarkan dan mendefinisikan hak para penghapus ranjau, keluarga mereka dan para peserta lain dalam menghapus ranjau yang terluka atau tidak mampu bekerja setelah cedera mereka.

India: pada tahun 2006, tinjau ulang terhadap rencana undang-undang Rakyat Lumpuh dimulai; Kebijakan Nasional untuk Orang Lumpuh diberikan, yang mengakui bahwa orang lumpuh merupakan sumber daya manusia berharga yang layak mendapatkan partisipasi penuh dalam masyarakat.

Sri Lanka: dalam bulan Februari 2006, Komisi Hak Azasi Manusia melakukan Konferensi Nasional tentang Hak Orang Lumpuh yang menetapkan komitmen dan aktivitas tertentu terhadap pelaksanaan Kebijakan Nasional untuk Orang Lumpuh.

Tajikistan: pada tahun 2005, pemerintah mengalokasikan lebih dari \$30.000 untuk pensiun bagi orang-orang yang selamat dari ranjau atau keluarga mereka yang terbunuh dalam ledakan ranjau, dan pensiun minimum dimunculkan.

Uganda: pada bulan Februari 2006, dua anggota parlemen yang telah terpilih sebagai bagian dari kelompok berkepentingan khusus dari para wakil masyarakat lumpuh berdiri di tempat kotak suara biasa dan dipilih atas nilai partai politiknya sendiri.

Perkembangan Internasional Lain

Negosiasi tentang naskah teks Konvensi Menyeluruh dan Menyatu Untuk Perlindungan dan Pengangkatan Hak Azasi Manusia dan Harga Diri Masyarakat Lumpuh dijadwalkan untuk diselesaikan dalam bulan Agustus 2006. Pada bulan Desember 2005, Majelis Umum PBB mengangkat seruan penyelesaian kepada negara-negara untuk berpartisipasi secara konstruktif untuk membuat teks itu siap untuk penyerahan dalam sesi ke-61 Majelis Umum PBB yang dimulai pada bulan September 2006. Pengangkatan dan pelaksanaan Konvensi akan mengharuskan pemasukan semua orang dengan permasalahan kelumpuhan ke dalam agenda kebijakan utama, komitmen sumber daya, pengangkatan-kesadaran, pembangunan-kapasitas, pengumpulan data menyeluruh, pelaksanaan pelayanan, dan program, dan pembentukan suatu badan pengawasan independen.

Dari tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2005, Mengangkat Suara Afrika Timur, di Kampala, Uganda memberikan pelatihan pembelaan kepada 10 peserta dari Eritrea, Rwanda, Sudan, dan Uganda. Pada bulan Mei 2006 di Geneva, Jaringan Kerja Orang Yang Selamat Dari Ranjau Darat memulai program pelatihan Perluasan Suara bagi para lulusan dari program Mengangkat Suara yang ditunjukkan untuk meningkatkan keahlian pembelaan mereka sehingga mereka bisa terlibat di tingkat lokal, regional, dan internasional, dan membantu mereka melaksanakan inisiatif-inisiatif terjaga bagi orang-orang yang selamat dan orang-orang lumpuh lainnya.

Pendanaan Pekerjaan Ranjau

Mengumpulkan informasi yang akurat dan lengkap tentang pendanaan pekerjaan ranjau secara global tetap merupakan tugas yang sukar untuk dipahami. Ada kekurangan transparansi dari pihak banyak negara, dan di antara mereka yang memang melapor, ada banyak variasi dalam apa yang dilaporkan, tingkat rincian yang dilaporkan, dan untuk periode waktu mana. Akan tetapi, adalah mungkin untuk memberikan gambaran informasi tentang situasi pendanaan global.

Untuk tahun 2005, Pengawasan Ranjau Darat telah mengidentifikasi US\$376 juta dalam pendanaan pekerjaan ranjau oleh lebih dari 27 donor, ini merupakan penurunan dari \$23 juta, atau 5.8 persen, dari tahun 2004. Penurunan pada total pendanaan global sebagian besar mencerminkan pengurangan besar pada pendanaan dari dua donor paling signifikan, Komisi Eropa (penurunan \$14.9 juta) dan Amerika Serikat (penurunan \$14.9 juta). Dari 20 donor yang paling signifikan, 10 memberikan pendanaan yang lebih kecil pada tahun 2005 daripada tahun 2004. (Lihat di bawah).

Ini merupakan pertama kalinya pendanaan pekerjaan ranjau secara global telah menurun secara berarti sejak tahun 1992, ketika negara-negara itu pertama kali memulai mempersempit sumber daya-sumber daya yang signifikan untuk pekerjaan ranjau. Ini merupakan masalah pemikiran serius sehingga pendanaan pekerjaan ranjau secara global jelas jatuh bukannya naik pada tahun 2005, tahun setelah banyak Pihak Negara Perjanjian Pelarangan Ranjau memberikan komitmen baru untuk pekerjaan ranjau pada Konferensi Tinjau Ulang Pertama dan dalam pengesahan bersama mereka untuk Rencana Kerja Nairobi. Adalah membingungkan bahwa pendanaan jatuh karena banyak Pihak Negara mendekati batas waktu yang dimandatkan perjanjian 10-tahun untuk penyelesaian pembebasan ranjau.

Akan tetapi, harus juga dicatat bahwa total tahun 2005 sebesar \$376 juta merupakan total tahunan tertinggi kedua yang pernah dicatat, dan \$37 juta (10.9 persen) lebih daripada

dua tahun yang lalu (2003). Penurunan pada tahun 2005 berasal dari dasar peningkatan 37 persen pada tahun 2002, 5 persen pada tahun 2003, dan 18 persen pada tahun 2004.

Kontribusi Donor pada tahun 2005

Para kontributor terbesar untuk pekerjaan ranjau secara global pada tahun 2005 adalah Amerika Serikat (\$81.9 juta), Komisi Eropa (\$51.5 juta), Jepang (\$39.3 juta), Norwegia (\$36.5 juta), Kerajaan Inggris (\$21.4 juta), Jerman (\$36.5 juta), Kanada (\$20.5 juta), dan Belanda (\$19.3 juta).

Dari 20 donor paling signifikan, setengah meningkatkan kontribusi pekerjaan ranjau mereka pada tahun 2005 dalam kerangka mata uang nasional, dan setengah memberikan jumlah yang lebih kecil. Negara-negara dengan peningkatan adalah: Slovakia (114 persen); Perancis (103 persen); Australia (50 persen); Italia (44 persen); Jerman (13 persen); Kerajaan Inggris (6.3 persen); Swedia (4.9 persen); Swiss (2 persen); Norwegia (1.2 persen); dan Belanda (0.2 persen).

Negara-negara dengan penurunan jumlah dalam kerangka mata uang nasional adalah: Selandia Baru (65 persen); Irlandia (32 persen); Belgia (30 persen); Austria (25 persen); Komisi Eropa (22 persen); Denmark (18 persen); AS (15 persen); Kanada (9 persen); Jepang (7 persen); dan Finlandia (2 persen).

Para donor yang meningkatkan kontribusi mereka sedikitnya \$1 juta termasuk: Slovakia (\$3.7 juta); Australia (\$3.2 juta); Jerman (\$2.4 juta); Norwegia (\$2 juta); Perancis (\$1.9 juta); Italia (\$1.3 juta); Swiss (\$1.2 juta); dan Kerajaan Inggris (\$1 juta).

Para donor yang menurunkan kontribusi mereka sedikitnya \$1 juta termasuk: Komisi Eropa (\$14.9 juta); AS (\$14.6 juta); Jepang (\$3.5 juta); Denmark (\$2.4 juta); Kanada (\$2.1 juta); Belgia (\$1.7 juta); dan Selandia Baru (\$1.6 juta). Dalam kerangka pendanaan pekerjaan ranjau atas dasar per kapita, para donor negara terbesar adalah: Norwegia (\$7.90 per kapita); Iceland (\$5.08 per kapita); Luxembourg (\$2.84 per kapita); dan Denmark (\$0.09 per kapita). Swiss, Slovakia, Swedia, Belanda, dan Finlandia juga memiliki kontribusi pekerjaan ranjau lebih dari \$1 per kapita.

Dalam kerangka pendanaan pekerjaan ranjau sebagai persentase pendapatan nasional kotor (*GNI/gross national income*), para donor negara terbesar adalah: Slovakia (0.017 persen); Norwegia (0.013 persen); dan Iceland (0.011 persen). Semua negara ini merupakan tiga negara satu-satunya yang memberikan kontribusi lebih dari seperseratus dari pendapatan nasional kotor mereka untuk pekerjaan ranjau pada tahun 2005. Para donor terbesar berikutnya atas dasar GNI adalah Denmark, Luxembourg, Belanda, Swedia, Finlandia, dan Swiss.

Tambahan Pendanaan Yang Berhubungan Dengan-Pekerjaan Ranjau pada tahun 2005

Total \$376 juta untuk negara-negara donor tidak menangkap semua pengeluaran global yang berhubungan dengan pekerjaan ranjau pada tahun 2005. Tipe-tipe pengeluaran lain dan kontribusi untuk pekerjaan ranjau bukan merupakan bagian dari total itu termasuk riset dan pengembangan (*R&D/research and development*), sejumlah pendanaan bantuan untuk korban dan kontribusi *in-kindnya*, pendanaan oleh LSM-LSM dan sektor swasta, dana pemeliharaan perdamaian PBB, dan pendanaan oleh negara-negara yang terkena-dampak-ranjau dari program pekerjaan ranjau mereka sendiri.

Seperti pada tahun-tahun yang lalu, Pengawasan Ranjau Darat belum memasukkan dana untuk riset dan pengembangan ke dalam teknologi dan peralatan penghapusan ranjau dalam totalnya, dan sebagai gantinya telah mendaftarkan pendanaan R&D yang tersedia secara terpisah; pada tahun 2005, pendanaan R&D bertotal sedikitnya \$30 juta (Lihat sesi R&D di bawah ini).

Pendanaan program bantuan untuk korban dimasukkan di mana mungkin, tapi bagi sejumlah donor utama, pendanaan bantuan untuk korban tidak bisa dipisahkan keluar dari program-program tertentu-bukan-ranjau-darat.

Dalam sejumlah kasus, para donor tidak melaporkan nilai moneter dari kontribusi *in-kindnya* (yang berlawanan dengan uang tunai).

Pendanaan pekerjaan ranjau yang diberikan oleh LSM-LSM dan sektor swasta tidak secara eksplisit dimasukkan, sebagian untuk menghindari perhitungan ganda ketika sebuah LSM menerima dana dari donor pemerintah. Pengawasan Ranjau Darat belum mampu untuk

mengumpulkan informasi yang luas tentang pendanaan LSM dan sektor swasta, tapi beberapa contoh pada tahun 2005 termasuk: Mengangkat-sebuah-Lapangan-Berranjau (AS) memberikan kontribusi \$3.7 juta untuk pekerjaan ranjau di sembilan negara; Dana Peringatan Putri Wales, Diana (Kerajaan Inggris) memberikan kontribusi lebih dari \$3 juta untuk pekerjaan ranjau untuk tiga negara dan dua LSM; Jaringan Kerja Orang Yang Selamat Dari Ranjau Darat (AS) melaporkan menerima kontribusi swasta dengan total \$800,000; Lembaga *Humpty Dumpty* (AS) mendapatkan \$770,000 untuk pembebasan ranjau di Angola melalui penjualan kelebihan susu dalam kemitraan swasta publik dengan Departemen Program Bantuan Makanan Pertanian AS; dan para anggota LSM dari *ActionLandmine.de* (Jerman) memberikan kontribusi lebih dari \$300,000 untuk pekerjaan ranjau.

Kontribusi-kontribusi dari pemeliharaan perdamaian PBB yang menilai anggaran untuk pekerjaan ranjau tidak dimasukkan dalam total global. UNMAS melaporkan mengamankan lebih dari \$24.3 juta untuk pekerjaan ranjau melalui pendanaan pemeliharaan perdamaian PBB dalam tahun kalender 2005; semua dana ini utamanya mencakup biaya untuk pekerjaan ranjau yang dilakukan sehubungan dengan operasi pemeliharaan perdamaian yang dimandatkan oleh Dewan Keamanan di Burundi, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia/Eritrea, Lebanon, dan Sudan.

Akhirnya, dan yang terpenting, kontribusi untuk pekerjaan ranjau oleh negara-negara yang terkena-dampak-ranjau itu sendiri bukan merupakan bagian dari \$376 juta total donor. Banyak negara yang terkena-dampak-ranjau tidak memberikan informasi yang tersedia tentang pengeluaran pekerjaan ranjau mereka, sehingga Pengawasan Ranjau Darat belum mampu mengembangkan perhitungan global yang akurat. Total pendanaan oleh negara-negara yang terkena-dampak-ranjau berjumlah puluhan juta dolar setiap tahun. Yang berikut adalah sejumlah contoh kontribusi oleh negara-negara yang terkena-dampak-ranjau pada tahun 2005, yang diambil dari laporan negara Pengawasan Ranjau Darat; delapan negara yang terkena-dampak-ranjau ini memberikan hampir \$50 juta pada tahun 2005.

- Kroasia memberikan KN192, 769,625 (\$32.4 juta), atau 57 persen dari total pengeluaran pekerjaan ranjaunya. Kontribusi tahun 2005 Kroasia berjumlah lebih dari

0.09 persen dari pendapatan nasional kotornya, atau lebih dari lima kali lipat kontribusi donor internasional tertinggi yang diukur sebagai persentase GNI.

- Di Bosnia dan Herzegovina, sumber-sumber nasional (termasuk Dewan Menteri, entitas pemerintah dan daerah) memberikan KM17,753,131 (\$11.3 juta), sekitar 44 persen dari total pengeluaran pekerjaan ranjanya, peningkatan dari 30 persen pada tahun 2004; ini melanjutkan trend peningkatan kontribusi nasional sejak tahun 2002.
- Mozambik memberikan 52.9 milyar Meticaís (\$2.3 juta), dibandingkan dengan 178 milyar Meticaís (\$7.9 juta) pada tahun 2004; semua kontribusi ini sebagian merupakan *in-kind* dan pengecualian-pajak.
- Azerbaijan memberikan kontribusi AZM3,498,623,400 (\$740,120), peningkatan dari \$255,000 pada tahun 2004.
- Chile memberikan \$680,217 untuk anggaran Komisi Penghapusan Ranjau Nasional, dibandingkan dengan \$154,086 pada tahun 2004.
- Thailand memberikan kontribusi Baht 18.21 juta (\$452,400) untuk pusat pekerjaan ranjau nasional, kurang dari setengah Baht 38.21 juta (sekitar \$950,000) memberikan tahun fiskal sebelumnya.
- Chad memberikan \$367,790 untuk pekerjaan ranjau nasional pada tahun 2005.
- Pemerintah Kolombia menyetujui COP571 juta (sekitar \$213,400) untuk program pekerjaan ranjau nasional selama periode Juli 2005 sampai Juni 2006, dibandingkan COP2.5 milyar (sekitar \$934,100) untuk periode Juli 2004 sampai Juni 2005.

Sebagai tambahan, pada tahun 2006, Jordan melaporkan bahwa negara itu memberikan kontribusi \$3.5 juta setiap tahun untuk program penghapusan ranjau nasionalnya. Pada tahun 2005, Lebanon melaporkan bahwa negara itu memberikan kontribusi tahunan *in-kind* dan bantuan lain untuk pekerjaan ranjau yang diberi nilai sekitar \$4 juta. Pada tahun 2005, Cyprus memperkirakan bahwa ia memberikan €170,000 (\$211,000) setiap tahun untuk pembebasan ranjau dan penghancuran tumpukan. Pada tahun 2004, Menteri Pertahanan Nikaragua melaporkan bahwa Nikaragua memberikan 16

juta Córdoba (sekitar \$1 juta) setiap tahun untuk lembaga-lembaga anggota Komite Penghapusan Ranjau Nasional.

Para Pihak Negara yang terkena-dampak-ranjau untuk Perjanjian Pelarangan Ranjau sebelumnya melaporkan kontribusi pekerjaan ranjau nasional dengan total \$190 juta dari tahun 1997-2003, dan untuk tahun 2004 Pengawasan Ranjau Darat mengidentifikasi sekitar \$57.5 juta kontribusi dari tujuh negara dengan informasi yang tersedia, termasuk \$4 juta oleh Ethiopia dan \$3.5 juta oleh Yemen.

Pendanaan, Kerjasama dan Perjanjian Pelarangan Ranjau

Pasal 6 Perjanjian Pelarangan Ranjau memuat kewajiban kerjasama pekerjaan ranjau untuk Para Pihak Negara. Lebih lanjut, di bawah Rencana Kerja Nairobi 2005-2009, Para Pihak Negar sepakat mereka akan memastikan pemeliharaan komitmen mereka, termasuk pemberian di mana mungkin pendanaan banyak-tahun untuk memfasilitasi perencanaan jangka-panjang pekerjaan ranjau dan program bantuan untuk korban (Pekerjaan #45); mereka sepakat, bila relevan, untuk mendorong PBB, organisasi-organisasi regional, dan Bank Dunia, bank-bank pembangunan regional dan lembaga-lembaga keuangan untuk mendukung Para Pihak Negara yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kewajiban perjanjian mereka (Pekerjaan #48); dan mereka sepakat untuk mengejar usaha-usaha untuk mengidentifikasi sumber bantuan, teknis, bahan atau keuangan baru dan bukan-tradisional (Pekerjaan #50).

Kebijakan Pendanaan Donor dan Perjanjian Pelarangan Ranjau

Sejumlah negara donor mengatur secara khusus agar pendanaan pekerjaan ranjau mereka seharusnya diarahkan dengan pengutamaan yang kuat untuk Para Pihak Negara Perjanjian Pelarangan Ranjau. Negara-negara donor yang telah menyatakan hal ini sebagai posisi kebijakan termasuk Kanada, Jerman, dan Belanda. EC mendaftarkan "komitmen yang terbukti dari bukan-Para Pihak Negara untuk pekerjaan ranjau dan prinsip-prinsip Perjanjian Pelarangan Ranjau" sebagai kriteria pendanaan, bukan status Pihak Negara, tapi EC juga telah menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap Perjanjian Pelarangan Ranjau mempengaruhi keputusannya untuk pendanaan pekerjaan ranjau.

Koordinasi Donor

Beberapa badan donor ada yang memfasilitasi koordinasi sumber daya pekerjaan ranjau. Kelompok Bantuan Pekerjaan Ranjau (*MASG/Mine Action Support Group*), yang diketuai oleh Swiss pada tahun 2005 dan oleh AS pada tahun 2006, terdiri dari 27 donor. MASG biasanya bertemu tiga kali setahun dan menghasilkan surat berita secara teratur yang telah memuat sejumlah informasi mengenai pendanaan pekerjaan ranjau. Komite Pengendali Pekerjaan Ranjau, yang diketuai oleh direktur UNMAS, memasukkan perwakilan 24 negara donor, dan bertemu setiap dua tahun. Kelompok Kontak Mobilisasi Sumber Daya (*RMCG/Resource Mobilization Contact Group*) dari Perjanjian Pelarangan Ranjau, yang dipimpin oleh Norwegia, dibentuk dengan maksud untuk mengamankan pendanaan yang terpelihara dan mempromosikan pekerjaan ranjau yang efektif-biaya dan efektif. Masalah yang menonjol untuk RMCG selama periode pelaporan mengidentifikasi kebutuhan tertentu dari Para Pihak Negara yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi batas waktu pembebasan ranjau Pasal 5.

Menyatukan Pendanaan Pekerjaan Ranjau Ke Dalam Pemrograman Pembangunan

Pada tahun 2006, Kelompok Kontak untuk Pekerjaan Ranjau dan Pembangunan dimulai oleh Kanada untuk membahas permasalahan mengenai aliran utama pekerjaan ranjau ke dalam sektor pembangunan, yang bersifat melengkapi terhadap pekerjaan RMCG. Pada tahun 2005, dua rapat diselenggarakan tentang topik menyatukan pekerjaan ranjau ke dalam pemrograman pembangunan; semua rapat ini dihadiri oleh ICBL dan LSM-LSM lain, juga oleh Para Pihak Negara. Rapat Dialog Tidak Resmi Pertama tentang Pekerjaan Ranjau Utama dalam Pembangunan disponsori bersama oleh Kanada dan GICHD pada bulan Juni 2005. Empat belas negara donor, Komisi Eropa dan berbagai perwakilan internasional hadir. Rapat Dialog Tidak Resmi Kedua tentang Menghubungkan Pekerjaan Ranjau Dengan Pembangunan diselenggarakan pada tanggal 5-6 Desember 2005, setelah Rapat Keenam Para Pihak Negara di Zagreb. Semua dialog ini dihubungkan dengan Pekerjaan #40 sampai #50 Rencana Pekerjaan Nairobi, yang membahas pekerjaan ranjau dalam konteks proses-

proses pembangunan, “bukan semata-mata diberi label sebagai unsur bantuan kemanusiaan.”

Para pengusul melihat penyatuan pekerjaan ranjau ke dalam pendanaan pembangunan sebagai cara untuk memberikan stabilitas jangka-panjang untuk pendanaan pekerjaan ranjau, dan mencegah penurunan di masa mendatang dalam kontribusi pekerjaan ranjau yang disebabkan oleh “kelelahan donor,” dengan memperluas saluran untuk pendanaan dalam perwakilan bantuan pembangunan resmi negara-negara donor itu sendiri dan dengan lebih baik menggunakan mekanisme-mekanisme pendanaan lain yang ada seperti Bank Dunia, bank pembangunan regional, dan fasilitas dana perwalian. Kanada, pengusul utama di antara Para Pihak Negara, telah menyatakan bahwa penyatuan pekerjaan ranjau ke dalam pemrograman pembangunan tidak harus merupakan solusi berjalur tunggal, dan pekerjaan ranjau itu bisa disatukan ke dalam program-program pembangunan sebagai tambahan terhadap para donor yang memberikan pendanaan pekerjaan ranjau yang dipersembahkan.

Beberapa pihak telah menyatakan pemikiran tentang aliran utama (atau penyatuan). Duta besar Martin Dahinden, yang berbicara sebagai direktur bebas dari GICHD pada tahun 2004, memperingatkan bahwa Pasal 6 Perjanjian Pelarangan Ranjau, yang memaksa Para Pihak Negara untuk memberikan bantuan kerjasama, “akan mendapatkan peran yang kurang menonjol” jika pendanaan pekerjaan ranjau disatukan ke dalam pengeluaran pembangunan yang lebih luas. Pihak-pihak lain telah mencatat pendekatan itu mungkin secara ceroboh mengancam keamanan sumber daya-sumber daya pekerjaan ranjau, membuat para operator pekerjaan ranjau bersaing dengan sumber daya bantuan internasional yang terbatas menurut kepentingan geo-politik yang sering berubah, dan mengurangi pengaruh yang signifikan yang masyarakat sipil telah miliki dalam mempromosikan pendanaan pekerjaan ranjau yang besar. Sebuah laporan untuk UNDP oleh Institut Riset Perdamaian Internasional (*PRIO/Peace Research Institute*) di Norwegia menyimpulkan “bahwa ada sedikit pengalaman pekerjaan ranjau dalam departemen

pembangunan dan sebaliknya kurangnya keahlian pembangunan dalam manajemen pekerjaan ranjau.”

Walaupun banyak Pihak Negara menyebutkan pembangunan dalam pernyataan mengenai kebijakan pendanaan mereka, tidak ada gerakan besar ke arah pelaksanaan pendekatan penyatuan pembangunan. Yang berikut adalah beberapa pandangan yang dinyatakan dan pekerjaan yang diambil oleh Para Pihak Negara.

Perwakilan Pembangunan Internasional Kanada (*CIDA/Canadian International Development Agency*) memberikan pendekatan yang akan mengangkat penyatuan pekerjaan ranjau dalam programnya secara teratur. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Internasional bekerja untuk memasukkan pekerjaan ranjau ke dalam pemrograman perdamaian dan keamanannya. Dalam departemen itu, Unit Pekerjaan Ranjau mengejar penyatuan pekerjaan ranjau ke dalam kerangka kerja pemrograman pembangunan dan masyarakat sipil di negara-negara yang terkena-dampak-ranjau. CIDA telah mengangkat aliran utama pembangunan dalam rapat-rapat Para Pihak Negara Perjanjian Pelarangan Ranjau.

Departemen untuk Pembangunan Internasional Kerajaan Inggris (*DfID/Department for International Development*) merencanakan tinjau ulang pada pertengahan tahun 2006 untuk kebijakan pendanaan pekerjaan ranjanya; tinjau ulang ini diharapkan merekomendasikan penyatuan berlanjut dari pekerjaan ranjau ke dalam program-program pembangunan yang lebih luas dan sektor keamanan, sejalan dengan perubahan kebijakan DfID pada tahun 2004.

Belanda berharap mengutamakan pekerjaan ranjau ke dalam pembangunan-perdamaian dan sektor keamanan/stabilitas, bukan pembangunan.

Saluran-saluran Pendanaan

Porsi yang besar dari pendanaan pekerjaan ranjau yang dilaporkan oleh para donor disalurkan melalui mekanisme pendanaan pihak ketiga. Pada tahun 2005, dana perwalian dilaporkan menerima sedikitnya \$113.4 juta dalam pendanaan pekerjaan ranjau, yang mewakili ekivalen 30 persen dari total kontribusi yang dilaporkan donor. Dana perwalian bisa

memberikan koordinasi antara para donor dan perwakilan pelaksana dan bisa menggunakan banyak sumber pendanaan untuk memelihara program-program yang berjalan.

- Dana Perwalian Sukarela (*VTF/Voluntary Trust Fund*) PBB untuk Bantuan Pekerjaan Ranjau, yang dioperasikan oleh UNMAS, menerima total kontribusi donor sekitar \$50 juta termasuk pendanaan inti dan banyak-tahun. Pendanaan itu diterima untuk pekerjaan ranjau di enam negara pada tahun 2005: Afghanistan, Burundi, Republik Demokratis Kongo, Eritrea, Lebanon, dan Sudan. UNMAS juga aktif dalam mengamankan pendanaan pemeliharaan perdamaian untuk pekerjaan ranjau dari PBB.
- Dana Perwalian Tema UNDP untuk Pencegahan Krisis dan Pemulihan melaporkan menerima kontribusi dengan total sekitar \$33.7 juta untuk pekerjaan ranjau di 14 negara pada tahun 2005. UNDP juga mendanai program pekerjaan ranjanya melalui perjanjian berbagi-biaya yang dilaksanakan secara lokal dan dana-dana perwalian dengan kantor-kantor negara UNDP.
- Kelompok Pembangunan PBB (UNDP) Dana Perwalian Irak merupakan bagian dari Fasilitas Dana Pembangunan Kembali Internasional untuk Irak. Pada tahun 2005, Dana Perwalian Irak UNDG menerima \$1 juta dalam mendanai pekerjaan ranjau dari Republik Korea. Pada bulan Februari 2006, Yunani memberikan kontribusi €1.9 juta (\$2.4 juta) untuk pekerjaan ranjau di Irak melalui dana itu.
- Pada tahun 2006, Dana Perwalian PBB untuk Keamanan Manusia (*UNTFHS/UN Trust Fund for Human Security*) mulai mengarahkan pendanaan langsung untuk pekerjaan ranjau untuk pertama kalinya sejak pemikirannya pada tahun 1999, yang menyalurkan lebih dari \$1.7 juta untuk pekerjaan ranjau di Sudan. UNTFHS saat ini merupakan dana perwalian donor tunggal yang menerima kontribusi secara eksklusif dari Jepang.
- Dana Perwalian Internasional (*ITF/International Trust Fund*) untuk Penghapusan Ranjau dan Bantuan Untuk Para Korban Ranjau yang berbasis-di-Slovenia menerima \$27.8 juta dari 13 pemerintah, EC, UNDP, para pihak berwenang lokal, perwakilan pemerintah, dan para donor swasta pada tahun 2005. Pendanaan itu diarahkan untuk

pekerjaan ranjau di Eropa tenggara dan Caucasus, para prinsipnya Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Serbia dan Montenegro dan provinsi Kosovo-nya, juga Azerbaijan. ITF memiliki perjanjian di mana AS memberikan dana-dana yang sesuai untuk sumbangan pekerjaan ranjau di Eropa tenggara.

- Dana Perwalian Kemitraan untuk Perdamaian (PfP/*Partnership for Peace*) dari NATO membantu negara-negara mitra NATO untuk memenuhi kewajiban penghancuran tumpukan mereka di bawah Perjanjian Pelarangan Ranjau. Pada tahun 2005, Dana Perwalian Kemitraan Untuk Perdamaian melaporkan menerima total € 854,000 (lebih dari \$1 juta) dari lima negara untuk penghancuran tumpukan ranjau anti-personil di Serbia dan Montenegro.

Pendanaan sebagaimana yang dilaporkan oleh para donor sering berbeda dari yang dilaporkan oleh dana perwalian yang disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk beragam tahun fiskal. Pada tahun 2005, dana perwalian melaporkan kontribusi oleh sedikitnya tiga donor yang tidak teridentifikasi dari pelaporan donor langsung: Andorra, \$25,522 untuk UN VTF untuk pendanaan inti; Portugal, \$16,000 untuk UN VTF bagi Sudan; dan Hongaria, € 40,000 (\$49,796) NATO PfP untuk Serbia dan Montenegro.

Para Donor Pekerjaan Ranjau

Kecuali dituliskan lain, semua angka ini dalam dolar AS. Semua total termasuk pendanaan bantuan untuk korban di mana hal ini diketahui, dan tidak memasukkan dana untuk riset dan pembangunan, yang diidentifikasi secara terpisah di mana diketahui.

Pendanaan Pekerjaan Ranjau Donor Berdasarkan Tahun

1992-2005	\$2.9 milyar
2005	\$376 juta
2004	\$399 juta
2003	\$339 juta
2002	\$324 juta
2001	\$237 juta
2000	\$243 juta

1999	\$219 juta
1998	\$187 juta (termasuk perkiraan \$9 j.)
1997	\$139 juta (termasuk perkiraan \$35 j.)
1996	\$132 juta (termasuk perkiraan \$34 j.)
1992-95	\$258 juta (termasuk perkiraan \$41 j.)

Total 1992-2005 termasuk \$50 juta dikontribusikan oleh Persatuan Emirate Arab untuk Lebanon 2002-2004, tapi setiap tahun semua total ini tidak diketahui.

Pendanaan Pekerjaan Ranjau Donor 1992-2005: \$2.9 milyar

Amerika Serikat	\$708.3 juta
Komisi Eropa	\$422.6 juta
Norwegia	\$255.6 juta
Jepang	\$217.3 juta
Kerajaan Inggris	\$175.3 juta
Kanada	\$148.1 juta
Jerman	\$144 juta
Belanda	\$133.9 juta
Swedia	\$126.6 juta
Denmark	\$109.8 juta
Swiss	\$79.9 juta
Australia	\$75.1 juta
Italia	\$56.5 juta
Finlandia	\$52 juta
Persatuan Emirate Arab	\$50 juta
Belgia	\$31.5 juta
Perancis	\$28.6 juta
Irlandia	\$16.3 juta
Austria	\$16.2 juta
Selandia Baru	\$12.4 juta

Slovakia	\$10.9 juta
Spanyol	\$10.1 juta
Yunani	\$9.6 juta
Negara-negara lain	\$32.5 juta

- Total \$32.5 juta untuk negara-negara lain termasuk Cina (\$6.2 juta), Luxembourg (\$5.9 juta), Korea Selatan (\$5.2 juta), Slovenia (\$3.8 juta), Saudi Arabia (\$3 juta), Iceland (\$2.8 juta), Republik Czech (\$2.1 juta), Polandia (\$2 juta), dan \$1.5 juta untuk para donor lain termasuk Brazil, Liechtenstein, Monako, Portugal, Afrika Selatan, dan negara-negara lain dalam jumlah yang lebih kecil.

Pendanaan Pekerjaan Ranjau Donor untuk tahun 2005: \$376 juta

Amerika Serikat	\$81.9 juta
Komisi Eropa	\$51.5 juta
Jepang	\$39.3 juta
Norwegia	\$36.5 juta
Kerajaan Inggris	\$21.4 juta
Jerman	\$21.1 juta
Kanada	\$20.5 juta
Belanda	\$19.3 juta
Swiss	\$12.1 juta
Swedia	\$11.7 juta
Denmark	\$11.3 juta
Australia	\$8.9 juta
Slovakia	\$7.2 juta
Finlandia	\$5.9 juta
Italia	\$4.5 juta
Belgia	\$4 juta
Perancis	\$3.8 juta
Austria	\$2.2 juta

Irlandia	\$2.2 juta
Polandia	\$2 juta
Spanyol	\$1.9 juta
Iceland	\$1.5 juta
Republik Czech	\$1.4 juta
Luxembourg	\$1.3 juta
Korea Selatan	\$1.1 juta
Selandia Baru	\$0.9 juta
Slovenia	\$0.4 juta

- Pendanaan pekerjaan ranjau dilaporkan oleh Komisi Eropa dan 18 dari 25 negara anggota Serikat Eropa, yang diambil bersama bertotal \$187 juta pendanaan yang diidentifikasi oleh Pengawasan Ranjau Darat.

Pendanaan Pekerjaan Ranjau per kapita pada tahun 2005

Norwegia	\$7.90
Iceland	\$5.08
Luxembourg	\$2.84
Denmark	\$2.09
Swiss	\$1.63
Slovakia	\$1.34
Swedia	\$1.30
Belanda	\$1.18
Finlandia	\$1.12
Kanada	\$0.64
Irlandia	\$0.53
Australia	\$0.44
Belgia	\$0.38
Kerajaan Inggris	\$0.36
Jepang	\$0.31

Amerika Serikat	\$0.28
Austria	\$0.27
Jerman	\$0.26
Selandia Baru	\$0.22
Slovenia	\$0.19
Republik Czech	\$0.14
Italia	\$0.08
Perancis	\$0.06
Polandia	\$0.05
Spanyol	\$0.04
Korea Selatan	\$0.02

Pendanaan Pekerjaan Ranjau pada tahun 2005 dalam persentase Pendapatan Nasional

Kotor

Slovakia	0.0168%
Norwegia	0.0133%
Iceland	0.0110%
Denmark	0.0110%
Luxembourg	0.0043%
Belanda	0.0032%
Swedia	0.0032%
Finlandia	0.0030%
Swiss	0.0030%
Kanada	0.0019%
Australia	0.0014%
Irlandia	0.0013%
Republik Czech	0.0013%
Slovenia	0.0011%
Belgia	0.0011%

Kerajaan Inggris	0.0009%
Selandia Baru	0.0008%
Jepang	0.0008%
Jerman	0.0007%
Polandia	0.0007%
Austria	0.0007%
Amerika Serikat	0.0006%
Italia	0.0003%
Perancis	0.0002%
Spanyol	0.0002%
Korea Selatan	0.0001%

AMERIKA SERIKAT - \$708.3 juta

2005	\$81.9 juta
2004	\$96.5 juta
2003	\$80.6 juta
2002	\$73.8 juta
2001	\$69.2 juta
2000	\$82.4 juta
1999	\$63.1 juta
1998	\$44.9 juta
1997	\$30.8 juta
1996	\$29.8 juta
1995	\$29.2 juta
1994	\$15.9 juta
1993	\$10.2 juta

- Semua angka ini tidak termasuk pendanaan bantuan untuk korban ranjau: pendanaan untuk program para korban perang dengan total tambahan \$14.4 juta pada tahun fiskal 2005.

- R&D bertotal tambahan \$13.15 juta dalam tahun fiskal 2005, \$12.8 juta dalam tahun fiskal 2004, dan \$146 juta untuk tahun fiskal 1995-2005.
- Lihat laporan negara Amerika Serikat untuk rincian lebih banyak tentang pendanaan pekerjaan ranjau.

KOMISI EROPA - \$422.6 juta

2005	\$51.5 juta (€41.3 juta)
2004	\$66.4 juta (€53.4 juta)
2003	\$64.5 juta (€57 juta)
2002	\$38.7 juta (€40.7 juta)
2001	\$23.5 juta (€26.1 juta)
2000	\$14.3 juta (€15.9 juta)
1999	\$15.5 juta (€17.3 juta)
1998	\$21.4 juta (€23.8 juta)
1992-1997	\$126.8 juta (€141.2 juta)

- Semua angka ini tidak termasuk tambahan pendanaan pekerjaan ranjau oleh masing-masing Negara Anggota Serikat Eropa.
- Pendanaan EC R&D bertotal tambahan €1,090,000 (\$1,356,941) pada tahun 2005, €460,000 (\$572,148) pada tahun 2004, dan €51 juta dari tahun 1992-2005.

Komisi Eropa mengalokasikan sekitar €41,337,001 (\$51,460,332) untuk pekerjaan ranjau pada tahun 2005. Ini merupakan penurunan yang signifikan dari €53.4 juta (\$66.4 juta) pada tahun 2004. Pada tahun 2005, EC memberikan pendanaan pekerjaan ranjau kepada 17 negara, dibandingkan dengan 21 negara pada tahun 2004. Total untuk tahun 2005 termasuk alokasi pendanaan banyak tahun, yang beberapa darinya harus disebarakan pada tahun 2006. Total itu juga memasukkan alokasi €3 juta (\$3.7 juta) untuk tender penghancuran tumpukan di Belarus yang belum dibagikan pada Juli 2006. Negara-negara yang menerima pendanaan EC pada tahun 2005 tapi tidak pada tahun 2004 termasuk Albania, Azerbaijan, Belarus, Burundi, Chile, Ekuador, dan Peru. Yang menerima pendanaan

EC pada tahun 2004 tapi tidak pada tahun 2005 termasuk Bosnia dan Herzegovina, Eritrea, Ethiopia, Kyrgyzstan, Mozambik, Somalia/Somaliland dan Tajikistan.

NORWEGIA - \$255.6 juta

2005	\$36.5 juta (NOK235 juta)
2004	\$34.3 juta (NOK231.2 juta)
2003	\$28.6 juta (NOK202.4 juta)
2002	\$25.4 juta (NOK202.9 juta)
2001	\$20 juta (NOK176.9 juta)
2000	\$19.5 juta (NOK178.6 juta)
1999	\$21.5 juta (NOK185 juta)
1998	\$24 juta
1997	\$16.7 juta (NOK125 juta)
1996	\$13.5 juta (NOK101 juta)
1995	\$11.6 juta (NOK87 juta)
1994	\$4.0 juta (NOK30 juta)

- Sebagai tambahan, R&D bertotal NOK3,983,375 (\$618,421) pada tahun 2005, dan NOK2,250,000 (\$333,833) pada tahun 2004; pengeluaran Norwegia sebelumnya untuk R&D tidak diketahui.

Norwegia memberikan NOK235,020,163 (\$36,487,015) pada tahun 2005, kontribusi pendanaan tertingginya untuk 18 negara pada tahun 2005, dibandingkan dengan untuk 16 negara pada tahun 2004. Dukungan bantuan untuk korban bertotal sedikitnya NOK40,227,963 (\$6,245,414) pada tahun 2005, sedikit lebih kecil daripada tahun 2004.

JEPANG - \$217.3 juta

2005	\$39.3 juta (¥4,323 juta)
2004	\$42.8 juta (¥4,630 juta)
2003	\$13 juta (¥1,590 juta)
2002	\$49.7 juta (¥5,537 juta)
2001	\$7.5 juta (¥802 juta)

2000	\$12.7 juta (¥1,480 juta)
1999	\$16 juta (¥1,904 juta)
1998	\$6.3 juta (¥722 juta)
Pra-1998	sekitar \$30 juta

- Total R&D ¥811 juta (\$7.4 juta) pada tahun 2005, ¥795 juta (\$7.35 juta) pada tahun 2004, dan ¥2.366 juta (\$21 juta) dari tahun 1999 sampai 2005.

Pada tahun 2005, Jepang memberikan kontribusi ¥4,323 juta (\$39.26 juta), kurang dari ¥4,630 juta (\$42.8 juta) yang dikontribusikan pada tahun 2004. Hampir setengah dari pendanaan pekerjaan ranjau 2005 Jepang, ¥2,100 juta (\$19 juta), dialokasikan untuk Sudan. Pada tahun 2005, Jepang memberikan pendanaan bantuan untuk korban ¥112,825,790 (\$1,024,664) atau 2.6 persen dari total pengeluaran, peningkatan dari ¥53.3 juta pada tahun 2004.

KERAJAAN INGGRIS - \$175.3 juta

2005-2006	\$21.4 juta (£11.8 juta)
2004-2004	\$20.4 juta (£11.1 juta)
2003-2004	\$20 juta (£12.3 juta)
2002-2003	\$18.5 juta (£12.3 juta)
2001-2002	\$15.4 juta (£10.7 juta)
2000-2001	\$21.5 juta (£15 juta)
1999-2000	\$20.4 juta (£13.6 juta)
1998-1999	\$6.5 juta (£4.6 juta)
1997-1998	\$6.3 juta (£4.6 juta)
1996	\$6.3 juta
1995	\$6.9 juta
1994	\$6.3 juta
1993	\$5.1 juta

- Semua angka ini tidak termasuk pendanaan bantuan untuk korban.

- Sebagai tambahan, R&D dengan total £1,777,563 (\$3,235,165) pada tahun 2005-2006, £1.2 juta (\$2.2 juta) pada tahun 2004-2005, dan £8.9 juta (\$14.6 juta) dari tahun 1999-2000 sampai 2005-2006.

Pendanaan Kerajaan Inggris sebesar £11,758,747 (\$21,400,920) pada tahun fiskal 2005-2006 mewakili peningkatan dari yang disesuaikan ke atas tahun 2004-2006, DfID melaporkan pendanaan pekerjaan ranjau untuk 10 negara, Somaliland dan tujuh organisasi bertotal £9,225,924 (16,791,182). Kementerian Pertahanan Kerajaan Inggris memberikan £2,279,823 (\$4,331,278) kepada Pusat Pelatihan Pekerjaan Ranjau Internasional (IMATC/*International Mine Action Training Center*) di Kenya, dan proyek Orang Cacat International Phoenix di Kosovo menerima £153,000 (\$278,460) melalui Kumpulan Pencegahan Konflik Global. Kerajaan Inggris melanjutkan bantuan pendanaannya untuk UNMAS dan UNICEF, tapi tidak melaporkan pendanaan inti kepada UNDP pada tahun 2005-2006.

KANADA - \$148.1 juta

2005	\$20.5 juta (C\$24.8 juta)
2004	\$22.6 juta (C\$29.5 juta)
2003	\$22.5 juta (C\$30.8 juta)
2002	\$15.1 juta (C\$22.3 juta)
2001	\$15.5 juta (C\$24 juta)
2000	\$11.9 juta (C\$17.7 juta)
1999	\$15.2 juta (C\$23.5 juta)
1998	\$9.5 juta
1997	\$3.0 juta (C\$4.6 juta)
1996	\$4.0 juta (C\$6 juta)
1995	\$1.5 juta (C\$2.2 juta)
1994	\$2.9 juta (C\$4.4 juta)
1993	\$2.2 juta (C\$3.4 juta)
1989	\$1.7 juta (C\$2.5 juta)

- Sebagai tambahan, R&D bertotal C\$3.4 juta (\$2.8 juta) pada tahun 2005, C\$3.1 juta (\$2.4 juta) pada tahun 2004, dan US\$16.3 juta dari tahun 1998-2005.

Kanada memberikan C\$24,799,163 (\$20,469,800) pada tahun fiskal 2005-2006, penurunan dari C\$29.5 juta (\$22.6 juta) tahun lalu. Kanada memberikan pendanaan kepada 31 negara dan area (kurang lima dari tahun lalu), juga badan-badan regional, perwakilan PBB, LSM-LSM, ICRC, dan GICHD. Kanada meningkatkan bantuan untuk pembebasan ranjau dari \$3.5 juta menjadi \$6.4 juta, tapi menurunkan pendanaan bagi bantuan untuk korban dari \$2 juta menjadi \$1.6 juta dan untuk pendidikan resiko ranjau dari \$1.1 juta menjadi sekitar \$562,000.

JERMAN - \$144 juta

2005	\$21.1 juta (€17 juta)
2004	\$18.7 juta (€15 juta)
2003	\$22.1 juta (€19.5 juta)
2002	\$19.4 juta (€20.4 juta)
2001	\$12.3 juta (DM26.8 JUTA, €13.7 juta)
2000	\$14.5 juta (DM27.6 juta)
1999	\$11.4 juta (DM21.7 juta)
1998	\$10.1 juta
1997	\$4.9 juta
1996	\$7.9 juta
1995	\$0.8 juta
1994	\$0.5 juta
1993	\$0.3 juta

- R&D: tidak ada pendanaan teridentifikasi pada tahun 2005; 2004: €102,989 (\$128,098); semua angka ini tersedia untuk tahun 2000-2003; 1993-1999: \$5.1 juta.

Pendanaan Jerman untuk pekerjaan ranjau bertotal €16,972,295 (\$21,128,810) pada tahun 2005, peningkatan dari €15 juta (\$18.7 juta) pada tahun 2004. Pada tahun 2005, Jerman memberikan pendanaan untuk 20 negara dan daerah, dua lagi pada tahun 2004.

Mereka yang menerima pendanaan pada tahun 2005 tapi tidak menerimanya pada tahun 2004 termasuk Bosnia dan Herzegovina, Kolombia, Republik Demokratis Kongo, Jordan, Somalia/Somaliland, dan Uganda. Negara-negara yang menerima pendanaan pada tahun 2004 tapi tidak pada tahun 2005 termasuk Burundi dan Mesir. Jerman mendanai aktivitas-aktivitas UNICEF di Caucasus dalam dua tahun itu. Mayoritas besar pendanaan pekerjaan ranjau Jerman diarahkan untuk pembebasan ranjau. Pada bulan Mei 2006, Jerman menyatakan bahwa negara itu tidak lagi mendanai aktivitas-aktivitas riset dan pengembangan dan, dalam pengutamaannya, memfokuskan pendanaan pada pembebasan ranjau.

BELANDA - \$133.9 juta

2005	\$19.3 juta (€15.5 juta)
2004	\$19.3 juta (€15.5 juta)
2003	\$12.1 juta
2002	\$16 juta
2001	\$13.9 juta (Dfl 32 juta, €15.5 juta)
2000	\$14.2 juta (Dfl 35.4 juta)
1999	\$8.9 juta (Dfl 23 juta)
1998	\$9.3 juta
1997	\$10.2 juta
1996	\$10.7 juta

Belanda memberikan kontribusi €15,521,772 (\$19,323,054) untuk pekerjaan ranjau pada tahun 2005, suatu jumlah yang bisa dibandingkan sebesar €15,494,919 (\$19.3 juta) pada tahun 2004. Pada tahun 2005, Belanda memberikan pendanaan untuk 10 negara, juga Abkhazia, Kosovo, Nagorno-Karabakh, dan Somaliland. Aktivitas-aktivitas yang diberi label sebagai pembebasan ranjau/pendidikan resiko ranjau menerima €11,812,619 atau 76 persen dari total pendanaan; pembangunan-kapasitas €2,758,002 atau 18 persen; pembelaan €277,203 atau sekitar 2 persen dan bantuan untuk korban menerima €542,893 atau sekitar 3 persen, dengan sisa €131,555 diberikan untuk aktivitas-aktivitas termasuk

MRE. Anggaran pekerjaan ranjau tahunan sebesar €12.6 juta (\$15.7 juta) untuk tahun 2005 dihabiskan berlebihan. Belanda berharap pendanaan itu pada tingkat €12.6 juta untuk beberapa tahun yang akan datang.

SWEDIA - \$126.6 juta

2005	\$11.7 juta (SEK87.6 juta) dibagikan
2004	\$11.4 juta (SEK83.5 juta) dibagikan
2003	\$12.7 juta (SEK102.9 juta) dibagikan
2002	\$7.3 juta (SEK71 juta) dibagikan
2001	\$9.8 juta (SEK100.9 juta) dibagikan
2000	\$11.8 juta (SEK107.9 juta) dibagikan
1999	\$9.8 juta (SEK83.3 juta) dibagikan
1998	\$16.6 juta (SEK129.5 juta) dialokasikan
1997	\$11.9 juta dialokasikan
1996	\$10.4 juta dialokasikan
1995	\$5.1 juta dialokasikan
1994	\$2.6 juta dialokasikan
1990-93	\$5.5 juta dialokasikan

- Semua angka ini tidak memasukkan pendanaan bantuan untuk korban.
- Swedia di masa lampau telah mendanai sejumlah program R&D (sekitar \$24 juta pada tahun 1994-1999 dan \$1.7 juta pada tahun 2003), tapi total nilai untuk tahun 2005 tidak diketahui.

Pada tahun 2005, kontribusi pekerjaan ranjau Swedia bertotal SEK87,554,890 (\$11,719,300), suatu peningkatan dari SEK83.5 juta (\$11.4 juta) pada tahun 2004. Swedia memberikan pendanaan pekerjaan ranjau untuk tiga negara pada tahun 2005 yang belum menerima pendanaan pada tahun 2004: Bosnia dan Herzegovina, Republik Demokratik Kongo dan Filipina. Swedia tidak mendanai pekerjaan ranjau di Mozambik pada tahun 2005, dan menurunkan pendanaan untuk Kamboja (dari SEK12 juta menjadi SEK3.8 juta) dan

Nikaragua (dari SEK6.6 juta menjadi SEK3.2 juta). Swedia melanjutkan bantuannya kepada UNMAS pada tahun 2005.

DENMARK - \$109.8 juta

2005	\$11.3 juta (DKK67.7 juta)
2004	\$13.7 juta (DKK82.3 juta)
2003	\$11.9 juta (DKK78.6 juta)
2002	\$10.6 juta (DKK83.5 juta)
2001	\$14.4 juta (DKK119.4 juta)
2000	\$13.4 juta (DKK106.7 juta)
1999	\$7 juta (DKK49.9 juta)
1998	\$6.2 juta (DKK44.3 juta)
1997	\$5.4 juta (DKK38.6 juta)
1996	\$8 juta (DKK57 juta)
1995	\$2.3 juta
1994	\$2.0 juta
1993	\$1.7 juta
1992	\$1.9 juta

- Semua angka untuk tahun 1992-1995 tidak termasuk kontribusi bilateral.
- Denmark melaporkan memberikan pendanaan DKK250,000 (\$41,699) untuk Forum Riset Penghapusan Ranjau Nordic untuk riset dan pengembangan pada tahun 2005. Negara itu telah mendanai program-program R&D yang lain di masa lalu, tapi nilainya tidak diketahui.
- Lihat laporan negara Denmark untuk rincian lebih banyak tentang pendanaan pekerjaan ranjau.

SWISS - \$79.9 juta

2005	\$12.1 juta (CHF15.1 juta)
2004	\$10.9 juta (CHF14.8 juta)
2003	\$8.8 juta

2002	\$8.3 juta
2001	\$9.8 juta
2000	\$7.4 juta
1999	\$5.7 juta
1998	\$tidak diketahui
1997	\$4.0 juta
1996	\$2.6 juta
1995	\$4.1 juta
1994	\$3.5 juta
1993	\$2.7 juta

- Semua total sejak tahun 2000 termasuk dana-dana yang signifikan untuk Pusat Internasional Geneva untuk Penghapusan Ranjau Kemanusiaan (*GICHD/Geneva Internasional Center for Humanitarian Demining*), yang sebagian besar bisa terhitung sebagai pendanaan R&D, tapi Pengawasan Ranjau Darat belum mengidentifikasi jumlah R&D tertentu. Pendanaan Swiss untuk GICHD bertotal \$6.4 juta pada tahun 2005, \$6.1 juta pada tahun 2004, \$5.23 juta pada tahun 2003, \$4.35 juta pada tahun 2002, \$3.3 juta pada tahun 2001, dan \$2.3 juta pada tahun 2000, dengan total sekitar \$27.7 juta dari tahun 2000-2005.

Swiss memberikan CHF15,094,000 (\$12,114,937) pada tahun 2005, suatu peningkatan dari CHF14.8 JUTA (\$10.9 juta) pada tahun 2004. Total tahun 2005 termasuk CHF8 juta (\$6.4 juta) untuk GICHD dan CHF7,094,000 (\$5.7 juta) untuk aktivitas-aktivitas ranjau lainnya; pengeluaran bukan-GICHD bertotal CHF6.7 juta (\$4.8 juta) pada tahun 2004. Pada tahun 2005, Swiss memberikan kontribusi pendanaan pekerjaan ranjau untuk 13 negara, kurang dua daripada tahun 2004. Negara-negara yang menerima pendanaan pada tahun 2005 yang tidak menerima kontribusi pada tahun 2004 adalah Bosnia dan Herzegovina, Republik Demokratik Kongo, Irak, dan Vietnam. Yang menerima dana pada tahun 2004 tapi tidak pada tahun 2005 termasuk Albania, Chad, Georgia, Somalia, dan Yemen. Total tahun 2005 termasuk perkiraan CHF2 juta (\$1,605,265) untuk kontribusi *in-*

kind untuk sembilan staff Kementerian Pertahanan untuk aktivitas-aktivitas pekerjaan ranjau di Afghanistan, Albania, Bosnia dan Herzegovina, Chad, Eritrea, Lebanon, dan Sri Lanka, juga staff dan peralatan di Sudan. Swiss melaporkan pendanaan bantuan untuk korban sebesar CHF1,125,000 (\$902,962), termasuk CHF300,000 (\$240,790) sebagai “bantuan untuk korban – dukungan untuk MBT.”

AUSTRALIA - \$75.1 juta

2005-2006	\$8.9 juta (A\$11.7 juta)
2004-2005	\$5.7 juta (A\$7.8 juta)
2003-2004	\$5.5 juta (A\$8.2 juta)
2002-2003	\$7.8 juta (A\$14.5 juta)
2001-2002	\$6.6 juta (A\$12.9 juta)
2000-2001	\$7.3 juta (A\$12.6 juta)
1999-2000	\$7.9 juta (A\$12.4 juta)
1998-1999	\$6.8 juta (A\$11.1 juta)
1997-1998	\$7.3 juta (A\$9.9 juta)
1996-1997	\$5.8 juta (A\$7.5 juta)
1995-1996	\$5.5 juta (A\$7.5 juta)

- Australia telah mendanai sejumlah program R&D di masa lalu, tapi total nilainya tidak diketahui.

Australia telah memberikan kontribusi A\$11,666,422 (\$8,897,980) untuk pekerjaan ranjau tahun fiskal Juli 2005-Juni 2006, peningkatan sekitar 50 persen dari A\$7,756,010 (\$5.7 juta) yang diberikan pada tahun 2004-2005, dan jumlah terbesar dalam tiga tahun. Australia telah menjaminkan pendanaan ranjau darat sebesar A\$75 juta untuk periode 2005-2009, dengan prioritas untuk negara-negara yang sangat terkena-dampak-ranjau di daerah Asia-Pasifik. Di FY 2005-2006, kontribusi Australia diarahkan untuk tujuh negara, dibandingkan dengan tiga negara tahun sebelumnya, di mana Afghanistan, Burma, Laos, dan Sudan menerima bantuan, sebagai tambahan untuk Kamboja, Sri Lanka, dan Vietnam. Aktivitas-aktivitas bantuan untuk korban menerima A\$3,244,192 (\$2,474,345) pada tahun

2005-2006, termasuk kontribusi yang signifikan untuk ICRC untuk Permintaan Khusus Pekerjaan Ranjau tahun 2006 dan Dana Khusus untuk Orang Lumpuh tahun 2006.

ITALIA - \$56.5 juta

2005	\$4.5 juta (€3.6 juta)
2004	\$3.2 juta (€2.5 juta)
2003	\$5.8 juta (€5.1 juta)
2002	\$8.7 juta (€9.9 juta)
2001	\$5.1 juta (L11.2 milyar, €5.6 juta)
2000	\$1.6 juta (L4.3 milyar, €1.7 juta)
1999	\$5.1 juta (L13.9 milyar, €4.8 juta)
1998	\$12 juta (L20 milyar)
1995-97	\$10.5 juta (L18 milyar)

- Italia juga telah mendanai sejumlah program R&D, tapi total nilainya tidak diketahui.

Italia memberikan kontribusi €3,583,600 (\$4,461,224) untuk aktivitas-aktivitas pekerjaan ranjau pada tahun 2005, jumlah yang lebih besar daripada €2,539,500 (\$3,158,630) pada tahun 2004. Italia memberikan pendanaan kepada lebih sedikit negara, enam pada tahun 2005 dibandingkan dengan sembilan pada tahun 2004. Irak dan Mozambik menerima pendanaan dari Italia pada tahun 2005, tapi tidak pada tahun 2004. Negara-negara yang tidak menerima kontribusi pada tahun 2005 tapi menerimanya tahun sebelumnya adalah Afghanistan, Azerbaijan, Kroasia, Eritrea, dan Tajikistan. Italia juga terus memberikan kontribusi untuk pekerjaan ranjau di Amerika dengan pendanaan kepada OAS pada tahun 2005. Pendanaan untuk Sudan meningkat menjadi €1,522,500 (\$1,895,360) pada tahun 2005 dari €200,000 (\$248,760) pada tahun 2004.

FINLANDIA - \$52 juta

2005	\$5.9 juta (€4.7 juta)
2004	\$6 juta (€4.8 juta)
2003	\$6.3 juta (€5.6 juta)
2002	\$4.5 juta (€4.8 juta)

2001	\$4.5 juta (€5 juta)
2000	\$4.8 juta
1999	\$5.7 juta
1998	\$6.6 juta
1997	\$4.5 juta
1996	\$1.3 juta
1995	\$0.7 juta
1991-94	\$1.3 juta

- Lihat laporan negara Finlandia untuk rincian lebih banyak tentang pendanaan pekerjaan ranjau Finlandia.

PERSATUAN EMIRATE ARAB - \$50 juta

Persatuan Emirate Arab telah melaporkan negara itu memberikan \$50 juta untuk pekerjaan ranjau di Lebanon dari tahun 2002-2004 di bawah Operasi Solidaritas Emirates. Pemutusan tahun-demi-tahun yang tepat untuk pengeluaran itu tidak tersedia. UAE membagikan \$3,332,751 untuk Lebanon melalui Dana Perwalian Sukarela PBB pada tahun 2002-2005, termasuk \$310,000 untuk aktivitas-aktivitas tindak-lanjut untuk Operasi Solidaritas Emirates pada tahun 2005; diasumsikan sebelumnya ini juga merupakan bagian dari alokasi banyak tahun sebesar \$50 juta.

BELGIA - \$31.5 juta

2005	\$4 juta (€3.2 juta)
2004	\$5.7 juta (€4.6 juta)
2003	\$6.2 juta (€5.5 juta)
2002	\$3.6 juta (€3.8 juta)
2001	\$2.1 juta (€2.2 juta)
2000	\$2.5 juta (BEF111 juta)
1999	\$2.3 juta (BEF93 juta)
1994-1998	\$5.1 juta

- R&D bertotal €456,314 (\$568,065) pada tahun 2005, €1,090,215 (\$1.36 juta) pada tahun 2004, dan \$9.8 juta dari tahun 1994-2005. Sebagai tambahan, pendanaan R&D banyak-tahun sebesar €905,960 (\$1,127,830) dikontribusikan oleh Pemerintah Flanders regional pada tahun 2005 untuk proyek APODO.

Belgia memberikan kontribusi €3,201,918 (\$3,986,068), untuk aktivitas-aktivitas pekerjaan ranjau pada tahun 2005, termasuk kontribusi-kontribusi *in-kind* yang signifikan. Belgia memberikan kontribusi €4,547,878 (\$5,656,651) pada tahun 2004. Pada tahun 2005, Belgia memberikan pendanaan pekerjaan ranjau dan bantuan untuk 10 negara dan Kosovo, dua kali lipat jumlah negara daripada tahun lalu. Negara-negara yang menerima pendanaan dan bantuan pada tahun 2005, tapi tidak pada tahun 2004 termasuk Angola, Bosnia dan Herzegovina, Burundi, Indonesia, Irak, dan Liberia. Pendanaan untuk ICRC tidak dilaporkan untuk tahun 2005, tapi total €2 juta (\$2.5 juta) atau 35 persen dari total pendanaan pada tahun 2004, yang lebih dari perhitungan 30 persen penurunan dalam total pendanaan tahun 2005.

PERANCIS - \$28.6 juta

2005	\$3.8 juta (€3.1 juta)
2004	\$1.9 juta (€1.5 juta)
2003	\$2.5 juta (€2.2 juta)
2002	\$3.6 juta (€3.8 juta)
2001	\$2.7 juta (€3 juta)
2000	\$1.2 juta
1999	\$0.9 juta
1995-98	\$12 juta

- Pengeluaran R&D tidak dilaporkan pada tahun 2005. Pada tahun 2004, kontribusi R&D bertotal €1.4 juta (\$2.2 juta).

Perancis melaporkan pendanaan pekerjaan ranjau sebesar €3,055,000 (\$3,803,170) pada tahun 2005. Ini lebih dari dua kali lipat tahun 2004 dengan total €1,523,845 (sekitar \$1.9 juta). Pendanaan diberikan untuk enam negara pada tahun 2005 (dibandingkan dengan

15 negara pada tahun 2004): Albania, Angola, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Mozambik dan Yemen. Pendanaan bantuan untuk korban bertotal €820,000 (\$1,020,818) pada tahun 2005, atau sekitar 27 persen dari total pendanaan. Perancis telah melaporkan bahwa kontribusinya antara 17 dan 25 persen dari pendanaan EC untuk proyek-proyek pekerjaan ranjau melalui berbagai saluran.

IRLANDIA - \$16.3 juta

2005	\$2.2 juta (€1.7 juta)
2004	\$3 juta (€2.4 juta)
2003	\$2.3 juta (€2 juta)
2002	\$1.6 juta (€1.7 juta)
2001	\$2 juta (€2.2 juta)
2000	\$1.1 juta
1999	\$1.5 juta
1994-1998	\$2.6 juta

Irlandia memberikan kontribusi €1,740,000 (\$2,166, 126) untuk pekerjaan ranjau pada tahun 2005, dibandingkan dengan €2,427,000 (\$3,018,703) pada tahun 2004. Pada tahun 2005, Irlandia memberikan pendanaan untuk empat negara: Afghanistan, Angola, Eritrea, dan Somalia. Pendanaan bantuan untuk korban €200,000 (\$248,980) diberikan untuk Angola pada tahun 2005; tidak ada pendanaan bantuan untuk korban diberikan pada tahun 2004.

AUSTRIA - \$16.2 juta

2005	\$2.2 juta (€1.8 juta)
2004	\$3 juta (€2.4 juta)
2003	\$0.9 juta (€0.8 juta)
2002	\$2 juta (€2.1 juta)
2001	\$0.9 juta (ATS13.7 juta)
2000	\$2 juta (ATS30 juta)
1999	\$1 juta (ATS15 juta)
1994-1998	\$4.2 juta

Austria memberikan €1,766,752 (\$2,199,430) pada tahun 2005. Ini merupakan penurunan dari €2.4 juta (\$3 juta) pada tahun 2004, yang menandai tingkat tertinggi untuk pendanaan pekerjaan ranjau Austria. Kontribusi Austria menguntungkan tujuh negara pada tahun 2005, seperti pada tahun 2004. Negara-negara yang menerima pendanaan dari Austria pada tahun 2005 dan 2004 adalah Kroasia dan Mozambik. Negara-negara yang akan menerima pendanaan pada tahun 2005 tapi tidak pada tahun 2004 termasuk Bosnia dan Herzegovina, Nikaragua, Serbia dan Montenegro dan Sri Lanka. Kontribusi bantuan untuk korban termasuk pendanaan untuk ICRC dan untuk program regional Afrika Timur. Austria telah melaporkan sebagai tambahan terhadap pendanaan pekerjaan ranjau bilateral, ia memberikan sekitar 2.2 persen dari pengeluaran bantuan pembangunan EC secara keseluruhan, termasuk kontribusi pekerjaan ranjau.

SELANDIA BARU - \$12.4 juta

2005/06	\$0.9 juta (NZ\$1.3 juta)
2004/05	\$2.5 juta (NZ\$3.7 juta)
2003/04	\$1.1 juta (NZ\$1.6 juta)
2002/03	\$0.8 juta (NZ\$1.4 juta)
2001/02	\$0.7 juta (NZ\$1.7 juta)
2000/01	\$1.1 juta (NZ\$2.3 juta)
1999/00	\$0.8 juta (NZ\$1.6 juta)
1998/99	\$0.5 juta (NZ\$0.9 juta)
1992-1998	\$4 juta (NZ\$6.9 juta)

- Selandia Baru telah mendanai program-program R&D, tapi total tahunannya tidak tersedia.

Selandia Baru telah melaporkan kontribusi dengan total NZ\$1,290,723 (\$909,831) untuk aktivitas-aktivitas pekerjaan ranjau selama tahun fiskal Juli 2005-Juni 2006, suatu penurunan dari NZ\$3,736,922 (\$2.48 juta) pada tahun 2004-2006, yang merupakan kontribusi terbesar Selandia Baru yang pernah dilakukan. Sebagai tambahan terhadap

negara-negara yang diberi dana pada tahun 2004, pendanaan itu diberikan untuk Nepal dan Sudan pada tahun 2005.

SLOVAKIA – 10.9 juta

2005	\$7.2 juta (SKK218.5 juta)
2004	\$3.5 juta (SKK101.9 juta)
1996-2002	\$230,000

Slovakia melaporkan pemberian kontribusi SKK218.5 juta (\$7.2 juta) sebagai nilai kontribusi *in-kind* Kekuatan Angkatan Bersenjata Slovak dalam operasi-operasi penghapusan ranjau di Afghanistan dan Irak pada tahun 2005; pada tahun 2004, negara ini melaporkan SKK101.9 juta (\$3.5 juta) dalam kontribusi *in-kind* untuk dua negara itu.

Para Donor Ranjau Lain

Spanyol memberikan €1,533,648 (\$1,909,238) pada tahun 2005, termasuk kontribusi pembebasan *in-kind* di Afghanistan, Irak dan Kosovo, dan pelatihan pada Pusat Pelatihan Penghapusan Ranjau Internasional, Pendanaan juga termasuk kontribusi dari administrasi regional Spanyol untuk pekerjaan ranjau di Kolombia. Spanyol memberikan kontribusi €978,494 (\$1.2 juta) pada tahun 2004. Perkiraan pendanaan total pekerjaan ranjau adalah \$10.1 juta.

Yunani tidak melaporkan pendanaan pekerjaan ranjau pada tahun 2005. Pendanaan pekerjaan ranjau sebelumnya bertotal \$9.6 juta pada tahun 2001-2004. Pada bulan Februari 2006, Yunani memberikan kontribusi €1.9 juta (\$2.4 juta) untuk pekerjaan ranjau di Irak untuk Dana Perwalian Irak UNDG dari Fasilitas Dana Pembangunan Kembali Internasional untuk Irak (IRFFI/*International Reconstruction Fund Facility for Iraq*) untuk operasi penghapusan ranjau; dana-dana itu telah dijamin pada bulan Juli 2005.

Luxembourg memberikan €1,081,931 (\$1,346,896) untuk pekerjaan ranjau pada tahun 2005. Pendanaan menguntungkan enam negara. Pada tahun 2004, \$773,186 dalam

pendanaan dilaporkan. R&D tidak dilaporkan untuk tahun 2005, tapi bertotal €2,500 (\$3,110) pada tahun 2004. Total pendanaan pekerjaan ranjau adalah \$5.9 juta.

Republik Korea memberikan kontribusi \$1,050,000 untuk pekerjaan ranjau pada tahun 2005, termasuk \$1 juta untuk Irak. \$3.1 juta dikontribusikan pada tahun 2004. Total pendanaan pekerjaan ranjau adalah \$5.2 juta.

Slovenia melaporkan Mengkontribusikan \$384,498 tahun 2005, termasuk \$374,153 melalui ITF dan kontribusi kepada GICHD. Slovenia memberikan \$433,861 melalui ITF pada tahun 2004. Total pendanaan ranjau adalah \$3.8 juta.

Iceland mengalokasikan \$1,500,000 pada tahun 2005 untuk *prosthetics*, spesialis, perawatan, dan pelatihan untuk Anggota Tubuh *Prosthetics* dan Pusat Rehabilitasi di Dohuk, Irak. Total pendanaan pekerjaan ranjau adalah \$2.8 juta pada tahun 1997-2005.

Republik Czech Mengkontribusikan CZK32,886,000 (\$1,370,794) untuk aktivitas-aktivitas pekerjaan ranjau pada tahun 2005, peningkatan yang signifikan dari \$189,234 pada tahun 2004. Kumpulan dana itu dilaporkan sebagai kontribusi jenis-masuk pembebasan ranjau militer di Afghanistan. Pendanaan juga memberikan untuk empat negara lain. Perkiraan total pendanaan ranjau adalah \$2.1 juta.

Polandia memperkirakan bantuan jenis-masuk-nya untuk pekerjaan ranjau pada tahun 2005 total €1.6 juta (\$1.99 juta). Para penghapus ranjau Polandia (total 137 orang) terlibat dalam pemeliharaan perdamaian dan misi stabilisasi di luar negeri di Afghanistan, Bosnia, dan Herzegovina, Syria, dan Kosovo.

Proyek-proyek Riset dan Pembangunan Yang Dilaporkan Oleh Para Donor

Pada tahun 2005, sembilan negara melapor menghabiskan sekitar \$30 juta untuk R&D yang berhubungan dengan pekerjaan ranjau, termasuk \$2.1 juta untuk Pusat Internasional Geneva untuk Penghapusan Ranjau Kemanusiaan. Pengeluaran terbesar oleh Amerika Serikat (\$13.2 juta), Jepang (\$7.4 juta), Kerajaan Inggris (\$3.2 juta), dan Kanada (\$2.8 juta). Negara-negara lain juga diyakini telah mempersembahkan dana-dana untuk R&D pekerjaan ranjau, tapi tidak menyediakan informasi.

Belgia mengalokasikan €456,314 (\$568,065) untuk R&D enam proyek, termasuk deteksi tandatangan ranjau banyak-sensor, Program Uji dan Evaluasi Internasional (ITEP/*International Test and Evaluation Program*) untuk Penghapusan Ranjau Kemanusiaan, pembangunan perangkat lunak penghapus ranjau, dan bantuan *in-kind* untuk evaluasi teknologi penghapusan ranjau di Angola.

Pemerintah regional Belgia dari Flanders memberikan pendanaan untuk APOPO sebesar €905,960 (\$1,127,830) untuk R&D dan penyebaran tikus sebagai sensor makhluk hidup, untuk periode 2005-2007. Total kontribusi Flander untuk APOPO dari tahun 2003-2007 adalah €1,296,432 (\$1,613,928), termasuk €150,000 (\$186,735) untuk tahun 2004 yang sebelumnya tidak dilaporkan oleh Pengawasan Ranjau Darat.

Kanada mengalokasikan C\$3,153,849 (\$2,603,260) kepada Pusat Teknologi Pekerjaan Ranjau Kanada (CCMAT/*Canadian Center for Mine Action Technology*) untuk riset yang tidak ditentukan dan proyek-proyek pembangunan.

Denmark melaporkan pendanaan sebesar DKK250,000 (\$41,699) untuk Forum Riset Penghapusan Ranjau Nordic.

EC melaporkan €350,000 (\$435,715) dalam pendanaan untuk Komite Eropa untuk Standarisasi aktivitas-aktivitas standarisasi R&D di bidang pekerjaan ranjau kemanusiaan.

Jepang melaporkan pendanaan R&D dengan total ¥811,000,000 (\$7,365,362), termasuk ¥716,000,000 (\$6,502,588) walaupun Perwakilan Ilmu dan Teknologi Jepang untuk program-program riset teknologi sensor bahan peledak dan tambahan ¥95,000,000 (\$862,774) untuk Organisasi Pengembangan Energi Baru dan Teknologi Industri untuk riset termasuk peningkatan detector dan permesinan untuk penggunaan di area-area bersemak, dan mesin penghapus ranjau bergerak.

Norwegia memberikan NOK150,000 (\$23,288) untuk Pembentukan Riset Pertahanan (FFI) untuk aktivitas-aktivitas Forum Riset Penghapusan Ranjau Nordic, dan NOK33,375 (\$5,181) untuk UNI Consult AS untuk konsultasi Nodeco/Minecat 230.

DfID Kerajaan Inggris memberikan pendanaan R&D sebesar £1,4771,563 (\$2,689,165) dalam tahun fiskal 2005-2006. DISARMCO diberi £206,335 (\$375,530) untuk proyek

penghancur ranjau-nya, Naga, yang telah seluruhnya didanai oleh DfID. ERA didanai £867,615 (\$1,579,059) untuk mengembangkan dan menguji *Minehound*, detector ranjau sensor ganda. Pendanaan £301,807 (\$549,289) diberikan untuk ITEP/QinetQ untuk pengetahuan, riset, dan nasehat, dan BARIC menerima £101,806 (\$185,287) untuk nasehat penghapusan ranjau.

Departemen Pertahanan AS menghabiskan \$13.15 juta untuk proyek-proyek R&D penghapusan ranjau kemanusiaan dalam tahun fiskal 2005, termasuk evaluasi sistem penghapusan ranjau percontohan. AS juga berpartisipasi dalam ITEP untuk meningkatkan teknologi yang ada.

Para donor juga memberikan kontribusi untuk GICHD yang diidentifikasi sebagai pendanaan R&D. Aktivitas-aktivitas tipe R&D yang dilakukan oleh GICHD mungkin termasuk aktivitas-aktivitas riset ke alam pembebasan mekanis dan teknologi sensor makhluk hidup, dan pengembangan distribusi perangkat lunak dan manajemen informasi/produk-produk data seperti Sistem Manajemen Informasi untuk Pekerjaan Ranjau (*IMSMA/Information Management for Mine Action*).

Para donor berikut melaporkan pendanaan dengan total \$2,116,202 kepada GICHD untuk R&D pada tahun 2005:

- Kanada: C\$230,440 (\$190,211), yang terdiri dari C\$11,342 (\$9,862) sebagai kontribusi R&D secara umum, dan C\$219,098 (\$180,849) untuk pejabat teknologi GICHD;
- Denmark: DKK300,000 (\$40,039) sebagai kontribusi umum untuk pendanaan R&D;
- EC: €740,000 (\$921,226) untuk R&D, informasi dan koordinasi;
- Norwegia: NOK3,800,000 (\$589,952) untuk R&D termasuk sistem-sistem kerja ranjau mekanis;
- Kerajaan Inggris: £300,000 (\$546,000) untuk bantuan inti GICHD untuk riset dan pengetahuan.

Sebagai tambahan, Swiss memberi GICHD CHF8 juta (\$6,4 juta) pada tahun 2005, dan total sekitar \$27.7 juta dari tahun 2000-2005. Pengawasan Monitor telah memasukkan

semua jumlah ini sebagai bagian dari pendanaan pekerjaan ranjau secara umum dari Swiss, bukan R&D, karena belum mungkin untuk secara konsisten membedakan komponen-komponen R&D.

Bantuan Untuk Negara-negara Dan Korban

Angka yang tepat, menyeluruh, dan bisa dibandingkan pada sumber daya-sumber daya yang ada pada bantuan untuk korban ranjau di banyak negara sulit untuk didapatkan. Sejumlah pemerintah tidak memberikan pendanaan tertentu bagi bantuan untuk korban, tapi sebaliknya menganggap bantuan untuk korban sebagai bagian menyatu dari pekerjaan ranjau kemanusiaan. Bahkan di antara semua pemerintah yang memang memberikan sejumlah alokasi pendanaan bantuan untuk korban tertentu dilaporkan bersama dengan aktivitas-aktivitas pekerjaan ranjau yang lain dan tidak mungkin untuk memisahkan semua jumlah yang dikeluarkan.

Walaupun dengan adanya komplikasi dalam mengidentifikasi alokasi-alokasi pendanaan tertentu, tampaknya di banyak negara yang terkena-dampak-ranjau bantuan yang tersedia untuk menyelesaikan kebutuhan orang-orang yang selamat tidak memadai dan tambahan bantuan dari luar dibutuhkan untuk memberikan perawatan dan rehabilitasi orang-orang yang selamat dari ranjau.

Dalam Deklarasi Zagreb dalam Rapat Keenam Para Pihak Negara, pemerintah-pemerintah memastikan suatu komitmen bagi mereka yang berada dalam posisi untuk melakukannya harus merespon terhadap prioritas bantuan untuk korban dari “24 Pihak Negara dengan jumlah orang yang selamat yang signifikan dari ranjau.” Para Pihak Negara juga mendeklarasikan, “Kami mengetahui mendesaknya pemenuhan semua kewajiban kami di bawah Konvensi juga tanggungjawab kami... bagi orang-orang yang selamat dari ranjau darat. Perkataan itu mungkin diterjemahkan mengartikan, secara keliru, bahwa tanggungjawab Para Pihak Negara terhadap orang-orang yang selamat dari ranjau agak terpisah dari kewajiban perjanjian ini, akan tetapi, pernyataan mendesak dalam pernyataan ini penting.

Dukungan yang terpelihara atas aktivitas-aktivitas bantuan untuk korban oleh semua Pihak Negara dibutuhkan, termasuk oleh donor maupun negara yang terkena-dampak-ranjau. Para Pihak Negara dalam Konferensi Tinjau Ulang Pertama mengulangi pertanyaan tentang kewajiban dalam Pasal 6.3 Perjanjian Pelarangan Ranjau, bahwa “Setiap negara yang berada dalam posisi untuk melakukannya memberikan bantuan untuk perawatan dan rehabilitasi, dan penyatuan kembali secara sosial dan ekonomi, bagi para korban ranjau,” yang menyatakan bahwa hal ini “membentuk suatu janji penting bagi ratusan ribu” orang yang selamat dari ranjau. Dalam Rencana Pekerjaan Nairobi, Para Pihak Negara menyatakan kembali komitmen bersama mereka untuk memberikan bantuan eksternal bagi bantuan untuk korban. Pekerjaan #36 menyerukan kepada Para Pihak Negara untuk “bertindak atas kewajiban mereka di bawah Pasal 6.3.” Walaupun dukungan bantuan untuk korban telah meningkat, lebih banyak pekerjaan besar dibutuhkan dari Para Pihak Negara untuk memenuhi semua komitmen.

Sebagai tambahan terhadap sumber daya-sumber daya yang diberikan oleh negara-negara, Komisi Eropa melaporkan pendanaan bagi bantuan untuk korban ranjau pada tahun 2005. Akan tetapi, total pendanaan yang bisa dirujuk secara khusus bagi bantuan untuk korban tidak diketahui, EC dilaporkan memberikan €799,684 (\$995,527) untuk Orang Cacat Internasional bagi bantuan untuk korban di Angola. EC juga memberikan kontribusi pendanaan untuk program yang termasuk komponen-komponen bantuan untuk korban.

Pendanaan bantuan untuk korban yang bisa diidentifikasi untuk tahun 2005 adalah sekitar \$37.3 juta, suatu peningkatan yang signifikan sekitar 29 persen dari \$28.8 juta pada tahun 2004. Negara-negara donor melaporkan pendanaan bantuan untuk korban kepada sedikitnya 22 negara, penurunan dari sedikitnya 33 negara pada tahun 2004.

Beberapa negara memberikan kontribusi pendanaan yang belum dilakukan pada tahun 2004. Banyak negara meningkatkan pendanaan mereka yang dilaporkan bagi bantuan untuk korban sebesar lebih dari 25 persen, termasuk Australia, Perancis, Jepang, Luxembourg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, dan Swiss.

Peningkatan terbesar dalam kerangka dolar diberikan oleh Amerika Serikat (peningkatan sebesar \$2.95 juta dari tahun 2004). Harus dicatat bahwa walaupun kontribusi AS tampaknya terbesar, bantuan ini termasuk total kontribusi atas Dana Untuk Korban Perang Leahy (sekitar \$14.4 juta, peningkatan sebesar \$2.47 juta dari pendanaan tahun 2004), yang mendukung program-program untuk semua korban perang; persentase pendanaan yang diberikan untuk membantu program-program yang membantu orang-orang yang selamat dari ranjau darat tidak tersedia. Pihak-pihak lain dengan peningkatan dolar yang besar termasuk Australia, Perancis, Jepang, Norwegia, dan Swiss.

Layak dicatat bahwa jumlah yang lebih besar yang diidentifikasi bagi bantuan untuk korban dipengaruhi oleh peningkatan metode-metode pencatatan dukungan keuangan dan mungkin tidak mewakili secara signifikan tingkat pendanaan yang lebih besar dalam kerangka nyata. Misalnya, pada tahun 2005 Iceland mengalokasikan \$1,500,000 sebagai bantuan *in-kind* untuk Anggota Tubuh *Prosthetic* dan Pusat Rehabilitasi di Irak bagian utama, pusat rehabilitasi spesialis yang merawat orang-orang yang selamat dari ranjau darat. Walaupun jumlah yang diidentifikasi sebagai kontribusi yang membantu orang-orang yang selamat dari ranjau pada pelaporan *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2006*, jumlah itu tidak diberi label sebagai pendanaan bantuan orang yang selamat. Lebih lanjut, karena kesadaran yang lebih besar dari Para Pihak Negara bagi bantuan untuk korban (ditekankan melalui proses VA 24), beberapa dari peningkatan yang dilaporkan diasumsikan sebagai hasil dari pelaporan yang lebih jelas dari pendanaan bantuan untuk korban yang ada. Sejumlah kontribusi yang sama mungkin telah dibuat di masa lalu, tapi tidak diperuntukkan sebagai pengeluaran bantuan untuk korban.

Walaupun dengan adanya peningkatan yang dilaporkan, tingkat sumber daya saat ini yang tersedia bagi bantuan untuk korban terus tidak memadai untuk kebutuhan orang yang selamat dari ranjau darat. Kekurangan pendanaan ini diidentifikasi selama periode pelaporan yang menghambat program-program bantuan orang yang selamat di beberapa negara, termasuk di antara 24 Pihak Negara dengan jumlah orang yang selamat dari ranjau yang signifikan. Negara-negara dengan aktivitas-aktivitas yang membantu orang-orang yang

selamat yang mengalami kekurangan pendanaan termasuk Kamboja, Kroasia, Sudan, Tajikistan, dan Yemen.

Tingkat pendanaan keseluruhan yang dikontribusikan pada bantuan untuk orang yang selamat telah gagal mencapai kebutuhan proyek-proyek yang ada yang tersedia untuk jumlah yang semakin meningkat dari orang yang selamat dari ranjau darat. Misalnya, jika diukur secara proporsional sebagai pilar pekerjaan ranjau PBB secara bersama, hanya 27 persen dari total jumlah semua permintaan proyek bantuan untuk korban melalui Portfolio PBB untuk Proyek-proyek Pekerjaan Ranjau diterima pada tahun 2005 (\$4.7 juta yang diterima dari \$17.5 juta yang diminta). Sebagai perbandingan, proyek-proyek pembebasan ranjau menerima 75 persen dari total permintaan bersama mereka pada tahun 2005 (\$115 juta yang diterima dari \$153 juta yang diminta). Pada tahun 2005, program bantuan untuk korban hanya menerima 2 persen dari total dana yang diterima melalui permintaan Portfolio (\$4.7 juta dari total \$241 juta). Tinjau Ulang Akhir Tahun Portfolio PBB melaporkan bahwa semua persentase ini konsisten dengan kecenderungan di masa lalu.

Kekurangan berlanjut untuk komitmen pendanaan jangka-panjang yang besar bagi bantuan untuk korban merupakan masalah pemikiran serius. Fluktuasi dalam pengeluaran atas program bantuan untuk korban telah menghambat pekerjaan organisasi pelaksana, dan mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan bagi orang-orang yang selamat dari ranjau dalam sejumlah kasus. Pelaporan Pengawasan Ranjau Darat telah menunjukkan bahwa program-program bantuan untuk korban sangat rawan terhadap alokasi pendanaan yang berubah. Pelayanan-pelayanan yang ada telah diakhiri, dan dalam sejumlah kasus seluruh program telah terpaksa ditutup, secara tiba-tiba meninggalkan orang-orang yang selamat dari ranjau tanpa pelayanan ketika pendanaan jangka-pendek telah diselesaikan. Peningkatan pendanaan jangka-panjang dibutuhkan untuk memampukan organisasi dan waktu program bantuan untuk orang yang selamat dalam membangun kapasitas dan mengamankan sumber-sumber pendanaan alternatif. Lebih lanjut, organisasi pendanaan jangka panjang bisa dianggap lebih bertanggungjawab, yang menguntungkan bagi para penerima dan donor program.

Seperti di masa lampau, sejumlah negara (termasuk Denmark, Swedia, dan Kerajaan Inggris) tidak memberikan pendanaan tertentu bagi bantuan untuk korban. Swedia dan Kerajaan Inggris menganggap bahwa orang-orang yang selamat dari ranjau darat dicapai melalui kerjasama pembangunan bilateral dan kontribusi-kontribusi lain. Pada tahun 2006, Jerman menyatakan bahwa negara itu akan mendanai bantuan untuk korban hanya dalam kasus-kasus pengecualian tertentu, dan akan mengkonsentrasikan pendanaan pada pembebasan ranjau.

Pengalaman telah menunjukkan bahwa kecuali pendanaan itu secara pasti ditargetkan untuk fasilitas-fasilitas dan program-program yang membantu orang lumpuh, termasuk orang-orang yang selamat dari ranjau darat, mungkin semua sumber daya itu akan diarahkan kepada area-area kesehatan umum atau masalah pembangunan lain, yang membiarkan penduduk lumpuh semakin dirugikan. Dalam hal penyatuan bantuan untuk korban ke dalam pemrograman pembangunan yang lebih luas, ICBL mengutamakan pendekatan jalur-kembar yang mengalokasikan pendanaan pada program-program bantuan untuk korban, juga menyatukan aktivitas-aktivitas bantuan untuk korban ke dalam program-program pembangunan dan sektor kesehatan yang ada dan muncul.

Sejumlah Pihak Negara telah mengakui keharusan untuk komitmen terpelihara tertentu dalam membantu orang-orang yang selamat dari ranjau dan orang-orang lumpuh. Setelah berkomitmen untuk memperkuat dukungannya bagi bantuan untuk orang yang selamat selama lima tahun berikutnya. Australia mengetahui bahwa "bantuan untuk korban telah menjadi salah satu dari area-area yang kurang didanai dalam konvensi ini dan bahwa komitmen jangka panjang dalam membantu orang yang selamat dari ranjau darat dibutuhkan oleh negara-negara yang terkena-ranjau-darat dan para donor.

Dengan cara yang sama, jika tidak lebih penting, maka pendanaan donor internasional merupakan kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh negara-negara yang terkena-dampak-ranjau bagi bantuan untuk korban. Akan tetapi, informasi tentang kontribusinya jarang yang tersedia. Pemerintah Yemen dilaporkan telah memberikan kontribusi \$108,000 kepada Program Bantuan Untuk Korban Ranjau Darat Yemen. Di Kroasia, negara itu dilaporkan

telah mengalokasikan KN155,000 (\$26,059) bagi bantuan untuk korban pada tahun 2005. Pengawasan Ranjau Darat telah mencatat kontribusi bantuan untuk korban oleh Kroasia dengan total \$76,356 sejak tahun 2001.

Pendanaan oleh negara-negara yang terkena-dampak-ranjau untuk area-area sistem kesehatan publik yang membantu orang-orang yang selamat dari ranjau darat juga jarang dilaporkan. Akan tetapi, fasilitas dan pelayanan publik yang menyelesaikan kebutuhan para korban ranjau darat merupakan bagian penting dari kelanjutan bantuan untuk orang yang selamat. Para Pihak Negara yang memberikan sumber daya-sumber daya untuk membantu orang-orang yang selamat dari ranjau melalui sistem kesehatan, atau telah mengundang legislasi yang berkomitmen mendanai bantuan untuk orang selamat melalui pelayanan negara, harus melaporkan kontribusi mereka. misalnya, Tajikistan memiliki undang-undang yang memberikan hak kepada orang-orang yang selamat dari ranjau dan orang lumpuh lain mendapatkan bantuan, termasuk perawatan medis dan rehabilitasi fisik; dalam laporan Pasal 7 terakhirnya, Tajikistan mencatat alokasi \$235,000 pada tahun 2005 untuk klinik *orthopedic* yang merawat orang lumpuh, 10-12 persen dari mereka merupakan orang-orang yang selamat dari ranjau darat. Para Pihak Negara yang terkena-dampak-ranjau harus didorong untuk melapor dengan rincian dan kejelasan sebanyak mungkin tentang bagaimana pendanaan melalui sistem negara dialokasikan dalam membantu orang-orang yang selamat dari ranjau. Pelaporan seperti itu tidak hanya menunjukkan komitmen dari Para Pihak Negara dalam memenuhi Pasal 6.3 Perjanjian Pelarangan Ranjau, juga akan membantu proses pengumpulan data yang diperlukan untuk memberikan bantuan yang tepat.

\$37.2 juta dalam kontribusi negara donor bagi bantuan untuk korban pada tahun 2005 tidak sepenuhnya merupakan wakil dari total sumber daya yang tersedia dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang selamat dari ranjau. Sebagai tambahan terhadap kontribusi negara-negara yang terkena-dampak-ranjau di atas, sumber-sumber lain termasuk banyak donor swasta dan yayasan derma. Sejumlah contoh pada tahun 2005 adalah: Dana Peringatan Putri Wales, Diana (derma berbasis-di-Kerajaan-Inggris) memberikan \$1.7 juta; Mengangkat-Lapangan-Ranjau memberikan sekitar \$1.3 juta; Jaringan Kerja Orang-orang

Yang Selamat Dari Ranjau Darat menerima \$3.2 juta (40 persen dari pendapatan tahunannya) dalam kontribusi dari hibah-hibah swasta dan sumbangan individu (termasuk pendanaan dari Dana Peringatan Putri Wales, Diana). Contoh-contoh lain pendanaan yang diberikan melalui berbagai cara, termasuk sumbangan individu, kontribusi *in-kind* dan warisan, ditemukan dalam berbagai laporan negara.

Termasuk dalam informasi yang diberikan oleh negara-negara adalah kontribusi untuk Permintaan Khusus ICRC kepada Pekerjaan Ranjau dan Dana Khusus ICRC untuk Orang Lumpuh. Pada tahun 2005, Permintaan Khusus ICRC untuk Pekerjaan Ranjau bertotal CHF17,000,000 (\$14,286,861), dibandingkan dengan CHF15.8 juta (\$12.7 juta) pada tahun 2004. Total tahun 2005 termasuk CHF5,224,000 (\$4,192,953) dari empat negara (Belgia, Kanada, Finlandia, dan Norwegia); CHF405,000 (\$325,066) dari masyarakat nasional (Australia, Norwegia, dan Persatuan Emirate Arab); CHF955,000 (\$766,514) dari organisasi-organisasi termasuk Rotary, Soroptimist International dan pihak-pihak lain; dan CHF11,216,000 (\$9,002,328) dari kontribusi kepada permintaan darurat tahunan.

Dana Khusus ICRC untuk Orang Lumpuh mengeluarkan CHF4,308,000 (\$3,457,741) untuk program-program rehabilitasi fisik bagi orang lumpuh, termasuk orang-orang yang selamat dari ranjau darat pada tahun 2005, suatu peningkatan dari CHF4,074,085 (\$3,278,150) yang dilaporkan untuk tahun 2004. Pada tahun 2005, lima negara (Kanada, Liechtenstein, Norwegia, Swiss, dan Amerika Serikat melalui Dana Para Korban Perang Leahy) memberikan kontribusi CHF3,037,000 (\$2,437,595); tujuh masyarakat nasional (Jerman, Irlandia, Jepang, Monako, Norwegia, Swiss, dan Turki) memberikan CHF745,000 (\$597,961); dan para donor swasta memberikan CHF255,000 (\$204,671).

Negara-negara juga melaporkan kontribusi tentang bantuan untuk korban melalui Dana Perwalian Internasional berbasis-di-Slovenia untuk Penghapusan Ranjau dan Bantuan Untuk Korban Ranjau. Pada tahun 2005, ITF mengeluarkan \$1,169,529 bantuan untuk korban, atau 4.2 persen dari pengeluaran keseluruhan. Ini mewakili peningkatan dari \$717,358 pada tahun 2004 (2.4 persen dari pengeluaran keseluruhan), tapi secara signifikan lebih kecil daripada \$2,684,100 (10,8 persen) yang dikeluarkan pada tahun 2003. Pengeluaran bagi

bantuan untuk korban tetap jauh di bawah target ITF, dibandingkan dengan empat negara pada tahun 2004 dan tujuh negara pada tahun 2003.

Para Penerima Pekerjaan Ranjau Utama

Informasi yang handal mengenai para penerima pekerjaan ranjau utama bahkan lebih sulit untuk didapatkan daripada tentang para donor pekerjaan ranjau. Menurut informasi yang bisa didapatkan, para penerima terbesar pendanaan pekerjaan ranjau selama beberapa waktu adalah Afghanistan (\$515 juta sejak tahun 1991), Kamboja (\$256 juta sejak tahun 1994), Irak (\$253 juta sejak tahun 1993), Mozambik (\$214 juta sejak tahun 1993), Angola (\$177 juta sejak tahun 1993), Bosnia dan Herzegovina (\$163 juta sejak tahun 1995), Kosovo (\$93 juta sejak tahun 1999), Lebanon (diperkirakan lebih besar dari \$86 juta sejak tahun 2000), Sudan (\$80 juta sejak tahun 2001), dan Laos (\$69 juta sejak tahun 1994). Sudan ditambahkan ke dalam daftar dari para penerima terbesar untuk pertama kalinya dalam edisi Pengawasan Ranjau Darat ini. Pendanaan untuk Sudan lebih dari tiga kali lipat pada tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004.

Para penerima tertinggi untuk pendanaan pekerjaan ranjau tahun 2005 adalah Afghanistan (\$66.8 juta), Sudan (\$48.4 juta), Angola (\$35.8), Irak (\$27.8), Kamboja (\$23.9 juta) dan Sri Lanka (\$19.1 juta).

Hanya di Sudan pendanaan pekerjaan ranjau sangat meningkat pada tahun 2005 (sampai \$33.4 juta). Peningkatan yang bisa dicatat lainnya pada tahun 2005 terlihat di Guinea-Bissau (\$2.5 juta), Albania (\$2.3 juta), Uganda (\$1.5 juta), Abkhazia (\$1.3 juta), Lebanon (\$1.3 juta), dan Burundi (\$1 juta).

Penurunan drastis dalam pendanaan pekerjaan ranjau terjadi di Irak (turun \$30.9 juta, atau 53 persen). Afghanistan (\$25 juta, atau 27 persen), dan Kamboja (\$17.7 juta, atau 43 persen). Negara-negara lain dengan penurunan besar pada tahun 2005 termasuk Sri Lanka (\$4.6 juta), Bosnia dan Herzegovina (\$2.7 juta), Mozambik (\$2 juta), Jordan (\$1.7 juta), Tajikistan (\$1.6 juta) dan Columbia (\$1.2 juta).

Penerima Pekerjaan Ranjau Puncak pada 2005

Afghanistan	\$66.8 juta
-------------	-------------

Sudan	\$48.4 juta
Angola	\$35.8 juta
Irak	\$27.8 juta
Kamboja	\$23.9 juta
Sri Lanka	\$19.1 juta
Bosnia dan Herzegovina	\$15.0 juta
Kroasia	\$9.1 juta
Mozambik	\$7.9 juta
Laos	\$7.0 juta
Lebanon	\$6.5 juta
Vietnam	\$5.8 juta
Republik Demokratis Kongo	\$4.9 juta
Eritrea	\$4.9 juta
Albania	\$4.8 juta
Azerbaijan	\$4.1 juta
Somaliland	\$3.7 juta
Nikaragua	\$3.5 juta
Guinea-Bissau	\$3.5 juta
Abkhazia	\$3.3 juta
Ethiopia	\$3.3 juta
Yemen	\$2.5 juta
Kolombia	\$2.3 juta
Burundi	\$2.1 juta
Cyprus	\$1.9 juta
Kosovo	\$1.9 juta
Uganda	\$1.7 juta
Serbia dan Montenegro	\$1.7 juta
Nagorno-Karabakh	\$1.2 juta

Chad \$1.2 juta

Chechnya \$1.0 juta

Ringkasan Pendanaan Penerima Pekerjaan Ranjau Utama

Abkhazia: Operasi-operasi HALO di Abkhazia menerima sekitar \$3.25 juta pada tahun 2005. Pada tahun 2004, HALO menerima kurang dari itu, sekitar \$2 juta.

Afghanistan: Laporan-laporan oleh para donor menunjukkan bahwa 16 negara dan Komisi Eropa memberikan kontribusi kepada \$66.8 juta untuk pekerjaan ranjau di Afghanistan pada tahun 2005. Ini menunjukkan penurunan sekitar 27 persen dari \$91.8 juta yang diberikan oleh 16 negara dan EC pada tahun 2004.

Albania: Para donor melaporkan kontribusi dengan total \$5.32 juta pada tahun 2005. Pada tahun 2004, kontribusi-kontribusi dengan total \$3 juta dilaporkan.

Angola: Pada tahun 2005, 17 negara dan EC melaporkan memberikan kontribusi \$35.8 juta untuk pekerjaan ranjau di Angola, suatu peningkatan yang signifikan dari \$28 juta yang dikontribusikan pada tahun 2004.

Azerbaijan: Dari laporan-laporan donor, Pengawasan Ranjau Darat memperkirakan bahwa Azerbaijan menerima sumbangan internasional dengan total \$4.1 juta untuk pekerjaan ranjau pada tahun 2005, dibandingkan dengan \$3.21 juta pada tahun 2004.

Bosnia dan Herzegovina: Lima belas negara dilaporkan memberikan kontribusi \$15 juta untuk pekerjaan ranjau di BiH pada tahun 2005, jauh lebih sedikit daripada \$17.7 juta pada tahun 2004. Pengawasan Ranjau Darat memperkirakan bahwa sekitar \$26.8 juta dikontribusikan untuk pekerjaan ranjau di BiH pada tahun 2005 dari sumber nasional dan internasional.

Burundi: Pengawasan Ranjau Darat memperkirakan bahwa total \$2.12 juta dikontribusikan oleh tiga negara dan EC untuk pekerjaan ranjau di Burundi pada tahun 2005, peningkatan yang besar dari tahun 2004 (\$1.1 juta).

Kamboja: Empat belas negara dilaporkan memberikan kontribusi \$23.9 juta pada tahun 2005. Ini merupakan penurunan yang signifikan dari pendanaan donor untuk tahun 2004 (\$41.7 juta oleh 13 negara dan EC). Penurunan ini utamanya mencerminkan kontribusi

tahunan Jepang yang jatuh dari \$18.7 juta pada tahun 2004 menjadi \$4.5 juta pada tahun 2005; kontribusi tahun 2004 telah menjadi peningkatan enam kali lipat dari tahun 2003.

Chad: Negara satu-satunya yang harus melaporkan pendanaan untuk pekerjaan ranjau di Chad pada tahun 2005 adalah Amerika Serikat, yang memberikan kontribusi \$1.17 juta. Pada tahun 2004, empat negara donor memberikan total \$1.9 juta.

Chechnya: Pada tahun 2005, tiga negara dilaporkan memberikan \$982,124 untuk pekerjaan ranjau di Chechnya dan daerah-daerah sekitarnya, suatu peningkatan dari tahun 2004 (\$804,066 dari tiga negara dan EC).

Kolombia: Tujuh negara dan EC dilaporkan memberikan kontribusi \$2.33 juta untuk pekerjaan ranjau di Kolombia pada tahun 2005. Ini merupakan penurunan sekitar 34 persen dari \$3.53 juta untuk tahun 2004.

Kroasia: Delapan negara dan EC dilaporkan memberikan kontribusi \$9.08 juta, suatu penurunan dari \$9.82 juta pada tahun 2004.

Cyprus: EC memberikan €1.5 juta (\$1.87 juta) untuk penghapusan ranjau di zona pendukung pada tahun 2005, sebagai bagian dari €4 juta (\$5 juta) pada pendanaan pekerjaan ranjau sejak tahun 2004.

Republik Demokratis Kongo: Delapan negara dan EC dilaporkan memberikan kontribusi \$4.86 juta untuk pekerjaan ranjau di DRC pada tahun 2005. Lima negara dan EC menyumbang \$4.46 juta pada tahun 2004.

Eritrea: Pada tahun 2005, enam negara donor dilaporkan memberikan kontribusi \$4.85 juta untuk pekerjaan ranjau di Eritrea. Delapan negara donor dan EC dilaporkan memberikan kontribusi dengan total \$4.95 juta pada tahun 2004. Pendanaan pekerjaan ranjau untuk Eritrea telah menurun sejak tahun 2002.

Ethiopia: Enam negara memberikan pendanaan pekerjaan ranjau dengan total \$2.6 juta untuk Ethiopia pada tahun 2005. Pada tahun 2004, pendanaan bertotal sekitar \$2.3 juta.

Guinea-Bissau: Dua negara dilaporkan memberikan \$349,187 untuk pekerjaan ranjau di Guinea-Bissau pada tahun 2005. Pada tahun 2004, \$998,771 dikontribusikan oleh tiga donor.

Irak: Empat belas donor dilaporkan memberikan total \$27.8 juta untuk pekerjaan ranjau di Irak pada tahun 2005, suatu penurunan lebih dari setengah dari \$58.7 juta dari 13 donor pada tahun 2004. Pendanaan AS saja menurun \$24 juta.

Jordan: Tiga negara dilaporkan memberikan kontribusi \$468,906 untuk pekerjaan ranjau di Jordan pada tahun 2005, suatu penurunan yang tajam dari tahun 2004 ketika para donor internasional memberikan sekitar \$2.2 juta.

Kosovo: Pengawasan Ranjau Darat mengidentifikasi enam donor yang memberikan kontribusi dengan total sedikitnya \$1.89 juta untuk pekerjaan ranjau di Kosovo pada tahun 2005, suatu peningkatan dari sekitar \$1.58 juta oleh tiga negara pada tahun 2004.

Laos: Sepuluh negara donor dilaporkan memberikan kontribusi dengan total \$7.2 juta untuk pekerjaan ranjau di Laos pada tahun 2005, suatu penurunan dari \$8.13 juta pada tahun 2004.

Mozambik: Dua belas negara donor dilaporkan memberikan kontribusi dengan total \$10 juta untuk pekerjaan ranjau di Mozambik pada tahun 2005, suatu penurunan dari sekitar \$12 juta yang disumbangkan oleh 14 negara dan EC pada tahun 2004.

Nagorno-Karabakh: Belanda dilaporkan memberikan €667,638 (\$831,143) kepada HALO untuk pembebasan ranjau dan MRE di Nagorno-Karabakh. Anggaran HALO untuk tahun 2005 sekitar \$1.33 juta.

Nicaragua: Pengawasan Ranjau Darat mengidentifikasi sedikitnya \$3.5 juta yang disumbangkan pada tahun 2005 untuk pekerjaan ranjau di Nicaragua oleh enam negara. Pada tahun 2004, lima negara donor dilaporkan menyumbangkan sekitar \$4 juta. Adalah sulit untuk dengan jelas mengidentifikasi pendanaan pekerjaan ranjau untuk Nicaragua atas dasar tahunan, karena banyak donor menentukan dana-dana untuk Organisasi program Amerika Tengah dari Amerika Serikat dan bukan Nicaragua secara pasti, dan beberapa pihak memberikan pendanaan banyak-tahun.

Serbia dan Montenegro: Pada tahun 2005, dua donor internasional memberikan sekitar \$1.7 juta untuk pekerjaan ranjau di Serbia dan Montenegro (tidak termasuk pendanaan penghancuran tumpukan), jumlah yang sama pada tahun 2004.

Somaliland: Enam negara donor dilaporkan memberikan \$3.73 juta untuk pendanaan pekerjaan ranjau untuk aktivitas-aktivitas di Somaliland (yang berbeda dari Somalia) pada tahun 2005, dibandingkan dengan \$4.11 juta pada tahun 2004.

Sri Lanka: Pada tahun 2005, 10 negara dan EC melaporkan \$19.05 juta pada pendanaan untuk pekerjaan ranjau di Sri Lanka, suatu penurunan dari \$23.6 juta yang dikontribusikan pada tahun 2004 oleh 12 negara dan EC.

Sudan: Pengawasan Ranjau Darat mengidentifikasi kontribusi pada tahun 2005 dengan total \$48.4 juta untuk pekerjaan ranjau di Sudan, dari 14 pemerintah dan EC. Ini merupakan peningkatan \$33.4 juta, lebih dari tiga kali lipat \$14.97 juta yang diberikan oleh dua belas pemerintah dan EC pada tahun 2004. Yang paling bisa dicatat, Jepang memberikan kontribusi lebih dari \$19 juta, dibandingkan dengan \$1.2 juta pada tahun 2004. Sejak tahun 2001, pendanaan pekerjaan ranjau untuk Sudan telah meningkat tajam setiap tahun: \$2.2 juta pada tahun 2001; \$5.1 juta pada tahun 2002; \$9.5 juta pada tahun 2003; \$15 juta pada tahun 2004; dan \$48.4 juta pada tahun 2005.

Status Konvensi

Konvensi 1997 tentang Pelarangan Penggunaan, Penumpukan, Produksi, dan Pengiriman Ranjau Anti-Personil dan tentang Penghancurannya (Perjanjian Pelarangan Ranjau 1997)

Di bawah Pasal 15, perjanjian ini terbuka untuk penandatanganan dari tanggal 3 Desember 1997 sampai berlaku, yaitu tanggal 1 Maret 1999. Pada daftar berikut, tanggal pertama adalah penandatanganan; tanggal kedua adalah pengesahan. Sekarang karena perjanjian ini telah berlaku, negara-negara mungkin tidak lagi menandatangani tapi mereka mungkin terikat tanpa penandatanganan melalui satu prosedur langkah yang dikenal sebagai pengaksesan. Menurut Pasal 16 (2), perjanjian ini terbuka untuk pengaksesan oleh suatu Negara yang belum menandatangani. Pengaksesan ditunjukkan di bawah ini dengan (a).

Sejak tanggal 1 Juli 2006, 154 penandatanganan/pengaksesan dan 151 pengesahan/pengaksesan (a

Para Pihak Negara

Afghanistan 11 Sep 02 (a)

Albania 8 Sep 98; 29 Feb 00

Algeria 3 Des 97; 9 Okt 01

Andorra 3 Des 97; 29 Jun 98

Angola 4 Des 97; 5 Jul 02

Antigua dan Barbuda 3 Des 97; 3 Mei 99

Argentina 4 Des 97; 14 Sep 99

Australia 3 Des 97; 14 Jan 99

Austria 3 Des 97; 29 Jun 98

Bahamas 3 Des 97; 31 Jul 98

Bangladesh 7 Mei 98; 6 Sep 00

Barbados 3 Des 97; 26 Jan 99

Belarus 3 Sep 03 (a)

Belgia 3 Des 97; 4 Sep 98
Belize 27 Feb 98; 23 Apr 98
Benin 3 Des 97; 25 Sep 98
Bhutan 18 Agus 05 (a)
Bolivia 3 Des 97; 9 Jun 98
Bosnia dan Herzegovina 3 Des 97; 8 Sep 98
Botswana 3 Des 97; 1 Mar 00
Brazil 3 Des 97; 30 Apr 99
Brunei Darussalam 4 Des 97; 24 Apr 06
Bulgaria 3 Des 97; 4 Sep 98
Burkina Faso 3 Des 97; 16 Sep 98
Burundi 3 Des 97; 22 Okt 03
Kamboja 3 Des 97; 28 Jul 99
Kamerun 3 Des 97; 19 Sep 02
Kanada 3 Des 97; 3 Des 97
Cape Verde 4 des 97; 14 Mei 01
Republik Afrika Tengah 8 Nov 02 (a)
Chad 6 Jul 98; 6 Mei 99
Chile 3 Des 97; 10 Sep 01
Kolombia 3 Des 97; 6 Sep 00
Comoros 19 Sep 02 (a)
Kongo (Brazzaville) 4 Mei 01 (a)
Kongo, DR 2 Mei 02 (a)
Kepulauan Cook 3 Des 97; 17 Mar 99
Cote d Ivoire 3 Des 97; 30 Jun 00
Kroasia 4 Des 97; 20 Mei 98
Cyprus 4 Des 97; 17 Jan 03
Republik Czech 3 Des 97; 26 Okt 99

Denmark 4 Des 97; 8 Jun 98
Djibouti 3 Des 97; 18 Mei 98
Dominica 3 Des 97; 26 Mar 99
Republik Dominika 3 Des 97; 30 Jun 00
Ekuador 4 Des 97; 29 Apr 99
El Salvador 4 Des 97; 27 Jan 99
Equatorial Guinea 16 Sep 98 (a)
Eritrea 27 Agus 01 (a)
Estonia 12 Mei 04 (a)
Ethiopia 3 Des 97; 17 Des 04
Fiji 3 Des 97; 17 Des 04
Perancis 3 Des 97; 23 Jul 98
Gabon 3 Des 97; 8 Sep 00
Gambia 4 Des 97; 23 Sep 02
Jerman 3 Des 97; 23 Jul 98
Ghana 4 Des 97; 30 Jun 00
Yunani 3 Des 97; 25 Sep 03
Grenada 3 Des 97; 19 Agus 98
Guatemala 3 Des 97; 26 Mar 99
Guinea 4 Des 97; 8 Okt 98
Guinea-Bissau 3 Des 97; 22 Mei 01
Guyana 4 Des 97; 5 Agus 03
Haiti 3 Des 97; 15 Feb 06
Holy See 4 Des 97; 17 Feb 98
Honduras 3 Des 97; 24 Sep 98
Hongaria 3 Des 97; 6 Apr 98
Iceland 4 Des 97; 5 Mei 99
Irlandia 3 Des 97; 3 Des 97

Italia 3 Des 97; 23 Apr 99
Jamaika 3 Des 97; 17 Jul 98
Jepang 3 Des 97; 30 Sep 98
Jordan 11 Agus 98; 13 Nov 98
Kenya 5 Des 97; 23 Jan 01
Kiribati 7 Sep 00 (a)
Latvia 1 Jul 05 (a)
Lesotho 4 Des 97; 2 Des 98
Liberia 23 Des 99 (a)
Liechtenstein 3 Des 97; 5 Okt 99
Lithuania 26 Feb 99; 12 Mei 03
Luxembourg 4 Des 97; 14 Jun 99
Makedonia FYR 9 Sep 98 (a)
Madagaskar 4 Des 97; 16 Sep 99
Malawi 4 Des 97; 13 Agus 98
Malaysia 3 Des 97; 22 Apr 99
Maldives 1 Okt 98; 7 Sep 00
Mali 3 Des 97; 7 Mei 01
Malta 4 Des 97; 7 Mei 01
Mauritania 3 Des 97; 21 Jul 00
Mauritius 3 Des 97; 3 Des 97
Meksiko 3 Des 97; 9 Jun 98
Moldova 3 Des 97; 8 Sep 00
Monako 4 Des 97; 17 Nov 98
Mozambik 3 Des 97; 25 Agus 98
Namibia 3 Des 97; 21 Sep 98
Nauru 7 Agus 00 (a)
Belanda 3 Des 97; 12 Apr 99

Selandia Baru 3 Des 97; 27 Jan 99
Nikaragua 4 Des 97; 30 Nov 98
Niger 4 Des 97; 23 Mar 99
Nigeria 27 Sep 01 (a)
Niue 3 Des 97; 15 Apr 98
Norwegia 3 Des 97; 9 Jul 98
Panama 4 Des 97; 7 Okt 98
Papua New Guinea 28 Jun 04 (a)
Paraguay 3 Des 97; 13 Nov 98
Peru 3 Des 97; 17 Jun 98
Filipina 3 Des 97; 15 Feb 00
Portugal 3 Des 97; 19 Feb 99
Qatar 4 Des 97; 13 Okt 98
Romania 3 Des 97; 30 Nov 00
Rwanda 3 Des 97; 8 Jun 00
Saint Kitts dan Nevis 3 Des 97; 2 Des 98
Saint Lucia 3 Des 97; 13 Apr 99
Saint Vincent dan Grenadines 3 Des 97; 1 Agus 01
Samoa 3 Des 97; 23 Jul 98
San Marino 3 Des 97; 18 Mar 98
Sao Tome e Principe 30 Apr 98; 31 Mar 03
Senegal 3 Des 97; 24 Sep 98
Serbia dan Montenegro 18 Sep 03 (a)
Seychelles 4 Des 97; 2 Jun 00
Sierra Leone 29 Jul 98; 25 Apr 01
Republik Slovak 3 Des 97; 25 Feb 99
Slovenia 3 Des 97; 27 Okt 98
Kepulauan Solomon 4 Des 97; 26 Jan 99

Afrika Selatan 3 Des 97; 26 Jun 98
Spanyol 3 Des 97; 19 Jan 99
Sudan 4 Des 97; 13 Okt 03
Suriname 4 Des 97; 23 Mei 02
Swaziland 4 Des 97; 22 Des 98
Swedia 4 Des 97; 30 Nov 98
Swiss 3 Des 97; 24 Mar 98
Tajikistan 12 Okt 99 (a)
Tanzania 3 Des 97; 13 Nov 00
Thailand 3 Des 97; 27 Nov 98
Timor-Leste 7 Mei 03 (a)
Togo 4 Des 97; 9 Mar 00
Trinidad dan Tobago 4 Des 97; 27 Apr 98
Tunisia 4 Des 97; 9 Jul 99
Turki 25 Sep 03 (a)
Turkmenistan 3 Des 97; 19 Jan 98
Uganda 3 Des 97; 25 Feb 99
Ukraine 24 Feb 99; 27 Des 05
Kerajaan Inggris 3 Des 97; 31 Jul 98
Uruguay 3 Des 97; 7 Jun 01
Vanuatu 4 Des 97; 16 Sep 05
Venezuela 3 Des 97; 14 Apr 99
Yemen 4 Des 97; 1 Sep 98
Zambia 12 Des 97; 23 Feb 01
Zimbabwe 3 Des 97; 18 Jun 98

Para Penandatangan

Indonesia 4 Des 97
Marshall Islands 4 Des 97

Polandia 4 Des 97

Bukan Penandatangan

Armenia	Libya
Azerbaijan	Mikronesia
Bahrain	Mongolia
Burma (Myanmar)	Moroko
Cina	Nepal
Kuba	Oman
Mesir	Pakistan
Finlandia	Palau
Georgia	Federasi Rusia
India	Saudi Arabia
Iran	Singapura
Irak	Somalia
Israel	Sri Lanka
Kazakhstan	Siria
Korea, Utara	Tonga
Korea, Selatan	Tuvalu
Kuwait	Persatuan Emirate Arab
Kyrgyzstan	Amerika Serikat
Lao PDR	Uzbekistan
Lebanon	Vietnam

Perkembangan Utama

Afghanistan

Pada bulan Mei 2006, Afghanistan melaporkan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Pelarangan Ranjau, 65,973 ranjau yang ditumpukkan telah dihancurkan, termasuk 44,819 sejak permulaan tahun 2005. Afghanistan melayani sebagai ketua-bersama Komite Kedudukan Bagi Bantuan Untuk Korban dan Penyatuan Kembali Secara Sosial Ekonomi dari bulan Desember 2005 sampai September 2006. Kecepatan penghapusan ranjau dipercepat pada tahun 2005; jumlah penghapusan ranjau tanah meningkat sebesar sepertiga menjadi hampir 140 kilometer kuadrat, walaupun dengan adanya keamanan yang menurun. Operasi-operasi pembebasan ranjau mengalami kekurangan pendanaan yang parah pada pertengahan tahun 2006; pemecatan personil penghapusan ranjau diumumkan pada bulan Juli, dengan pemotongan lebih lanjut yang diperkirakan. Penerangan resiko ranjau mencapai lebih dari 1.8 juta orang Afghanistan dan 2.365 komunitas pada tahun 2005. Ada 848 kecelakaan baru yang dicatat pada tahun 2005, yang memelihara tingkat kecelakaan yang relatif konstan pada tahun-tahun terakhir; akan tetapi, kecelakaan anak terus meningkat.

Albania

Pada bulan April 2006 parlemen mengambil legislasi pelaksanaan nasional. Albania mengungkapkan bahwa negara ini memiliki ranjau anti-kendaraan dengan kabel putus dan negara ini berencana untuk menghancurkannya. DanChurchAid menghapus ranjau dan melepaskan 1.38 kilometer kuadrat tanah yang terkena-dampak-ranjau di Albania timur laut pada tahun 2005, di mana penerangan resiko ranjau berlanjut. Sebagian besar kecelakaan terjadi di bagian lain negara ini, yang disebabkan oleh sisa bahan peledak perang. Pada tahun 2005, 23 kecelakaan baru dicatat; hanya dua kecelakaan berada di timur laut.

Algeria

Algeria menyelesaikan penghancuran tumpukannya pada tanggal 21 November 2005. Total 150,050 ranjau anti-personil dari 10 tipe yang berbeda dihancurkan pada 12 kejadian penghancuran selama setahun. Algeria melayani sebagai ketua-bersama Komite Kedudukan

untuk Pemberesan Ranjau, Penerangan Resiko Ranjau dan Teknologi Pekerjaan Ranjau dari bulan Desember 2004 sampai Desember 2005. Dari bulan November 2004 sampai 31 Maret 2006, angkatan bersenjata menemukan dan menghancurkan 190,858 ranjau anti-personil yang ditempatkan (enam persen dari tiga juta-0plus ranjau darat di perbatasan bagian timur dan barat Algeria). Algeria juga menghancurkan 10,996 ranjau anti-personil yang diletakkan oleh angkatan bersenjata selama perjuangan dengan kelompok pemberontak pada tahun 1990an. Pada bulan Mei 2006, pemerintah dan Program Pembangunan PBB menegosiasikan perjanjian kerjasama untuk pekerjaan ranjau. Ada peningkatan yang signifikan pada kecelakaan dari ranjau, perlengkapan perang yang tidak diledakkan dan alat bahan peledak yang ditingkatkan yang dipicu-korban pada tahun 2005, di mana sedikitnya 15 orang terbunuh dan 36 terluka.

Angola

Pada bulan Mei 2006, Angola sekali lagi menunjukkan negara itu mungkin membutuhkan perpanjangan waktu dari batas waktu tanggal 1 Januari 2007 untuk penyelesaian penghancuran tumpukan ranjau anti-personil, tapi Perjanjian Pelarangan Ranjau tidak memungkinkan perpanjangan waktu. Legislasi pelaksanaan nasional telah dikirim kepada parlemen. Pada tahun 2005, 14.2 kilometer kuadrat tanah dan 668 kilometer jalan dihapus ranjanya, menurut Angola; para operator penghapus ranjau melaporkan lebih sedikit pembebasan. Pada bulan Desember 2005, Komisi Eksekutif untuk Penghapusan Ranjau dibentuk, untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas lembaga-lembaga penghapusan ranjau nasional Angola. Survey Dampak Ranjau Darat berlanjut dan pada bulan Mei 2006 telah diselesaikan di 15 dari 18 provinsi. Pada tahun 2006, Angola merancang rencana strategis pekerjaan ranjau pertamanya, untuk tahun 2006-2011. Tujuannya untuk merubah pekerjaan ranjau di Angola untuk fokus ganda pada persyaratan kemanusiaan dan pembangunan kembali secara nasional dan persyaratan pembangunan. Penerangan resiko ranjau diperluas ke 17 provinsi yang mencapai 440,334 orang pada tahun 2005; fokusnya berubah dari pendekatan darurat menjadi pendekatan yang lebih berorientasi-pembangunan. Pada tahun 2005, ada sedikitnya 96 kecelakaan baru karena

ranjau dan persenjataan perang yang tidak diledakkan, suatu penurunan signifikan dari tahun 2004; sebagian besar insiden melibatkan ranjau anti-personil.

Bangladesh

Bangladesh melayani sebagai ketua-bersama pada Komite Kedudukan untuk Penghancuran Tumpukan dari bulan Desember 2004 sampai Desember 2005. Tidak ada kecelakaan ranjau dilaporkan di Bangladesh pada tahun 2005 dan bulan Januari-Mei 2006; ada delapan kecelakaan yang berhubungan dengan-UXO pada tahun 2005. Antara tahun 1999 dan 2005, 163 orang terbunuh dan 1,281 terluka oleh peralatan bahan peledak yang ditingkatkan, menurut hasil-hasil survey pertama.

Belarus

Setelah penandatanganan kontrak dengan Pemeliharaan NATO dan Perwakilan Penyediaan pada bulan Februari 2006, Belarus mulai menghancurkan tumpukan sisanya sebesar 294,755 ranjau anti-personil, selain dari ranjau-ranjau PFM. Negara ini dilaporkan menghancurkan 3,600 ranjau anti-personil pada tahun 2005. Belarus juga akan menghancurkan komponen-komponen yang dipicu-korban dari tipe-MON-nya dan ranjau-ranjau OZM-72. Kementerian Pertahanan menandatangani “pernyataan pengesahan” untuk menerima bantuan teknis dari Komisi Eropa untuk penghancuran 3.27 juta ranjau PFM pada tanggal 6 Mei 2006, dengan tujuan memulai proyek ini pada bulan Januari 2007. Lebih dari 31.000 sisa bahan peledak perang dihancurkan dalam operasi pembebasan di mana 58 merupakan ranjau anti-personil. Pada bulan Mei 2006, seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan mendeklarasikan bahwa 353 kilometer kuadrat tanah membutuhkan pembebasan. Ada satu insiden di mana empat kecelakaan yang disebabkan oleh persenjataan perang yang tidak diledakkan pada tahun 2005, suatu penurunan dari lima insiden dan 16 kecelakaan pada tahun 2004.

Bhutan

Bhutan menyetujui Perjanjian Pelarangan Ranjau pada tanggal 18 Agustus 2005 dan perjanjian itu berlaku pada tanggal 1 Februari 2006.

Bolivia

Bolivia melaporkan bahwa proses untuk pengundangan legislasi pelaksanaan di dalam negeri sedang dijalankan. Pada tanggal 7 April 2006, Presiden Bolivia mendalilkan Rencana Nasional untuk Kesetaraan dan Peluang Yang Sama Bagi Orang-orang Lumpuh.

Bosnia dan Herzegovina

Pembebasan ranjau dan survey teknis pada tahun 2005 melepaskan 6 kilometer kuadrat tanah, lebih banyak dari tahun 2004, tapi jauh lebih kecil daripada yang dibutuhkan untuk rencana strategis tahun 2005-2009. Lebih dari 100.000 orang menerima penerangan resiko ranjau pada tahun 2005. Kecenderungan yang menurun pada kecelakaan baru berlanjut pada tahun 2005; 19 kecelakaan dilaporkan. Pada bulan Januari 2006, EUFOR menemukan tempat persembunyian persenjataan terbesar sejak permulaan operasinya di BiH, termasuk lebih dari 500 ranjau anti-personil. Ratusan ranjau anti-personil dikumpulkan dari penduduk di bawah Panen Operasi pada tahun 2005. BiH melaporkan bahwa pada akhir tahun 2005, ia menerima 1.305 ranjau anti-personil aktif, 822 ranjau tanpa pemicu dan 15,343 MRUD (tipe-Claymore) ranjau fragmentasi terarah.

Brunei

Brunei mengesahkan Perjanjian Pelarangan Ranjau pada tanggal 24 April 2006. ICBL melakukan misi pembelaan untuk Brunei pada bulan Maret 2006, dan Unit Pendukung Pelaksanaan perjanjian dikunjungi pada awal bulan April. Para pejabat memastikan bahwa tumpukan Brunei hanya ranjau Claymore yang dipicu-perintah, yang berjumlah antara 500 dan 1,000.

Burundi

Burundi menyatakan bahwa para pemberontak terus menggunakan ranjau anti-personil. Survey umum dimulai pada pertengahan tahun 2005 untuk menentukan batasan kontaminasi ranjau dan sisa bahan peledak perang. DanChurchAid membebaskan 1.998 meter kuadrat tanah, yang menurunkan area terkontaminasi lebih lanjut sebesar 15.5 kilometer kuadrat pada tahun 2005. Orang Cacat Internasional melatih 255 relawan penerangan resiko ranjau, yang mencapai hampir 37.000 penerima.

Kamboja

Kamboja mendeklarasikan bahwa dari tahun 2000 sampai 2005 total 71,136 ranjau anti-personil yang ditumpuk baru saja ditemukan dan dihancurkan, termasuk 16,878 pada tahun 2005, jumlah terbesar untuk satu tahun saja. Pembebasan ranjau meningkat lebih dari 63 persen pada tahun 2005, yang disebabkan oleh peningkatan pembebasan oleh Pusat Pekerjaan Ranjau Kamboja dan karena para operator lain mengetahui tanah yang ditanami dan bebas kecelakaan karena resiko-rendah. Strategi pengurangan area ini disetujui oleh pemerintah pada bulan Mei 2006. Pada tahun 2005, ada 875 kecelakaan ranjau baru/UXO, yang memelihara rata-rata harian dua kecelakaan baru sejak tahun 2000. Untuk menyelesaikan masalah ini, strategi penerangan resiko ranjau direvisi pada tahun 2006. Dua puluh dua kecelakaan penghapus ranjau dicatat pada tahun 2005, tapi hanya 14 terhitung oleh operator yang dikenal. Untuk pertama kalinya, kekuatan angkatan bersenjata Kamboja mengirim para penghapus ranjau untuk bergabung dengan misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Chad

Rencana Strategis Nasional untuk Memerangi Ranjau dan UXO direvisi pada tahun 2005 dengan memperhitungkan batas waktu Pasal 5 Perjanjian Pelarangan Ranjau untuk pembebasan semua area berranjau; akan tetapi, rencana itu hanya bertujuan untuk mendapatkan “nol korban” dan “tidak berdampak” dengan batas waktu tahun 2009. Dewan Para Menteri menyetujui legislasi pelaksanaan nasional pada bulan Oktober 2005 dan menyerahkannya kepada parlemen. Penilaian PBB pada bulan Juli 2005 menyimpulkan bahwa permasalahan manajemen dan keuangan mengancam program pekerjaan ranjau Chad; pada bulan Desember, bantuan keuangan PBB ditunda setelah Chad gagal untuk memberikan pendanaan yang dijaminnya untuk pekerjaan ranjau; UNDP mempekerjakan kembali sejumlah pendanaan pada pertengahan tahun 2006. Pada tahun 2005, 285,172 meter kuadrat dibebaskan dari ranjau, dengan tambahan dua kilometer kuadrat pembebasan area perang. Dua kampanye penerangan resiko ranjau mencapai sekitar 110.000 pengunjung Sudan dan masyarakat setempat pada tahun 2005. Sejumlah MRE darurat dilaksanakan setelah konflik baru pada bulan April 2006. Jumlah kecelakaan yang dicatat terus meningkat,

walaupun dengan adanya pengumpulan data yang terbatas; pada tahun 2005, ada sedikitnya 35 kecelakaan, dan dari bulan Januari sampai Juni 2006, ada sedikitnya 54 kecelakaan baru dari ranjau dan persenjataan perang yang tidak diledakkan.

Chile

Sebuah proposal oleh Chile dan Argentina untuk perluasan pelaporan tentang ranjau yang diterima untuk tujuan pelatihan dan pengembangan disetujui oleh Para Pihak Negara pada bulan Desember 2005. Chile mengumumkan bahwa pada tahun 2006 negara ini akan menghancurkan 1,292 ranjau anti-personil tidak lagi membutuhkan pelatihan, sebagai tambahan terhadap 300 ranjau yang diperkirakan dipakai selama pelatihan. Chile masih mempersiapkan legislasi untuk lebih lengkap dan pasti melaksanakan Perjanjian Pelarangan Ranjau. Antara bulan April 2005 dan April 2006, Chile membebaskan 2,239 ranjau anti-personil dan 843 ranjau anti-kendaraan. Dua garis depan penghapusan ranjau baru dibuka, di Tambo Quemado pada bulan Juli 2005 dan di Taman Nasional Lullaillaco pada bulan Februari 2006. Chile memagari 14 area baru yang diperkirakan-berranjau antara bulan Agustus dan Desember 2005. Sebuah perjanjian ditandatangani sebesar ?1 juta dalam pendanaan Komisi Eropa untuk pekerjaan ranjau di Chile. Ada dua kecelakaan ranjau-darat dan enam kecelakaan UXO pada tahun 2005, suatu peningkatan dari tahun 2004 (tidak ada kecelakaan ranjau).

Kolombia

Kelompok-kelompok bersenjata bukan-negara, yang paling bisa dicatat FARC, terus menggunakan ranjau anti-personil dan peralatan bahan peledak yang ditingkatkan secara luas. Kolombia memulai pembebasan ranjau dari basis-basis militer. Pembebasan untuk satu basis diselesaikan, sedang berjalan pada yang kedua, dan survey-survey dampak telah dilaksanakan di 17 basis. Walaupun dengan adanya pengumpulan data yang tidak memadai, Columbia mencatat peningkatan yang signifikan pada kecelakaan pada tahun 2005: 1,110 kecelakaan, sekitar tiga kecelakaan per hari, dibandingkan dengan 882 kecelakaan pada tahun 2004, 734 kecelakaan pada tahun 2003 dan 627 kecelakaan pada tahun 2002.

Republik Demokratis Kongo

Pada bulan Mei 2006, Republik Demokratik Kongo mengatakan kepada Para Pihak Negara bahwa negara ini telah menyelesaikan penghancuran terhadap semua ranjau anti-personil yang ditumpuk yang berada di bawah kontrolnya yang negara itu telah mampu identifikasi, dan karena itu memenuhi kewajiban perjanjiannya. Negara itu juga berkata ia berharap mendapatkan tumpukan tambahan ranjau anti-personil di masa mendatang, yang ia akan hancurkan. Telah ada beberapa laporan penggunaan ranjau anti-personil oleh pemberontak selama konflik yang berhubungan dengan proses penghentian. Pada tahun 2005, pekerjaan ranjau di DRC menerima hanya tiga persen dari pendanaan yang diminta melalui proses permohonan terkonsolidasi dan 22 persen dari pendanaan yang diminta melalui proses portfolio PBB. Seorang operator pekerjaan ranjau menutup operasi di DRC yang disebabkan oleh kurangnya pendanaan. Total 446,498 meter kuadrat tanah dan 60.6 kilometer jalan di area-area yang dihuni di provinsi Equateur, Katanga, dan Orientalie dibebaskan selama tahun 2005; 1,172 ranjau, 28,337 item persenjataan perang yang tidak diledakkan dan 49,288 sisa bahan peledak lain dihancurkan. Penerangan resiko ranjau terus terbatas, tapi UNICEF untuk pertama kalinya menerima pendanaan untuk aktivitas-aktivitas di empat provinsi itu. Pada tahun 2005, ada sedikitnya 45 kecelakaan, termasuk 14 orang terbunuh dan 31 terluka; lebih sedikit daripada tahun 2004 dan jauh lebih sedikit daripada tahun 2003.

Kepulauan Cook

Kepulauan Cook mengesahkan Perjanjian Pelarangan Ranjau pada tanggal 16 Maret 2006, dan perjanjian berlaku untuk negara itu pada tanggal 1 September 2006.

Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire menunjukkan bahwa negara itu tidak terkena-dampak-ranjau walaupun dengan adanya konflik bersenjata akhir-akhir ini. Misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa dan kekuatan Perancis melaksanakan 18 operasi mengeluarkan persenjataan perang yang tidak diledakkan. Dua anak-anak terbunuh oleh persenjataan perang yang tidak diledakkan pada tahun 2005.

Kroasia

Kroasia menjadi tuan rumah Rapat Keenam Para Pihak Negara pada bulan November-Desember 2005. Negara ini melayani sebagai Presiden Rapat, suatu posisi yang bertanggungjawab sampai Rapat Para Pihak Negara berikutnya pada bulan September 2006. Kroasia menyatakan bahwa negara itu telah menghilangkan batang pengungkit dari ranjau TMRP-6-nya. Perusahaan Kroasia, Agencija Alan, menghapus ranjau TMRP-6 dari website dan katalog penjualannya. Pada tanggal 15 Desember 2005, parlemen memberikan Hukum Penghapusan Ranjau Kemanusiaan dan Hukum Hak-hak Khusus untuk Jaminan Sosial dan Asuransi Pensiun program Penghapusan Ranjau Kemanusiaan. Kroasia hanya melepas 27.2 kilometer kuadrat. Para anggota parlemen mengkritik kecepatan yang lamban dari penghapusan ranjau dan pelaksanaan yang terbatas bagi bantuan untuk korban. Ada 20 kecelakaan ranjau darat/UXO yang dicatat pada tahun 2005, lebih banyak daripada tahun 2004.

Cyprus

Rencana nasional untuk pelaksanaan Perjanjian Pelarangan Ranjau, termasuk penghancuran tumpukan dan pembebasan ranjau, diakhiri pada bulan Agustus 2005. Cyprus menghancurkan 11,000 ranjau anti-personil pada tahun 2005 dan 18,000 lagi dicatat untuk penghancuran pada tahun 2006. Pada bulan Mei 2006, Cyprus memberitahu posisinya tentang permasalahan tertentu untuk penerjemahan dan pelaksanaan yang berhubungan dengan Pasal 1, 2, dan 3 Perjanjian Pelarangan Ranjau. Pembebasan Garda Nasional ladang ranjau di zona pendukung diselesaikan pada bulan Juli 2005. Pada bulan Agustus 2005, sebuah perjanjian dicapai untuk membebaskan ladang ranjau kekuatan Turki di dalam zona pendukung. Sejak bulan April 2006, 20 dari 48 ladang ranjau di zona pendukung telah dibebaskan, dengan pelepasan lebih dari 900,000 meter kuadrat tanah. Cyprus melaporkan penghancuran 237 ranjau anti-personil di dua area berranjau yang dikendalikan dua Republik di luar zona pendukung pada tahun 2005.

Denmark

Pada bulan November 2005, Denmark mengumumkan bahwa negara itu akan mengalokasikan DKK86 juta (hampir US\$ juta) untuk membebaskan ranjau darat dari

semenanjung Skallingen, yang negara itu pertama kali laporkan sebagai area berranjau dalam laporan Pasal 7-nya pada tahun 1999. Pada bulan Mei 2006, sebuah perusahaan perdagangan Inggris dipilih dari antara lima perusahaan yang ber-prakualifikasi. Denmark mengesahkan Protokol V CCW tentang Sisa Bahan Peledak Perang pada tanggal 28 Juni 2005. Denmark menghancurkan 1,929 ranjau anti-personil yang diterimanya pada aktivitas-aktivitas pelatihan tahun 2005, yang menyisakan 60 ranjau.

Djibouti

Djibouti mengundang legislasi pelaksanaan nasional pada bulan Maret 2006.

El Salvador

El Salvador bergabung dengan Protokol V CCW untuk Sisa Bahan Peledak Perang pada tanggal 23 Maret 2006. Pada bulan Maret 2006, El Salvador menyatakan kembali bahwa negara ini tidak memiliki masalah ranjau. Sembilan ranjau dan 370 item persenjataan perang yang tidak diledakkan dan peralatan bahan peledak lain ditemukan dan dihancurkan oleh Polisi Sipil Nasional pada tahun 2005. Total 4,823 orang menerima penerangan resiko. Pada tahun 2005, ada sedikitnya empat kecelakaan ranjau/ERW. Sejak tanggal 11 Mei 2006, El Salvador – salah satu dari 24 Pihak Negara – belum menyerahkan Formulir J laporan Pasal 7 tahunannya juga tidak memberikan pemutakhiran pada perencanaan bantuan untuk korbannya.

Eritrea

Pada bulan Mei 2006, kelompok pengawasan embargo persenjataan PBB melaporkan bahwa pemerintah Eritrea telah mengirimkan 1,000 ranjau anti-personil kepada kaum fundamentalist militan di Somalia. Eritrea menyangkal semua klaim ini sebagai “tanda dasar dan tidak ditemukan” dan memberi label kepada laporan itu sebagai “keterlaluan dan patut disesalkan.” Pada bulan Oktober 2005, Eritrea melaporkan bahwa negara itu tidak lagi menerima ranjau hidup apapun untuk tujuan pelatihan. Eritrea belum melaporkan tindakan nasional apapun untuk melaksanakan Perjanjian Pelarangan Ranjau sebagaimana diminta pada Pasal 9. Eritrea mengakhiri program pembangunan-kapasitas pekerjaan ranjau PBB yang ditunda pada pertengahan tahun 2005 setelah penahanan pemerintah terhadap

kendaraan penghapus ranjau. Pada bulan Oktober 2005, PBB menunda pembebasan ranjau yang bersebelahan dengan Zona Keamanan Sementara ketika Eritrea melarang penerbangan helikopter PBB (yang dibutuhkan untuk evakuasi medis selama penghapusan ranjau). Team-team penghapusan ranjau Eritrea membebaskan hampir 2.2 kilometer kuadrat tanah pada tahun 2005. Lebih dari 129,000 orang menerima penerangan resiko ranjau termasuk pembahasan keselamatan untuk 3,433 penjaga perdamaian PBB, staff dan para pekerja LSM. Ada 68 kecelakaan baru yang dicatat karena ranjau dan persenjataan perang yang tidak diledakkan, suatu peningkatan yang signifikan dari tahun 2004.

Estonia

Selama tahun 2005, operasi pembebasan terencana menghancurkan 2,066 item persenjataan perang yang tidak diledakkan, termasuk lebih dari 890 item di selatan, lebih dari 400 di Pulau Saarema dan lebih dari 400 di timur laut negara itu; hanya empat dari semua item ini ranjau. Dari tanggal 1 Januari sampai 7 Mei, 559 item bahan peledak ditemukan, dua dari antaranya ranjau.

Ethiopia

Ethiopia menjadi Negara Pihak Perjanjian Pelarangan Ranjau pada tanggal 1 Juni 2005. Ethiopia belum menyerahkan laporan transparansi Pasal 7 pertamanya, yang jatuh tempo pada tanggal 28 November 2005. Pada bulan Oktober 2005 dan Mei 2006, kelompok pengawasan embargo persenjataan PBB untuk Somalia melaporkan bahwa pemerintah Ethiopia telah memberikan tipe-tipe ranjau darat yang tidak terinci kepada faksi-faksi di Somalia; Ethiopia dengan keras menyangkal tuduhan itu. Pada tahun 2005, Ethiopia melaporkan bahwa lebih dari 11 kilometer kuadrat tanahnya dihapus ranjaunya (pengurangan area dari tujuh kilometer kuadrat tanah dan pembebasan 4.3 kilometer kuadrat), yang menghancurkan 184 ranjau anti-personil, 98 ranjau anti-kendaraan dan 6,607 item persenjataan perang yang tidak diledakkan, menurut Program Pembangunan PBB, sekitar enam kilometer kuadrat dikembalikan untuk penggunaan sipil pada tahun 2005. Bantuan Rakyat Norwegia mulai beroperasi di Ethiopia pada bulan November 2005; ia mengembangkan anjing deteksi ranjau dan pengurangan area/kapasitas survey teknis di

Ethiopia. Pada bulan April 2006, Komisi Eropa menjaminkan sedikitnya €8 juta (US\$10 juta) untuk pekerjaan ranjau di Ethiopia selama tiga tahun. Ada sedikitnya 31 kecelakaan baru pada tahun 2005, lebih banyak dari tahun 2004, tapi pengumpulan datanya tetap tidak cukup.

Perancis

Walaupun tidak ada area-area berranjau yang dicatat di Perancis daratan, negara ini memiliki kewajiban perjanjian dalam hal area-area berranjau manapun yang berada di bawah wilayah hukum atau kontrolnya di tempat lain. Perancis mengumumkan bahwa negara ini berencana untuk memulai pembebasan ranjau-ranjau anti-personil sekitar depot amunisinya di Djibouti pada bulan Oktober 2006, lebih dari tujuh tahun setelah menjadi Pihak Negara Perjanjian Pelarangan Ranjau.

Yunani

Pada tahun 2005, battalion Angkatan Bersenjata Yunani, TENX, mensurvey hampir 2.25 kilometer kuadrat di berbagai lokasi melintasi negara itu, utamanya di pegunungan Grammos dan Vitsi di barat daya. Sejak tanggal 10 April 2006, 10,002 dari 24,751 ranjau anti-personil telah dibebaskan dari ladang ranjau di Sungai Evros yang berbatasan dengan Turki. Pada tahun 2005, sedikitnya tujuh orang terbunuh dan satu lainnya terluka di ladang ranjau Evros. Pengawasan Ranjau Darat mengidentifikasi salah satu contoh dari rehabilitasi dan bantuan lain yang diberikan untuk satu orang sipil yang selamat dari ranjau di Yunani.

Guatemala

Pada tanggal 15 Desember 2005, Guatemala menyelesaikan Program Penghapusan Ranjau Nasional-nya dan mendeklarasikan negara itu telah memenuhi kewajibannya di bawah Pasal 5 Perjanjian Pelarangan Ranjau. Unit penghapus ranjau bergerak dibentuk untuk merespon terhadap laporan-laporan sisa ranjau dan sisa bahan peledak perang. Pada tahun 2005, 23 ranjau ditemukan dalam operasi pembebasan, 114,479 orang di 495 komunitas terkena-dampak-ranjau menerima penerangan resiko ranjau, dan sedikitnya ada dua orang terbunuh dan tujuh terluka oleh persenjataan perang yang tidak diledakkan. Pada

bulan Desember 2005, Guatemala menjadi ketua-bersama Komite Kedudukan pada Status Umum dan Operasi Perjanjian Pelarangan Ranjau.

Guinea-Bissau

Pada tanggal 17 Oktober 2005, Guinea-Bissau menyelesaikan penghancuran tumpukannya sebanyak 10,654 ranjau anti-personil, yang lebih awal dari batas waktu perjanjian tanggal 1 November 2006-nya. Pada bulan Maret dan April 2006, faksi dari Gerakan berbasis-di-Senegal untuk Kekuatan Demokratis Casamance meletakkan ranjau anti-personil dan anti-kendaraan di Guinea-Bissau bagian utara, yang menyebabkan kecelakaan sipil dan gangguan sosial ekonomi yang signifikan. Kecelakaan pada tahun 2005 menurun hampir setengah dari tahun 2004, tapi pada bulan Juni 2006 telah naik kembali dua kali lipat dari tingkat tahun 2005. Sejak bulan Juni, ada 37 kecelakaan baru, sebagian besar akibat dari satu insiden yang menyebabkan 28 kecelakaan. Ibukotanya, Bissau, menjadi bebas area ranjau pada akhir bulan Juni 2006.

Guyana

Sejak bulan Juni 2006, Guyana belum menyerahkan laporan transparansi Pasal 7 pertamanya, yang jatuh tempo tanggal 29 Juli 2004.

Haiti

Haiti mengesahkan Perjanjian Pelarangan Ranjau pada tanggal 15 Februari 2006 dan berlaku tanggal 1 Oktober 2006.

Honduras

Pada tahun 2005, Pengawasan Ranjau Darat mencatat kecelakaan ranjau baru pertamanya di Honduras sejak pelaporan dimulai pada tahun 1999.

Jordan

Jordan menawarkan menjadi tuan rumah Rapat Kedelapan Para Pihak Negara Perjanjian Pelarangan Ranjau pada bulan November 2007. Jordan menjadi ketua-bersama Komite Kedudukan untuk Pembebasan Ranjau, Penerangan Resiko Ranjau dan Teknologi Pekerjaan Ranjau pada bulan Desember 2005. Jordan menerbitkan rencana pekerjaan ranjau lima tahun pertamanya pada bulan Juni 2005. Untuk mempercepat pembebasan

ranjau dalam usaha memenuhi batas waktu Pasal 5-nya, Jordan memutuskan bahwa Bantuan Rakyat Norwegia harus memulai operasi pembebasan pada tahun 2006; pembebasan itu sebelumnya dilaksanakan hanya oleh para teknisi angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata melaporkan pembebasan total terhadap 2,943,380 meter kuadrat tanah pada tahun 2005. Strategi dan rencana tahunan untuk penerangan resiko ranjau disepakati. Ada sedikitnya tiga kecelakaan baru pada tahun 2005.

Kenya

Pada tahun 2005, Pusat Pelatihan Pekerjaan Ranjau Internasional, proyek bersama Inggris-Kenya, melatih dan memperlengkapi para penghapus ranjau dari Kenya, Nigeria, Somaliland, dan Uganda. Pada tahun 2006, negara ini memberikan pelatihan kepada para penghapus ranjau dari Rwanda dan Sudan. Orang Cacat Internasional memulai proyek dua-tahun untuk memberikan penerangan resiko ranjau kepada para pengungsi Sudan di pengungsian Kakuma, Kenya. Selama tahun 2005, 16 kecelakaan dicatat pada salah satu insiden ranjau darat.

Latvia

Latvia menjadi Negara Pihak pada tanggal 1 Januari 2006. Negara ini menyerahkan laporan Pasal 7 pertamanya, yang menunjukkan tumpukan 2,410 ranjau akan dihancurkan pada tahun 2006, sementara 1,301 ranjau akan diterima untuk pelatihan. Selama tahun 2005, lebih dari 8,000 sisa bahan peledak perang termasuk 200 ranjau anti-tank dan anti-personil ditemukan dan dihancurkan. Pada bulan Agustus 2005, sekolah pembuangan persenjataan bahan peledak Latvia secara resmi disesuaikan dengan status lembaga pendidikan nasional dengan hak menerbitkan diploma negara. Pada awal tahun 2006, toko swasta untuk persenjataan perang bahan peledak ditemukan di sebuah ladang di Latvia bagian timur; seorang sipil terluka ketika mencoba mematikan salah satu dari peralatan itu.

Liberia

Pada tanggal 16 September 2005, Liberia bergabung dengan Protokol II Yang Diamendemen (Ranjau Darat) dari Konvensi tentang Persenjataan Konvensional. Liberia belum menyerahkan laporan transparansi Pasal 7 Perjanjian Pelarangan Ranjau sejak bulan

Oktober 2004. Negara itu belum mengundang suatu tindakan pelaksanaan nasional. Liberia telah mendeklarasikan tidak ada area berranjau yang mengandung ranjau anti-personil. Sedikit informasi yang tersedia menunjukkan sedikit sisa resiko dari ranjau darat dan resiko lebih besar dari persenjataan perang yang tidak diledakkan. Pekerjaan Ranjau Darat Kerajaan Inggris melakukan sebuah proyek percontohan pada awal tahun 2006, yang mengungkapkan sedikitnya 14 kecelakaan sebelumnya yang tidak dilaporkan sejak bulan November 2004, dan keharusan untuk penerangan resiko dan peningkatan pelaporan untuk persenjataan perang bahan peledak.

Makedonia (Sebelumnya Republik Yugoslav)

Pada bulan Juli 2006, FYR Makedonia menghancurkan semua dari 4,000 ranjau yang sebelumnya diterima untuk tujuan riset dan pelatihan. Untuk pertama kalinya negara itu menyatakan pendapatnya tentang permasalahan yang berhubungan dengan Pasal 1 dan 2, yang menyetujui posisi ICBL dan banyak Pihak Negara. Pada bulan Mei 2006, FYR Makedonia mendeklarasikan bahwa pembebasan sisa lapangan berranjau akan dimulai pada bulan Juni 2006. Direktorat Perlindungan dan Penyelamatan beroperasi pada bulan Juni 2005 untuk pembebasan ranjau dan persenjataan perang yang tidak diledakkan; pada bulan Desember negara ini mempresentasikan sebuah rencana untuk membebaskan semua ranjau pada bulan September 2006 dan semua persenjataan perang yang tidak diledakkan pada tahun 2009. Ada satu kecelakaan, dari persenjataan perang, selama tahun 2005.

Mauritania

Legislasi pelaksanaan nasional baru telah dirancang. Pembebasan ranjau dimulai kembali pada awal tahun 2006 setelah ditunda sepanjang tahun 2005 karena kurangnya dana. Pada tahun 2005, Kantor Penghapusan Ranjau Kemanusiaan Nasional terus menandai, mensurvey, dan membuat skala kecil pembuangan persenjataan perang bahan peledak; negara ini melepaskan 960,000 meter kuadrat dari area-area berbahaya yang diduga dan membebaskan 43 item persenjataan perang yang tidak diledakkan. Mauritania dan misi PBB di Sahara Bagian Barat menyelenggarakan suatu rapat untuk membahas lebih lanjut kerjasama regional untuk pekerjaan ranjau.

Moldova

Pada bulan Mei 2006, Moldova untuk pertama kalinya menyatakan pendapatnya tentang permasalahan yang berhubungan dengan Pasal 1, 2, dan 3 Perjanjian Pelarangan Ranjau, yang menyetujui posisi ICBL dan banyak Pihak Negara. Moldova mengumumkan maksudnya untuk menghancurkan pada tahun 2006 semua dari 249 ranjau yang sebelumnya diterima untuk pelatihan. Moldova tidak menganggap teritori di bawah kontrolnya terkena-dampak-ranjau, tapi laporan-laporan yang tidak dipastikan menunjukkan ranjau-ranjau anti-personil masih tersisa di sejumlah area. Pada tahun 2005, ada 14 kecelakaan orang sipil yang disebabkan oleh persenjataan perang yang tidak diledakkan, termasuk empat anak-anak terbunuh.

Mozambik

Permasalahan Lembaga Penghapusan Ranjau Nasional dalam hal pencatatan dan pelaporan data pekerjaan ranjau tetap ada pada tahun 2005 dan awal tahun 2006. Negara ini mengklaim bahwa para operator penghapusan ranjau kemanusiaan membebaskan 11.3 kilometer kuadrat tanah berranjau pada tahun 2005; akan tetapi, para operator melaporkan pembebasan dari hanya 3.9 kilometer kuadrat. Sejumlah operator kemanusiaan melanjutkan survey ulang area-area yang diperkirakan berranjau yang diidentifikasi oleh Survey Dampak Ranjau Darat dan lebih lanjut memastikan kekurangannya. Dua penghapus ranjau terbunuh dan tiga lainnya terluka selama penghapusan ranjau pada tahun 2005. Program Penghapusan Ranjau Yang Dipercepat ditutup karena kurangnya pendanaan. Dua dari tiga operator terbesar lain, Bantuan Rakyat Norwegia dan HALO Trust, berencana untuk menutup operasi di lapangan pada tahun 2006 dan 2007. Total 57 kecelakaan ranjau/UXO baru pada 23 insiden dilaporkan pada tahun 2005, hampir dua kali lipat dari tahun 2004 dan empat kali lipat dari tahun 2003. Makalah Strategi Pengurangan Kemiskinan yang disetujui memasukkan tindakan-tindakan yang mengutamakan orang lumpuh, termasuk orang-orang yang selamat dari ranjau.

Namibia

Kekuatan Angkatan Bersenjata Namibia terus melakukan operasi survey terbatas di Kavango dan daerah-daerah Caprivi Bagian Barat pada tahun 2005 tapi tidak menemukan ranjau apapun. Polisi Namibia menghancurkan lima ranjau dan 3,300 persenjataan perang yang tidak diledakkan melintasi negara itu selama tahun 2005. Pada bulan Maret 2006, Namibia menyatakan bahwa negara itu “aman-ranjau,” tapi tidak siap untuk mendeklarasikan negaranya sendiri bebas-ranjau sampai penyelesaian survey yang berjalan. Pada tahun 2005, 12 orang terluka oleh ranjau dan persenjataan perang yang tidak diledakkan.

Nicaragua

Nicaragua melayani sebagai ketua-bersama Komite Kedudukan bagi Bantuan Untuk Korban dan Penyatuan Kembali Secara Sosial Ekonomi sampai bulan Desember 2005. Nicaragua mengesahkan Protokol V CCW untuk Sisa Bahan Peledak Perang pada tanggal 15 September 2005. Total 353,562 meter kuadrat tanah dibebaskan pada tahun 2005, lebih sedikit dari tahun 2004, dan 86 persen dari rencana pembebasan tahun itu. Nicaragua menunda penyelesaian Program Penghapusan Ranjau Kemanusiaan Nasional-nya sampai tahun 2007 karena penundaan pembebasan dan penemuan berlanjut ranjau yang tidak dimasukkan dalam catatan militer. Pada tahun 2005, 92,257 orang di 303 komunitas beresiko tinggi menerima penerangan resiko ranjau; program-program ini direvisi pada awal tahun 2006 dengan melihat kecelakaan ranjau/UXO yang berlanjut. Pada tahun 2005, kecelakaan itu dua kali lipat dengan 15 kecelakaan ranjau/UXO baru yang dicatat; enam kecelakaan lain telah terjadi pada bulan Mei 2006.

Niger

Legislasi pelaksanaan nasional, Hukum 2004-044, diangkat pada tanggal 8 Juni 2004.

Panama

Pihak Berwenang Lingkungan Nasional Panama mendeklarasikan pada bulan September 2005 bahwa negara ini akan membebaskan batasan militer AS sebelumnya yang terkontaminasi oleh persenjataan perang yang tidak diledakkan.

Peru

Pembebasan dilakukan untuk ranjau dan fragmen-fragmen bahan peledak di sekitar 35 menara listrik. Pada bulan April 2006, Peru dan Ekuador memulai operasi pembebasan di sekitar area sungai Chira, yang ditunda dari tahun 2005. Penerangan resiko ranjau secara terbatas diberikan oleh LSM Peru. Kecelakaan yang dilaporkan meningkat pada tahun 2005.

Filipina

Pemberontak Angkatan Bersenjata Rakyat Baru meningkatkan penggunaan ranjau anti-kendaraan yang ditingkatkan yang dipicu-perintah, yang mengakibatkan lebih banyak kecelakaan. Analisa media Pengawasan Ranjau Darat menemukan 145 kecelakaan ranjau/IED pada tahun 2005, hampir peningkatan 300 persen untuk kecelakaan yang dilaporkan pada tahun 2004. Kekuatan Angkatan Bersenjata Filipina melaporkan penahanan ranjau anti-personil dan anti-kendaraan dari NPA. Front Pembebasan Nasional Moro dan Kelompok Abu Sayyaf terus menanam ranjau anti-kendaraan dalam peperangan mereka yang berlanjut menentang angkatan bersenjata.

Rwanda

Rancangan hukum pelaksanaan nasional telah diserahkan kepada Kabinet Para Menteri. Program penghapusan ranjau diaktifkan dengan pelatihan dan melengkapi para penghapus ranjau pada awal tahun 2006. Pada bulan Mei 2006, angkatan kerja penghapus ranjau Rwanda telah meningkat sebesar 150 personil. Wali Kesadaran Ranjau menyebarkan tiga penasehat teknis pada bulan Mei 2006 untuk mendukung para penghapus ranjau yang baru dilatih. Pada tahun 2005 dan 2006, kecelakaan ranjau darat terus meningkat walaupun dengan adanya pengumpulan data yang tidak lengkap, yang dilaporkan karena kebutuhan ekonomi dan kurangnya pendidikan ranjau.

Senegal

Para pemberontak dari faksi MFDC menggunakan ranjau anti-personil dan anti-kendaraan di Guinea-Bissau pada bulan Maret 2006. Pada bulan Agustus 2005, Senegal mengangkat legislasi pelaksanaan nasional untuk Perjanjian Pelarangan Ranjau. Ini termasuk penguasaan untuk pihak berwenang pekerjaan ranjau nasional dan pusat

pekerjaan ranjau. Pada bulan Oktober 2005, Program Pembangunan PBB dan Orang Cacat Internasional memulai suatu survey dampak ranjau darat darurat di Casamance; hasil-hasil pendahuluannya menunjukkan bahwa 93 orang desa terkena-dampak-ranjau. Pada tahun 2005, 10 kecelakaan baru tercatat, suatu penurunan dari 17 kecelakaan pada tahun 2004.

Serbia dan Montenegro

Serbia dan Montenegro mulai menghancurkan tumpukan ranjau anti-personilnya pada bulan Agustus 2005 dan pada bulan Maret 2006 telah menghancurkan 649,217 ranjau, hampir setengah dari tumpukannya. Aturan Kejahatan baru dari Republik Serbia berlaku pada tanggal 1 Januari 2006, yang menjadikan ranjau anti-personil kejahatan. Pada tahun 2005, 963,775 meter kuadrat area berranjau dan area-area peperangan dibebaskan di Serbia. Di Montenegro, Pusat Regional untuk Penghapusan Ranjau Bawah Air memulai suatu survey umum untuk kontaminasi di kotamadya Plav dan Rozaje pada bulan Mei 2006. Tidak ada kecelakaan orang sipil dilaporkan selama tahun 2005. Tidak ada pendanaan diberikan secara nasional maupun internasional bagi perencanaan bantuan untuk orang yang selamat dari ranjau yang diajukan setiap tahun sejak tahun 2004.

Sierra Leone

Sierra Leone belum menyerahkan laporan transparansi Pasal 7-nya sejak bulan Februari 2004. Negara itu belum mengundang suatu tindakan pelaksanaan nasional.

Sudan

Sudan mengutip tumpukan sebesar 14,485 ranjau anti-personil, yang menambahkan 5,000 ranjau SPLA terhadap total sebelumnya; negara ini cenderung untuk menerima 10,000 dari semua ranjaunya untuk tujuan pelatihan. Negara itu terus melakukan inventaris ranjau yang ditumpuk. Pada tanggal 24 Desember 2005, pihak berwenang pekerjaan ranjau nasional dan pusat pekerjaan ranjau dibentuk, dan pusat pekerjaan ranjau Sudan Selatan. Organisasi-organisasi penghapusan ranjau membebaskan hampir tiga kali lipat tanah pada tahun 2005 daripada tahun 2004, dengan survey dan kapasitas pembebasan yang sama. Lebih dari 1.3 kilometer kuadrat area berranjau dibebaskan. Pada tahun 2005, sekitar US\$61.5 juta diperkirakan dibelanjakan untuk pekerjaan ranjau (termasuk bantuan pekerjaan

ranjau untuk pemeliharaan perdamaian). Aktivitas-aktivitas MRE meningkat secara signifikan dan meluas ke area-area baru di Sudan; 316,188 orang terjangkau pada tahun 2005 dengan penekanan khusus pada orang-orang yang kembali. Sedikitnya ada 79 kecelakaan karena ranjau dan persenjataan perang yang tidak diledakkan pada tahun 2005, lebih dari tahun 2004; pada tahun 2006 ada sedikitnya 29 kecelakaan pada tanggal 21 Mei.

Suriname

Dengan bantuan Organisasi Amerika Serikat, Suriname membebaskan sedikitnya 13 ranjau anti personil dari teritorinya antara bulan Februari dan April 2005.

Swaziland

Kekuatan Angkatan Bersenjata Swaziland memberitahu Pengawasan Ranjau Darat pada tahun 2006 bahwa Swaziland tidak bisa mendeklarasikan dengan pasti apakah negara itu tetap terkena-dampak-ranjau dari teritorinya antara bulan Februari dan April 2005. Pada bulan Maret 2006, Kementerian Pertahanan menerima tawaran bantuan internasional untuk mengukur situasi ranjau dan mengembangkan rencana pembebasan sesuai dengan batas waktu Perjanjian Pelarangan Ranjau.

Tajikistan

Para pihak berwenang melaporkan penghancuran 80 ranjau anti-personil pada bulan Desember 2005 yang ditahan selama operasi penegakan hukum. Tajikistan memakai 30 ranjau untuk pelatihan para penghapus ranjau pada tahun 2005; hal ini dilaporkan dengan menggunakan format laporan Pasal 7 baru yang diperluas untuk ranjau-ranjau yang diterima. Yayasan Swiss bagi team-team penghapusan ranjau Pekerjaan Ranjau membebaskan 129,156 meter kuadrat pada tahun 2005, suatu peningkatan besar yang dimungkinkan dengan perluasan pada kapasitas penghapusan ranjau. Pusat anjing deteksi ranjau dibuka pada bulan April 2006. Kekurangan bantuan donor mengancam perencanaan untuk mencapai produktivitas yang lebih besar pada tahun 2006. Pada bulan Mei 2006, Tajikistan menyelesaikan rencana bantuan untuk korban untuk tahun 2005-2009. Kecelakaan meningkat untuk tahun ketiga secara berturut-turut menjadi 20. Dari tanggal 18 sampai 30 Juli

2005, penampungan pertama untuk 32 anak-anak yang selamat dari ranjau diadakan, yang memberikan penerangan resiko ranjau dan bantuan untuk yang selamat.

Tanzania

Pada bulan Mei 2006, Tanzania menyatakan negara ini dalam proses pengangkatan legislasi pelaksanaan nasional. Negara ini bermaksud mendapatkan 1,000 ranjau tambahan untuk penggunaan di proyeknya dalam melatih tikus-tikus deteksi ranjau.

Thailand

Pusat Pekerjaan Ranjau Thailand memulai pengurangan area pada tahun 2005 dalam suatu tawaran untuk mempercepat penghapusan ranjau; area itu dilepaskan (5.9 kilometer kuadrat) adalah tiga kali lipat lebih besar daripada tahun 2004. Pusat ini mengajukan kepada kabinet bahwa ia harus berubah dari organisasi militer di bawah kekuatan angkatan bersenjata menjadi organisasi sipil. Pada bulan Januari 2006, hal ini disahkan pada tinjau ulang tingkat tinggi program pekerjaan ranjau Thailand; sebuah proposal diserahkan kepada pemerintah pada bulan Mei. Pemotongan pendanaan membuat unit-unit bertanggungjawab terhadap sebagian besar penghapusan ranjau di Thailand untuk menghilangkan lebih banyak dari setengah angkatan kerja mereka pada tahun 2006. Penerangan resiko ranjau meningkat, dengan lebih dari 333,000 orang dijangkau. Diperkirakan ada 43 kecelakaan ranjau baru pada tahun 2005; perencanaan dibahas untuk pengumpulan di seluruh negara untuk data kecelakaan ranjau. Sebuah rencana bagi bantuan untuk korban dirancang pada bulan Desember 2005.

Tunisia

Tunisia bergabung dengan Protokol II Yang Diamendemen CCW pada tanggal 23 Maret 2006. Sejak tanggal 15 April 2006, angkatan bersenjata belah membebaskan 90 persen dari ladang ranjau Ras Jedir, yang menghancurkan 3,503 ranjau anti-personil dan 785 ranjau anti-kendaraan.

Turki

Turki membebaskan tumpukan sebesar 2,979, 165 ranjau anti-personil, angka yang lebih besar daripada yang dilaporkan sebelumnya; untuk pertama kalinya negara ini

memasukkan 22,788 ranjau ADAM yang dikirim-dengan-artileri secara keseluruhan. Turki melaporkan pada bulan Desember 2005, Perwakilan Pemeliharaan dan Penyediaan NATO dan sebuah perusahaan menandatangani sebuah perjanjian dalam menetapkan fasilitas baru untuk menghancurkan ranjau yang ditumpuk. Pada bulan Mei 2006, Turki berkata bahwa komponen-komponen yang dipicu-korban untuk ranjau M18 Claymore akan dihancurkan. Pada tanggal 18 Juli 2006, Partai Para Pekerja Kurdistan melakukan suatu pelarangan terhadap ranjau anti-personil dengan menandatangani Akta Komitmen Seruan Geneva. Ada sedikitnya 220 kecelakaan ranjau darat/UXO baru pada tahun 2005, suatu peningkatan signifikan dari 168 pada tahun 2004 dan 67 pada tahun 2003. Total 2,171 ranjau dibebaskan dari 300,000 meter kuadrat tanah pada tahun 2005. Proses mengundang perusahaan-perusahaan nasional dan internasional untuk memberikan tender pembebasan area-area berranjau, sebagai ganti penggunaan gratis atas tanah, diperjuangkan dalam parlemen.

Uganda

Kekuatan Uganda telah terus menahan ranjau-ranjau darat dari Angkatan Bersenjata Perlawanan Lord. Belum ada laporan yang pasti tentang penggunaan ranjau-ranjau anti personil pada tahun 2005 atau awal tahun 2006. Uganda menyerahkan dua laporan transparansi Pasal 7 pada tahun 2005. Komite Pengendalian Nasional untuk Pekerjaan Ranjau bertemu untuk pertama kalinya pada bulan Januari 2006; pada bulan Februari komite ini mulai merancang legislasi dalam mendukung pekerjaan ranjau. Pada bulan April 2006, Pusat Pekerjaan Ranjau Uganda dibuka; hampir 60 personil dari angkatan bersenjata dan polisi dibawahinya. Pada bulan Mei 2006, penilaian kebutuhan pekerjaan ranjau berjalan di dua wilayah dan survey teknis berlanjut di tiga wilayah lain. Pada tahun 2005, 40 kecelakaan ranjau/UXO baru dicatat. Semua kecelakaan ini terus dilaporkan pada tahun 2006, sedikitnya 22 pada bulan Mei.

Ukraine

Ukraine menyerahkan pengesahannya pada tanggal 27 Desember 2005 dan Perjanjian Pelarangan Ranjau berlaku pada tanggal 1 Juni 2006. Pada bulan Februari 2006,

Komisi Eropa memberikan penghargaan kontrak €5.9 juta untuk penghancuran ranjau tipe-PFM Ukraine. Tender €1 juta EC untuk penghancuran tambahan ranjau anti-personil bukan-PFM sebesar 716,746 yang baru diidentifikasi dibatalkan. PBB melakukan penilaian antar-perwakilan pada bulan Desember 2005; laporan itu belum diselesaikan pada tanggal 1 Juni 2006. Ukraine menyetujui program tiga-tahun untuk melepaskan amunisi di basis militer Novobohdanovka. Penerangan resiko ranjau dimulai pada tahun 2005 atas dasar regional. Ada 16 kecelakaan baru⁸ dari persenjataan perang yang tidak diledakkan pada tahun 2005, penurunan dari tahun 2004.

Kerajaan Inggris

Walaupun tidak ada area-area ranjau yang dicatat di Kerajaan Inggris daratan, negara ini memiliki kewajiban perjanjian dalam hal area-area berranjau manapun yang berada di bawah wilayah hukum atau kontrolnya di tempat lain. Lebih dari tujuh tahun sejak menjadi Pihak Negara, Kerajaan Inggris belum memulai pembebasan area-area berranjau di Kepulauan Falklands. Kerajaan Inggris dan Argentina bertemu lima kali dalam periode pelaporan untuk membahas pelaksanaan studi kelayakan, yang diharapkan terjadi antara bulan November 2006 dan Maret 2007.

Vanuatu

Vanuatu mengesahkan Perjanjian Pelarangan Ranjau pada tanggal 16 September 2005 dan perjanjian itu berlaku pada tanggal 1 Maret 2006.

Venezuela

Pada bulan Juli 2005, Venezuela memberikan untuk pertama kalinya tabel waktu untuk pembebasan ranjau anti-personil yang diletakkan di sekitar enam pos angkatan lautnya. Pada bulan Mei 2006, Venezuela mendeklarasikan bahwa negara itu tidak akan memulai operasi pembebasan sebelum tahun 2007 karena para teknisi perang Angkatan Lautnya membutuhkan perlengkapan penghapusan ranjau dan pelatihan tambahan.

Yemen

Yemen merinci pandangannya tentang permasalahan utama penerjemahan dan pelaksanaan yang berhubungan dengan Pasal 1 dan 2 Perjanjian Pelarangan Ranjau,

dengan mengambil posisi kuat yang mencerminkan yang ada di ICBL dan banyak Pihak Negara lain. Kelompok pengawasan PBB melaporkan bahwa pengiriman tipe-tipe ranjau yang tidak ditentukan oleh Yemen kepada Pemerintah Federal Transisi di Somalia pada bulan Juli 2005. Pengurangan area melalui survey teknis melepaskan lebih dari 100 kilometer kuadrat tanah yang terkena-dampak-ranjau dan tanah yang diduga pada tahun 2005. Operasi-operasi pembebasan melepaskan 18 kilometer kuadrat lagi. Seorang penghapus ranjau terbunuh selama operasi itu. Pada bulan Maret 2006, studi sosial ekonomi dan nafkah dimulai untuk mengukur pengembalian sosial ekonomi dari pembebasan ranjau. Penerangan resiko ranjau menjangkau 191,262 orang dalam 92 komunitas selama tahun 2004. Beberapa bantuan untuk orang yang selamat dan organisasi orang lumpuh menarik diri dari Yemen pada tahun 2005-2006, dan organisasi nasional menghadapi kesulitan pendanaan.

Zambia

Pada tahun 2005, Pusat Pekerjaan Ranjau Zambia disusun, yang membatasi operasinya. Strategi tiga tahun dikembangkan dengan tujuan membebaskan ranjau dan persenjataan perang yang tidak diledakkan dari 41 area berbahaya pada tahun 2007. Kurangnya perkembangan menimbulkan revisi target-target program dan, pada bulan Mei 2006, Zambia merancang Rencana Penyelesaian Pekerjaan Ranjau, yang ditujukan untuk memenuhi batas waktu Pasal 5 tahun 2011-nya. Pada bulan Maret 2006, Zambia mengumumkan perawatan kesehatan gratis bagi orang yang hidup di area-area pedesaan, termasuk orang-orang yang selamat dari ranjau, yang menghapus biaya yang diberikan pada awal tahun 1990an.

Zimbabwe

Ada dua contoh petani secara terpisah yang menggunakan ranjau anti-personil untuk melindungi panen. Pembebasan ladang ranjau Air Terjun Victoria-Mlibizi diselesaikan pada bulan Oktober 2005. Total 25,959 ranjau dihancurkan di ladang ranjau, termasuk 6,959 pada tahun 2005. Pada bulan Mei 2006, Zimbabwe melaporkan bahwa hanya setengah dari ladang ranjaunya telah dibebaskan, yang memberikan tantangan signifikan dalam rapat

batas waktu perjanjian tanggal 1 Maret 2005. Penerangan resiko ranjau di area-area yang terkena-dampak-ranjau dimulai kembali pada tahun 2006. Pada tahun 2005, 14 kecelakaan baru termasuk tujuh anak-anak dicatat. Tujuh orang Zimbabwe juga terlibat dalam kecelakaan ranjau darat di Afghanistan dan Taiwan pada tahun 2005.

Para Penandatangan

Indonesia

Pada bulan Oktober 2005, Presiden Indonesia secara resmi memberikan persetujuannya untuk memulai proses pengesahan untuk Perjanjian Pelarangan Ranjau. Sebuah rancangan hukum pengesahan sedang ditinjau ulang.

Marshall Islands

Marshall Islands memberikan suara untuk keputusan Majelis Umum PBB yang mengangkat Perjanjian Pelarangan Ranjau, setelah abstain pada tahun-tahun sebelumnya.

Polandia

Dokumen-dokumen untuk pengesahan Polandia terhadap Perjanjian Pelarangan Ranjau telah mengalami konsultasi antar kementerian. Polandia mendeklarasikan tumpukan sebesar 984,690 ranjau anti-personil pada akhir tahun 2005; negara itu melepaskan 12,990 ranjau kedaluwarsa yang ditumpuk pada tahun 2005. Pada tahun 2005, team militer Polandia melaksanakan 7,698 respon terhadap ranjau dan sisa bahan peledak perang, yang membebaskan 6,138 ranjau anti-personil dan anti-kendaraan dan 39,160 sisa bahan peledak. Sebagai tambahan, polisi melepaskan 281 granat, 828 pemicu dan detonator, 1,642 item persenjataan perang yang tidak diledakkan dan 26,029 buah amunisi.

Bukan-Para Penandatangan

Armenia

PBB melaporkan pada tahun 2005 para pihak berwenang Armenia telah memutuskan untuk menyerahkan kepada Sekretaris-Jenderal PBB atas dasar sukarela, laporan transparansi tahunan yang diminta Perjanjian Pelarangan Ranjau dan Protokol II Yang Diamendemen CCW, dan team-team dari Kementerian Pertahanan menghapus ranjau 125,000 meter kuadrat tanah. UNICEF melakukan pelatihan tentang penerangan resiko ranjau

pada bulan April 2006, dan mulai mengembangkan strategi penerangan resiko ranjau. Pada tahun 2005, lima orang terluka oleh ranjau dan persenjataan perang yang tidak diledakkan, suatu penurunan dari 15 kecelakaan yang dilaporkan pada tahun 2004.

Azerbaijan

Untuk pertama kalinya, Azerbaijan memberikan suara untuk keputusan Majelis Umum PBB yang menyerukan universalisasi Perjanjian Pelarangan Ranjau. Azerbaijan berkata negara itu mungkin memberikan laporan transparansi Pasal 7 Perjanjian Pelarangan Ranjau. Pada tahun 2005, Azerbaijan menghapus ranjau hampir tujuh kilometer kuadrat tanah, sama dengan produktivitas tahun 2004. Selama kwartal pertama tahun 2006, hampir 2.3 kilometer kuadrat dihapus ranjaunya. Kecelakaan yang dilaporkan meningkat pada tahun 2005 dari 32 menjadi 59 yang dikarenakan oleh insiden UXO tunggal yang membunuh tiga orang dan melukai 23 lainnya. Dua proyek bantuan untuk orang yang selamat dimulai pada bulan April-Juni 2006. Pensiun bagi orang lumpuh ditingkatkan pada bulan April 2006.

Burma (Myanmar)

Baik kelompok bersenjata junta militer maupun bukan-negara telah terus menggunakan ranjau anti-personil secara luas. Angkatan Bersenjata Myanmar telah mendapatkan, dan menggunakan jumlah ranjau anti-personil yang semakin meningkat dari disain M-14 Amerika Serikat; manufaktur dan sumber dari semua ranjau yang tidak bisa dideteksi ini – apakah dari luar negeri atau dari dalam negeri – tidak diketahui. Pada bulan November 2005, Industri Berat Militer dilaporkan memulai perekrutan para teknisi untuk produksi generasi berikutnya ranjau dan *munitions* lain. Kelompok bersenjata bukan-negara, Angkatan Bersenjata Persatuan Negara WA, dituduh memproduksi ranjau anti-personil tipe-PMN di pabrik persenjataan yang sebelumnya milik Partai Komunis Burma. Pada bulan Oktober 2005, junta militer memberikan pernyataan publik pertamanya tentang pelarangan ranjau darat sejak tahun 1999. Ada sedikitnya 231 kecelakaan ranjau baru pada tahun 2005. Médecins Sans Frontières (MSF)-Perancis menutup program bantuannya dan menarik diri dari Burma, karena pembatasan yang diterapkan oleh para pihak berwenang.

Cina

Pada bulan Desember 2005, Cina memberikan suara untuk pertama kalinya untuk keputusan Majelis Umum PBB yang menyerukan universalisasi Perjanjian Pelarangan Ranjau. Dari akhir tahun 1990an sampai 2005, Cina menghancurkan hampir 2.2 juta ranjau anti-personil yang ditumpuk apakah yang kedaluwarsa atau tidak sesuai dengan Protokol II Yang Diamendemen CCW. Cina meluncurkan proyek baru untuk pembebasan ranjau darat dari perbatasannya dengan Vietnam, dan melakukan penerangan resiko ranjau di desa-desa sekitarnya. Negara ini memberikan kursus pelatihan tiga-bulan di Thailand, dan mengirim satu battalion ke Lebanon pada bulan April 2006 untuk mendukung PBB. Satu kecelakaan ranjau dilaporkan.

Mesir

Dewan Nasional Hak Azasi Manusia mengorganisir konferensi ranjau darat pada bulan Desember 2005? Kejadian ranjau darat utama pertama yang akan diselenggarakan di Kairo sejak bulan April 2000. Konferensi ini merekomendasikan bahwa Mesir mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap Perjanjian Pelarangan Ranjau dan Sekretaris-Jenderal PBB sebelumnya Boutros Boutros-Ghali menyerukan kepada Mesir untuk menyetujuinya. Penasehat Diplomatic ICBL bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan para pejabat senior pertahanan; Menteri Luar Negeri berkata bahwa Mesir tidak lagi bersikukuh untuk pertanyaan hukum tentang tanggungjawab pengguna atas pembebasan ranjau. Ada laporan-laporan penggunaan ranjau darat oleh kaum militan pada tahun 2005. Media melaporkan bahwa pada bulan April 2006, Kementerian Kerjasama Internasional dan Program Pembangunan PBB akan memulai proyek penghapusan ranjau; hal ini belum dipastikan. Pada tahun 2005, sedikitnya ada 16 kecelakaan baru, dan pada akhir bulan Juni 2006, 15 kecelakaan lagi dicatat.

Finlandia

Dalam Rapat Keenam Para Pihak Negara, Finlandia menyatakan kembali komitmennya untuk menyetujui Perjanjian Pelarangan Ranjau pada tahun 2012 dan menghancurkan semua ranjau anti-personil yang ditumpuk pada tahun 2016.

Georgia

Dalam rapat-rapat Komite Kedudukan antar sesi pada bulan Mei 2006, Georgia berkata bahwa posisinya yang tanpa-akses terhadap Perjanjian Pelarangan Ranjau dipertimbangkan kembali. Negara ini memulai kembali komitmennya untuk tidak menggunakan, memproduksi, mengimpor, atau mengekspor ranjau anti-personil. Georgia menjadi tuan rumah untuk kerja kelompok tentang pembangunan-kepercayaan dan kerjasama regional melalui pekerjaan ranjau di Tbilisi pada bulan Oktober 2005, acara ranjau darat internasional yang disponsori-pemerintah pertama kalinya di Georgia. Ada laporan-laporan bahwa para teknisi perang Georgia membebaskan ranjau-ranjau di Ossetia Selatan pada tahun 2005. Sedikitnya 31 kecelakaan baru dilaporkan pada tahun 2005, suatu penurunan dari tahun 2004.

India

Kelompok bersenjata bukan negara telah terus menggunakan ranjau dan peralatan bahan peledak yang ditingkatkan di banyak bagian di India. India berpartisipasi sebagai pengamat dalam semua dari tiga rapat Perjanjian Pelarangan Ranjau utama dalam periode pelaporan. Pemerintah Kanada melaksanakan misi pembelaan tingkat-tinggi pertama ke India pada bulan Maret 2006. India melakukan penghapusan ranjau untuk memungkinkan pengiriman bantuan melintasi Lini Kontrol kepada para korban gempa bumi Pakistan. Sedikitnya ada 336 kecelakaan dari ranjau dan peralatan bahan peledak yang ditingkatkan pada tahun 2005, dan 271 dari bulan Januari sampai Mei 2006.

Iran

Pada tahun 2005, UNDP merevisi proposalnya bagi bantuan untuk pekerjaan ranjau, dan menunggu respon dari pusat pekerjaan ranjau Iran pada bulan Mei 2006. Pada bulan Januari 2006, Pusat Internasional Geneva untuk Penghapusan Ranjau Kemanusiaan menandatangani suatu perjanjian untuk memberikan pelatihan pekerjaan ranjau. Iran dan Irak menandatangani nota kesepakatan pada bulan Desember 2005 untuk membebaskan ranjau darat dari perbatasan mereka. Komite penerangan resiko ranjau dibentuk pada bulan Desember 2005, yang mengembangkan suatu rencana strategi dan pekerjaan. Sedikitnya kecelakaan 109 ranjau/UXO baru dicatat pada tahun 2005.

Irak

Para pejabat Irak telah terus menyatakan rasa tertarik yang kuat untuk bergabung dalam Perjanjian Pelarangan Ranjau. Kekuatan perlawanan telah terus menggunakan peralatan bahan peledak yang ditingkatkan dalam jumlah besar, juga ranjau anti-kendaraan. Kekuatan koalisi telah menemukan banyak tempat persembunyian ranjau anti-personil. Pengurangan pendanaan internasional untuk Irak (turun setengah dari tahun 2004) plus keamanan yang menurun secara signifikan menghambat pekerjaan ranjau di semua tempat kecuali daerah bagian utara; sejumlah kontrak dan operasi berakhir secara dini. Pihak Berwenang Pekerjaan Ranjau Nasional melaporkan penurunan tajam pada pembebasan ranjau tahun 2005. Direktur Jenderal kedua dari pihak berwenang dalam dua tahun digantikan pada bulan Oktober 2005. Survey Dampak Ranjau Darat Irak menyelesaikan survey terhadap 13 dari 18 *governorates* Irak pada bulan April 2006, tapi menunda survey di Tikrit dan Diyala karena kurangnya keamanan. Sejak bulan Mei 2006, survey itu telah mencatat 565 kecelakaan dalam dua tahun (lebih dari 20 persen adalah anak-anak) dan 7,631 kecelakaan baru-baru ini. Pada tahun 2005, ada sedikitnya 358 kecelakaan, peningkatan dari tahun 2004, dan mungkin merupakan suatu perkiraan yang diperkecil karena tidak ada pengawasan kecelakaan yang efektif di Irak.

Israel

Kekuatan Pertahanan Israel menghancurkan 15,510 ranjau kedaluwarsa yang ditumpuk pada tahun 2005. Israel memperpanjang waktu penundaannya untuk ekspor ranjau anti-personil selama tiga tahun pada bulan Juli 2005. Operasi-operasi pembebasan dilakukan di bagian utara Lembah Jordan pada tahun 2005, setelah pemindahan ranjau sebagai akibat banjir.

Kazakhstan

Seorang pejabat berkata kepada Pengawasan Ranjau Darat bahwa Kazakhstan sedang bersikap menghancurkan tumpukan ranjau anti-personilnya, yang sebagian besar kedaluwarsa.

Republik Korea

Korea Selatan melaporkan tumpukan 407,800 ranjau anti-personil, bukan dua juta yang negara ini tunjukkan sebelumnya. Korea Selatan memproduksi ranjau tipe-Claymore untuk pertama kalinya sejak tahun 2000. Negara ini mengekspor ranjau Claymore ke Selandia Baru pada bulan Desember 2005. Para serdadu Korea Selatan memulai pembebasan tiga ladang ranjau di Zona Kontrol Sipil dan tujuh basis militer di selatan. Pada tahun 2005, ada sedikitnya 10 kecelakaan ranjau darat baru.

Kuwait

Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri merekomendasikan akses untuk Perjanjian Pelarangan Ranjau, dan rancangan hukum akses diserahkan kepada Majelis Umum. Kuwait memberikan suara untuk keputusan Majelis Umum PBB pro-pelarangan tahunan untuk pertama kalinya sejak tahun 1998. Pada tahun 2005, delapan kecelakaan baru yang disebabkan ranjau dan persenjataan perang yang tidak diledakkan dilaporkan, suatu penurunan signifikan dari 20 kecelakaan yang dilaporkan tahun 2004. Dari bulan Januari sampai Mei 2006, ada tujuh kecelakaan baru; semua merupakan warganegara asing.

Kyrgyzstan

Sebuah proyek untuk survey dan penandaan area-area berranjau dan untuk penerangan resiko ranjau dimulai oleh Kelompok Penghapus Ranjau Denmark dalam kemitraan dengan Garda Perbatasan dan LSM-LSM lokal.

Republik Demokratis Rakyat Lao

Pada bulan Juli 2005, Laos memastikan maksudnya untuk menyetujui Perjanjian Pelarangan Ranjau di masa mendatang. Permasalahan donor tentang struktur kelembagaan menyebabkan penurunan pada dukungan keuangan pada tahun 2005; pemerintah menunjuk direktur utama Pihak Berwenang Pengatur Nasional pada bulan Desember. UXO Lao melaporkan suatu peningkatan tajam produktivitas pada tahun 2005, yang menghapus ranjau 15.7 kilometer kuadrat tanah. Dua organisasi penghapus ranjau menerima wewenang untuk operasi pembebasan pada tahun 2005 dan satu lagi pada awal tahun 2006. Ada 164 kecelakaan baru dalam 91 insiden (54 persen adalah anak-anak), lebih sedikit daripada yang

dilaporkan pada tahun 2004. Dua studi dilakukan, untuk dampak perdagangan logam sampah pada kecelakaan dari persenjataan perang yang tidak diledakkan, dan pada bantuan untuk korban.

Lebanon

Untuk pertama kalinya, Lebanon memberikan suara untuk keputusan Majelis Umum PBB pro-Perjanjian Pelarangan Ranjau tahunan dalam Komite Pertama; negara ini absen dari suara terakhir. Proses wawancara internal yang bisa memberikan akses sedang dilakukan. Lebanon sedang mempertimbangkan penyerahan laporan transparansi Pasal 7 Perjanjian Pelarangan Ranjau secara sukarela. ICBL melakukan misi pembelaan khusus untuk Lebanon pada bulan Juni 2006. Dua kilometer kuadrat tanah yang terkena-dampak-ranjau dibebaskan pada tahun 2005, dan 3.9 kilometer kuadrat lagi dari tanah berranjau dan diduga-berranjau dilepaskan melalui survey. Kantor Penghapusan Ranjau Nasional merancang suatu kebijakan pekerjaan ranjau yang bertanggungjawab sendiri untuk manajemen program pekerjaan ranjau dan melibatkan lembaga-lembaga sipil dalam penentuan-prioritas. Survey teknis di seluruh negara dimulai pada tahun 2005; 9.8 kilometer kuadrat area yang diduga telah disurvei pada bulan Mei 2006, yang menghasilkan pembatalan terhadap 7.2 kilometer kuadrat sebagai tidak terkontaminasi. Penerangan resiko ranjau ditunda karena situasi keamanan, tapi dilanjutkan kembali pada akhir tahun 2005. Ada 22 kecelakaan baru pada tahun 2005, suatu peningkatan yang signifikan dari tahun 2004.

Mongolia

Mongolia telah memulai pendekatan langkah-demi-langkah untuk menyetujui Perjanjian Pelarangan Ranjau pada tahun 2008. Amendemen-amendemen terhadap Hukum tentang Kerahasiaan Negara dipersiapkan agar dapat mengeluarkan ranjau darat dari daftar kerahasiaan dan menempatkan rincian mengenai jumlah ranjau anti-personil yang ditumpuk di wilayah publik. Para teknisi angkatan bersenjata mengeluarkan lebih dari 1,000 item persenjataan perang bahan peledak pada tahun 2005. Seorang sipil dilaporkan terluka oleh persenjataan perang yang tidak diledakkan pada tahun 2005.

Maroko

Maroko memberikan suara untuk Keputusan Majelis Umum PBB tahunan yang mendukung Perjanjian Pelarangan Ranjau untuk tahun kedua secara berturut-turut. Negara ini mengumumkan dalam Rapat Keenam Para Pihak Negara maksudnya untuk menyerahkan laporan transparansi Pasal 7 secara sukarela. Antara bulan April 2005 and April 2006, 289 ranjau dan item persenjataan perang yang tidak diledakkan ditandai dan 7,074 item persenjataan perang bahan peledak, sebagian besar ranjau anti-personil yang ditumpuk Polisario, dihancurkan. Pada tahun 2005, ada sedikitnya sembilan kecelakaan baru.

Nepal

Pada tanggal 26 Mei 2006, pemerintah Nepal dan Partai Komunis Nepal (Maoist) menyepakati suatu perlucutan senjata bilateral dan Aturan Perilaku yang memasukkan tanpa-penggunaan ranjau darat. Sebelum perlucutan-senjata, keduabelah pihak terus menggunakan ranjau darat dan/atau peralatan bahan peledak yang ditingkatkan. Kerajaan Inggris menunda pelatihan bagi unit pembuangan persenjataan perang bahan peledak angkatan bersenjata pada bulan Februari 2005, tapi melanjutkan kembali pada bulan Agustus 2005 dan mengirimkan peralatan baru. Kecelakaan dari semua jenis peralatan bahan peledak tampaknya lebih rendah pada tahun 2005 daripada tahun 2004; usaha-usaha dilakukan oleh LSM-LSM untuk membentuk sistem pengumpulan data kecelakaan di seluruh negara. Mayoritas kecelakaan itu adalah anak-anak. Penerangan resiko ranjau/bahan peledak mendapatkan kecepatan, yang melibatkan banyak organisasi lokal dan internasional.

Kepulauan Pasifik (Mikronesia, Palau, Tonga, Tuvalu)

Pada bulan Mei 2006, Palau menyatakan harapannya untuk menyetujui Perjanjian Pelarangan Ranjau dalam Rapat Ketujuh Para Pihak Negara dalam bulan September 2006.

Mikronesia menyelesaikan suatu tinjau ulang Perjanjian Pelarangan Ranjau dan membuat rancangan legislasi akses untuk menyerahkannya kepada kongres. Pada bulan Desember 2005, Mikronesia untuk pertama kalinya memberikan suara untuk keputusan Majelis Umum PBB tahunan yang menyerukan universalisasi Perjanjian Pelarangan Ranjau.

Pakistan

Kelompok-kelompok bersenjata bukan-negara menggunakan ranjau anti-personil, ranjau anti-kendaraan, dan peralatan bahan peledak yang ditingkatkan secara luas di provinsi Baluchistan, dan sampai batasan yang lebih kecil di Waziristan dan area-area lain di Pakistan. Penerangan resiko ranjau dilakukan oleh LSM-LSM dan sampai batasan tertentu oleh para pihak berwenang Pakistan di Area-area Suku Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Pusat dan di Kashmir Pakistan; Bantuan Islam LSM-LSM Inggris dan Respon Internasional memulai proyek-proyek penerangan resiko ranjau baru pada tahun 2005-2006 di Kashmir Pakistan. Pada tahun 2005, ada sedikitnya 214 kecelakaan karena ranjau, persenjataan perang yang tidak diledakkan dan peralatan bahan peledak yang ditingkatkan, suatu peningkatan dari 195 pada tahun 2004. Pada tahun 2006, tingkat kecelakaan terus meningkat, di mana sedikitnya 263 kecelakaan sejak tanggal 14 Mei.

Federasi Rusia

Para pejabat Rusia memastikan kepada Pengawasan Ranjau Darat pada bulan Juni 2006 bahwa kekuatan Rusia terus menggunakan ranjau anti-personil di Chechnya. Protokol II Yang Diamendemen CCW berlaku untuk Rusia pada tanggal 2 September 2005. Team-team pembebasan melakukan lebih dari 300 tugas pada tahun 2005 untuk menyelesaikan sisa-sisa bahan peledak dari Perang Dunia II, yang menghancurkan 40,000 item bahan peledak, termasuk 10,500 ranjau. Pengawasan Ranjau Darat mengidentifikasi 305 kecelakaan baru dalam sedikitnya 82 insiden pada tahun 2005.

Somalia

Pemerintah Pusat Transisi (*TFG/Transitional Federal Government*) menyatakan kembali maksudnya untuk bergabung dengan Perjanjian Pelarangan Ranjau. Tampaknya telah berlangsung penggunaan ranjau anti-personil oleh berbagai faksi di bagian-bagian berbeda negara itu. Pada bulan Mei 2006, kelompok pengawasan embargo persenjataan PBB melaporkan bahwa pemerintah Eritrea telah mengirimkan 1,000 ranjau anti-personil kepada kaum fundamentalist militan di Somalia. Pada bulan Oktober 2005, kelompok pengawasan melaporkan bahwa para anggota TFG, termasuk presidennya, dan seorang

lawan dari TFG telah terlibat dalam pengiriman persenjataan yang termasuk tipe-tipe ranjau darat yang tidak ditentukan. Kelompok pengawasan juta menyatakan bahwa pemerintah Ethiopia dan Yemen telah memberikan tipe-tipe ranjau yang tidak ditentukan kepada faksi-faksi di Somalia. Daerah Somali dari Puntland menyelesaikan suatu Survey Dampak Ranjau Darat di tiga daerah pada tahun 2005. Survey ini menemukan 35 komunitas yang terkena-dampak-ranjau, yang ekuivalen dengan perkiraan 6 persen dari komunitas-komunitas di tiga daerah itu. Sedikitnya 276 kecelakaan ranjau/UXO baru dicatat pada tahun 2005, suatu peningkatan yang signifikan daripada tahun sebelumnya. Team-team pembuangan persenjataan perang bahan peledak polisi di Puntland melaporkan penghancuran lebih dari 3,000 item persenjataan perang yang tidak diledakkan antara bulan Juli 2004 dan akhir tahun 2005. Staff Pusat Pekerjaan Ranjau Puntland, bersama dengan personil EOD, mulai memberikan penerangan resiko ranjau.

Sri Lanka

Sejak bulan Desember 2005, penggunaan LTTE yang diduga untuk ranjau-ranjau Claymore yang dipicu-perintah telah sangat naik, dan Angkatan Bersenjata dalam beberapa contoh dituduh untuk penggunaan ranjau anti-personil oleh para pemberontak. Sebelas operator menghapus ranjau 19.5 juta meter kuadrat tanah pada tahun 2005, lebih dari lima kali lipat tahun 2004, sebagai akibat dari peningkatan kapasitas pembebasan manual dan mekanis dan peningkatan pengurangan area. Akan tetapi, permusuhan baru pada awal tahun 2006 sangat menghambat operasi penghapusan ranjau di area-area yang diperjuangkan, yang mengakibatkan pembebasan yang jauh berkurang. Penerangan resiko ranjau meluas, yang mencapai lebih dari 630,000 orang pada tahun 2005; 80 persen dari guru sekolah di provinsi-provinsi yang terkena-dampak-ranjau telah dilatih tentang penerangan resiko ranjau. Ada 38 kecelakaan ranjau baru/UXO baru pada tahun 2005, yang secara signifikan lebih sedikit daripada 56 kecelakaan pada tahun 2004.

Siria

Pada bulan April 2006 Angkatan Bersenjata Siria menyelesaikan operasi pembebasan di desa Hanoot Saida di Golan sebelah selatan, dan di desa Hameedia sebelah utara kota

Quneitra; 1,564 ranjau anti-kendaraan dibebaskan dan dihancurkan. Kekuatan PBB membebaskan dan menghancurkan enam ranjau anti-personil, 177 ranjau anti-kendaraan, dan 34 item peralatan perang yang tidak diledakkan pada tahun 2005. Pada tahun 2005, ada peningkatan yang signifikan dalam kecelakaan yang dilaporkan karena ranjau dan OXU pada tahun 2004 dan 2003; ada sedikitnya 11 kecelakaan baru pada tahun 2005 dan sembilan dari tanggal 1 Januari sampai 22 Mei 2006. Setelah insiden ranjau di Dataran Tinggi Golan pada bulan Januari 2006 di mana lima anak terluka, komite pemerintah, yang dibentuk pada tahun 2004 untuk mengangkat penerangan resiko ranjau di area-area yang terkena-dampak-ranjau, diperkuat kembali dan semua aktivitas ini dilakukan di sekolah-sekolah.

Amerika Serikat

Pemerintah AS memberikan lebih dari \$95 juta dalam tahun fiskal 2005 untuk program pekerjaan ranjau kemanusiaan, dibandingkan dengan \$109 juta dalam tahun fiskal 2004, perubahan terbesar adalah penurunan yang signifikan dalam pendanaan khusus yang dialokasikan untuk pekerjaan ranjau di Irak. Pentagon meminta \$1.3 milyar untuk riset dan produksi dua sistem ranjau darat baru – Sistem *Munitions* Laba-laba dan Intelijen – di antara tahun-tahun fiskal 2005 dan 2011; semua sistem ini tampaknya tidak sesuai dengan Perjanjian Pelarangan Ranjau. Kongres memerintahkan studi Pentagon untuk efek-efek tanpa pandang bulu yang mungkin dari sistem Laba-laba itu, yang karenanya menunda keputusan Pentagon yang diharapkan pada bulan Desember 2005 tentang apakah menghasilkan sistem Laba-laba.

Uzbekistan

Pada bulan Oktober Uzbekistan dilaporkan telah membebaskan seperlima dari perbatasannya dengan Tajikistan dan beberapa area di sekitar daerah kantong di Kyrgyzstan.

Vietnam

Selama kunjungan delegasi pemerintah Kanada pada bulan November 2005 untuk mempromosikan Perjanjian Pelarangan Ranjau, para pejabat dari dua kementerian

pertahanan dan luar negeri bersikukuh bahwa Vietnam tidak lagi memproduksi ranjau anti-personil. Beberapa pejabat menunjukkan bahwa Vietnam akan bergabung dengan perjanjian itu pada suatu titik dan menekankan bahwa negara ini sudah menghormati semangat perjanjian dengan tidak memproduksi, menjual, atau menggunakan ranjau anti-personil. Fase percontohan Pengukuran Dampak dan Survey Teknis Ranjau Darat dan UXO disimpulkan pada bulan Mei 2005. Dua LSM berhenti bekerja di Vietnam pada akhir tahun 2005. UNICEF menerima pendanaan lima-tahun untuk pekerjaan ranjau yang berfokus pada penerangan dan pembelaan resiko ranjau. Ada sedikitnya 112 kecelakaan baru pada tahun 2005.

Lainnya

Abkhazia

Jumlah tanah yang dibebaskan dan dikurangi oleh HALO Trust pada tahun 2005 – lebih dari 2.5 kilometer kuadrat – merupakan catatan untuk program organisasi di Abkhazia. Selama tahun 2005, HALO mendeklarasikan daerah Gali dan lembah sungai Gumista dekat Sukhum bebas-dampak ranjau. Pada tahun 2005, 15 kecelakaan ranjau/UXO baru dilaporkan, suatu peningkatan yang signifikan dari tahun 2004 (enam kecelakaan).

Chechnya

Pada bulan Juni 2006, para pejabat Rusia memastikan bahwa kekuatan Rusia terus menggunakan ranjau anti-personil di Chechnya. Kekuatan Chechnya telah terus menggunakan peralatan bahan peledak yang ditingkatkan secara luas. Team-team pembebasan membebaskan 5,000 item persenjataan perang bahan peledak di Chechnya dan Ingushetia, termasuk 32 ranjau darat dibebaskan dari lini rel kereta api. LSM-LSM nasional yang didukung oleh UNICEF, ICRC dan Kelompok Penghapus Ranjau Denmark/Dewan Pengungsi Denmark memberikan penerangan resiko ranjau di Chechnya dan kepada orang-orang yang dipindahkan di Caucasus bagian utara. UNICEF mencatat 24 kecelakaan ranjau darat/UXO baru, yang melanjutkan pengurangan kecelakaan pada tahun-tahun terakhir. Untuk membuat data kecelakaan yang lebih akurat, perubahan harus dibuat terhadap pengumpulan data dan sistem pencatatan. UNICEF melakukan pelatihan pertama

untuk konseling trauma bagi 22 psikolog anak dari Chechnya. ICRC mengamankan perawatan bagi para tawanan Chechnya di Azerbaijan.

Kosovo

Pada tahun 2005, operasi-operasi penghapusan ranjau membebaskan lebih dari 4.3 kilometer kuadrat tanah, suatu peningkatan 10 persen pada produktivitas tahun 2004, yang menghancurkan 719 ranjau anti-personil, 30 ranjau anti-kendaraan, 977 kumpulan bom kecil dan 1,378 item UXO lain. Pada bulan Desember 2005, Orang Cacat Internasional mengakhiri aktivitas-aktivitas penghapusan ranjaunya di Kosovo setelah enam tahun operasi. Pada akhir tahun 2005, 15 area berbahaya masih membutuhkan pembebasan; dari semua ini, tiga mengandung ancaman ranjau dan 12 sisanya terkontaminasi oleh kumpulan bom kecil. Ada juga 53 area yang membutuhkan survey teknis dan mungkin juga pembebasan. Sedikitnya satu dari para operator penghapus ranjau yakin bahwa ini memperkecil jumlah sisa kontaminasi, dan merencanakan suatu misi pengukuran untuk pertengahan Juli 2006 dalam mendefinisikan sisa ancaman dari kelompok *munitions* dan ranjau darat. Pada tahun 2005, 11 kecelakaan baru dicatat, suatu penurunan dari tahun 2004; semua disebabkan oleh kumpulan bom kecil atau persenjataan perang lain, dan sebagian besar merupakan akibat perusakan.

Nagorno-Karabakh

Pada tahun 2005, HALO menghapus ranjau lebih dari 7.9 kilometer kuadrat area berranjau dengan pembebasan dan survey, dan 13 kilometer kuadrat tanah lainnya oleh pembebasan area perang. HALO juga memberikan penerangan resiko ranjau kepada sekitar 7,700 orang. Secara signifikan ada lebih sedikit kecelakaan yang dilaporkan daripada tahun 2004 ketika tingkat kecelakaan itu memuncak.

Palestina

Ada laporan-laporan penggunaan ranjau anti-kendaraan oleh orang Palestina pada bulan Juni dan Juli 2006 selama aksi militer Israel di Gaza. Pengukuran pekerjaan ranjau PBB pada bulan September 2005 mengkritik Pihak Berwenang Palestina karena kurangnya respon yang efektif terhadap ancaman dari ranjau darat, sisa bahan peledak perang dan

peralatan bahan peledak yang ditingkatkan, yang meningkat ketika para penghuni Israel dan militer menarik diri dari Jalur Gaza pada tahun 2005. Ada 46 orang terbunuh dan 317 orang terluka dalam 187 insiden tahun 2005, suatu peningkatan dari tahun 2004. Pada awal tahun 2006, usaha-usaha dilakukan untuk menghidupkan kembali Komite Pekerjaan Ranjau Nasional. Team-team pembuangan persenjataan perang bahan peledak polisi Palestina melakukan 1,162 tugas pembuangan persenjataan perang bahan peledak pada tahun 2005, dibandingkan 939 pada tahun 2004.

Somaliland

Pada tahun 2005, dua LSM penghapus ranjau internasional Kelompok Penghapus Ranjau Denmark dan HALO Trust menghapus ranjau lebih dari 18 kilometer kuadrat tanah, yang mayoritas besar darinya merupakan pembebasan area perang oleh HALO; 602 ranjau anti-personil, 99 ranjau anti-kendaraan, lebih dari 20,000 sisa bahan peledak perang dan sejumlah besar amunisi dihancurkan. Pada bulan Maret 2006, Kelompok Penghancur Ranjau Denmark menghentikan semua pembebasan ranjau di Somaliland. Pada tahun 2005, 93 kecelakaan ranjau darat/UXO baru dicatat; dua pertiga adalah anak-anak dan hampir sepertiga wanita; kecelakaan terjadi di semua dari enam daerah. Penerangan resiko ranjau meningkat, yang menjangkau sedikitnya 30,000 penerima dari bulan Januari 2005 sampai Juni 2006.

Taiwan

Pada bulan Juni 2006, Taiwan mengundang legislasi yang melarang produksi dan perdagangan ranjau anti-personil, tapi tidak untuk penumpukan dan penggunaannya, dan membutuhkan pembebasan area-area berranjau dalam waktu tujuh tahun. Pada bulan September 2005, Presiden, Menteri Luar Negeri, dan Wakil Presiden Legislatif Yuan semua menandatangani pernyataan yang berkomitmen untuk pelarangan pada ranjau anti-personil dan penghapusan ranjau. Sebuah kontrak yang diberikan untuk MineTech Internasional untuk membebaskan ranjau di Pulau Kinmen ditunda setelah sebuah ledakan pada bulan April 2005 di mana dua penghapus ranjau terbunuh dan yang ketiga terluka. Seorang legislator berkata Kementerian Pertahanan Nasional membatalkan pendanaan untuk

penghapusan ranjau pada tahun 2006 setelah pemerintah mengajukan pembelian persenjataan besar. Para pejabat mengatakan penghapusan ranjau akan dimulai lagi pada tahun 2007 dan Kementerian itu telah mengusulkan suatu anggaran NTD4.2 milyar (US\$131 juta) untuk membebaskan semua ladang ranjau yang tersisa setelah tahun 2009.

Sahara Barat

Pada bulan November 2005, Front Polisario menandatangani Akta Seruan Komitmen Geneva yang menolak ranjau anti-personil. Polisario menghancurkan lebih dari 3,000 dari ranjau-ranjau yang ditumpuk pada bulan Februari 2006, misi PBB di Sahara Bagian Barat menemukan dan menandai 289 ranjau dan persenjataan perang yang tidak diledakkan, dan mengawasi penghancuran 7,074 item persenjataan perang bahan peledak, yang sebagian besar ranjau anti-personil yang ditumpuk. Pekerjaan Ranjau Kerajaan Inggris memulai suatu pembuangan persenjataan perang bahan peledak dan proyek survey teknis pada pertengahan tahun 2006. Ranjau anti personil menyebabkan sedikitnya dua kecelakaan pada tahun 2005, dan sedikitnya ada delapan kecelakaan ranjau dari bulan Januari sampai Mei 2006.

18 September 1997

Konvensi Pelarangan Penggunaan, Penumpukan, Produksi, dan Pengiriman Ranjau Anti-Personil dan Penghancurannya

Pendahuluan

Para Pihak Negara

Bertekad mengakhiri penderitaan dan kecelakaan yang disebabkan oleh ranjau anti-personil, yang membunuh atau membuat cacat ratusan orang setiap minggu, yang sebagian besar orang sipil yang tidak bersalah dan tak berdaya dan khususnya anak-anak, menghambat pembangunan ekonomi dan pembangunan kembali, menghambat pengembalian para pengungsi dan orang-orang yang dipindahkan di dalam negeri, dan mendapatkan konsekuensi yang parah lain selama bertahun-tahun setelah penempatannya.

Percaya perlunya melakukan yang terbaik untuk memberikan kontribusi dengan cara yang efisien dan terkodiner untuk menghadapi tantangan dalam menghilangkan ranjau-ranjau anti-personil yang ditempatkan di seluruh dunia, dan memastikan penghancurannya.

Ingin melakukan yang terbaik dalam memberikan bantuan untuk perawatan dan rehabilitasi, termasuk penyatuan kembali secara sosial dan ekonomi para korban ranjau.

Menyadari bahwa pelarangan total ranjau anti-personil juga merupakan tindakan pembangunan-kepercayaan yang penting.

Menyambut pengangkatan Protokol Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Ranjau, Jebakan-ranjau dan Peralatan Lain, sebagaimana yang diamendemen pada tanggal 3 Mei 1996, yang dilampirkan kepada Konvensi tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Persenjataan Konvensional Tertentu Yang Mungkin Dianggap Terlalu Melukai atau Berdampak Tanpa Pandang Bulu, dan menyerukan pengesahan awal Protokol ini oleh semua Negara yang belum melakukannya.

Menyambut juga Keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa 51/45 S pada tanggal 10 Desember 1996 yang mendorong semua Negara untuk mengusahakan dengan keras suatu perjanjian internasional yang efektif, yang mengikat secara hukum untuk melarang penggunaan, penumpukan, produksi, dan pengiriman ranjau darat anti-personil.

Menyambut lebih lanjut tindakan-tindakan yang diambil selama bertahun-tahun di masa lalu, baik secara unilateral/sepihak dan multilateral/banyak pihak, yang bertujuan melarang, membatasi, atau menunda penggunaan, penumpukan, produksi dan pengiriman ranjau anti-personil.

Menekankan peran nurani publik untuk melanjutkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dibuktikan oleh seruan untuk pelarangan total ranjau anti-personil dan menyadari usaha-usaha untuk tujuan itu yang diambil oleh Kampanye Palang Merah Internasional dan Gerakan Bulan Sabit Merah Internasional dalam Melarang Ranjau Darat dan banyak lembaga swadaya masyarakat lain di seluruh dunia.

Menyerukan kembali Deklarasi Ottawa tanggal 5 Oktober 1996 dan Deklarasi Brussels tanggal 27 Juni 1997 yang mendorong komunitas internasional untuk menegosiasikan perjanjian internasional dan secara hukum mengikat yang melarang penggunaan, penumpukan, produksi, dan pengiriman ranjau anti-personil.

Menekankan keinginan untuk menarik kepatuhan dari semua Negara terhadap Konvensi ini, dan bertekad untuk bekerja keras ke arah promosi universalisasi-nya dalam semua *fora* yang relevan termasuk, *inter alia*, Perserikatan Bangsa-bangsa, Konferensi Perlucutan Senjata, organisasi regional, dan kelompok, dan konferensi tinjau ulang terhadap Konvensi Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Persenjataan Konvensional Tertentu Yang Mungkin Dianggap Melukai Secara Berlebihan atau Berdampak Tanpa Pandang Bulu.

Mendasarkan diri mereka pada prinsip hukum kemanusiaan internasional bahwa hak para pihak untuk konflik angkatan bersenjata dalam memilih metode atau cara peperangan tidak terbatas, atas prinsip yang melarang penggunaan dalam konflik bersenjata terhadap persenjataan, *projectiles* dan bahan-bahan dan metode-metode peperangan dengan sifat menimbulkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu dan pada prinsip bahwa perbedaan harus diberikan antara orang sipil dan serdadu.

Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1

Kewajiban umum

1. Masing-masing Pihak Negara berusaha untuk tidak pernah dalam keadaan apapun:
 - a) Menggunakan ranjau anti-personil;
 - b) Mengembangkan, memproduksi, dalam keadaan lain mendapatkan, menumpuk, menerima atau mengirim kepada siapapun, secara langsung atau tidak langsung, ranjau anti-personil;'
 - c) Membantu, mendorong, atau menyebabkan, dengan cara apapun, seseorang untuk terlibat dalam suatu aktivitas yang dilarang untuk Pihak Negara di bawah Konvensi ini.
2. Masing-masing Pihak Negara berusaha untuk menghancurkan atau memastikan penghancuran semua ranjau anti-personil sesuai dengan peraturan Konvensi ini.

Pasal 2

Definisi

1. "Ranjau anti-personil" berarti ranjau yang dirancang untuk diledakkan dengan adanya, di sekitar atau kontak dengan orang dan yang akan melumpuhkan, melukai, atau membunuh satu atau lebih orang. Ranjau dirancang untuk dipicu oleh adanya, di sekitar atau kontak dengan kendaraan selain orang, yang dilengkapi dengan peralatan anti-penanganan, tidak dianggap ranjau anti-personil jika dilengkapi demikian.
2. "Ranjau" berarti *munition* yang dirancang untuk ditempatkan di bawah, pada atau di dekat tanah atau area permukaan lain dan diledakkan dengan adanya, di sekitar atau kontak dengan orang atau kendaraan.
3. "Peralatan anti-penanganan" berarti peralatan yang dimaksudkan untuk melindungi ranjau dan yang merupakan bagian, atau berhubungan, melekat atau ditempatkan di bawah ranjau dan yang aktif ketika usaha dibuat untuk mengganggu atau dalam keadaan lain secara tidak sengaja mengganggu ranjau itu.
4. "Mengirim" melibatkan, sebagai tambahan terhadap gerakan fisik ranjau anti-personil ke dalam atau dari teritori nasional, pengiriman hak dan kontrol pada ranjau, tapi tidak melibatkan pengiriman teritori yang mengandung ranjau anti-personil yang ditempatkan.

5. "Area berranjau" berarti area yang berbahaya karena adanya atau diduga adanya ranjau.

Pasal 3

Pengecualian

1. Dengan tidak mengabaikan kewajiban umum di bawah Pasal 1, penerimaan atau pengiriman sejumlah ranjau anti-personil untuk pengembangan dan pelatihan deteksi ranjau, pembebasan ranjau, atau teknik penghancuran ranjau diizinkan. Jumlah ranjau tersebut harus tidak melebihi jumlah minimum yang mutlak perlu untuk tujuan yang disebutkan di atas.
2. Pengiriman ranjau anti-personil untuk tujuan penghancuran diizinkan.

Pasal 4

Penghancuran ranjau anti-personil yang ditumpuk

Kecuali seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3, setiap Pihak Negara berusaha untuk menghancurkan atau memastikan penghancuran semua ranjau anti-personil yang dimiliki atau dimiliki, atau yang berada di bawah wilayah hukum atau kontrolnya, sesegera mungkin yang tidak lebih lama dari empat tahun setelah berlakunya Konvensi ini pada Pihak Negara itu.

Pasal 5

Penghancuran ranjau anti-personil di area-area berranjau

1. Setiap Pihak Negara berusaha untuk menghancurkan atau memastikan penghancuran semua ranjau anti-personil di area-area berranjau di bawah wilayah hukum atau kontrolnya, sesegera mungkin tapi tidak lebih lama dari sepuluh tahun setelah berlakunya Konvensi ini bagi Pihak Negara itu.
2. Masing-masing Pihak Negara harus memberikan segala usaha untuk mengidentifikasi semua area yang berada di bawah wilayah hukum atau kontrolnya di mana ranjau anti-personil diketahui atau diduga ditempatkan dan harus memastikan sesegera mungkin agar semua ranjau anti-personil di area berranjau di bawah wilayah hukum atau kontrolnya diberi tanda batas lingkaran, diawasi, dan dilindungi dengan pemagarangan atau

cara lain, untuk memastikan pengeluaran yang efektif orang sipil, sampai semua ranjau anti-personil yang termuat di dalamnya telah dihancurkan. Pemberian tanda itu sedikitnya harus sesuai dengan standar yang ditetapkan pada Penggunaan Ranjau, Jebakan-Ranjau, dan Peralatan Lain, sebagaimana yang diamendemen pada tanggal 3 Mei 1996, yang terlampir pada Konvensi Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Persenjataan Konvensional Tertentu Yang Mungkin Dianggap Melukai Secara Berlebihan atau Berdampak Tanpa Pandang Bulu.

3. Jika Pihak Negara percaya bahwa ia tidak mampu untuk menghancurkan atau memastikan penghancuran semua ranjau anti-personil yang dirujuk dalam ayat 1 ini dalam periode waktu itu, ia bisa menyerahkan permintaan dalam Rapat Para Pihak Negara atau Konferensi Tinjau Ulang untuk perpanjangan waktu batas waktu dalam menyelesaikan penghancuran ranjau anti-personil tersebut, selama suatu periode sampai sepuluh tahun.
4. Setiap permintaan harus memuat:
 - a) Durasi perpanjangan waktu yang diajukan;
 - b) Penjelasan rinci tentang alasan untuk perpanjangan waktu yang diajukan, termasuk:
 - (i) Persiapan dan status kerja yang dilakukan di bawah program-program penghapusan ranjau nasional;
 - (ii) Cara keuangan dan teknis yang tersedia bagi Pihak Negara untuk penghancuran semua ranjau anti-personil; dan
 - (iii) Keadaan yang menghambat kemampuan Pihak Negara untuk menghancurkan semua ranjau anti-personil di area-area berranjau;
 - c) Implikasi perpanjangan waktu secara kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan
 - d) Informasi lain apapun yang relevan untuk permintaan perpanjangan waktu yang diajukan.

5. Rapat Para Pihak Negara atau Konferensi Tinjau Ulang, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang termuat dalam ayat 4, menilai permintaan itu dan memutuskan dengan suara mayoritas dari Para Pihak Negara yang hadir dan memberikan suara apakah mengabulkan permintaan untuk periode perpanjangan waktu itu.
6. Perpanjangan waktu itu mungkin diperbaharui saat penyerahan permintaan baru sesuai dengan ayat 3, 4, dan 5 Pasal ini. Dalam meminta periode perpanjangan waktu lebih lanjut Pihak Negara harus menyerahkan informasi tambahan tentang apa yang telah dilakukan dalam periode perpanjangan waktu sebelumnya sesuai dengan Pasal ini.

Pasal 6

Kerjasama dan bantuan internasional

1. Dalam memenuhi kewajibannya di bawah Konvensi ini masing-masing Pihak Negara berhak untuk mengusahakan dan menerima bantuan, di mana layak, dari Para Pihak Negara lain untuk perpanjangan waktu yang dimungkinkan.
2. Masing-masing Pihak Negara berusaha untuk memfasilitasi dan berhak untuk berpartisipasi dalam pertukaran sebanyak mungkin untuk peralatan, bahan dan informasi ilmiah dan teknologi mengenai pelaksanaan Konvensi ini. Para Pihak Negara harus tidak menerapkan pembatasan yang tidak semestinya pada peraturan peralatan pembebasan ranjau dan informasi yang berhubungan dengan tujuan kemanusiaan.
3. Masing-masing Pihak Negara yang berada dalam posisi untuk melakukannya harus memberikan bantuan untuk perawatan dan rehabilitasi, dan penyatuan kembali secara sosial dan ekonomi, bagi para korban ranjau dan untuk program kesadaran ranjau. Bantuan tersebut bisa diberikan, *inter alia*, melalui sistem Perserikatan Bangsa-bangsa, organisasi atau lembaga internasional, regional, atau nasional, Komite Internasional Palang Merah, Palang Merah nasional dan masyarakat Bulan Sabit Merah, dan Federasi Internasional mereka, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, atau atas dasar bilateral.

4. Masing-masing Pihak Negara yang berada dalam posisi untuk melakukannya harus memberikan bantuan untuk pembebasan ranjau dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan. Bantuan seperti itu bisa diberikan, *inter alia*, melalui sistem Perserikatan Bangsa-bangsa, organisasi atau lembaga internasional, regional, atau nasional, atau atas dasar bilateral, atau dengan memberikan kontribusi kepada Dana Perwalian Sukarela Perserikatan Bangsa-bangsa bagi Bantuan dalam Pembebasan Ranjau, atau dana-dana regional lain yang berurusan dengan penghapusan ranjau.
5. Masing-masing Pihak Negara yang berada dalam posisi untuk melakukannya harus memberikan bantuan bagi penghancuran ranjau anti-personil yang ditumpuk.
6. Masing-masing Pihak Negara berusaha untuk memberikan informasi untuk database tentang pembebasan ranjau yang ditetapkan dalam sistem Perserikatan Bangsa-bangsa, khususnya informasi mengenai berbagai cara dan teknologi pembebasan ranjau, dan mendaftarkan para ahli, para perwakilan ahli atau titik-titik kontak nasional untuk pembebasan ranjau.
7. Para Pihak Negara bisa meminta Perserikatan Bangsa-bangsa, organisasi-organisasi regional, Para Pihak Negara lain atau *fora* antar pemerintah atau bukan-pemerintah berkompeten lain untuk membantu para pihak berwenangnya dalam perincian suatu program penghapusan ranjau nasional untuk menentukan, *inter alia*:
 - a) Batasan dan lingkup masalah ranjau anti-personil;
 - b) Sumber daya keuangan, teknologi, dan kemanusiaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program;
 - c) Perkiraan jumlah tahun yang diperlukan untuk menghancurkan semua ranjau anti-personil di area-area berranjau di bawah wilayah hukum atau kontrol dari Pihak Negara yang berkepentingan;
 - d) Aktivitas-aktivitas kesadaran ranjau untuk mengurangi insiden luka atau kematian yang berhubungan dengan ranjau;

- e) Hubungan antara Pemerintah Pihak Negara yang berkepentingan dan entitas-entitas pemerintah, antar-pemerintah atau bukan-pemerintah yang relevan yang akan bekerja dalam pelaksanaan program.
8. Masing-masing Pihak Negara yang memberikan dan menerima bantuan di bawah peraturan Pasal ini harus bekerjasama dengan pandangan untuk memastikan pelaksanaan sepenuhnya dan tepat waktu untuk program bantuan yang disetujui.

Pasal 7

Tindakan-tindakan transparansi

1. Masing-masing Pihak Negara harus melapor kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa sesegera mungkin, dan dalam suatu kejadian tidak lebih dari 180 hari setelah berlakunya Konvensi ini untuk Pihak Negara itu tentang:
 - a) Tindakan pelaksanaan nasional yang dirujuk dalam Ayat 9;
 - b) Total dari semua ranjau anti-personil tertumpuk yang dimiliki atau dipunyai oleh negara itu, atau yang berada di bawah wilayah hukumnya;
 - c) Sampai batasan yang mungkin, lokasi dari semua area berranjau yang memuat, atau diduga memuat, ranjau anti-personil yang berada di bawah wilayah hukum atau kontrolnya, memasukkan sebanyak mungkin rincian mengenai tipe dan jumlah dari masing-masing tipe ranjau anti-personil di setiap area berranjau dan kapan semua itu ditempatkan;
 - d) Tipe, kuantitas dan, jika mungkin, banyaknya semua ranjau anti-personil yang diterima atau dikirimkan untuk pembangunan dan pelatihan dalam deteksi ranjau, pembebasan ranjau atau teknik-teknik penghancuran ranjau, atau dikirimkan untuk tujuan penghancuran, juga instruksi yang dikuasakan oleh Pihak Negara untuk menerima atau mengirim ranjau anti-personil, sesuai dengan Pasal 3;
 - e) Status program untuk perubahan atau penghentian tugas fasilitas produksi ranjau anti-personil;
 - f) Status program untuk penghancuran ranjau-ranjau anti-personil sesuai dengan Pasal 4 dan 5, termasuk rincian tentang metode-metode yang akan digunakan

dalam penghancuran, lokasi dari semua tempat penghancuran dan keselamatan yang bisa diterapkan dan standar lingkungan yang harus dipatuhi;

- g) Tipe dan jumlah dari semua ranjau anti-personil yang dihancurkan setelah berlakunya Konvensi ini untuk Pihak Negara itu, termasuk pemecahan jumlah dari setiap tipe ranjau anti-personil yang dihancurkan, masing-masing sesuai dengan Pasal 4 dan 5, bersama dengan, jika mungkin, jumlah dari masing-masing tipe ranjau anti-personil dalam hal penghancuran sesuai dengan Pasal 4;
 - h) Karakteristik teknis dari setiap tipe ranjau anti-personil yang diproduksi, sampai batasan yang diketahui, dan yang saat ini dimiliki atau dimiliki oleh Pihak Negara, dengan memberikan, di mana secara wajar mungkin, kategori informasi yang bisa memfasilitasi identifikasi dan pembebasan ranjau anti-personil; minimum, informasi ini harus memasukkan dimensi, pemicuan, kandungan bahan peledak, dan informasi lain yang bisa memfasilitasi pembebasan ranjau; dan
 - i) Tindakan-tindakan yang diambil untuk memberikan peringatan langsung dan efektif kepada penduduk sehubungan dengan semua area yang diidentifikasi di bawah ayat 2 Pasal 5.
2. Informasi yang diberikan sesuai dengan Pasal ini harus dimutakhirkan oleh Pihak Negara setiap tahun, yang mencakup tahun kalender terakhir, dan melapor kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa tidak lebih lambat dari tanggal 30 April setiap tahun.
 3. Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa harus mengirim semua laporan yang diterima tersebut kepada Para Pihak Negara.

Pasal 8

Fasilitasi dan klarifikasi kepatuhan

1. Para Pihak Negara sepakat untuk berkonsultasi dan bekerjasama dengan satu sama lain dalam hal pelaksanaan peraturan Konvensi ini dan bekerjasama dalam semangat

kerjasama untuk memfasilitasi kepatuhan oleh Para Pihak Negara terhadap kewajiban mereka di bawah Konvensi ini.

2. Jika satu atau lebih Pihak Negara ingin menjelaskan dan berusaha menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan kepatuhan peraturan Konvensi ini dengan Pihak Negara lain, negara itu bisa menyerahkan, melalui Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, Permintaan untuk Klarifikasi masalah itu kepada Pihak Negara itu. Permintaan itu harus disertai dengan semua informasi yang tepat. Setiap Pihak Negara yang menerima Permintaan untuk Klarifikasi harus memberikan, melalui Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, dalam waktu 28 hari kepada Pihak Negara yang meminta semua informasi yang akan membantu dalam mengklarifikasi masalah ini.
3. Jika Pihak Negara yang meminta tidak menerima respon melalui Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa dalam periode waktu itu, atau menganggap respon untuk Permintaan Klarifikasi itu tidak memuaskan, negara itu bisa menyerahkan masalah itu melalui Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Rapat Para Pihak Negara selanjutnya. Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa harus mengirimkan penyerahan itu, yang disertai dengan semua informasi yang tepat sehubungan dengan Permintaan Klarifikasi, kepada semua Pihak Negara. Semua informasi tersebut harus dipresentasikan kepada Pihak Negara yang diminta yang berhak untuk merespon.
4. Sebelum pelaksanaan suatu rapat Para Pihak Negara, suatu Pihak Negara yang berkepentingan bisa meminta Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa untuk melaksanakan jabatannya dalam memfasilitasi klarifikasi yang diminta.
5. Pihak Negara yang meminta bisa mengajukan melalui Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa pelaksanaan suatu Rapat Khusus Para Pihak Negara untuk mempertimbangkan masalah itu. Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa karena itu harus mengkomunikasikan proposal ini dan semua informasi yang diserahkan oleh Para Pihak Negara yang berkepentingan, kepada semua Pihak

Negara dengan permintaan agar mereka menunjukkan apakah mereka setuju dengan suatu Rapat Khusus Para Pihak Negara, untuk tujuan membahas masalah itu. Dalam hal dalam waktu 14 hari dari tanggal komunikasi tersebut, sedikitnya sepertiga dari Para Pihak Negara sepakat untuk Rapat Khusus tersebut, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa harus melaksanakan Rapat Khusus Para Pihak Negara ini dalam waktu 14 hari lebih lanjut. Kuorum/jumlah minimal untuk Rapat ini terdiri dari mayoritas Para Pihak Negara.

6. Rapat Para Pihak Negara atau Rapat Khusus Para Pihak Negara, sebagaimana yang mungkin terjadi, harus lebih dulu menentukan apakah harus mempertimbangkan masalah ini lebih lanjut, dengan memperhitungkan semua informasi yang diserahkan oleh Para Pihak Negara yang berkepentingan. Rapat Para Pihak Negara atau Rapat Khusus Para Pihak Negara harus memberikan segala usaha untuk mencapai keputusan dengan consensus. Jika walaupun dengan adanya semua usaha untuk tujuan itu tidak ada kesepakatan telah dicapai, rapat harus mengambil keputusan dengan mayoritas Para Pihak Negara yang hadir dan memberikan suara.
7. Semua Pihak Negara harus sepenuhnya bekerjasama dalam Rapat Para Pihak Negara atau Rapat Khusus Para Pihak Negara dalam pemenuhan pandangannya tentang masalah itu, termasuk suatu misi pencarian-fakta yang dikuasakan sesuai dengan ayat 8.
8. Jika klarifikasi lebih lanjut diminta, Rapat Para Pihak Negara atau Rapat Khusus Para Pihak Negara harus menguasai misi pencarian-fakta dan memutuskan atas mandatnya dengan mayoritas Para Pihak Negara yang hadir dan memberikan suara. Kapan saja Pihak Negara yang diminta bisa mengundang misi pencarian-fakta untuk teritorinya. Misi tersebut harus terjadi tanpa keputusan dengan Rapat Para Pihak Negara atau Rapat Khusus Para Pihak Negara dalam menguasai misi tersebut. Misi itu, yang terdiri dari paling banyak 9 ahli, ditunjuk dan disetujui sesuai dengan ayat 9 dan 10, bisa mengumpulkan informasi tambahan tentang tempat atau di tempat-tempat

lain secara langsung sehubungan dengan masalah kepatuhan yang dituduhkan, yang berada di bawah wilayah hukum atau kontrol Pihak Negara yang diminta.

9. Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa harus mempersiapkan dan memutakhirkan daftar nama, kewarganegaraan, dan data relevan lain tentang para ahli yang berkualifikasi yang diberikan oleh Para Pihak Negara dan mengkomunikasikannya kepada semua Pihak Negara. Seorang ahli yang dimasukkan dalam daftar ini harus dianggap sebagai ditunjuk untuk semua misi pencarian-fakta kecuali suatu Pihak Negara mendeklarasikan tidak menerimanya secara tertulis. Dalam hal tidak terima, ahli itu harus tidak berpartisipasi dalam misi-misi pencarian-fakta di teritori atau suatu tempat lain yang berada di bawah wilayah hukum atau kontrol Pihak Negara yang menolak, jika tidak menerimanya dideklarasikan sebelum penunjukkan ahli untuk misi tersebut.
10. Saat menerima permintaan dari Rapat Para Pihak Negara atau Rapat Khusus Para Pihak Negara, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, setelah berkonsultasi dengan Pihak Negara yang diminta, menunjuk pada anggota misi, termasuk pemimpinnya. Warganegara dari Para Pihak Negara yang meminta misi pencarian-fakta atau yang secara langsung terkena-dampaknya harus tidak ditunjuk untuk misi tersebut. Para anggota misi pencarian-fakta harus mendapatkan hak istimewa dan kekebalan dari Perserikatan Bangsa-bangsa, yang diangkat pada tanggal 13 Februari 1946.
11. Dengan pemberitahuan sedikitnya 72 jam, para anggota misi pencarian-fakta harus tiba di teritori Pihak Negara yang diminta sedini mungkin. Pihak Negara yang diminta harus melakukan tindakan administratif yang diperlukan untuk menerima, mengangkut, dan menampung misi itu, dan harus bertanggungjawab dalam memastikan keamanan misi ini sampai batasan maksimum yang mungkin sementara mereka berada di teritori yang berada di bawah kontrolnya.
12. Tanpa praduga terhadap kedaulatan Pihak Negara yang diminta, misi pencarian-fakta bisa membawa ke dalam teritori Pihak Negara yang diminta perlengkapan yang

diperlukan yang harus digunakan secara eksklusif untuk mengumpulkan informasi tentang masalah kepatuhan yang dituduhkan. Sebelum kedatangannya, misi ini akan memberitahu Pihak Negara yang diminta tentang peralatan yang ia maksudkan untuk gunakan dalam perjalanan misi pencarian-faktanya.

13. Pihak Negara yang diminta harus memberikan segala usaha untuk memastikan misi pencarian-fakta itu diberi peluang untuk berbicara dengan semua orang yang relevan yang mungkin bisa memberikan informasi sehubungan dengan masalah kepatuhan yang dituduhkan.
14. Pihak Negara yang diminta harus memberikan akses untuk misi pencarian-fakta ke semua area dan pemasangan yang berada di bawah kontrolnya di mana fakta-fakta yang relevan untuk masalah kepatuhan bisa diharapkan dikumpulkan. Hal ini sesuai dengan perjanjian di mana Pihak Negara yang diminta anggap perlu untuk:
 - a) Perlindungan peralatan, informasi, dan area-area yang peka;
 - b) Perlindungan suatu kewajiban konstitusional Pihak Negara yang diminta dalam hal hak milik, pencarian dan penahanan, atau hak-hak konstitusional lain; atau
 - c) Perlindungan dan keselamatan fisik dari para anggota misi pencarian-fakta.

Dalam hal Pihak Negara yang diminta memberikan perjanjian itu, negara itu harus memberikan usaha yang wajar untuk menunjukkan melalui cara alternatif kepatuhannya terhadap Konvensi ini.

15. Misi pencarian-fakta bisa tetap di teritori Pihak Negara yang berkepentingan selama tidak lebih dari 14 hari, dan di suatu tempat tertentu tidak lebih dari 7 hari, kecuali keadaan lain disepakati.
16. Semua informasi yang diberikan secara rahasia dan tidak berhubungan dengan masalah pokok misi pencarian-fakta harus diperlakukan atas dasar kerahasiaan.
17. Misi pencarian-fakta harus melapor, melalui Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, dalam Rapat Para Pihak Negara atau Rapat Khusus Para Pihak Negara hasil dari penemuannya.

18. Rapat Para Pihak Negara atau Rapat Khusus Para Pihak Negara harus mempertimbangkan semua informasi yang relevan, termasuk laporan yang diserahkan oleh misi pencarian-fakta, dan bisa meminta Pihak Negara yang diminta untuk mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah kepatuhan dalam periode waktu yang ditentukan. Pihak Negara yang diminta harus melaporkan semua tindakan yang diambil sebagai respon terhadap permintaan ini.
19. Rapat Para Pihak Negara atau Rapat Khusus Para Pihak Negara bisa menyatakan kepada Para Pihak Negara yang berkepentingan jalan dan cara untuk lebih lanjut menjelaskan atau menetapkan masalah yang berada di bawah pertimbangan, termasuk memulai prosedur yang tepat sesuai dengan hukum internasional. Dalam keadaan di mana masalah yang ada ditentukan karena keadaan yang berada di luar kontrol Pihak Negara yang diminta, Rapat Para Pihak Negara itu bisa merekomendasikan tindakan yang tepat, termasuk penggunaan tindakan kerjasama yang dirujuk dalam Pasal 6.
20. Rapat Para Pihak Negara atau Rapat Khusus Para Pihak Negara harus memberikan semua usaha untuk mencapai keputusannya yang dirujuk dalam ayat 18 dan 19 dengan consensus, yang dalam keadaan lain oleh dua-pertiga dari mayoritas Para Pihak Negara yang hadir dan memberikan suara.

Pasal 9

Tindakan pelaksanaan nasional

Masing-masing Pihak Negara harus mengambil semua tindakan legal, administratif dan lainnya yang tepat, termasuk penerapan sanksi hukum, untuk menghambat dan menekan suatu aktivitas yang dilarang untuk Pihak Negara yang berada di bawah Konvensi ini yang diambil oleh orang-orang atau di teritori yang berada di bawah wilayah hukum atau kontrolnya.

Pasal 10

Penyelesaian perselisihan

1. Para Pihak Negara harus berkonsultasi dan bekerjasama dengan satu sama lain dalam menyelesaikan suatu perselisihan yang mungkin timbul dalam hal pelaksanaan atau penerjemahan Konvensi ini. Masing-masing Pihak Negara bisa membawa perselisihan tersebut ke hadapan Rapat Para Pihak Negara.
2. Rapat Para Pihak Negara bisa memberikan kontribusi untuk penyelesaian perselisihan dengan cara apapun yang dianggap tepat, termasuk pemberian jabatan yang baik, yang memanggil para pihak Negara yang berselisih untuk memulai prosedur penyelesaian pilihan mereka dan merekomendasikan batas-waktu untuk suatu prosedur yang disepakati.
3. Pasal ini tanpa praduga terhadap peraturan Konvensi ini tentang fasilitasi dan klarifikasi kepatuhan itu.

Pasal 11

Rapat-rapat Para Pihak Negara

1. Para Pihak Negara harus bertemu secara teratur agar dapat membahas suatu masalah dalam hal penerapan atau pelaksanaan Konvensi ini, termasuk:
 - a) Operasi dan status Konvensi ini;
 - b) Permasalahan yang timbul dari laporan-laporan yang diserahkan di bawah peraturan Konvensi ini.
 - c) Kerjasama dan bantuan internasional sesuai dengan Pasal 6;
 - d) Pengembangan teknologi untuk membebaskan ranjau anti-personil;
 - e) Penyerahan Para Pihak Negara yang berada di bawah Pasal 8; dan
 - f) Pembahasan yang berhubungan dengan penyerahan Para Pihak Negara sebagaimana yang diberikan untuk itu dalam Pasal 5.
2. Rapat Pertama dari Para Pihak Negara harus dilaksanakan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa dalam waktu satu tahun setelah berlakunya Konvensi ini. Rapat-rapat selanjutnya harus dilakukan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa setiap tahun sampai Konferensi Tinjau Ulang pertama.

3. Di bawah persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 8, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa harus melakukan Rapat Khusus Para Pihak.
4. Negara-negara yang bukan para pihak terhadap Konvensi ini, juga Perserikatan Bangsa-bangsa, organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga relevan lain, organisasi-organisasi regional, Komite Internasional Palang Merah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang relevan bisa diundang untuk menghadiri semua rapat ini sebagai para pengamat sesuai dengan Peraturan Prosedur yang disepakati.

Pasal 12

Konferensi Tinjau Ulang

1. Konferensi Tinjau Ulang harus dilakukan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa lima tahun setelah berlakunya Konvensi ini. Konferensi-konferensi Tinjau Ulang selanjutnya harus dilakukan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa jika diminta demikian oleh satu atau lebih Pihak Negara, dengan ketentuan interval waktu antara Konferensi-konferensi Tinjau Ulang itu dalam keadaan itu harus kurang dari lima tahun. Semua Pihak Negara terhadap Konvensi ini harus diundang untuk setiap Konferensi Tinjau Ulang.
2. Tujuan Konferensi Tinjau Ulang itu harus:
 - a) Untuk meninjau ulang operasi dan status Konvensi ini;
 - b) Mempertimbangkan keharusan dan interval waktu di antara Rapat-rapat lebih lanjut dari Para Pihak Negara yang dirujuk dalam ayat 2 Pasal 11;
 - c) Dalam mengambil keputusan untuk penyerahan Para Pihak Negara sebagaimana yang diberikan untuk itu dalam Pasal 5; dan
 - d) Mengangkat, bila perlu, dalam kesimpulan laporan akhirnya sehubungan dengan pelaksanaan Konvensi ini.
3. Negara-negara bukan pihak Konvensi ini, juga Perserikatan Bangsa-bangsa, organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga internasional relevan lain, organisasi-organisasi regional, Komite Internasional Palang Merah dan lembaga-lembaga

swadaya masyarakat relevan bisa diundang untuk menghadiri setiap Konferensi Tinjau Ulang sebagai para pengamat sesuai dengan Peraturan Prosedur yang disepakati.

Pasal 13

Amendemen

1. Kapan saja setelah berlakunya Konvensi ini suatu Pihak Negara bisa mengajukan amendemen terhadap Konvensi ini. Suatu proposal untuk amendemen harus dikomunikasikan dengan Pihak Penyimpanan, yang akan mengedarkannya kepada semua Pihak Negara dan mengerjakan pandangan mereka tentang apakah suatu Konferensi Amendemen harus dilakukan untuk membahas proposal itu. Jika mayoritas Pihak Negara memberitahu Pihak Penyimpanan tidak lebih lambat dari 30 hari setelah peredarannya bahwa mereka mendukung pembahasan lebih lanjut proposal itu, Pihak Penyimpanan harus melakukan Konferensi Amendemen untuk mana semua Pihak Negara harus diundang.
2. Negara-negara yang bukan pihak Konvensi ini, juga Perserikatan Bangsa-bangsa, organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga internasional relevan lain, organisasi regional, Komite Internasional Palang Merah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang relevan bisa diundang untuk menghadiri setiap Konferensi Amendemen sebagai para pengamat sesuai dengan Peraturan Prosedur yang disepakati.
3. Konferensi Amendemen harus langsung diadakan setelah Rapat Para Pihak Negara atau Konferensi Tinjau Ulang kecuali mayoritas Pihak Negara meminta rapat itu diadakan lebih awal.
4. Suatu amendemen untuk Konvensi ini harus diangkat oleh mayoritas dua-pertiga dari Para Pihak Negara yang hadir dan memberikan suara pada Konferensi Amendemen. Pihak Penyimpanan harus mengkomunikasikan suatu amendemen yang diangkat demikian kepada Para Pihak Negara.
5. Suatu amendemen terhadap Konvensi ini harus berlaku bagi semua Pihak Negara terhadap Konvensi ini yang telah menerimanya, saat penyimpanan oleh Pihak

Penyimpan instrumen penerimaan oleh mayoritas Pihak Negara. Setelah itu amendemen ini akan berlaku untuk seluruh Pihak Negara pada tanggal penyimpanan instrumen penerimaannya.

Pasal 14

Biaya

1. Biaya Rapat Para Pihak Negara, Rapat Khusus Para Pihak Negara, Konferensi Tinjau Ulang dan Konferensi Amendemen harus ditanggung oleh Para Pihak Negara dan Negara-negara bukan pihak Konvensi ini yang berpartisipasi di dalamnya, sesuai dengan skala penilaian Perserikatan Bangsa-bangsa yang disesuaikan dengan tepat.
2. Biaya yang dikenakan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa di bawah Pasal 7 dan 8 dan biaya misi pencarian-fakta harus ditanggung oleh Para Pihak Negara sesuai dengan skala penilaian Perserikatan Bangsa-bangsa yang disesuaikan dengan tepat.

Pasal 15

Penandatanganan

Konvensi ini, yang dilaksanakan di Oslo, Norwegia, pada tanggal 18 September 1997, terbuka untuk penandatanganan di Ottawa, Kanada, oleh semua Negara dari tanggal 3 Desember 1997 sampai 4 Desember 1997, dan di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-bangsa di New York dari tanggal 5 Desember 1997 sampai berlakunya.

Pasal 16

Pengesahan, penerimaan, persetujuan, atau akses

1. Konvensi ini tunduk kepada pengesahan, penerimaan atau persetujuan dari Para Penandatanganan.
2. Konvensi ini terbuka untuk akses oleh suatu Negara yang belum menandatangani Konvensi ini.
3. Instrumen-instrumen pengesahan, penerimaan, persetujuan, atau akses akan disimpan oleh Pihak Penyimpan.

Pasal 17

Pemberlakuan

1. Konvensi ini berlaku pada tanggal satu bulan enam setelah bulan mana instrumen ke-40 untuk pengesahan, penerimaan, persetujuan atau akses telah disimpan.
2. Untuk suatu Negara yang menyimpan instrumen pengesahan, penerimaan, persetujuan atau aksesnya setelah tanggal penyimpanan instrumen ke-40 pengesahan, penerimaan, persetujuan, atau akses, Konvensi ini berlaku pada hari pertama bulan keenam setelah tanggal di mana Negara itu telah menyerahkan instrumen pengesahan, penerimaan, persetujuan, atau aksesnya.

Pasal 18

Penerapan peraturan

Suatu negara pada waktu pengesahan, penerimaan, persetujuan, atau akses mendeklarasikan bahwa ia akan menerapkan peraturan ayat 1 Pasal 1 Konvensi ini dengan menunda pemberlakuannya.

Pasal 19

Penyediaan

Pasal-pasal Konvensi ini tidak bisa disediakan.

Pasal 20

Durasi dan penarikan diri

1. Konvensi ini berlaku selama durasi tidak terbatas.
2. Masing-masing Pihak Negara, dalam melaksanakan kedaulatan nasionalnya, berhak untuk menarik diri dari Konvensi ini. Negara itu harus memberikan pemberitahuan penarikan diri kepada semua Pihak Negara lain, kepada Pihak Penyimpan dan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Instrumen penarikan diri ini termasuk penjelasan lengkap alasan-alasan yang memotivasi penarikan diri ini.
3. Penarikan diri ini hanya akan berlaku enam bulan setelah penerimaan instrumen penarikan diri oleh Pihak Penyimpan. Akan tetapi, jika pada saat kedaluwarsa periode enam-bulan itu, penarikan diri Pihak Negara itu terlibat dalam konflik bersenjata, penarikan diri itu harus tidak berlaku sebelum akhir konflik bersenjata itu.

4. Penarikan diri Pihak Negara dari Konvensi ini tidak akan dalam hal apapun mempengaruhi tugas Negara-negara untuk terus memenuhi kewajiban yang diambil di bawah peraturan hukum internasional yang relevan.

Pasal 21

Pihak Penyimpanan

Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa dengan ini ditunjuk sebagai Pihak Penyimpan Konvensi ini.

Pasal 22

Teks-teks otentik

Naskah asli Konvensi ini, di mana teks-teks Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol yang sama otentiknya, harus disimpan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.

Catatan

- 1 Sejak tanggal 1 Juli 2006.
- 2 ICBL secara umum menggunakan judul singkat, Perjanjian Pelarangan Ranjau; judul singkat lainnya yang digunakan termasuk: Perjanjian Ottawa, Konvensi Ottawa, Konvensi Pelarangan Ranjau Anti-personil, dan Konvensi Pelarangan Ranjau.
- 3 Dari 84, 65 merupakan penandatanganan yang mengesahkan dan 19 bukan-penandatanganan yang setuju.
- 4 Tujuh belas negara yang abstain dari memberikan suara untuk Keputusan UNGA 60/80 pada bulan Desember 2005; Kuba, Mesir, India, Iran, Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Libia, Myanmar, Pakistan, Palau, Rusia, Korea Selatan, Siria, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Vietnam.
- 5 Pemberian suara dihasilkan pada tahun keputusan UNGA tahunan yang menyerukan universalisasi dan pelaksanaan lengkap Perjanjian Pelarangan Ranjau: 1997 (Keputusan 52/38A) – 142 mendukung, tidak ada yang menentang, 18 abstain; 1998 (Keputusan 53/77N) – 147 mendukung, satu yang menentang, 20 abstain; 2000 (Keputusan 55/33V) – 143 mendukung, tidak ada yang menentang; 22 abstain; 2001 (Keputusan 56/24M) – 138 mendukung, tidak ada yang menentang, 19 abstain; 2002 (Keputusan 57/74) – 143 mendukung, tidak ada yang menentang, 23 abstain; 2003 (Keputusan 58/53) – 153 mendukung, tidak ada yang menentang, 23 abstain; dan 2005 (Keputusan 59/84) – 157 mendukung, tidak ada yang menentang, 22 abstain.
- 6 Lima negara bukan pihak yang absen adalah Lebanon (yang memberikan suara mendukung dalam Komite Pertama), Mongolia (yang memberikan suara mendukung dari setiap keputusan UNGA pro-Perjanjian Pelarangan Ranjau tahunan sebelumnya sejak tahun 1998), dan Laos, Korea Utara, dan Saudi Arabia (semua absen dari setiap suara sebelumnya).
- 7 Seruan Geneva adalah LSM berbasis-di-Swiss. Di bawah Akta Komitmen, penandatanganan sepakat untuk melarang penggunaan, produksi, penumpukan, dan

- pengiriman ranjau anti-personil, dan mengusahakan dan bekerjasama dalam pekerjaan ranjau.
- 8 Nama lengkapnya adalah Konvensi Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Persenjataan Konvensional Tertentu Yang Bisa Dianggap Melukai Secara Berlebihan atau Berdampak Tampak Pandang Bulu.
 - 9 Pada sebuah surat bulan Juni 2006 kepada Pengawasan Ranjau Darat, India memastikan bahwa negara itu “belum mengusahakan suatu penundaan terhadap peraturan manapun” dari Protokol II Yang Diamendemen. Telah ada kebingungan tentang poin ini karena India mendapatkan kesempatan yang dirujuk untuk memodifikasi ranjau tidak-terdeteksi-nya “jauh sebelum periode yang diatur” oleh Protokol II Yang Diamendemen.
 - 10 Sistem ranjau anti-personil yang dikirimkan-dari-jauh adalah tumpukan-stok berdasarkan Protokol II Yang Diamendemen CCW Para Pihak Negara Belarus, Cina, Yunani, Israel, Pakistan, Korea Selatan, Turki, Yunani, Israel, Pakistan, Rusia, Korea Selatan, Turki, Ukraine, dan Amerika Serikat. India telah menyelidiki perkembangan sistem tersebut. Perjanjian Pelarangan Ranjau mengharuskan Belarus, Yunani, dan Turki untuk menghancurkan ranjau anti-personil yang dikirim-dari-jauh pada tanggal 1 Maret 2008, dan Ukraine pada tanggal 1 Juni 2010. Perjanjian Pelarangan Ranjau Para Pihak Negara Bulgaria, Italia, Jepang, Belanda, Turkmenistan dan Kerajaan Inggris telah menghancurkan tumpukan-stok ranjau anti-personil yang dikirim-dari-jauh mereka.
 - 11 Sejak publikasi *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005*, 10 negara mengesahkan Protokol V dalam urutan berikut ini: Bulgaria, Norwegia, Holy See, El Salvador, Slovakia, Liechtenstein, Swiss, Albania, Tajikistan, dan yang terakhir pada tanggal 6 Juni 2006, Republik Czech. Swedia yang pertama mengesahkan Protokol V, pada bulan Juni 2004, yang diikuti oleh Lithuania, Sierra Leone, Kroasia, Jerman, Finlandia, Ukraine, India, Luxembourg, Belanda, Denmark, Nikaragua, dan Liberia.

- 12 Lihat edisi-edisi lalu *Laporan Pengawasan Ranjau Darat* untuk rinciannya. Angola, Ekuador, dan Ethiopia telah mengakui menggunakan ranjau anti-personil sebagai penandatanganan. Pengawasan Ranjau Darat telah mengutip tuduhan yang bisa dipercaya tentang penggunaannya sementara menjadi penandatanganan oleh Burundi, Rwanda, Sudan, dan Uganda. Para Pihak Negara lain saat ini yang menggunakan ranjau anti-personil sejak awal tahun 1990an sebagai bukan-penandatanganan termasuk Afghanistan, Bosnia dan Herzegovina, Kolombia, DR Kongo, Kroasia, Eritrea, Peru, Serbia dan Montenegro, Turki, Venezuela, dan Zimbabwe.
- 13 FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Kolombia; ELN: Ejército de Liberación Nacional; AUC: Autodefensas Unidas de Kolombia. Lihat laporan tentang Kolombia dalam edisi Pengawasan Ranjau Darat ini.
- 14 Ada 51 produsen saat ini dan di masa lalu yang dipastikan. Tidak dimasukkan dalam total itu adalah lima Pihak Negara yang telah mengutip sejumlah sumber sebagai para produsen di masa lalu, tapi menyangkalnya: Kroasia, Nikaragua, Filipina, Thailand, dan Venezuela. Sebagai tambahan, Jordan mendeklarasikan memiliki sejumlah kecil ranjau yang berasal dari Siria pada tahun 2000. Tidak jelas apakah ini mewakili hasil produksi, ekspor, atau penangkapan.
- 15 Tiga puluh tiga Pihak Negara Perjanjian Pelarangan Ranjau yang suatu ketika memproduksi ranjau anti-personil termasuk: Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Kanada, Chile, Kolombia, Republik Czech, Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Peru, Portugal, Rumania, Serbia dan Montenegro, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Uganda, Kerajaan Inggris, dan Zimbabwe.
- 16 Sembilan Pihak Negara belum secara resmi mendeklarasikan penyerahan akhir kemampuan produksi dalam laporan Pasal 7: Australia, Austria, Belgia, Jerman, Yunani, Belanda, Norwegia, Serbia dan Montenegro, dan Turki. Bagi banyak negara ini produksi ranjau anti-personil berhenti sebelum berlakunya perjanjian ini.

- 17 Sejak memulai pelaporan pada tahun 1999, Pengawasan Ranjau Darat juga menghilangkan Turki dan FR Yugoslavia (yang menjadi Serbia dan Montenegro) dari daftar para produsennya. Nepal ditambahkan ke dalam daftar pada tahun 2003 setelah penerimaan para pejabat militer bahwa produksi terjadi di pabrik-pabrik negara itu.
- 18 Sejak tanggal 1 Juli 2006, negara-negara berikut telah menyelesaikan penghancuran tumpukan ranjau anti-personil mereka: Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgia, Bosnia & Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Kamboja, Kamerun, Kanada, Chad, Chile, Kolombia, DR Kongo, Rep. Kongo, Kroasia, Republik Kroasia, Denmark, Djibouti, Ekuador, El Salvador, Perancis, Gabon, Jerman, Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Hongaria, Italia, Jepang, Jordan, Kenya, Lithuania, Luxembourg, FYR Makedonia, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Moldova, Mozambik, Namibia, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Nigeria, Norwegia, Peru, Filipina, Portugal, Romania, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, Kerajaan Inggris, Uruguay, Yemen, Venezuela, Zambia, dan Zimbabwe.
- 19 Dalam hal Burundi, Yunani, dan Sudan, penghancuran fisik ranjau sebenarnya belum dimulai sejak pertengahan tahun 2006. Pengawasan Ranjau Darat menganggap negara-negara mengalami “perkembangan” jika mereka telah melaporkan mereka merumuskan perencanaan penghancuran, mengusahakan bantuan keuangan internasional, melakukan inventaris nasional, atau membangun fasilitas penghancuran.
- 20 Para Pihak Negara berikut telah mendeklarasikan tidak memiliki tumpukan ranjau anti-personil: Andorra, Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Republik Afrika Tengah, Comoros, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dominica, Republik Dominika, Eritrea, Estonia, Fiji, Ghana, Grenada, Guatemala, Holy See, Iceland, Irlandia, Jamaica, Kiribati, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Madagaskar, Malawi, Maldives, Malta, Meksiko, Monako, Nauru, Niger, Niue, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Qatar, Rwanda, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadines, Samoa, San Marino, Senegal, Seychelles, Kepulauan Solomon,

Swaziland, Timor Leste, Togo, dan Trinidad & Tobago. Sejumlah negara ini tampaknya memiliki tumpukan di masa lalu, tapi menggunakan atau menghancurkannya sebelum bergabung dengan Perjanjian Pelarangan Ranjau, termasuk Eritrea, Rwanda, dan Senegal.

- 21 Dari 71 yang memilih tidak menerima ranjau anti-personil, 20 negara pada suatu ketika memiliki tumpukan.
- 22 Bhutan, Brunei, Cape Verde, Kepulauan Cook, Ethiopia, Equatorial Guinea, Guyana, Haiti, São Tomé e Príncipe, Ukraine dan Vanuatu belum menunjukkan apakah mereka bermaksud menerima ranjau anti-personil; sebagian besar belum menyerahkan laporan Pasal 7. Dari sebelas ini, hanya Ethiopia, Guyana dan Ukraine dianggap memiliki ranjau.
- 23 Tiga puluh delapan Pihak Negara menerima antara 1,000 dan 5,000 ranjau anti-personil: Afghanistan, Angola, Argentina, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Kanada, Kamerun, Chile, Cyprus, Republik Czech, Djibouti, Ekuador, Perancis, Jerman, Jordan, Kenya, Latvia, Mali, Mozambik, Namibia, Belanda, Nikaragua, Peru, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Tanzania, Thailand, Uganda, Kerajaan Inggris, Venezuela, Yemen, dan Zambia.
- 24 Tujuh belas Pihak Negara yang menerima kurang dari 1,000 ranjau anti-personil: Kolombia, Republik Kongo, Denmark, El Salvador, Guinea-Bissau, Honduras, Irlandia, Italia, Luxembourg, Mauritania, Rwanda, Sierra Leone, Suriname, Tajikistan, Togo, Uruguay, dan Zimbabwe.
- 25 14 Pihak Negara berikut dilaporkan memakai ranjau anti-personil yang diterima pada tahun 2005: Belgia (356), Kanada (50), Chile (29), Kroasia (164), Jerman (41), Honduras (11), Irlandia (8), Jepang (1,596), Mozambik (151), Nikaragua (19), Slovenia (1), Swedia (396), Tajikistan (30), dan Turki (850).
- 26 11 Pihak Negara yang menggunakan Formulir D yang diperluas adalah: Argentina, Kanada, Chile, Perancis, Jerman, Jepang, Moldova, Nikaragua, Romania, Tunisia, dan Turki.

- 27 55 Pihak Negara yang tidak menyerahkan pemutakhiran adalah: Andorra, Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Benin, Botswana, Brazil, Kamerun, Cape Verde, Republik Afrika Tengah, Comoros, Costa Rica, Djibouti, Republik Dominika, El Salvador, Equatorial Guinea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Holy See, Jamaika, Kiribati, Lesotho, Liberia, Luxembourg, Malawi, Mali, Nauru, Niger, Niue, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Rwanda, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & the Grenadines, Samoa, San Marino, São Tomé e Príncipe, Seychelles, Sierra Leone, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Timor-Leste, Togo, Trinidad & Tobago, Uruguay. Jumlah ini tidak termasuk enam Pihak Negara dengan batas waktu tertunda: Bhutan, Brunei, Kepulauan Cook, Haiti, Ukraine, dan Vanuatu.
- 28 Total 49 Pihak Negara telah mengundang legislasi pelaksanaan: Albania, Australia, Austria, Belgia, Belize, Bosnia, Kanada, Kolombia, Costa Rica, Kroasia, Republik Czech, Djibouti, El Salvador, Perancis, Jerman, Guatemala, Honduras, Hongaria, Iceland, Irlandia, Italia, Jepang, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Mali, Malta, Mauritius, Monako, Selandia Baru, Nikaragua, Niger, Norwegia, Serbia dan Montenegro, St Vincent dan Grenadines, Seychelles, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Trinidad dan Tobago, Kerajaan Inggris, Yemen, Zambia, dan Zimbabwe.
- 29 Total 23 Pihak Negara dalam proses mengundang legislasi: Afghanistan, Bangladesh, Benin, Bolivia, Chad, Chile, DR Kongo, Gabon, Guinea, Jamaika, Kenya, Malawi, Mauritania, Mozambik, Namibia, Nigeria, Peru, Filipina, Rwanda, Suriname, Swaziland, Tanzania, dan Uganda.
- 30 Total 40 Pihak Negara yang telah menganggap hukum yang ada memadai atau tidak menganggap legislasi baru itu perlu: Algeria, Andorra, Antigua & Barbuda, Argentina, Belarus, Bulgaria, Republik Afrika Tengah, Chile, Cyprus, Denmark, Rep. Dominika, Estonia, Yunani, Guinea-Bissau, Holy See, Jordan, Kiribati, Lesotho, FYR Makedonia, Madagaskar, Meksiko, Moldova, Belanda, Panama, Papua New Guinea, Paraguay,

- Portugal, Qatar, Romania, Samoa, San Marino, Senegal, Slovakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Tajikistan, Thailand, Tunisia, Turki dan Venezuela.
- 31 Negara-negara yang tanpa perkembangan ke arah tindakan pelaksanaan nasional termasuk: Angola, Bahamas, Barbados, Bhutan, Botswana, Brunei, Burundi, Kamerun, Republik Kongo, Cape Verde, Comoros, Kepulauan Cook, Cote d'Ivoire, Dominika, Ekuador, Ethiopia, Equatorial Guinea, Eritrea, Fiji, Gambia, Ghana, Grenada, Guyana, Haiti, Latvia, Liberia, Maldives, Nauru, Niue, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone, Sudan, Timor Leste, Togo, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, dan Vanuatu.
- 32 www.icrc.org/Web/Eng/siteeng.nsf/html/57JR2C?OpenDocument.
- 33 Albania, Australia, Belgia, Bosnia & Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Cyprus, Rep. Czech, Denmark, Estonia, Perancis, Jerman, Hongaria, Italia, Jepang, Kenya, Luxembourg, FYR Makedonia, Malaysia, Meksiko, Namibia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Qatar, Senegal, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Tajikistan, Tanzania, Turki, Kerajaan Inggris, Uruguay, Yemen, Zambia, dan Zimbabwe.
- 34 Australia, Rep. Czech, Selandia Baru, Swedia, Kerajaan Inggris, Zambia, dan Zimbabwe.
- 35 Albania, Austria, Bosnia & Herzegovina, Brazil, Kamerun, Kroasia, Cyprus, Rep. Czech, Denmark, Estonia, Perancis, Guinea, Hongaria, Italia, FYR Makedonia, Malaysia, Meksiko, Namibia, Selandia Baru, Portugal, Samoa, Senegal, Slovakia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Kerajaan Inggris, Yemen, dan Zambia.
- 36 Para Pihak Negara yang mengakui memiliki ranjau tipe Claymore atau OZM-72 termasuk: Australia, Austria, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Brunei, Kanada, Kolombia, Kroasia, Denmark, Ekuador, Estonia, Honduras, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Norwegia, Papua New Guinea, Serbia & Montenegro, Slovenia, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Thailand, Turki, Kerajaan Inggris, dan Zimbabwe.

- 37 Para Pihak Negara yang mendeklarasikan tidak memiliki atau telah menghancurkan ranjau tipe-Claymore atau OZM-72 yang dimasukkan sebagai bagian dari program penghancuran tumpukan mereka termasuk: Albania, Bangladesh, Belgia, Bolivia, Bulgaria, Kamboja, Chad, Cyprus, Rep. Czech, El Salvador, Perancis, Jerman, Italia, Jordan, Kenya, Luxembourg, FYR Makedonia, Moldova, Mozambique, Peru, Filipina, Portugal, Qatar, Romania, Slovakia, Tajikistan, Tanzania, Turkmenistan, Uruguay, dan Yemen.
- 38 Pasal 7.1 negara-negara Perjanjian Pelarangan Ranjau, "Setiap Pihak Negara harus melapor kepada Sekretaris-Jenderal... tentang: g) Tipe dan jumlah dari semua ranjau anti-personil yang dihancurkan setelah berlakunya Konvensi untuk Pihak Negara itu, dengan memasukkan pemecahan jumlah setiap tipe ranjau anti-personil yang dihancurkan, masing-masing sesuai dengan Pasal 4 dan 5, bersama dengan, jika mungkin, jumlah setiap tipe ranjau anti-personil dalam hal penghancuran sesuai dengan Pasal 4."
- 39 DI bawah Protokol V Konvensi Persenjataan Konvensional, sisa bahan peledak perang (*ERW/explosive remnants of war*) didefinisikan sebagai persenjataan perang yang tidak diledakkan (*UXO/unexploded ordnance*) dan persenjataan perang yang ditinggalkan (*AXO/abandoned explosive ordnance*). Ranjau secara eksplisit dikeluarkan dari definisi ini.
- 40 Tinjauan ini meringkas informasi rinci dalam laporan negara dalam edisi Pengawasan Ranjau Darat ini. Kecuali dinyatakan lain, lihat laporan negara yang relevan untuk sumber informasi.
- 41 Sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Standar Pekerjaan Ranjau Internasional (*IMAS/International Mine Action Standards*), area yang dihapus ranjaunya termasuk yang dilepas oleh survey juga melalui pembebasan area ranjau dan perang.
- 42 Lebih lanjut, angka 740 kilometer kuadrat tidak sepenuhnya mencerminkan batasan penghapusan ranjau seperti Iran, salah satu dari program-program penghapusan

- ranjau terbesar, yang menolak memberikan statistik untuk tahun 2005, seperti yang dilakukan negara-negara lain.
- 43 “Penghapusan ranjau” merujuk secara bersama aktivitas-aktivitas survey, penilaian, pengurangan area, penandaan dan pemagaran dan semua aktivitas lain yang merupakan persiapan “pembebasan,” juga survey pasca-pembebasan. “Pembebasan” ranjau merujuk kepada penghancuran ranjau *in situ*, atau pemindahannya dari tanah dan penghancuran selanjutnya di tempat lain.
 - 44 Total ini mengkombinasikan UXO dan AXO tapi tidak memasukkan, di mana diketahui, bagian-bagian amunisi persenjataan kecil, yang akan meningkatkan total itu secara signifikan.
 - 45 Semua angka yang diberikan dalam tabel telah dipisahkan berdasarkan bukti dan input yang ada dari para operator. Semua angka yang dipresentasikan ini adalah yang diberikan oleh para operator di 9 mana mereka berbeda dari pusat pekerjaan ranjau dalam hal Ethiopia, semua angka ini adalah yang diberikan oleh Pusat Pekerjaan Ranjau Ethiopia.
 - 46 Akan tetapi, di Honduras pada bulan November 2005, sebuah ranjau dilaporkan telah membunuh seorang petani di kotamadya El Paraíso, di area pada sebelah perbatasan dengan Nikaragua yang sebelumnya telah dihapus ranjaunya. Tidak diketahui pekerjaan apa yang telah dilakukan oleh para pihak berwenang Honduras untuk menjelaskan area ini aman, juga tidak apakah ini merupakan ranjau yang baru diletakkan atau yang telah terlewat oleh operasi penghapusan ranjau sebelumnya. El Salvador mengklaim telah membebaskan teritorinya dari kontaminasi ranjau kepada standar-standar internasional pada tahun 1994, sebelum menjadi Pihak Negara Perjanjian Pelarangan Ranjau.
 - 47 Belarus, Côte d’Ivoire, El Salvador, Estonia, Indonesia, Kenya, Latvia, Liberia, Mongolia, Panama, Polandia, Saudi Arabia, Sierra Leone dan AS. Sejumlah negara lain juga memiliki sisa bahan peledak perang dari Perang Dunia I dan II.

- 48 Pasal 5 Perjanjian Pelarangan Ranjau berlaku untuk Para Pihak Negara tanpa memandang kapan ranjau anti-personil itu ditempatkan, atau oleh siapa, dan dengan cara yang sama akan berlaku untuk suatu ranjau anti-personil yang mungkin diletakkan di masa mendatang.
- 49 Misalnya, Guinea-Bissau dan Jordan tampaknya telah menyimpangkan LIS lengkap untuk mendapatkan survey dampak yang lebih murah dan lebih berbobot ringan.
- 50 Bosnia dan Herzegovina terdiri dari dua entitas, Republik Srpska dan Federasi (yang lebih besar dari keduanya), dan Wilayah Brcko.
- 51 Argentina juga menyatakan wilayah hukumnya atas Falklands (Malvinas) dan karena itu menerima kewajiban di bawah Pasal 5.
- 52 Ringkasan status Para Pihak Negara yang terkena-dampak-ranjau ini, sejak Mei 2006, didasarkan pada hasil riset yang dihasilkan untuk *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2006*, termasuk tapi tidak terbatas pada pernyataan resmi. Klarifikasi dalam respon terhadap tabel ini diterima.
- 53 Rencana Pekerjaan Nairobi, Pekerjaan #27, "Laporan Akhir Konferensi Tinjau Ulang Pertama," APLC/CONF/2004/5, 9 Februari 2005, h. 99.
- 54 Pernyataan oleh OAS tentang Suriname, Komite Kedudukan Pembebasan Ranjau, Penerangan Resiko Ranjau dan Teknologi Pekerjaan Ranjau, Geneva, 13 Juni 2005.
- 55 Laporan Pasal 7, Formulir C, 30 April 2006. Laporan ini sebenarnya mengklaim bahwa Guatemala "bebas ranjau anti-personil." Laporan ini tidak merujuk ranjau anti-kendaraan, walaupun telah melaporkan penemuan dan penghancuran ranjau anti-kendaraan di masa lampau.
- 56 Irak bukan merupakan Pihak Negara Perjanjian Pelarangan Ranjau, tapi sejak tahun 2004 para pejabat pemerintah telah berkata bahwa mereka cenderung bergabung dengan perjanjian itu.
- 57 GICHD, "Tinjau Ulang Pekerjaan Ranjau di Mozambik," Laporan Akhir, Oktober 2005, h. 25.

- 58 Ruth Bottomley, Bantuan Rakyat Norwegia, "Partisipasi Komunitas Pekerjaan Ranjau, Tinjau Ulang dan Kerangka Kerja Konseptual," Desember 2005, h. 4.
- 59 Studi Pengetahuan, Sikap, Praktek (*KAP/Knowledge, Attitudes, Practices*) yang dilakukan di Afghanistan bertanya kepada orang lokal: "Sejumlah orang mengambil resiko dan pergi ke area-area berbahaya. Mengapa mereka melakukannya?" Jawaban yang umum, "karena permasalahan ekonomi dan keuangan," menerima 45 persen, dan tiga aktivitas utama tertentu menyebut menggembalakan ternak, mengumpulkan kayu bakar dan mengumpulkan logam sampah. Program Pekerjaan Ranjau untuk Afghanistan (*MAPA/Mine Action Program for Afghanistan*), "Analisa KAP 2004/2005, Pengawasan Dampak Penerangan Resiko Ranjau di Afghanistan," Kabul, 2006, h. 25.
- 60 Enam negara dikeluarkan dari daftar tahun lalu karena tidak ada aktivitas MRE dilaporkan (Bangladesh, Estonia, Latvia, Malawi, Moldova, dan Serbia dan Montenegro) dan lima negara ditambahkan karena aktivitas-aktivitas baru (Cina, Côte d'Ivoire, Peru, Tunisia, dan Ukraine).
- 61 Para Pihak Negara dengan program MRE termasuk Afghanistan, Albania, Angola, Belarus, Bosnia dan Herzegovina, Burundi, Kamboja, Chad, Chile, Kolombia, Côte d'Ivoire, Kroasia, DR Kongo, Ekuador, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Guatemala, Guinea-Bissau, Jordan, Liberia, Mauritania, Mozambik, Namibia, Nikaragua, Peru, Filipina, Rwanda, Senegal, Sudan, Tajikistan, Thailand, Tunisia, Turki, Uganda, Ukraine, Yemen, Zambia, dan Zimbabwe.
- 62 Bukan Para Pihak Negara dengan program MRE termasuk Armenia, Azerbaijan, Burma/Myanmar, Cina, Georgia, India, Iran, Irak, Israel, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Nepal, Pakistan, Polandia, Rusia, Somalia, Korea Selatan, Sri Lanka, Siria, dan Vietnam.
- 63 Area-area itu adalah Abkhazia, Chechnya, Kepulauan Falklands/Malvinas, Kosovo, Nagorno-Karabakh, Palestina, Somaliland, dan Sahara Bagian Barat.
- 64 Pengawasan Ranjau Darat mencatat 8.4 juta orang pada tahun 2003, 4.8 juta pada tahun 2002, dan jumlah yang lebih kecil pada tahun-tahun sebelumnya.

- 65 Sri Lanka dan Thailand adalah tambahan-tambahan baru untuk lima besar; tahun lalu Ethiopia dan Laos memiliki tempat-tempat itu.
- 66 Para Pihak Negara yang melaporkan MRE pada tahun 2005 termasuk Afghanistan, Albania, Chile, Kolombia, DR Kongo, Kroasia, Ekuador, Guatemala, Jordan, Mauritania, Mozambik, Nikaragua, Peru, Senegal, Sudan, Suriname, Swaziland, Tajikistan, Thailand, Tunisia, Turki, Yemen, dan Zimbabwe.
- 67 MRE yang terlalu mendasar tidak melampaui pendekatan gaya-kuliah dan di banyak negara tidak memasukkan MRE berbasis-di-sekolah.
- 68 Honduras, walaupun menyatakan-sendiri bebas-ranjau, mendapatkan seorang korban ranjau pada tahun 2005. Karena alasan ini tampak dalam daftar. Suriname, setelah operasi pembebasan ranjau memasukkan penghubung komunitas, dianggap bebas-ranjau dan dihilangkan dari daftar.
- 69 LSM-LSM nasional yang beroperasi di Afghanistan, Albania, Angola, Azerbaijan, Bosnia dan Herzegovina, Burma, Burundi, Kamboja, Chile, Kolombia, Kroasia, DR Kongo, Ethiopia, Georgia, India, Irak, Kyrgyzstan, Lebanon, Nepal, Pakistan, Peru, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Siria, Thailand, Turki, Uganda, Ukraine, dan Yemen, juga di Chechnya, Somaliland, dan Sahara Bagian Barat.
- 70 LSM-LSM internasional yang beroperasi di Afghanistan, Angola, Bosnia dan Herzegovina, Burundi, Kamboja, Chad, Kroasia, DR Kongo, Georgia, Irak, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Liberia, Mauritania, Mozambik, Nepal, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Uganda, dan Vietnam, juga di Abkhazia, Chechnya, Nagorno-Karabakh dan Somaliland.
- 71 ICRC menyatakan bahwa ia mendukung aktivitas-aktivitas pekerjaan ranjau pencegahan di 27 negara, tapi sama sekali tidak mendaftarkannya. ICRC, "Pekerjaan Ranjau Laporan Khusus 2006," Geneva, Mei 2006, h. 8. Pengawasan Ranjau Darat memiliki informasi tentang aktivitas-aktivitas MRE oleh masyarakat nasional, biasanya dengan dukungan teknis dan keuangan dari ICRC, dan dari waktu ke waktu oleh ICRC sendiri, di 24 negara: Afghanistan, Albania, Angola, Azerbaijan, Bosnia dan

- Herzegovina, Burma/Myanmar, Kamboja, Kolombia, Kroasia, Ethiopia, India, Iran, Irak, Israel/OPT, Jordan, Kyrgyzstan, Namibia, Nepal, Nikaragua, Rusia (Caucasus Bagian Utara), Serbia dan Montenegro (Kosovo), Sudan, Siria, dan Tajikistan.
- 72 UNICEF mendukung aktivitas-aktivitas pekerjaan ranjau di: Afghanistan, Albania, Angola, Armenia, Azerbaijan, Bosnia dan Herzegovina, Burundi, Kamboja, Chad, Kolombia, DR Kongo, Eritrea, Ethiopia, Georgia/Abkhazia, Indonesia (pembelaan), Irak, Jordan, Laos, Lebanon, Mauritania, Nepal, Nikaragua, Rusia (Caucasus Bagian Utara), Senegal, Sri Lanka, Sudan, Siria, Tajikistan, Thailand, dan Vietnam, juga Palestina dan Somaliland.
- 73 Lihat *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005*, h. 40.
- 74 Banyak entitas yang memberikan pelatihan keamanan memasukkan keselamatan ranjau darat dan ERW ke dalam kemasan pembahasan mereka, termasuk pusat-pusat pelatihan militer bagi para serdadu pemeliharaan keamanan, Departemen Keselamatan dan Keamanan PBB, Program Makanan Dunia, Para Komisaris Tinggi PBB bagi Para Pengungsi, dan organisasi pelatihan LSM REdR-IHE.
- 75 Joanne Durham, "Dari Intervensi kepada Penyatuan: Penerangan Resiko Ranjau dan Penghubung Komunitas," *Jurnal Pekerjaan Ranjau*, Terbitan 9.2, Februari 2006.
- 76 Para Pihak Negara dengan program-program MRE berbasis-komunitas termasuk Afghanistan, Albania, Angola, Bosnia dan Herzegovina, Burundi, Kamboja, Chad, Kolombia, Ethiopia, Mauritania, Nikaragua, Senegal, Sudan, Thailand, dan Uganda. Bukan Para Pihak Negara dengan MRE berbasis-komunitas termasuk Azerbaijan, Irak, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Pakistan, dan Sri Lanka. Ada aktivitas-aktivitas MRE berbasis-komunitas di Chechnya, Kosovo, Palestina, dan Somaliland.
- 77 Ruth Bottomley, "Laporan Evaluasi untuk Orang Cacat Internasional Perancis, Memperkuat dan Mempromosikan Asosiasi-asosiasi dan Jaringan Kerja Komunitas untuk Penerangan Resiko Ranjau Terpelihara [di Angola]," Lyon, Mei 2005, h. 6.
- 78 UNICEF/GICHD, "Studi tentang Pengumpulan Logam Sampah di Lao DPR," Geneva, September 2005, h. 5-6.

- 79 UNICEF/GICHAD, "Evaluasi Proyek-proyek Penerangan Resiko UXO yang didukung-UNICEF di Lao PDR," Geneva, Oktober 2005, h. 5. Empat rekomendasi utama adalah: memulai penilaian kebutuhan penerangan resiko UXO di banyak provinsi; terlibat dalam proses perencanaan strategis untuk program secara keseluruhan dengan semua pihak berkepentingan perencanaan strategis yang didasarkan pada penilaian itu; menetapkan sistem pengawasan korban nasional yang sepenuhnya mencakup kebutuhan penerangan resiko; dan terus mendukung pembangunan mekanisme koordinasi MRE.
- 80 Ruth Bottomley, "Partisipasi Komunitas dalam Pekerjaan Ranjau, Suatu Tinjau Ulang dan Kerangka Kerja Konseptual," Bantuan Rakyat Norwegia, Desember 2005, h. 30-35.
- 81 Sheree Bailey, Spesialis Bantuan Untuk Korban, GICHAD, "Mengembangkan tujuan-tujuan SMART dan rencana pekerjaan nasional – peran koordinasi antar-kementerian," Komite Kedudukan bagi Bantuan Untuk Korban dan Penyatuan Kembali Secara Sosial Ekonomi, Geneva, 9 Mei 2006.
- 82 Untuk tujuan riset Pengawasan Ranjau Darat, semua kecelakaan itu termasuk para individu yang terbunuh atau terluka sebagai akibat dari insiden yang melibatkan ranjau anti-personil, ranjau anti-kendaraan, peralatan bahan peledak yang ditingkatkan (*IEDs/improvised explosive ordnance*), *munitions* kumpulan dan persenjataan perang yang tidak diledakkan (*UXO/unexploded ordnance*) lainnya. Walaupun jelas bahwa peralatan itu dipicu-perintah, semua insiden ini dikeluarkan. Dalam hal Irak dan Afghanistan, semua kecelakaan yang diidentifikasi sebagai kecelakaan IED dikeluarkan dari semua total itu karena tampaknya merupakan insiden yang dipicu-perintah. Dari informasi yang tersedia di banyak negara, tidak selalu mungkin untuk menentukan dengan kepastian tipe senjata yang menyebabkan insiden itu. Di mana tingkat rincian ini tersedia, informasi itu dimasukkan dalam laporan negara itu.
- 83 Semua ini termasuk Abkhazia, Chechnya, Nagorno-Karabakh, Palestina, Somaliland, Taiwan, dan Sahara Bagian Barat.

- 84 *Pengawasan Ranjau Darat* melaporkan 6,521 kecelakaan untuk tahun 2004 dalam Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005, tapi karena sifat pengumpulan data yang berlangsung, kecelakaan tambahan yang terjadi tahun 2004 telah didaftarkan di beberapa negara, termasuk Kolombia, DR Kongo, dan Sudan.
- 85 Lebih lanjut, bahkan jumlah kecelakaan baru *yang dilaporkan* harus dianggap minimum, karena banyak negara yang sangat terkena-dampak-ranjau tidak mampu memberikan statistik untuk tahun itu seluruhnya atau untuk seluruh negara itu. Sejumlah laporan merujuk kepada beberapa orang yang terbunuh atau terluka tanpa memberikan angka pasti; semua laporan ini dan yang manapun dengan “perkiraan” tidak dimasukkan dalam total.
- 86 Ada sejumlah indikasi bahwa perkiraan ini seharusnya direvisi dan dikurangi, tapi pada titik ini ada data negara yang tidak cukup untuk mendasarkan perkiraan baru.
- 87 Angka untuk kecelakaan ranjau yang melibatkan wanita dan anak-anak seharusnya juga dianggap sebagai minimum; jenis kelamin dan usia kecelakaan sering tidak teridentifikasi; jenis kelamin dan usia dari 2,450 kecelakaan tidak diketahui.
- 88 Di negara-negara yang terkena-dampak-ranjau di mana media merupakan sumber informasi utama, kecelakaan yang dilaporkan terutama dari militer. Di Kolombia, misalnya, di mana mekanisme pengumpulan data telah ditetapkan dan negara itu mengalami konflik bersenjata, 69 persen dari 1,110 kecelakaan yang dicatat pada tahun 2005 adalah personil militer. Kecelakaan ranjau/UXO yang dilaporkan di Kolombia terhitung 15 persen dari kecelakaan yang dicatat oleh Pengawasan Ranjau Darat pada tahun 2005. Karena itu, persentase kecelakaan militer yang besar di Kolombia berdampak pada kecelakaan orang sipil. Secara kontras, di Kamboja, negara yang damai, hanya satu persen dari 898 kecelakaan dari militer.
- 89 Pengawasan Ranjau Darat mencatat 305 kecelakaan di Rusia pada tahun 2005 dibandingkan dengan hanya enam pada tahun 2004, tapi peningkatan ini terutama karena riset yang lebih luas dalam sumber bahasa-Rusia.

- 90 Pengawasan Ranjau Darat juga mencatat jauh lebih sedikit kecelakaan di Burundi dan Georgia pada tahun 2005 daripada tahun 2004, tapi tinjau ulang lebih lanjut menunjukkan data tahun 2004 tidak akurat.
- 91 Laporan Akhir dari Konferensi Tinjau Ulang Pertama, APLC/CONF.2004/5, 9 Februari 2005. h. 29.
- 92 Sebagian besar sistem manajemen database hanya memiliki kapasitas untuk mencatat kecelakaan yang dilaporkan kepada mereka, tapi tidak secara aktif mengidentifikasi kecelakaan di area-area yang terkena-dampak-ranjau.
- 93 Para perencana dan penyedia bantuan orang yang selamat di Afghanistan, Laos, dan tempat lain juga telah mencatat hal ini untuk Pengawasan Ranjau Darat, dan telah mengutip sistem-sistem lain seperti CMVIS di Kamboja, INSEC di Nepal, IHSCO di Irak, dan sistem-sistem Epi.info.
- 94 Ini membandingkan 33 negara dan enam area yang dilaporkan dalam *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005*.
- 95 “Pengumpulan Data Tidak Lengkap” berarti sistem ini tidak mencakup semua area yang terkena-dampak-ranjau atau tidak memungkinkan analisa, atau para pelaku yang relevan telah menyatakan data ini tidak lengkap karena alasan-alasan lain. “Sistem Manajemen Data” termasuk IMSMA dan semua tipe pengumpulan data resmi lain, tapi bukan analisa media. “Bantuan Memadai” tidak berarti semua orang dilayani atau sistem itu sempurna; bantuan itu dianggap tidak memadai jika para pelaku relevan menyatakannya, atau jika jelas pelayanan itu tidak memenuhi kebutuhan orang lumpuh pada umumnya. “Hukum Kelumpuhan” menunjukkan apakah ada undang-undang tertentu, bukan apakah undang-undang itu ditegakkan, yang sebagian besar tidak terjadi. “Formulir J” menunjukkan adanya informasi bantuan untuk korban dalam Formulir J secara sukarela Pasal 7 Perjanjian Pelarangan Ranjau; formulir itu tidak mencerminkan jumlah atau kualitas informasi. Ada 98 kecelakaan pada tahun 2004 yang tidak terlihat dalam daftar ini karena terjadi di tujuh negara yang dikeluarkan dari daftar Pengawasan Ranjau Darat tahun ini karena tidak ada kecelakaan pada tahun

2005 atau 2006, tapi dimasukkan dalam angka kecelakaan total tahun 2004. Karena alasan perbandingan, dalam hal Chechnya, data UNICEF digunakan, di mana dalam total kecelakaan tahun 2004 hasil analisa media Pengawasan Ranjau Darat di Chechnya juga dimasukkan.

- 96 Laporan Akhir Konferensi Tinjau Ulang Pertama, APLC/CONF/2004/5, 9 Februari 2005, h. 27. Pengawasan Ranjau Darat memberikan informasi tentang fasilitas yang tersedia bagi orang lumpuh tanpa memandang penyebab kelumpuhan dan di mana mungkin mengidentifikasi jumlah orang yang selamat yang mengukur pelayanan ini.
- 98 VA24 adalah: Afghanistan, Albania, Angola, Bosnia dan Herzegovina, Burundi, Kamboja, Chad, Kolombia, Kroasia, Republik Demokratis Kongo, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Guinea-Bissau, Mozambik, Nikaragua, Peru, Senegal, Serbia dan Montenegro, Sudan, Tajikistan, Thailand, Uganda dan Yemen. Laporan Akhir dari Konferensi Tinjau Ulang Pertama, APLC/CONF/2004/5, 9 Februari 2005, h. 33.
- 99 Semua area tema ini merupakan kumpulan data, perawatan darurat dan medis berlanjut, rehabilitasi fisik, dukungan sosial kejiwaan, penyatuan kembali secara ekonomi, dan undang-undang kebijakan publik.
- 100 Rincian: perubahan terhitung dibandingkan dengan situasi saat ini; Bisa diukur: sistem untuk mengukur perkembangan yang terjadi; Bisa dicapai: bisa dipenuhi pada tahun 2009 dengan sejumlah usaha yang wajar; Relevan: membentuk peningkatan penting terhadap situasi saat ini; dan Terikat-waktu: tidak lebih lambat dari tahun 2009.
- 101 GICHD, "Dukungan Proses diberikan dengan Unit Bantuan Pelaksanaan untuk Para Pihak Negara terhadap Konvensi Pelarangan Ranjau Darat AP yang telah melaporkan tanggungjawab untuk jumlah yang signifikan orang-orang yang selamat dari ranjau darat," 8 Februari 2006, h. 2-3.
- 102 Spesialis bantuan untuk korban bagi Burundi dimasukkan dalam Daftar Para Peserta dalam Rapat Komite Kedudukan, tapi Pengawasan Ranjau Darat tidak menjelaskan keberadaan orang ini.

- 103 Yang terkena-dampak-ranjau: Afghanistan, Albania, Angola, Bosnia dan Herzegovina, Burundi, Kamboja, Chile, Kolombia, Kroasia, DR Kongo, Ekuador, Mozambik, Peru, Senegal, Serbia dan Montenegro, Sudan, Tajikistan, Thailand, Turki, Uganda, Yemen (menggunakan Formulir I) dan Zimbabwe. Yang tidak terkena-dampak-ranjau: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Lithuania, Malta, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol dan Swedia. Sedikitnya 11 negara lain menggunakan Formulir J melaporkan permasalahan selain dari bantuan untuk korban dan pendanaan, termasuk: Argentina, Republik Kongo, Costa Rica, Cyprus, Denmark, Yunani, Malawi, Nigeria, Polandia, Rwanda, dan Slovakia.
- 104 Ini mencerminkan tinjauan atas total perkembangan (atau kekurangan yang ada) di bidang bantuan untuk korban, bukan evaluasi aktivitas-aktivitas tertentu, yang didasarkan pada informasi Pengawasan Ranjau Darat telah bisa didapatkan. Pengawasan Ranjau Darat mempertimbangkan indikator-indikator berikut: jumlah kecelakaan ranjau/UXO; peningkatan proyek-proyek yang ada atau proyek-proyek yang baru dilaksanakan di area-area kumpulan data, liputan perawatan medis, rehabilitasi, penyatuan kembali secara sosial ekonomi, dan pelayanan sosial kejiwaan; peningkatan pelaksanaan hak orang lumpuh; peningkatan koordinasi dan kapasitas nasional; dan kualitas pelaporan dan partisipasi perkembangan dalam forum-forum perjanjian (termasuk partisipasi orang yang selamat) antara Mei 2005 dan Mei 2006. Informasi tertentu bisa ditemukan dalam laporan negara dalam *Laporan Pengawasan Ranjau 2006*.
- 105 Laporan Akhir dari Konferensi Tinjau Ulang Pertama, APLC/CONF/2004/5, 9 Februari 2005, h. 31-32.
- 106 Sejak bulan Juli 2006, hanya delapan negara donor telah melaporkan kontribusi pendanaan mereka tentang database Investasi Pekerjaan Ranjau PBB untuk tahun 2005. Pelaporan donor untuk database PBB (yang bisa diakses di www.mineactioninvestments.org) telah menurun selama lima tahun terakhir (18 pada tahun 2001, 11 pada tahun 2002, 10 pada tahun 2003, 12 pada tahun 2004, 8 pada

tahun 2005). Empat belas Pihak Negara melaporkan kontribusi pendanaan pekerjaan ranjau untuk tahun 2005 dalam Formulir J laporan transparansi Pasal 7 mereka, tapi dari semua ini, hanya tujuh yang memuat data yang cukup tepat dan rinci yang berguna untuk analisa. Sejumlah data pendanaan dimuat dalam Laporan Tahunan Nasional Protokol II Yang Diamendemen CCW. Data lain diberikan secara langsung kepada Pengawasan Ranjau Darat oleh para donor.

- 107 Dalam sejumlah kasus, para donor tidak melapor pada tahun kalender 2005. Di antara negara-negara yang melaporkan tahun-tahun fiskal yang berbeda adalah AS (Oktober 2004-September 2005), Kanada (April 2005-Maret 2006), Kerajaan Inggris (April 2005-April 2006) dan Australia dan Selandia Baru (Juli 2005-Juni 2006). Seperti di masa lalu, informasi pendanaan donor untuk Jepang telah dipisahkan atas dasar tahun kalender.
- 108 Tidak seperti tiga tahun lalu ketika peningkatan pada pendanaan pekerjaan ranjau global seperti yang dinyatakan dalam dolar AS dipompa oleh nilai dolar yang menurun, pada tahun 2005 penyeimbangan relatif tingkat pertukaran terhadap dolar AS berarti penurunan tahun ini tidak banyak terpengaruh oleh nilai dolar. Misalnya, Euro meningkat nilainya kurang dari 0.09 persen versus dolar pada tahun 2005. Untuk Euro, Pengawasan Ranjau Darat telah menggunakan rata-rata tingkat ini: pada tahun 2005: €1=US\$1.2449; pada tahun 2004: €1=US\$1,2438; pada tahun 2003: €1=US\$1.13; pada tahun 2002: €1=US\$0.95; dan pada tahun 2001: €1=US\$0.90. Simpanan Federal AS, "Daftar Tingkat Pertukaran (Tahunan)," 3 Januari 2006.
- 109 Pendanaan meningkat setiap tahun sejak tahun 1992, kecuali untuk tahun 2001 ketika Pengawasan Ranjau Darat melaporkan penurunan \$4 juta ketika mencatat, "Dengan ketidakpastian dan keanehan dalam pengumpulan data pekerjaan ranjau, penurunan ini tidak secara statistik signifikan. Sesungguhnya paling tidak sebagian bisa dirujuk kepada tingkat pertukaran yang berfluktuasi dengan dolar AS."
- 110 UNMAS, "Laporan Tahunan 2005," h. 60, 64.

- 111 Untuk tahun fiskal 1 Oktober 2005-30 September 2006. Rata-rata pertukaran untuk tahun 2005: Baht 40.252=US\$1. Simpanan Federal AS, "Tingkat Pertukaran Asing (Tahunan)," 3 Januari 2006; *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005*, h. 570.
- 112 Akan tetapi, pemerintah Chad dilaporkan telah gagal atau tertunda untuk mengirimkan bagian pendanaan pekerjaan ranjau yang dijaminkannya pada tahun 2005, yang secara merugikan mempengaruhi operasi selama tahun itu. Lihat laporan tentang Chad dalam edisi Pengawasan Ranjau darat ini.
- 113 Laporan Akhir Konferensi Tinjau Ulang Pertama, APLC/CONF/2004/5, 9 Februari 2005, h. 94-105.
- 114 Lihat www.gichd.ch/1067.o.html.
- 115 Pernyataan oleh Kanada, Komite Kedudukan untuk Status Umum dan Operasi Konvensi, Geneva, 8 Mei 2006.
- 116 Amb. Martin Dahinden, Direktur (sebelumnya), GICHD, "Penghapusan Ranjau Kemanusiaan di Persimpangan: Kuliah Perpisahan," 1 Juli 2004.
- 117 Kritian Berg Harpviken dan Jan Isaksen, "Mengklaim Kembali Kancan Peperangan: Pekerjaan Ranjau Utama dalam Pembangunan," PRIO- Laporan UNDP, 2004, h. 43.
- 118 Email dari Carly Volkes, DFAIT, 7 Juni 2006.
- 119 Email dari Andrew Wilson, Departemen Konflik dan Masalah Kemanusiaan, DfID, 4 Juli 2006.
- 120 Email dari Ellen Schut, Divisi Kebijakan Kontrol Persenjataan dan Ekspor Persenjataan, Kementerian Luar Negeri, 7 April 2006.
- 121 Email dari Mayumi Watabe, Unit Keamanan Kemanusiaan, Kantor PBB untuk Koordinasi Masalah Kemanusiaan (*OCHA/Office for the Coordination of Human Affairs*), 15 Juni 2006.
- 122 Email dari Anne Soutula, Pejabat Staff untuk Dana Perwalian, Divisi Kebijakan Masalah Politik dan Keamanan, Kantor Pusat NATO, 6 Juli 2006.
- 123 Semua angka untuk tahun-tahun sebelum 2005 diambil dari Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005, dengan koreksi yang diterima untuk tahun-tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2004, peningkatan pendanaan dilaporkan dalam data koreksi oleh Australia dan Kerajaan Inggris menanggulangi penurunan pendanaan yang dilaporkan EC. Dalam sebagian besar tapi tidak semua kasus, semua angka untuk tahun-tahun sebelumnya dihitung pada tingkat pertukaran untuk tahun-tahun itu.

- 124 Rata-rata tingkat pertukaran untuk tahun 2005, yang digunakan di seluruh laporan ini; €1=US\$1,2449, A\$1=US\$0.7627, US\$1=NOK6.4412, £1=US\$1.8920, US\$1=C\$1.2115, US\$1=SEK7.4710, US\$1=DKK5.9953, NZ\$1=US\$0.7049, US\$1=¥110.11. Simpanan Federal AS, "Daftar Tingkat Pertukaran (Tahunan)," 3 Januari 2006. Rata-rata tingkat pertukaran untuk tahun 2005; US\$1=CHF1.2459. Simpanan Federal AS, "Daftar Tingkat Pertukaran (Tahunan)," 3 Januari 2006 digunakan untuk konversi CHF selain dari pelaporan keuangan FSD. Konversi mata uang dibulatkan seluruhnya, yang mungkin mengakibatkan perbedaan tambahan pembulatan.
- 125 EC melaporkan total kontribusi negara anggota EU dan kontribusi EC lebih dari €147 juta (\$183 juta). "Kontribusi EC untuk Pengawasan Ranjau Darat 2006," 30 Juni 2006.
- 126 Pendanaan per kapita memberikan perspektif lain terhadap pendanaan pekerjaan ranjau oleh negara-negara donor. Untuk menghitung semua angka ini, jumlah pendanaan negara tahun 2005 dibagi jumlah penduduk negara itu. Jumlah penduduk berasal dari Bank Dunia, Database Indikator Pembangunan Dunia, "Penduduk tahun 2005," 1 Juli 2006, www.worldbank.org, yang diakses pada tanggal 1 Juli 2006. Tidak dimasukkan dalam jumlah pendanaan negara, dan karenanya tidak dicerminkan dalam angka per kapita, adalah kontribusi kepada badan-badan Serikat Eropa, yang selanjutnya disalurkan sebagai pendanaan Komisi Eropa untuk pekerjaan ranjau.
- 127 Pendapatan nasional kotor (GNI) sebelumnya dikenal sebagai produk nasional kotor (GNP). Semua angka GNI berasal dari Bank Dunia, Database Indikator Pembangunan Dunia, "Total GNI tahun 2005. Metode Atlas," 1 Juli 2006, www.worldbank.org. yang diakses pada tanggal 1 Juli 2006.

- 128 Email dari Laura Liguori, Unit Kebijakan Keamanan, Perlucutan Senjata Konvensional, EC, Juni-Juli 2006.
- 129 Angka ini telah disesuaikan ke bawah sebesar €4.09 juta (\$5.09 juta) dari total pada *Laporan Pengawasan Ranjau 2005* yang didasarkan pada informasi yang baru tersedia. EC. "Pekerjaan Ranjau di Dunia tahun 2005," h. 55; Kontribusi Komunitas Eropa kepada *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005*, dengan email dari Nicola Marcel, Unit RELEX 3a Kebijakan Keamanan, EC, 19 Juli 2005; email dari Laura Liguori, EC, Juni-Juli 2006.
- 130 Email dari Annette A. Landell-Mills, Kementerian Masalah Luar Negeri, 21 Juni 2006.
- 131 Email dari Kitagawa Yasu, Kampanye Jepang Untuk Pelarangan Ranjau Darat (JCBL/*Japan Campaign to Ban Landmine*), Maret-Mei 2006, dengan informasi yang diterjemahkan diterima oleh JCBL dari Divisi Bantuan Kemanusiaan, Departemen Kerjasama Multilateral, 11 Mei 2005 dan Divisi Persenjataan Konvensional, Departemen Tanpa-penyebaran dan Ilmu, 11 April 2006.
- 132 Email dari Kitagawa Yasu, JCBL, dengan informasi dari Nobuhisa Tsuchiya, Divisi Dorongan Riset, dan Bp. Saito, Divisi Pembangunan Teknologi Sistem Mekanis, NEDO JST, 11 Juli 2006.
- 133 Email dari Kitagawa Yasu, JCBL, 10 Agustus 2005, dengan terjemahan dari Kementerian Luar Negeri informasi yang dikirim kepada JCBL pada tanggal 11 Mei 2005.
- 134 Email dari Andrew Willson, DfID, tanggal 20 Maret 2006; email dari Debbie Clements, Direktorat Komite Bersama, Kementerian Pertahanan, 10 Agustus 2005; email dari Lt. Kol. Robin Swanson, Kementerian Pertahanan, 22 Mei 2006. Angka tahun 2004 direvisi dari £8.3 juta (\$15.3 juta) yang dilaporkan dalam *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005*. Jumlah itu meningkat £2,913,231 (\$5,339,952) untuk mencerminkan pendanaan bagi Pusat Pelatihan Pekerjaan Ranjau Internasional di Kenya, tapi mengurangi £155,133 (\$284,359) untuk program-program yang selanjutnya diidentifikasi sebagai R&D. Rata-rata tingkat pertukaran untuk tahun 2004:

- £1=US\$1.833, Simpanan Federal AS, "Daftar Tingkat Pertukaran (Tahunan)," 3 Januari 2005.
- 135 Semua angka sebelum tahun 1998 hanya memasukkan pendanaan CIDA.
- 136 Database Investasi Pekerjaan Ranjau; email dari Carly Vokes, DFAIT, 7 Juni 2006.
- 137 Laporan Pasal 7, Formulir J, 27 April 2006; Database Investasi Pekerjaan Ranjau.
- 138 Pernyataan kepada Komite Kedudukan untuk Pembebasan Ranjau, Penerangan Resiko Ranjau dan Teknologi Pekerjaan Ranjau, Geneva, 10 Mei 2006.
- 139 Semua angka sebelum tahun 1996 tidak tersedia.
- 140 Email dari Ellen Schut, Kementerian Luar Negeri, 7 April 2006; email dari Brechtje Paardekooper, Divisi Bantuan Untuk Kemanusiaan DMV/HH, Kementerian Luar Negeri, 18 April 2006.
- 141 Laporan Pasal 7, Formulir J, 2 Mei 2006; email dari Sara Brandt Hansen, Pejabat Kantor, Departemen untuk Keamanan Global, Kementerian Luar Negeri, Maret-Mei 2006.
- 142 Database Investasi Pekerjaan Ranjau; email dari Rita Helmich Olesen, Bantuan Untuk Kemanusiaan & Kerjasama LSM, Kementerian Luar Negeri, 31 Maret 2006.
- 143 Database Investasi Pekerjaan Ranjau; email dari Rita Helmich Olesen, Bantuan Untuk Kemanusiaan & Kerjasama LSM, Kementerian Luar Negeri, 31 Maret 2006.
- 144 Email dari Rémy Friedmann, Divisi Politik IV, Kementerian Luar Negeri, 28 April 2006.
- 145 Email dari Katheryn Bennett, AusAID, 30 Juni 2006.
- 146 Jumlah untuk tahun 2004 telah direvisi ke atas sebesar A\$509,516 (\$375,259) dari A\$7,246,585 (\$5.3 juta) yang dikutip dalam *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005* untuk memasukkan jumlah yang tidak dilaporkan sebelumnya sebesar A\$500,000 (\$368,250) bagi bantuan untuk korban di Kamboja dan A\$9,516 (\$7,009) untuk detector ranjau bagi Azerbaijan. Email dari Katheryn Bennet, AusAID, Juli 2006. Rata-rata tingkat pertukaran untuk tahun 2004: A\$1=US\$0.7365, Simpanan Federal AS, "Daftar Tingkat Pertukaran (Tahunan)," 3 Januari 2005.

- 147 Email dari Manfredo Capozza, Penasehat Penghapus Ranjau Untuk Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri, Maret 2006. Tidak dimasukkan dalam jumlah ini adalah \$300,000 untuk UNICEF bagi MRE di Sudan seperti yang dilaporkan oleh UNMAO.
- 148 Angka tahun 2005 memasukkan jumlah €1,280,000 (\$1,593,472) untuk Sudan yang dilaporkan oleh Kedutaan Besar Italia di Khartoum juga €242,500 (\$301,888) yang dilaporkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk Sudan.
- 149 Database Investasi Pekerjaan Ranjau; email dari Paula Sirkiä, Unit Bantuan Untuk Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri, 16 Maret 2006.
- 150 UAE melaporkan dalam database Investasi Pekerjaan Ranjau PBB ia telah memberikan \$50 juta dari tahun 2002-2004 sebagai berikut: \$1,631,715 untuk Fase 1 (pengintaian ladang ranjau dan penghapusan jebakan-ranjau); \$24,766,000 untuk Fase 2 (pembebasan dan penghapusan ranjau dan UXO); \$6,199,000 untuk Fase 3 (pembebasan dan penghapusan UXO); \$1,349,685 untuk pembelian mesin penghapusan ranjau dan peralatan lain; \$3,342,800 sebagai kontribusi untuk kantor PBB di Lebanon Selatan; \$476,538 untuk film dan liputan media proyek oleh Emirates Media Corp; dan \$12,234,262 untuk pengeluaran Angkatan Bersenjata UAE dan pengeluaran administratif lain. Database Investasi Pekerjaan Ranjau, www.mineaction.org, yang diakses pada tanggal 4 Agustus 2005.
- 151 UNMAS, "Laporan Tahunan 2005," h. 61; Kantor Penghapusan Ranjau Nasional, Program Pekerjaan Ranjau Lebanon, "Laporan Tahunan 2005," Lampiran A; MACC SL, "Laporan Tahunan 2005," 14 Februari 2006; email dari Christopher Clark, Kepala Penasehat Teknis/Manager Program PBB, MACC SL, 22 Mei 2006.
- 152 Laporan Pasal 7, Formulir J, 26 April 2006; email dari Dominique Jones, Conseiller, Kementerian Pertahanan, 17 Mei 2006; email dari Stan Brabant, Kepala, Unit Kebijakan, Orang Cacat Internasional, 26 Mei 2006.
- 153 Laporan Pasal 7, Formulir J, 26 April 2006; Protokol II Yang Diamendemen CCW Laporan Pasal 13, Formulir E, 6 Oktober 2005; informasi dari Olivier Sigaud, Kementerian Luar Negeri, dalam email dari Timon Van Lidth, Orang Cacat

Internasional, 29 Juni 2006, Perancis memasukkan pendanaan untuk CNEMA (Komisi Nasional untuk Penghapusan Ranjau Anti-Personil/*National Commission for the Elimination of Anti-Personnel Mines*) sebesar €135,000 (\$168,062) dalam pelaporannya untuk tahun 2005; pendanaan ini belum dimasukkan dalam laporan yang lalu.

- 154 Laporan Pasal 7, Formulir J, 26 April 2006; Protokol II Yang Diamendemen CCW Laporan Pasal 13, Formulir E, 6 Oktober 2005; informasi dari Olivier Sigaud, Kementerian Luar aNegeri, dalam email dari Timon Van Lidth, Orang Cacat Internasional, 29 Juni 2006.
- 155 Kementerian Luar Negeri. "Bantuan untuk peran pekerjaan ranjau dalam pembebasan ranjau dan bantuan untuk para korban," tersedia di www.diplomatie.gouv.fr, yang diakses tanggal 4 Juli 2006. Perancis telah menyatakan ia akan mempresentasikan informasi yang lebih rinci mengenai kontribusi keuangannya untuk pekerjaan ranjau melalui EC dalam Rapat Ketujuh Para Pihak Negara di Geneva tahun 2006. Pelaporan oleh Amb. François Rivasseau, Perwakilan Tetap untuk Konferensi Perlucutan Senjata, Komite Kedudukan Pembebasan Ranjau, Penerangan Resiko Ranjau dan Teknologi Pekerjaan Ranjau, Geneva, 10 Mei 2006.
- 156 Laporan Pasal 7, Formulir J, 21 April 2006; email dari Therese Healy, Sesi Perlucutan Senjata dan Tanpa-Penyebaran, Divisi Politik, Departemen Luar Negeri, Mei 2006.
- 157 Laporan Pasal 7, 27 April 2006; email dari Alexander Kmentt, Wakil Direktur, Departemen Untuk Perlucutan Senjata, Kontrol Persenjataan dan Tanpa-Penyebaran, Kementerian Luar Negeri Federal, 27 April 2006.
- 158 Email dari Alexander Kmentt, Kementerian Luar Negeri Federal, 4 Mei 2006.
- 159 Email dari Helen Fawthorpe, Kementerian Luar Negeri, 6 Juni 2006; email dari Megan Mccoy, Kementerian Luar Negeri 6 Juni 2006.
- 160 Laporan Pasal 7, Formulir J, tertanggal 4 Mei 2006; email dari Henrik Markus, Kementerian Luar Negeri, 16 Mei 2006. Rata-rata tingkat pertukaran untuk tahun 2005:

- SKK0.033=US\$1. Perkiraan Pengawasan Ranjau Darat didasarkan pada informasi dari www.oanda.com/convert/fxhistory.
- 161 Laporan Pasal 7, Formulir J, 27 April 2006; email dari Luis Gómez Nogueira, Sub-departemen untuk Perlucutan Senjata Internasional, Kementerian dan Kerjasama Luar Negeri, 25 April 2006.
- 162 Ini merupakan perkiraan, karena pekerjaan ranjau pendanaan Spanyol belum dilaporkan secara lengkap dalam semua tahun-tahun yang berlalu. Lihat *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2004*, h. 748.
- 163 IRFFI, "Jaminan yang dibuat untuk IRFFI dan pembangunan kembali Irak dalam Rapat Donor Yang Diperluas IRFFI," 18 Juli 2005; Dana Perwalian Irak Kelompok Pembangunan PBB, "Surat Berita," Januari 2006, h. 1.
- 164 Email dari François Berg, Kementerian Luar Negeri Luxembourg, 30 Maret 2006.
- 165 Respon terhadap Pengawasan Ranjau Darat dari Misi Tetap ROK untuk PBB di New York, 9 Mei 2006.
- 166 Email dari Irina Gorsic, Penasehat, Kementerian Luar Negeri, Juni 2006.
- 167 Kedutaan Besar Iceland di Washington DC, "Iceland Memberikan Kontribusi 1,5 Juta USD untuk Proyek *Prosthetics* di Irak Bagian Utara," Lembar Informasi 08/05, 28 April 2005. Jumlah ini tidak dilaporkan secara pasti sebagai kontribusi pekerjaan ranjau oleh Iceland.
- 168 Surat dari Tadeusz Chomicki, Kementerian Luar Negeri, 22 Maret dan 8 Mei 2006.
- 169 Laporan Pasal 7, Formulir J, 26 April 2006
- 170 "Kerjasama antara Flanders dan Mozambik," (dalam karya Flemish), h. 2, website Resmi Flanders, www.flanders.be, yang diakses pada tanggal 3 Juni 2006; Geert Bourgeois, Kementerian Administrasi Flemish, Kebijakan Luar Negeri, Media dan Parawisata, "Jawaban untuk Pertanyaan No. 42 dari Sabine Pleyne dari tanggal 13 Januari 2006," (dalam karya Flemish), Website Parlemen Flanders, (tidak ada tanggal), tersedia di www.vlaamsparlement.be, yang diakses pada tanggal 3 Juni 2006.
- 171 Email dari Carly Vokes, DFAIT, 7 Juni 2006.

- 172 Database Investasi Pekerjaan Ranjau; email dari Rita Helmich-Olesen, Kementerian Luar Negeri, 31 Maret 2006.
- 173 Email dari Laura Liguori, EC, Juni-Juli 2006.
- 174 Email dari Kitagawa Yasu, JCBL, dengan informasi dari Nobuhisa Tsuchiya, Divisi Dorongan Riset, dan Bp. Saito, NEDO JST, 11 Juli 2006.
- 175 Email dari Annette A. Landell-Mills, Kementerian Luar Negeri, 21 Juni 2006.
- 176 DfID, "Proyek yang didanai DfID mengembangkan peralatan anti-ranjau darat penghancur tanah," tanggal 5 April 2005, www.dfid.gov.uk, yang diakses pada tanggal 5 Juli 2006; Universitas Cranfield, "Cranfield memimpin pembangunan peralatan anti-ranjau darat generasi selanjutnya," 29 Maret 2005.
- 177 ERA, "Percobaan yang berhasil untuk detector ranjau revolusioner ERA," (tidak ada tanggal), www.era.co.uk, yang diakses pada bulan Desember 2005.
- 178 Email dari Andrew Willson, DfID, 20 Maret dan 4 Juli 2006.
- 179 Kantor Menteri Pertahanan, "Ringkasan Penjelasan Riset dan Pengembangan, Penghapusan Ranjau Kemanusiaan, PE:0603920D8Z," Februari 2006, h. 291.
- 180 Email dari Carly Volkes, DFAIT, 7 Juni 2006.
- 181 Email dari Rita Helmich-Olesen, Kementerian Luar Negeri, 31 Maret 2006.
- 182 Email dari Laura Liguori, EC, Juni-Juli 2006.
- 183 Email dari Annette A. Landell-Mills, Kementerian Luar Negeri, 21 Juni 2006.
- 184 Email dari Andrew Willson, DfID, 20 Maret 2006.
- 185 "Deklarasi Zagreb," (Versi Tidak Resmi), Bagian III, 8, 2 Desember 2005.
- 186 Laporan Akhir Konferensi Tinjau Ulang Pertama, APLC/CONF/2004/5, 9 Februari 2005, h. 27.
- 187 Semua jumlah dinyatakan dalam dolar AS. Data ini dikumpulkan setelah analisa oleh Pengawasan Ranjau Darat dari lampiran Formulir J untuk laporan Pasal 7, dan data lain yang diberikan untuk Pengawasan Ranjau Darat. Beberapa dari angka untuk tahun 2004 telah berubah sejak *Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2005*, karena informasi

- baru tersedia, dan total tahun 2004 telah disesuaikan dengan hanya memasukkan kontribusi donor. Rincian lengkap tersedia dengan permintaan.
- 189 UNMAS, "Tinjau Ulang Akhir-Tahun Portfolio 2005," h. 6. www.mineaction.org, yang diakses pada tanggal 20 Mei 2005.
- 190 Pernyataan oleh Australia, "Bantuan Untuk Orang Yang Selamat," Komite Kedudukan bagi Bantuan Untuk Korban dan Penyatuan Kembali Secara Sosial-Ekonomi, Geneva, 9 Mei 2006.
- 191 LSN, "Laporan Tahunan 2005," h. 25.
- 192 Harus dicatat bahwa perhitungan keuangan ICRC didasarkan pada tahun kalender di mana sejumlah donor memiliki tahun-tahun fiskal yang berbeda. Untuk tujuan analisa pendanaan, semua kontribusi ini dicerminkan dalam tahun di mana semuanya diterima oleh ICRC.
- 193 Pekerjaan Ranjau Permintaan Khusus ICRC tahun 2004. Analisa Pengawasan Ranjau Darat dari KPMG Fides Peat, "Bantuan untuk Para Korban Ranjau, Geneva: Laporan pemeriksa untuk informasi pelengkap tentang Permintaan Khusus, Laporan kontribusi dan pengeluaran, Laporan keuangan 2004," Lampiran II dan III, Geneva, 14 Juli 2005. Rata-rata tingkat pertukaran untuk tahun 2004: US\$1=CHF1,2428, yang digunakan untuk jumlah CHF yang tidak dikontribusikan oleh Pemerintah Swiss pada tingkat yang ditetapkan. Simpanan Federal AS, "Daftar Tingkat Pertukaran (Tahunan)," 3 Januari 2005.
- 194 Email dari Luka Buhin, Manager Proyek, ITF, 30 Mei 2006; "Laporan Tahunan 2005" ITF h 18. Dalam laporan tahunan ITF untuk tahun 2005, total itu sedikit berbeda (\$1,140,809.46 atau 4.12 persen) karena satu proyek bantuan korban secara tidak tepat dihitung sebagai MRE.
- 195 Email dari Luka Buhin, ITF, 30 Mei 2006; email dari Iztok Hoäevar, Kepala Departemen Hubungan Internasional, ITF, 18 Juoli 2006.
- 196 Pengawasan Ranjau Darat tahun lalu memperkirakan \$18.8 juta pada kontribusi pekerjaan ranjau untuk tahun 2004, tapi total itu termasuk kontribusi oleh SFOR,

UNDP, dan berbagai organisasi internasional sebagai tambahan terhadap pemerintah donor dan EC.

Foto sampul © C. Rebotton/Orang Cacat Internasional, Maret 2006

Phoas Yek adalah seorang berusia enam belas tahun yang periang dan suka belajar dari desa Sung II, di wilayah Samlot yang terpencil dan miskin Kamboja. Anak ketiga dari delapan anak dalam keluarga petani yang miskin, Phoas melangkah pada sebuah ranjau ketika bermain di hutan dekat rumahnya, yang suatu ketika merupakan kubu Khmer Merah. Orangtuanya bekerja keras untuk menabung US\$4 yang dibutuhkan untuk mengangkutnya ke pusat rehabilitasi Battambang untuk mendapatkan bantuan medis. Phoas telah menerima tujuh tungkai prosthetic di pusat yang didukung-ICRC, ia terus tumbuh dengan cepat sehingga ia sering membutuhkan prosthetic-nya diganti. Tidak seperti banyak orang Kamboja yang acata, Phoas telah mampu pergi ke sekolah, dengan dukungan dari Orang Cacat Internasional. Setiap hari ia naik sepeda ke sekolah, dan dalam waktu luangnya ia membaca buku sekolahnya berulang-ulang karena buku-buku lain tidak tersedia. Ia berharap lulus dari sekolah itu dan memiliki toko penyewaan baju yang bagus.

Ke Arah Dunia Bebas-Ranjau

Inisiatif Pengawasan Ranjau Darat dikordinasi oleh Dewan Editorial dari empat organisasi: Pekerjaan Ranjau Kanada, Orang Cacat International, Pengawasan Hak Azasi Manusia, dan Bantuan Rakyat Norwegia. Pekerjaan Ranjau Kanada bekerja sebagai perwakilan utama.

Pengawasan Ranjau Darat

Laporan tahun 2006

Laporan Pengawasan Ranjau Darat 2006 adalah laporan tahunan kedelapan dari Pengawasan Ranjau Darat, inisiatif berbasis-masyarakat sipil yang belum pernah ada sebelumnya oleh Kampanye Internasional untuk Pelarangan Ranjau Darat (ICBL/*International Campaign to Ban Landmines*), *Co-Laurate* Nobel Perdamaian tahun

1997. Laporan ini adalah produk dari jaringan kerja pelaporan global dari 71 periset dari 63 negara.

Pengawasan Ranjau Darat mengumpulkan informasi dan menilai respon dari komunitas internasional terhadap krisis ranjau darat global, utamanya dalam hal Konvensi tahun 1997 tentang Pelarangan Penggunaan, Penumpukan, Produksi dan Pengiriman Ranjau Anti-Personil dan Tentang Penghancurannya. Sejak tahun 1999, inisiatif yang sangat terpuji ini telah berhasil dan secara konsisten menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa lembaga swadaya masyarakat bisa bekerjasama dalam suatu cara yang terpelihara, terkodiner, dan sistematis dalam mengawasi dan melaporkan pelaksanaan perlucutan senjata internasional atau perjanjian hukum kemanusiaan.

Edisi Laporan Pengawasan Ranjau Darat ini mempresentasikan informasi baru yang dikumpulkan pada tahun 2005 dan 2006. Edisi ini memuat informasi tentang 126 negara dan area-area dalam hal penggunaan anti-personil, produksi, penumpukan, perdagangan, pembebasan ranjau kemanusiaan, pendanaan pekerjaan ranjau, kecelakaan ranjau darat dan bantuan untuk yang selamat.

Disain sampul oleh Rafael Jimenea, Disain Laporan oleh Komunikasi Visual, vizcomlorg, Dicetak dan Dijilid di Kanada.